

STATISTIK APARATUR INDONESIA 2012



STATISTIK APARATUR INDONESIA 2012



Statistik Aparatur Indonesia 2012 merupakan publikasi yang diterbitkan oleh Pusat Kajian Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A) I Lembaga Administrasi Negara (LAN) bekerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Publikasi ini menyediakan berbagai macam data mengenai aparatur, yang terdiri dari data kelembagaan; data ketatalaksanaan; data sumber daya manusia aparatur; data keuangan yang mendukung reformasi birokrasi; dan data mengenai kinerja aparatur. Data yang disajikan dikumpulkan dari beberapa instansi pemerintah pusat yang memiliki kewenangan di bidang aparatur.

Kehadiran publikasi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh *stakeholder* untuk proses perumusan berbagai kebijakan di bidang aparatur dan juga untuk Keperluan akademis.



Pusat Kajian Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A) I
Lembaga Administrasi Negara
Jl. Kiara Payung KM.4,7 Jatiningor Sumedang Jawa Barat

ISBN 978-979-3382-62-3



Pusat Kajian Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A) I
Lembaga Administrasi Negara

STATISTIK APARATUR INDONESIA 2012

Penanggung Jawab :

Kepala PKP2A I Lembaga Administrasi Negara

Tim Penyusun :

Shafiera Amalia, S.IP.

Dr.H. Baban Sobandi, SE.,M.Si

Rosita Novi Andari, S.Sos

Krismiyati Tasrin, ST, M. Ec

Rizky Fitria, SE.



Diterbitkan Oleh :

Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

BANDUNG

2012

STATISTIK APARATUR INDONESIA 2012

Penulis : Shafiera Amalia, *et.al.*

Desain Sampul : Irman Hermansyah

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Cetakan I, 2012

**Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,
Termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit**

Hak Penerbitan pada:

Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I

Lembaga Administrasi Negara

Alamat : Jl. Kiara Payung km. 4,7 Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat

Tel/Fax : (022) 7790044 – 7790055

E-mail : admin@litbang-lan-bdg.info

info@bandung.lan.go.id

Web : www.litbang-lan-bdg.info

www.bandung.lan.go.id

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Shafiera Amalia, et.al.

Statistik Aparatur Indonesia 2012

Bandung: Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I

Lembaga Administrasi Negara, 2012

x;250 hlm.; 21 x 29,7 cm

ISBN: 978-979-3382-62-3

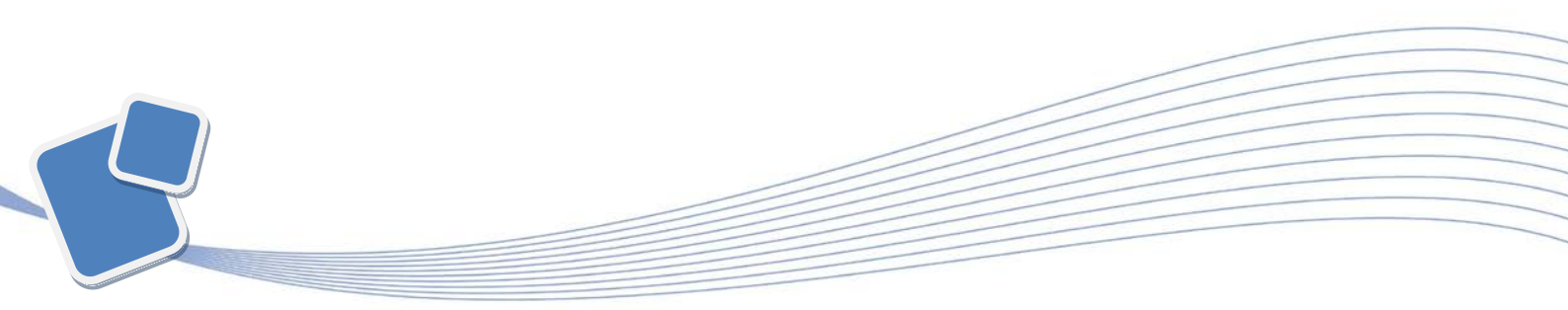
I.

II. Aparatur

III. Shafiera, Amalia

Tim Penyusun :

1. Shafiera Amalia, S.IP.
2. Dr.H. Baban Sobandi, SE.,M.Si
3. Rosita Novi Andari, S.Sos
4. Krismiyati Tasrin, ST, M. Ec
5. Rizky Fitria, SE.



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa karena atas rahmat dan ridha-Nya kami dapat menyelesaikan buku **“Statistik Aparatur Indonesia 2012”**. Kegiatan penyusunan buku ini merupakan kerjasama antara Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A) I Lembaga Administrasi Negara dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Kehadiran publikasi ini merupakan suatu usaha untuk memenuhi ketersediaan data mengenai aparatur yang integral dan komprehensif yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, baik untuk keperluan perumusan kebijakan, maupun bagi keperluan akademis. Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan data terkait dengan aparatur.

Buku ini berisikan data statistik mengenai aparatur, dari aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia aparatur, fiskal/keuangan yang mendukung reformasi birokrasi dan aspek kinerja aparatur/reformasi birokrasi. Data yang disajikan dalam buku ini diperoleh dari berbagai instansi pemerintah yang memiliki kewenangan di bidang aparatur.

Sebagai publikasi pertama, terdapat banyak kekurangan dalam buku ini. Oleh karenanya, kami mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk peningkatan kualitas publikasi ini di masa mendatang.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan buku ini.

Sumedang, November 2012

Tim Penyusun



KATA SAMBUTAN KEPALA PKP2A I LAN

Aparatur merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Baik buruknya penyelenggaraan pemerintahan sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas aparatur. Oleh karena itu, diperlukan berbagai kebijakan yang dapat menyelesaikan berbagai masalah mengenai aparatur, dimana dalam perumusannya diperlukan berbagai data yang terintegrasi, akurat dan berkelanjutan.

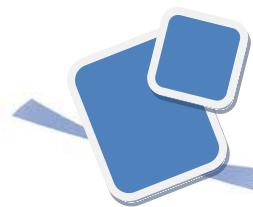
Namun sangat disayangkan, ketersediaan data aparatur saat ini masih jauh dari yang diharapkan. Tidak jarang Pemangku kepentingan (*stakeholder*) merasa kesulitan untuk memperoleh berbagai data mengenai aparatur. Padahal data tersebut akan dipergunakan untuk kegiatan perumusan kebijakan di bidang aparatur. Dengan terbatasnya data yang dijadikan referensi dalam perumusan kebijakan aparatur, tidak menutup kemungkinan kebijakan yang dihasilkan tidak dapat berhasil dengan baik dalam implementasinya.

Melihat fenomena tersebut, Pusat Kajian Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A) I Lembaga Administrasi Negara bekerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) berinisiatif untuk menyusun buku “**Statistik Aparatur Indonesia 2012**”. Buku ini berisikan sejumlah data penting mengenai aparatur, baik dari sisi kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM aparatur, keuangan yang mendukung reformasi birokrasi dan data mengenai kinerja aparatur. Kehadiran buku ini diharapkan mampu menyediakan berbagai data yang diperlukan dalam perumusan kebijakan aparatur dan berbagai kajian akademis terkait aparatur.

Bersama ini pula kami sampaikan penghargaan dan apresiasi kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian buku ini. Disamping itu, kami mengharapkan masukan, saran dan kritik untuk penyempurnaan buku ini di masa mendatang.

Sumedang, November 2012

Gering Supriyadi



DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Kata Pengantar	iv
Kata Sambutan Kepala PKP2A I LAN	v
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	xviii
Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Output	2
D. Kegunaan dan Manfaat	2
E. Teknik Pengumpulan Data	3
Bagian I Kelembagaan	7
A. Kelembagaan Pemerintah	7
B. Struktur Organisasi	8
C. Ketersediaan Dokumen Kelembagaan	9
Bagian II Ketatalaksanaan	63
A. Sistem Perencanaan Kerja	63
B. Sistem Prosedur Kerja	64
C. Sistem Pengawasan dan Pengendalian	66
Bagian III Sumber Daya Manusia Aparatur	111
A. Jumlah Pegawai Negeri Sipil	111
B. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan	112
C. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil	113
D. Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil	115
E. Disiplin Pegawai Negeri Sipil	116

	F. Pensiun Pegawai Negeri Sipil	116
Bagian IV	Keuangan/Fiskal yang Mendukung Reformasi Birokrasi (RB)	193
	A. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	193
	B. Alokasi Belanja Negara untuk Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur	193
	C. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	194
	D. Pendapatan Asli Daerah	194
	E. Dana Perimbangan	195
	F. Alokasi Belanja Pemerintah Daerah	196
Bab V	Kinerja Aparatur/Reformasi Birokrasi	221
	A. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Instansi	221
	B. Kualifikasi Penilaian LAKIP oleh Kemenpan	223
	C. Integritas Sektor Publik	224
	D. Peringkat Dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	224
	E. Peringkat Doing Business Indonesia dan Negara ASEAN	225
	F. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dan Negara ASEAN	226
	G. Skor Government Effectiveness Index Indonesia dan Negara ASEAN	226
	H. Skor Rule Of Law Index Indonesia dan Negara ASEAN	226
	I. Skor Regulatory Quality Index Indonesia dan Negara ASEAN	227
	J. Peringkat dan Nilai Human Development Index Indonesia dan Negara ASEAN	227

DAFTAR TABEL

Bagian I	Kelembagaan	
Tabel I.1	Nomenklatur Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	10
Tabel I.2.	Nomenklatur Kementerian Tahun 2012	10
Tabel I.3.	Nomenklatur Lembaga Pemerintah Non Kementerian Tahun 2012	12
Tabel I.4.	Nomenklatur Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	13
Tabel I.5.	Nomenklatur Lembaga Setingkat Menteri Tahun 2012	13
Tabel I.6.	Nomenklatur Lembaga Pemerintah Lainnya Tahun 2012	13
Tabel I.7.	Nomenklatur Lembaga Non Struktural Tahun 2012	14
Tabel I.8	Jumlah Pemerintah Kabupaten Tahun 2007-2011	17
Tabel I.9	Jumlah Pemerintah Kota Tahun 2007-2011	18
Tabel I.10	Daerah Otonom Baru	19
Tabel I.11	Titelatur dan Eselonering pada Kementerian yang melaksanakan Urusan Pemerintahan yang Secara Tegas di sebutkan dalam UUD 1945	20
Tabel I.12	Titelatur dan Eselonering pada Kementerian yang melaksanakan Urusan Pemerintahan yang ruang lingkupnya di sebutkan dalam UUD 1945	22
Tabel I.13	Titelatur dan Eselonering pada Kementerian yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dalam Rangka Penajaman Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pemerintah (Kementerian Kesekretariatan Negara)	24
Tabel I.14	Titelatur dan Eselonering pada Kementerian yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dalam Rangka Penajaman Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pemerintah	25
Tabel I.15	Titelatur dan Eselonering pada Kementerian yang dibentuk untuk keperluan Sinkronisasi dan Koordinasi Urusan Kementerian	27
Tabel I.16	Titelatur dan Eselonering pada Lembaga Pemerintah Non Kementerian	28
Tabel I.17	Titelatur dan Eselonering pada Lembaga yang dipimpin pejabat setingkat menteri (Kejaksaan Agung)	30
Tabel I.18	Titelatur dan Eselonering pada Lembaga yang dipimpin pejabat setingkat menteri (Kepolisian RI)	32
Tabel I.19	Titelatur dan Eselonering pada Lembaga yang dipimpin pejabat setingkat menteri (Sekretariat Kabinet)	33
Tabel I.20	Titelatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara (Sekretariat	34

	Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat)	
Tabel I.21	Titelatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara (Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat)	35
Tabel I.22	Titelatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara (Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah)	36
Tabel I.23	Titelatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara (Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan)	37
Tabel I.24	Titelatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara (Kesekretariatan Mahkamah Agung)	39
Tabel I.25	Titelatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara (Sekretariat Panitera Mahkamah Agung)	40
Tabel I.26	Titelatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara (Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi)	41
Tabel I.27	Titelatur dan Eselonering Kesekretariatan Lembaga Negara yang Diatur Dalam UUD 1945 dan UU (Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial)	42
Tabel I.28	Titelatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Non Struktural	43
Tabel I.29	Nomenklatur dan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Khusus	44
Tabel I.30	Jenis dan Nomenklatur Jabatan Fungsional Umum di lingkungan Pemerintah Pusat	47
Tabel I.31	Nomenklatur Lembaga Pusat yang Memiliki Dokumen Analisis Jabatan Tahun 2012	59
Tabel I.32	Nomenklatur Lembaga Pusat yang Memiliki Dokumen Analisis Beban Kerja Tahun 2012	60
Bagian II	Ketatalaksanaan	
Tabel II.1.	Jumlah Kementerian/Lembaga Pusat yang Telah Memiliki Dokumen IKU Tahun 2008-2010	67
Tabel II.2.	Jumlah Pemerintah Daerah Provinsi yang Telah Memiliki Dokumen IKU Tahun 2008-2010	67
Tabel II.3.	Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Memiliki Dokumen IKU Tahun 2008-2010	67
Tabel II.4.	Jumlah Kementerian/Lembaga Pusat yang Telah Memiliki Dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2005-2010	67
Tabel II.5.	Jumlah Pemerintah Daerah Provinsi yang Telah Memiliki Dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2005-2010	68
Tabel II.6.	Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Memiliki Dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2005-2010	68

Tabel II.7.	Jumlah Keseluruhan Kementerian/Lembaga Pusat dan Pemerintah Daerah yang Telah Memiliki Dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2005-2010	68
Tabel II.8.	Jenis SPM yang Telah Diterbitkan	69
Tabel II.9.	Data jumlah dan nomenklatur Pemerintah Daerah yang telah menerapkan PTSP Tahun 2012	70
Tabel II.10.	Data jumlah dan nomenklatur Lembaga Tinggi Negara yang telah menerapkan e-Government Tahun 2012	72
Tabel II.11.	Data jumlah dan nomenklatur Kementerian yang telah menerapkan e-Government Tahun 2012	74
Tabel II.12.	Data jumlah dan nomenklatur Lembaga Setingkat Menteri yang telah menerapkan e-Government Tahun 2012	83
Tabel II.13.	Data jumlah dan nomenklatur Lembaga Non Kementerian yang telah menerapkan e-Government Tahun 2012	84
Tabel II.14.	Jumlah Pemerintah Daerah Propinsi yang telah memiliki Website Tahun 2012	89
Tabel II.15.	Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten yang telah memiliki Website Tahun 2012	90
Tabel II.16.	Jumlah Pemerintah Daerah Kota yang telah memiliki Website Tahun 2012	91
Tabel II.17.	Data jumlah dan nomenklatur Pemerintah Pusat yang telah memiliki Peraturan Menteri/Kepala K/L mengenai SPIP Tahun 2010 – 2011	92
Tabel II.18.	Data jumlah dan nomenklatur Pemerintah Daerah yang telah memiliki Peraturan Kepala Daerah mengenai SPIP Tahun 2010 – 2011	95
Tabel II.19.	Rekapitulasi jumlah Pemerintah Daerah yang telah memiliki Peraturan Kepala Daerah mengenai SPIP Tahun 2010 – 2011	107
Bagian III	Sumber Daya Manusia Aparatur	
Tabel III.1.	Jumlah PNS Berstatus PNS Instansi Pusat dan PNS Pemerintah Daerah	117
Tabel III.2.	Jumlah PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) Menurut Pendidikan	117
Tabel III.3.	Jumlah PNS Pusat Menurut Pendidikan	117
Tabel III.4.	Jumlah PNS Daerah Menurut Pendidikan	118
Tabel III.5.	Jumlah Total PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) Menurut Kelompok umur	118
Tabel III.6.	Jumlah PNS Pusat Menurut Kelompok Umur	118
Tabel III.7.	Jumlah PNS Daerah Menurut Kelompok Umur	119
Tabel III.8.	Jumlah Total PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) Menurut Golongan/Ruang	119
Tabel III.9.	Jumlah PNS Pusat Menurut Golongan/Ruang	120

Tabel III.10.	Jumlah PNS Daerah Menurut Golongan/Ruang	121
Tabel III.11.	Data Umum Total Jumlah PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) yang Menduduki Jabatan Struktural, Fungsional tertentu dan Fungsional Umum	121
Tabel III.12.	Data Umum PNS Pusat yang Menduduki Jabatan Struktural, Fungsional tertentu dan Fungsional Umum	122
Tabel III.13.	Data Umum PNS Daerah yang Menduduki Jabatan Struktural, Fungsional tertentu dan Fungsional Umum	122
Tabel III.14.	Data Umum Jumlah PNS Pusat dan PNS Daerah yang Menduduki Jabatan Struktural	122
Tabel III.15.	Jumlah PNS (PNS Pusat dan Daerah) yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Kelompok Umur	123
Tabel III.16.	Jumlah PNS Pusat yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Kelompok Umur	123
Tabel III.17.	Jumlah PNS Daerah yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Kelompok Umur	124
Tabel III.18.	Jumlah Total PNS (PNS Pusat dan Daerah) yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Pendidikan	124
Tabel III.19.	Jumlah PNS Pusat yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Pendidikan	125
Tabel III.20.	Jumlah PNS Daerah yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Pendidikan	125
Tabel III.21.	Jumlah Total PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Jenis Kelamin	126
Tabel III.22.	Jumlah PNS Pusat yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Jenis Kelamin	126
Tabel III.23.	Jumlah PNS Daerah yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Jenis Kelamin	126
Tabel III.24.	Jumlah Total PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Golongan/Ruang	126
Tabel III.25.	Jumlah PNS Pusat yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Golongan/Ruang	127
Tabel III.26.	Jumlah PNS Daerah yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Golongan/Ruang	128
Tabel III.27.	Jumlah PNS Pusat dan PNS Daerah yang Menduduki Jabatan Fungsional tertentu	128
Tabel III.28.	Jumlah Total PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) yang Menduduki Jabatan Fungsional tertentu Menurut Kelompok Umur	129
Tabel III.29.	Jumlah PNS Pusat yang Menduduki Jabatan Fungsional tertentu Menurut Kelompok Umur	129
Tabel III.30.	Jumlah PNS Daerah yang Menduduki Jabatan Fungsional tertentu Menurut Kelompok Umur	130
Tabel III.31.	Jumlah Total PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) yang Menduduki Jabatan Fungsional tertentu Menurut Pendidikan	130
Tabel III.32.	Jumlah PNS Pusat yang Menduduki Jabatan Fungsional	131

	tertentu Menurut Pendidikan	
Tabel III.33.	Jumlah PNS Daerah yang Menduduki Jabatan Fungsional tertentu Menurut Pendidikan	131
Tabel III.34.	Jumlah Total PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) yang Menduduki Jabatan Fungsional tertentu Menurut Jenis Kelamin	132
Tabel III.35.	Jumlah PNS Pusat yang Menduduki Jabatan Fungsional tertentu Menurut Jenis Kelamin	132
Tabel III.36.	Jumlah PNS Daerah yang Menduduki Jabatan Fungsional tertentu Menurut Jenis Kelamin	132
Tabel III.37.	Jumlah Total PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) yang Menduduki Jabatan Fungsional tertentu Menurut Golongan/Ruang	132
Tabel III.38.	Jumlah PNS Pusat yang Menduduki Jabatan Fungsional tertentu Menurut Golongan/Ruang	133
Tabel III.39.	Jumlah PNS Daerah yang Menduduki Jabatan Fungsional tertentu Menurut Golongan/Ruang	134
Tabel III.40.	Jumlah PNS yang Menduduki Jabatan Peneliti Menurut Jenjang	134
Tabel III.41.	Jumlah PNS yang Menduduki Jabatan Dosen Menurut Lembaga	137
Tabel III.42.	Jumlah PNS yang Menduduki Jabatan Dosen Menurut Tingkat Pendidikan	137
Tabel III.43.	Jumlah Guru berstatus PNS yang tersedia di Seluruh Kabupaten/Kota	137
Tabel III.44.	Jumlah Guru berstatus guru swasta yang tersedia di Seluruh Kabupaten/Kota	138
Tabel III.45.	Jumlah PNS yang Menduduki Jabatan Guru TK Menurut Status Kepegawaian	138
Tabel III.46.	Jumlah PNS yang Menduduki Jabatan Guru SD Menurut Status Kepegawaian	138
Tabel III.47.	Jumlah PNS yang Menduduki Jabatan Guru SMP Menurut Status Kepegawaian	139
Tabel III.48.	Jumlah PNS yang Menduduki Jabatan Guru SMA Menurut Status Kepegawaian	139
Tabel III.49.	Jumlah PNS yang Menduduki Jabatan Guru SMK Menurut Status Kepegawaian	139
Tabel III.50.	Jumlah PNS yang Menduduki Jabatan Guru SLB Menurut Status Kepegawaian	139
Tabel III.51.	Jumlah PNS yang Menduduki Jabatan Guru SD Menurut Usia	140
Tabel III.52.	Jumlah PNS yang Menduduki Jabatan Guru SMP Menurut Usia	140
Tabel III.53.	Jumlah PNS yang Menduduki Jabatan Guru SMA Menurut Usia	140
Tabel III.54.	Jumlah PNS yang Menduduki Jabatan Guru SMK Menurut Usia	141

Tabel III.55.	Jumlah PNS yang Menduduki Jabatan Guru TK Menurut Ijasah Tertinggi	141
Tabel III.56.	Jumlah PNS yang Menduduki Jabatan Guru SD Menurut Ijasah Tertinggi	142
Tabel III.57.	Jumlah PNS yang Menduduki Jabatan Guru SMP Menurut Ijasah Tertinggi	142
Tabel III.58.	Jumlah PNS yang Menduduki Jabatan Guru SMA Menurut Ijasah Tertinggi	142
Tabel III.59.	Jumlah PNS yang Menduduki Jabatan Guru SMK Menurut Ijasah Tertinggi	143
Tabel III.60.	Jumlah PNS yang Menduduki Jabatan Guru SLB Menurut Ijasah Tertinggi	143
Tabel III.61.	Jumlah PNS yang Menduduki Jabatan Guru TK Menurut Jenis Kelamin	143
Tabel III.62.	Jumlah PNS yang Menduduki Jabatan Guru SD Menurut Jenis Kelamin	143
Tabel III.63.	Jumlah PNS yang Menduduki Jabatan Guru SMP Menurut Jenis Kelamin	144
Tabel III.64.	Jumlah PNS yang Menduduki Jabatan Guru SMA Menurut Jenis Kelamin	144
Tabel III.65.	Jumlah PNS yang Menduduki Jabatan Guru SMK Menurut Jenis Kelamin	144
Tabel III.66.	Jumlah PNS yang Menduduki Jabatan Guru SLB Menurut Jenis Kelamin	144
Tabel III.67.	Jumlah PNS yang Menduduki Jabatan Tenaga Kesehatan	145
Tabel III.68.	Jumlah Total PNS (Pusat-Daerah) yang Menduduki Jabatan Auditor	145
Tabel III.69.	Jumlah Umum PNS Pusat dan PNS Daerah yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum	146
Tabel III.70.	Jumlah Total PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut kelompok Umur	146
Tabel III.71.	Jumlah PNS Pusat yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Kelompok Umur	146
Tabel III.72.	Tabel III.72. Jumlah PNS Daerah yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Kelompok Umur	147
Tabel III.73.	Jumlah Total PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Pendidikan	147
Tabel III.74.	Jumlah PNS Pusat yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Pendidikan	148
Tabel III.75.	Jumlah PNS Daerah yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Pendidikan	148
Tabel III.76.	Jumlah Total PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Jenis Kelamin	149
Tabel III.77.	Jumlah PNS Pusat yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Jenis Kelamin	149

Tabel III.78.	Jumlah PNS Daerah yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Jenis Kelamin	149
Tabel III.79.	Jumlah Total PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Golongan/Ruang	149
Tabel III.80.	Jumlah PNS Pusat yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Golongan/Ruang	150
Tabel III.81.	Jumlah PNS Daerah yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Golongan/Ruang	151
Tabel III.82.	Jumlah PNS yang Pernah Ikut Diklat PIM I, II, III, IV dan Prajabatan	151
Tabel III.83.	Jumlah PNS yang Pernah Ikut Diklat Fungsional dan Teknis	152
Tabel III.84.	Jumlah Keseluruhan Lembaga Diklat dan Program Diklat Kepemimpinan Kementerian yang Sudah Diakreditasi Tahun 2011	152
Tabel III.85.	Jumlah Keseluruhan Lembaga Diklat dan Program Diklat Kepemimpinan Lembaga Non Kementerian yang Sudah Diakreditasi Tahun 2011	156
Tabel III.86.	Jumlah Keseluruhan Lembaga Diklat dan Program Diklat Kepemimpinan Pemerintah Provinsi yang Sudah Diakreditasi Tahun 2011	158
Tabel III.87.	Jumlah Keseluruhan Lembaga Diklat dan Program Diklat Kepemimpinan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Sudah Diakreditasi Tahun 2011	161
Tabel III.88.	Jumlah Keseluruhan Lembaga Diklat dan Program Diklat Teknis dan Fungsional Kementerian yang Sudah Diakreditasi Tahun 2011	162
Tabel III.89.	Jumlah Keseluruhan Lembaga Diklat dan Program Diklat Teknis dan Fungsional Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang Sudah Diakreditasi Tahun 2011	166
Tabel III.90.	Jumlah PNS Kementerian/Lembaga yang Menduduki Jabatan Widyaiswara Menurut Jenjang dan Golongan Ruang	169
Tabel III.91.	Jumlah PNS Pemerintah Daerah yang Menduduki Jabatan Widyaiswara Menurut Jenjang dan Golongan Ruang	169
Tabel III.92.	Data time Series Gaji Pokok PNS Golongan I	170
Tabel III.93.	Data time Series Gaji Pokok PNS Golongan II	172
Tabel III.94.	Data time Series Gaji Pokok PNS Golongan III	174
Tabel III.95.	Data time Series Gaji Pokok PNS Golongan IV	176
Tabel III.96.	Data Tunjangan Jabatan Struktural	179
Tabel III.97.	Data Tunjangan Jabatan Fungsional tertentu	179
Tabel.III.98.	Data Peserta Askes Sosial Menurut Jenis Kepesertaan	184
Tabel III.99.	Data Peserta Askes Sosial Menurut Golongan Kepegawaian	185
Tabel.III.100.	Data Peserta Askes Sosial Menurut Kelompok Umur	186
Tabel III.101.	Jumlah PNS yang Terkena Hukuman Disiplin Per Bulan Februari Tahun 2011	187

Tabel III.102.	Data Uang Pensiun PNS Per Kelompok	188
Tabel III.103.	PNS yang Pensiun Menurut Kelompok	188
Tabel III.104.	PNS yang Pensiun Menurut Kelompok Menurut Golongan/Ruang	189
Tabel III.105.	PNS yang Pensiun Menurut Kelompok Menurut Jenis Kelamin	189
Bagian IV	Keuangan/Fiskal yang Mendukung Reformasi Birokrasi (RB)	
Tabel IV.1.	Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (dalam miliaran rupiah)	198
Tabel IV.2.	Alokasi Belanja Negara untuk Sektor Pendidikan (dalam miliaran rupiah)	200
Tabel IV.3.	Alokasi Belanja Negara untuk Sektor Kesehatan (dalam miliaran rupiah)	202
Tabel IV.4.	Alokasi Belanja Negara untuk Sektor Infrastruktur (dalam miliaran rupiah)	205
Tabel IV.5.	Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi (dalam jutaan rupiah)	208
Tabel IV.6.	Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (dalam jutaan rupiah)	208
Tabel IV.7.	Jumlah Pemda Propinsi berdasarkan persentase kontribusi PAD terhadap Anggaran Pendapatan	209
Tabel IV.8.	Jumlah Pemda Kabupaten/Kota berdasarkan persentase kontribusi PAD terhadap Anggaran Pendapatan	209
Tabel IV.9.	Data Total PAD Provinsi/Kabupaten/Kota (dalam dalam jutaan rupiah)	210
Tabel IV.10.	Jumlah Pemda Propinsi berdasarkan persentase kontribusi DAU terhadap Anggaran Pendapatan	210
Tabel IV.11.	Jumlah Pemda Kab/Kota berdasarkan persentase kontribusi DAU terhadap Anggaran Pendapatan	210
Tabel IV.12.	Data Total DAU Provinsi/Kabupaten/Kota (dalam jutaan rupiah)	211
Tabel IV.13.	Jumlah Pemda Propinsi berdasarkan persentase kontribusi DAK terhadap Anggaran Pendapatan	211
Tabel IV.14.	Jumlah Pemda Kab/Kota berdasarkan persentase kontribusi DAK terhadap Anggaran Pendapatan	211
Tabel IV.15.	Data Total DAK Provinsi/Kabupaten/Kota (dalam jutaan rupiah)	212
Tabel IV.16.	Jumlah Pemda Propinsi berdasarkan persentase kontribusi Dana Bagi Hasil terhadap Anggaran Pendapatan	212
Tabel IV.17.	Jumlah Pemda Kab/Kota berdasarkan persentase kontribusi Dana Bagi Hasil terhadap Anggaran Pendapatan	212
Tabel IV.18.	Data Total Dana Bagi hasil Provinsi/ Kabupaten/Kota (dalam jutaan rupiah)	213
Tabel IV.19.	Jumlah Pemda Propinsi berdasarkan persentase Anggaran Belanja Pegawai terhadap Total Anggaran Belanja	213

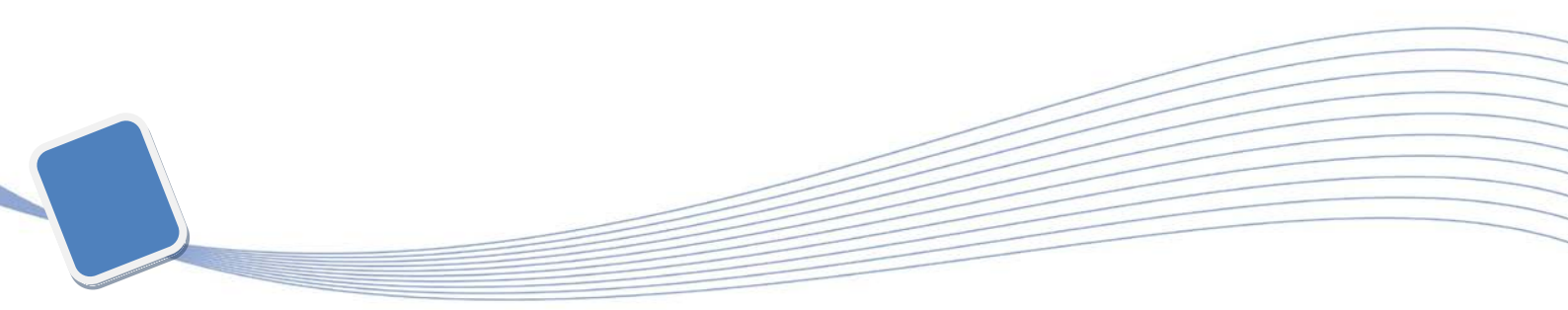
Tabel IV.20.	Jumlah Pemda Kab/Kota berdasarkan persentase Anggaran Belanja Pegawai terhadap Total Anggaran Belanja	213
Tabel IV.21.	Total Dana Belanja Pegawai Provinsi/Kabupaten/Kota (dalam jutaan rupiah)	214
Tabel IV.22.	Jumlah Pemda Propinsi berdasarkan persentase Anggaran Belanja Sektor Pendidikan terhadap Total Anggaran Belanja	214
Tabel IV.23.	Jumlah Pemda Kab/Kota berdasarkan persentase Anggaran Belanja Sektor Pendidikan terhadap Total Anggaran Belanja	214
Tabel IV.24.	Total Dana Belanja sektor pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota (dalam jutaan rupiah)	215
Tabel IV.25.	Jumlah Pemda Propinsi berdasarkan persentase Anggaran Belanja Sektor Kesehatan terhadap Total Anggaran Belanja	215
Tabel IV.26.	Jumlah Pemda Kab/Kota berdasarkan persentase Anggaran Belanja Sektor Kesehatan terhadap Total Anggaran Belanja	215
Tabel IV.27.	Total Dana Belanja sektor kesehatan Provinsi/ Kabupaten/Kota (dalam jutaan rupiah)	216
Tabel IV.28.	Jumlah Pemda Propinsi berdasarkan persentase Anggaran Belanja Sektor Infrastruktur terhadap Total Anggaran Belanja	216
Tabel IV.29.	Jumlah Pemda Kab/Kota berdasarkan persentase Anggaran Belanja Sektor Infrastruktur terhadap Total Anggaran Belanja	216
Tabel IV.30.	Total Dana Belanja sektor infrastruktur Provinsi/ Kabupaten/Kota (dalam jutaan rupiah)	217
Bagian V	Kinerja Aparatur / Reformasi Birokrasi	
Tabel V.1.	Kualifikasi Hasil Penilaian BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2004-2010	229
Tabel V.2.	Kualifikasi Hasil Penilaian BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat	229
Tabel V.3.	Kualifikasi Hasil Penilaian BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	229
Tabel V.4.	Kualifikasi Hasil Penilaian Kemenpan terhadap LAKIP Pemerintah Pusat Tahun 2011	230
Tabel V.5.	Kualifikasi Hasil Penilaian Kemenpan terhadap LAKIP Pemerintah Daerah Tahun 2011	232
Tabel V.6.	Nomenklatur Pemerintah Daerah Propinsi dengan Kualifikasi Hasil Penilaian Kemenpan terhadap LAKIP Pemerintah Daerah Tahun 2011	232
Tabel V.7.	Nomenklatur Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Kualifikasi Hasil Penilaian Kemenpan terhadap LAKIP Pemerintah Daerah Tahun 2011	233
Tabel V.8.	Perkembangan Integritas Sektor Publik Tingkat Nasional	237
Tabel V.9.	Peringkat Dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Secara Nasional Tahun 2012	237
Tabel V.10.	Peringkat Dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Secara Nasional Tahun 2012	238

Tabel V.11.	Peringkat Dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Secara Nasional Tahun 2012	246
Tabel V.12.	Peringkat Doing Business Negara ASEAN 2011 – 2012	248
Tabel V.13	Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Negara ASEAN Tahun 2007-2011	248
Tabel V.14.	Peringkat Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Negara ASEAN Tahun 2007-2011	248
Tabel V.15.	Perbandingan Skor <i>Government Effectiveness Index</i> Negara ASEAN 2005-2009	249
Tabel V.16.	Perbandingan Skor <i>Rule of Law Index</i> Negara ASEAN 2005-2009	249
Tabel V.17.	Perbandingan Skor <i>Regulatory Quality Index</i> Negara ASEAN 2005-2009	249
Tabel V.18.	Rangking (<i>Rank</i>) dan Nilai (<i>Value</i>) <i>Human Development Index</i> (HDI) Negara ASEAN 2010-2011	250
Tabel V.19.	Nilai Komponen (<i>components</i>) <i>Human Development Index</i> (HDI) Negara ASEAN 2010-2011	250

DAFTAR GAMBAR

Bagian II	Kelembagaan	
Gambar 1.1.	Peta Kelembagaan Instansi Pemerintah Pusat	16
Gambar 1.2.	Titelatur dan Eselonering pada Kementerian yang melaksanakan Urusan Pemerintahan yang Secara Tegas di sebutkan dalam UUD 1945	21
Gambar 1.3.	Titelatur dan Eselonering pada Kementerian yang melaksanakan Urusan Pemerintahan yang ruang lingkupnya di sebutkan dalam UUD 1945	23
Gambar 1.4	Titelatur dan Eselonering pada Kementerian yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dalam Rangka Penajaman Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pemerintah (Kementerian Kesekretariatan Negara)	24
Gambar 1.5	Titelatur dan Eselonering pada Kementerian yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dalam Rangka Penajaman Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pemerintah	26
Gambar 1.6	Titelatur dan Eselonering pada Kementerian yang dibentuk untuk keperluan Sinkronisasi dan Koordinasi Urusan Kementerian	27
Gambar 1.7.	Titelatur dan Eselonering pada Lembaga Pemerintah Non Kementerian	29
Gambar 1.8.	Titelatur dan Eselonering pada Kejaksaan Agung	31
Gambar 1.9.	Titelatur dan Eselonering pada Kejaksaan Tinggi	31
Gambar 1.10.	Titelatur dan Eselonering pada Lembaga yang dipimpin pejabat setingkat menteri (Sekretariat Kabinet)	33
Gambar 1.11.	Titelatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat)	34
Gambar 1.12.	Titelatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat)	35
Gambar 1.13.	Titelatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah)	36
Gambar 1.14	Titelatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan diatur	38

	dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan)	
Gambar 1.15	Titelatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi)	41
Gambar 1.16.	Titelatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial)	42
Bagian II	Ketatalaksanaan	
Gambar II.1.	Jumlah Lembaga Pusat dan Pemerintah Daerah yang Telah Memiliki Dokumen IKU Tahun 2008-2010	64
Gambar II.2.	Jumlah Lembaga Pusat dan Pemerintah Daerah yang Telah Memiliki Dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2005-2010	64
Gambar II.3.	Jumlah Pemerintah Daerah yang telah menerapkan PTSP Tahun 2012	65
Bagian III	Sumber Daya Manusia Aparatur	
Grafik III.1.	Jumlah PNS Kementerian/Lembaga yang Menduduki Jabatan Widyaiswara Berdasarkan Jenjang dan Golongan Ruang	114
Grafik III.2.	Jumlah PNS Pemerintah Daerah yang Menduduki Jabatan Widyaiswara Berdasarkan Jenjang dan Golongan Ruang	115
Bagian V	Kinerja Aparatur / Reformasi Birokrasi	
Gambar V.1.	Kualifikasi Hasil Penilaian BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat	222
Gambar V.2.	Kualifikasi Hasil Penilaian BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	222
Gambar V.3.	Kualifikasi Hasil Penilaian Kemenpan terhadap LAKIP Pemerintah Pusat Tahun 2011	223
Gambar V.4.	Kualifikasi Hasil Penilaian Kemenpan terhadap LAKIP Pemerintah Daerah tahun 2011	224
Gambar. V.5.	Perkembangan Integritas Sektor Publik Tingkat Nasional	225



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini data mempunyai peranan yang sangat penting. Dalam kehidupan sehari-hari kita selalu memproduksi dan mengkonsumsi data, baik pada tingkatan individu; organisasi swasta dan masyarakat; dan juga pada organisasi pemerintah. Pada organisasi pemerintah, data mutlak diperlukan dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan. Data diperlukan dalam seluruh proses manajemen pemerintahan; data diperlukan dalam proses perumusan, implementasi hingga evaluasi seluruh kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Data juga diperlukan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan di seluruh sektor.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, data merupakan keterangan yang benar dan nyata; data merupakan keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian. Pentingnya ketersediaan data dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai bahan pertimbangan agar kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat berjalan efektif dan efisien; agar pembangunan yang dilakukan pemerintah dapat berhasil guna dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Ketidaktersediaan data yang memadai akan menyebabkan kesalahan dalam merumuskan kebijakan atau merencanakan pembangunan, sehingga hasil yang diharapkan tidak tercapai dan hanya memboroskan sumber daya yang ada.

Melihat pentingnya data dalam perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 31 menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan didasarkan pada informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Regulasi ini mengemukakan dan mengharuskan dua hal, yaitu bahwa dalam setiap perencanaan pembangunan haruslah didasarkan pada data; dan yang kedua data yang digunakan dalam perencanaan pembangunan haruslah data yang valid dan akurat. Hal ini dikarenakan walaupun telah tersedia data untuk proses perencanaan pembangunan, tetapi data tersebut tidak valid dan akurat karena kesalahan dalam mengumpulkan dan mengolah data, maka dapat terjadi kesalahan dan kegagalan dalam proses perencanaan pembangunan. Dengan demikian, dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, diperlukan data yang memadai, valid dan akurat agar setiap kebijakan yang diproduksi oleh pemerintah dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan.

Sebagai bagian dari aspek pemerintahan, pengelolaan (manajemen) dan pembangunan sumber daya aparatur mutlak memerlukan data yang memadai, valid dan akurat sebagai input utama dalam merumuskan berbagai kebijakan, program pembangunan dan pengelolaan sumber daya aparatur. Namun kenyataannya, belum tersedia data yang memadai, valid dan akurat mengenai sumber daya aparatur yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh *stakeholder* dalam proses pengambilan keputusan



yang terkait dengan kebijakan, program pembangunan dan pengelolaan sumber daya aparatur. Misalnya saja saat ini terjadi perbedaan data mengenai jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di seluruh instansi pemerintah, baik Pusat maupun Daerah.

Data jumlah PNS ini hanya satu data mengenai sumber daya aparatur yang harus diperbaiki ketersediannya dan dijamin kevalidan dan keakuratannya. Masih banyak jenis data lain mengenai sumber daya aparatur yang diperlukan tetapi belum dikumpulkan dan dikelola dengan baik oleh instansi yang berwenang; atau bahkan jenis data tersebut belum ada, belum pernah dikumpulkan sama sekali oleh instansi yang berwenang. Kondisi inilah yang melatarbelakangi PKP2A I LAN untuk melaksanakan kegiatan penyusunan buku statistik aparatur 2012.

B. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya buku ini adalah untuk mengumpulkan dan menyusun data aparatur yang tersedia pada instansi yang berwenang dan menyajikannya dalam bentuk publikasi yang mudah dimengerti dan digunakan oleh berbagai stakeholder.

C. Output

Buku ini berisikan data mengenai aparatur yang terdiri dari beberapa aspek, yaitu :

1. bagian I berisikan data kelembagaan;
2. bagian II berisikan data ketatalaksanaan;
3. bagian III berisikan data sumber daya manusia aparatur;
4. bagian IV berisikan data keuangan/fiskal yang mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi;
5. bagian V berisikan data kinerja aparatur/ reformasi birokrasi.

D. Kegunaan dan Manfaat

Adapun kegunaan dari buku ini yang utama adalah sebagai bahan bagi perumusan kebijakan perencanaan makro (RPJM) bidang aparatur oleh Bappenas. Selain itu, buku Statistik Aparatur 2012 ini juga dapat digunakan oleh berbagai *stakeholder* yang memerlukan data untuk proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan, program pembangunan dan pengelolaan sumber daya aparatur.



E. Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan pengumpulan data di bidang aparatur menggunakan teknik Studi pustaka (*desk research*) yang dilakukan di beberapa lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan di bidang aparatur. Diantaranya adalah Badan Kepegawaian Negara (BKN); Badan Pusat Statistik (BPS); Kementerian PAN; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Keuangan; Lembaga Administrasi Negara; Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI); dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Kesehatan; Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); Lembaga Transparency International, UNDP; PT Askes; dan PT Taspen .

BAGIAN I

KELEMBAGAAN

Bagian ini menyajikan data tentang kelembagaan yang terdiri dari Kelembagaan Pemerintah, Struktur Organisasi dan Ketersediaan Dokumen Kelembagaan. Kelembagaan Pemerintah dibagi ke dalam dua bagian yakni Kelembagaan Pemerintah Pusat dan Kelembagaan Pemerintah Daerah. Struktur organisasi dibagi ke dalam empat bagian yakni, pemetaan titelatur dan eselonering jabatan struktural di kementerian/lembaga, nomenklatur jabatan fungsional tertentu dan nomenklatur jabatan fungsional umum di lingkungan kementerian/lembaga. Sedangkan ketersediaan dokumen kelembagaan dibagi menjadi dua bagian yaitu ketersediaan dokumen analisis jabatan dan ketersediaan dokumen analisis beban kerja.

A. Kelembagaan Pemerintah

Kelembagaan Pemerintah Pusat terdiri dari 8 Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 34 Kementerian, 28 Lembaga Pemerintah Non Kementerian, 6 Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara, 8 Kesekretariatan lembaga Negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 4 Lembaga Setingkat Menteri, 2 Lembaga Pemerintah Lainnya, dan 91 Lembaga Non Struktural. Data jumlah dan Nomenklatur Lembaga Pusat Tahun 2012 dapat dilihat lebih jelas pada Tabel I.1 sampai tabel I.7. Sementara itu untuk kelembagaan pemerintah daerah dapat dilihat pada tabel I.8, dan tabel I.9 dan tabel I.10.

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik tahun 2012, jumlah kabupaten di Indonesia adalah 399 kabupaten dari 33 Provinsi. Tabel I.8 menyajikan data mengenai perkembangan jumlah Pemerintah Kabupaten dari Tahun 2007–2011. Dari tabel tersebut terlihat bahwa terdapat tiga belas provinsi yang mengalami perkembangan jumlah kabupaten, yaitu : Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi NTB, Provinsi NTT, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat.

Tabel I.9 menggambarkan jumlah Pemerintah Kota dari Tahun 2007 – 2011. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2011 terlihat bahwa dari 33 Provinsi terdapat 3 Provinsi yang mengalami perkembangan jumlah Pemerintah Kota selama lima tahun berjalan, seperti Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jambi dan Provinsi Banten. Sementara 30 Provinsi lainnya tidak pernah mengalami penambahan jumlah pemerintah kota selama lima tahun berjalan.



Tabel 1.10 menyajikan data mengenai jumlah daerah otonom baru antara tahun 1999 sampai dengan tahun 2008 dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa provinsi Papua memiliki daerah otonom paling banyak yakni 22 daerah, kemudian provinsi Sumatera Utara sebanyak 14 daerah otonom baru, lalu provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebanyak 13 provinsi. Sedangkan Provinsi DKI Jakarta, Provinsi DIY, dan Provinsi Bali, adalah tiga provinsi yang tidak mempunyai daerah otonom baru selama lima tahun terakhir.

B. Struktur Organisasi

Data mengenai struktur organisasi yang tersedia dan ditampilkan meliputi data titelatur dan eselonering jabatan struktural di kementerian/lembaga; data nomenklatur jabatan fungsional khusus dan instansi pembinaanya; dan data mengenai jenis dan nomenklatur jabatan fungsional umum di lingkungan pemerintah pusat. Menurut PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam jabatan Struktural, jabatan struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural tidak dapat merangkap jabatan struktural lain maupun dengan jabatan fungsional.

Sementara itu, menurut Keppres No. 87 Th. 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional, Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu secara mandiri. Dan menurut Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2011, jabatan fungsional umum merupakan kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada beban tugas yang diberikan oleh atasan.

Untuk data mengenai Jabatan struktural diurutkan mulai dari eselon I – eselon IV. Pada tabel 1.11 sampai tabel 1.28, disajikan data mengenai titelatur dan eselonering pada berbagai kategori kementerian dan lembaga pemerintah pusat. Selain ditampilkan dalam bentuk tabel, data mengenai titelatur dan eselonering pada berbagai kategori lembaga pemerintah pusat juga ditampilkan dalam bentuk diagram, yaitu pada gambar 1.1 sampai gambar 1.16.

Sementara itu, untuk jabatan fungsional khusus, terdapat 114 jabatan fungsional khusus dengan 41 Instansi Pembina untuk jabatan fungsional khusus tersebut. Nomenklatur jabatan fungsional khusus dan instansi pembinaanya dapat dilihat pada tabel 1.29. Tabel 1.30 yang menyajikan data jenis dan nomenklatur jabatan fungsional umum di lingkungan pemerintah pusat. Instansi pengguna jabatan fungsional umum tersebut dibagi ke dalam 4 kelompok yaitu Kementerian Koordinator dimana terdapat 3 kementerian; yaitu Kementerian Negara dimana terdapat 28 Kementerian; dan Lembaga pemerintah Non Kementerian dimana terdapat 21 Instansi Pengguna, dan yang termasuk ke dalam Lembaga Setingkat



Menteri yaitu 13 Instansi Pengguna.

C. Ketersediaan Dokumen Kelembagaan

Bagian ini menampilkan data mengenai jumlah dan nomenklatur lembaga pusat yang memiliki dokumen analisis jabatan dan dokumen analisis beban kerja pada tahun 2012, baik Kementerian yang berada di bawah Kementerian Koordinator, Kementerian Negara, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, maupun Sekretariat Lembaga Negara.

Dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja merupakan dokumen yang harus dimiliki oleh setiap instansi pemerintah karena secara khusus memiliki kegunaan dalam menyusun kebutuhan pegawai di setiap instansi. Dokumen analisis jabatan menyediakan informasi mengenai nomenklatur jabatan yang dibutuhkan oleh instansi, uraian tugasnya dan kualifikasi untuk dapat menduduki jabatan tersebut. Sementara itu, dokumen analisis beban kerja menyediakan informasi mengenai berapa jumlah pegawai yang diperlukan untuk menduduki jabatan tersebut. Dengan demikian, seharusnya setiap instansi memiliki dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja tersebut.

Secara definisi, menurut Perka BKN Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan, analisis jabatan merupakan Proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan. Dan menurut Permendagri Nomor 12 tahun 2008, analisis beban kerja adalah suatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.

Berdasarkan sumber dari Kementerian PAN dan RB Tahun 2012 baru ada 41 instansi pemerintah pusat yang telah melengkapi dokumen Analisis Jabatan. Selain itu, masih terdapat beberapa Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, maupun Sekretariat Lembaga Negara yang masih belum memiliki dokumen analisis Jabatan yang lengkap.

Pada Instansi Pusat tingkat Kementerian negara terdapat 4 kementerian yang tidak melengkapi uraian jabatan seperti Kementerian Agama, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Informasi dan Informatika, Kementerian Negara Riset dan Teknologi. Kemudian, terdapat satu kementerian yang tidak melengkapi peta jabatan, yaitu Kementerian Pertanian. Sementara di Lembaga Pemerintah Non Kementerian terdapat 3 lembaga yang tidak dilengkapi uraian jabatan, diantaranya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPN), Badan SAR Nasional, dan Badan Pertanahan Nasional. Pada kelompok Sekretariat Lembaga Negara terdapat satu Lembaga Sekretariat Negara yang belum dilengkapi Uraian Jabatan yaitu Sekretariat KPU, untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel I.31. Sementara itu, Tabel I.32 memperlihatkan jumlah dan nomenklatur Lembaga Pusat yang Memiliki Dokumen Analisis Beban Kerja Tahun 2012. Berdasarkan data dari Kementerian PAN dan RB Tahun 2012 baru ada 25 lembaga pusat yang memiliki dokumen analisis beban kerja.



Tabel 1.1 Nomenklatur Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

No	Lembaga Negara	Pemegang Cabang Kekuasaan Negara	Pasal dalam UUD 1945
1	Majelis Permusyawaratan Rakyat	Mengubah dan menetapkan UUD	Pasal 3
2	Dewan Perwakilan Rakyat	Membentuk undang-undang	Pasal 20
3	Dewan Perwakilan Daerah	Membentuk undang-undang	Pasal 22D
4	Presiden	Memegang kekuasaan pemerintahan	Pasal 4
5	Mahkamah Konstitusi	Kekuasaan kehakiman	Pasal 24 C
6	Mahkamah Agung	Kekuasaan kehakiman	Pasal 24A
7	Komisi Yudisial	Pengusulan pengangkatan hakim agung	Pasal 24B
8	Badan Pemeriksa Keuangan	Pemeriksaan keuangan negara	Pasal 23E

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012

Tabel 1.2. Nomenklatur Kementerian Tahun 2012

No.	Jenis Kementerian	Nomenklatur Kementerian
1.	Kementerian yang melaksanakan Urusan Pemerintahan yang Secara Tegas di sebutkan dalam UUD 1945	a. Kementerian Dalam Negeri b. Kementerian Luar Negeri c. Kementerian Pertahanan
2.	Kementerian yang melaksanakan Urusan Pemerintahan yang ruang lingkupnya di sebutkan dalam UUD 1945	a. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia b. Kementerian Keuangan c. Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral d. Kementerian Perindustrian e. Kementerian Perdagangan f. Kementerian Pertanian g. Kementerian Kehutanan h. Kementerian Perhubungan i. Kementerian Kelautan Dan Perikanan j. Kementerian Tenaga Kerja Dan Tranmigrasi k. Kementerian Pekerjaan Umum l. Kementerian Kesehatan m. Kementerian Pendidikan Nasional n. Kementerian Social o. Kementerian Agama p. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata q. Kementerian Komunikasi dan Informatika



Lanjutan Tabel I.2.

No.	Jenis Kementerian	Nomenklatur Kementerian
3.	Kementerian yang melaksanakan urusan Pemerintahan dalam Rangka Penajaman Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pemerintah	a. Kementerian Riset dan Teknologi b. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah c. Kementerian Lingkungan Hidup d. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak e. Kementerian Perdayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi f. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal g. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional h. Kementerian Badan Usaha Milik Negara i. Kementerian Perumahan Rakyat j. Kementerian Pemuda Dan Olahraga k. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan l. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian m. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat n. Kementerian Sekretariat Negara

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012



Tabel 1.3. Nomenklatur Lembaga Pemerintah Non Kementerian Tahun 2012

No	Lembaga Pemerintah Non Kementerian
1	Lembaga Administrasi Negara
2	Arsip Nasional Republik Indonesia
3	Badan Kepegawaian Negara
4	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
5	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
6	Badan Pusat Statistik
7	Badan Standardisasi Nasional
8	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
9	Badan Tenaga Nuklir Nasional
10	Badan Intelijen Negara
11	Lembaga Sandi Negara
12	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
13	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
14	Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional
15	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
16	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
17	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
18	Badan Koordinasi Penanaman Modal
19	Badan Pertahanan Nasional
20	Badan Pengawasan Obat dan Makanan
21	Lembaga Ketahanan Nasional
22	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
23	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
24	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
25	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
26	Badan SAR Nasional
27	Badan Narkotika Nasional
28	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012





Tabel 1.4. Nomenklatur Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

No	Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara
1	Sekretariat Mahkamah Agung
2	Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat
3	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah
4	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
5	Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan
6	Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
7	Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012

Tabel 1.5. Nomenklatur Lembaga Setingkat Menteri Tahun 2012

No	Lembaga Setingkat Menteri
1	Kejaksaan Agung Republik Indonesia
2	Kepolisian Negara Republik Indonesia
3	Tentara Nasional Republik Indonesia
4	Sekretariat Kabinet

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012

Tabel 1.6. Nomenklatur Lembaga Pemerintah Lainnya Tahun 2012

No	Lembaga Pemerintah Lainnya
1	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
2	Lembaga Penyiaran Publik Republik Indonesia

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012



Tabel 1.7. Nomenklatur Lembaga Non Struktural Tahun 2012

No	Lembaga Non Struktural
1.	Komisi Hukum Nasional
2.	Komisi Kepolisian Nasional
3.	Komisi Pengawas Persaingan Usaha
4.	Komisi Perlindungan Anak Indonesia
5.	Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
6.	Komisi Kejaksaan
7.	Komisi Penanggulangan AIDS Nasional
8.	Komisi Nasional Lanjut Usia
9.	Komisi Penyiaran Indonesia
10.	Komisi Banding Merek
11.	Komisi Banding Paten
12.	Komisi Informasi Pusat
13.	Komisi Pengawas Haji Indonesia
14.	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
15.	Komisi Pemilihan Umum
16.	Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi
17.	Dewan Buku Nasional
18.	Dewan Gula Nasional
19.	Dewan Riset Nasional
20.	Dewan Koperasi Indonesia
21.	Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
22.	Dewan Kelautan Indonesia
23.	Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional
24.	Dewan Pengupahan Nasional
25.	Dewan Ketahanan Pangan
26.	Dewan Energi Nasional
27.	Dewan Pers
28.	Dewan Pertimbangan Presiden
29.	Dewan Sumber Daya Air Nasional
30.	Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Dewan Bebas)
31.	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
32.	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan
33.	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun
34.	Dewan Ketahanan Nasional
35.	Dewan Nasional Perubahan Iklim
36.	Dewan Jaminan Sosial Nasional
37.	Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia
38.	Dewan Penerbangan Antariksa Nasional
39.	Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus
40.	Badan Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu
41.	Badan Kebijakan dan Pengendalian Perumahan dan Pemukiman Nasional
42.	Badan Pendukung Pengembangan System Penyediaan Air Minum
43.	Badan Pengelola Dana Abadi Umat
44.	Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas
45.	Badan Nasional Sertifikasi Profesi
46.	Badan Perlindungan Konsumen Nasional
47.	Badan Pengawas Pemilihan Umum



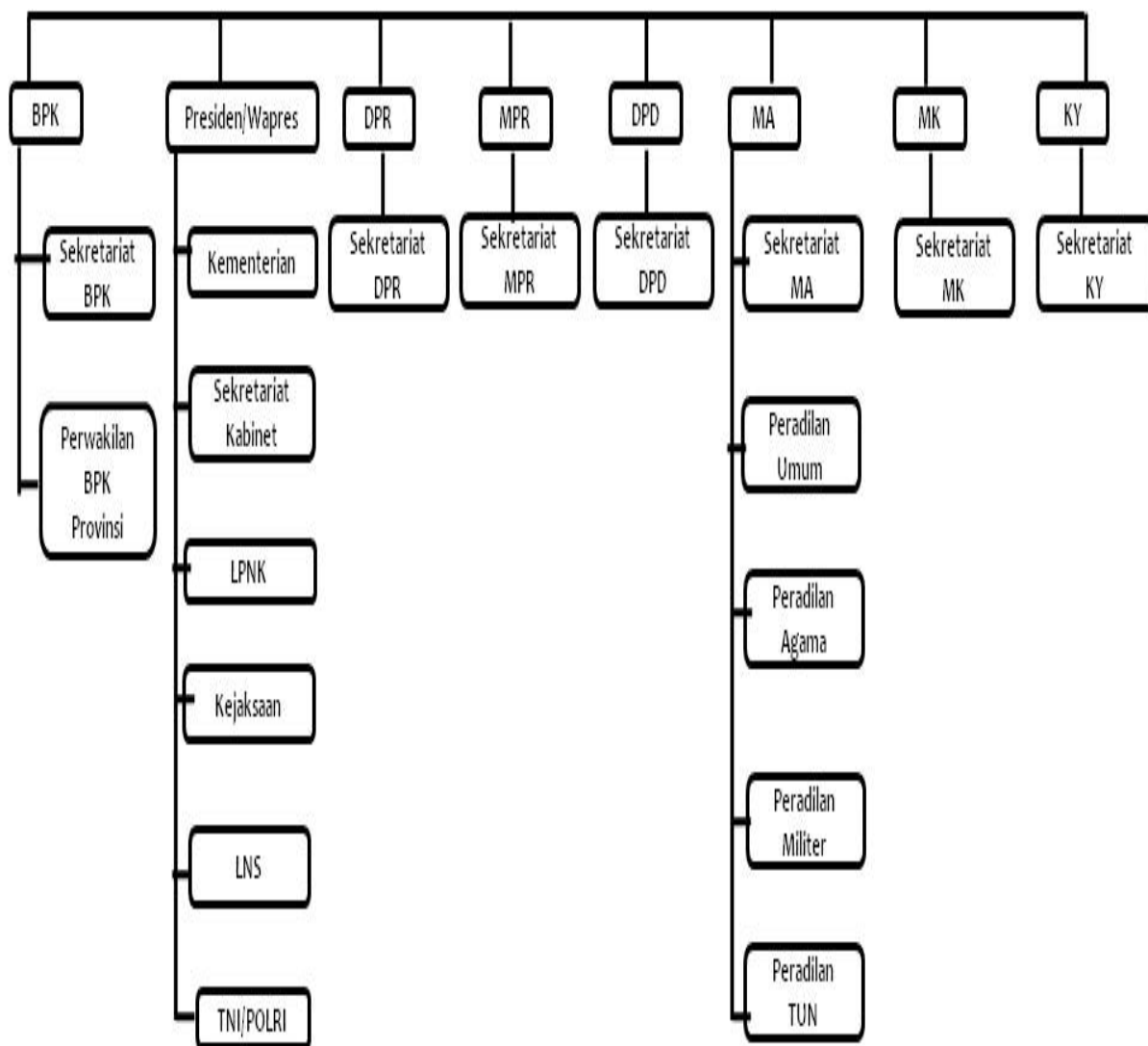
Lanjutan Tabel 1.7.

No	Lembaga Non Struktural
48.	Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura
49.	Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
50.	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
51.	Badan Amil Zakat Nasional
52.	Badan Koordinasi Keamanan Laut
53.	Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik
54.	Badan Standarisasi Dan Akreditasi Nasional Keolahragaan
55.	Badan Olahraga Professional
56.	Badan Nasional Pengelola Perbatasan
57.	Badan Pertimbangan Perfilman Nasional
58.	Badan Pertimbangan Kepegawaian
59.	Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal
60.	Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Sabang
61.	Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
62.	Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun
63.	Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan
64.	Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional
65.	Komite Nasional Keselamatan Transportasi
66.	Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak
67.	Komite Akreditasi Nasional
68.	Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan
69.	Komite Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran
70.	Komite Standar Akuntansi Pemerintah
71.	Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan
72.	Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur
73.	Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (<i>Avian Influenza</i>) Dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemic Influenza
74.	Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Di Pulau Batam, Pulau Bintan, Dan Pulau Karimun
75.	Komite Olahraga Nasional Indonesia
76.	Komite Inovasi Nasional
77.	Lembaga Sensor Film
78.	Lembaga Kerja Sama Tripartit
79.	Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat
80.	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
81.	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
82.	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
83.	Ombudsman Republik Indonesia
84.	Unit Kerja Presiden Untuk Pengawasan Dan Pengendalian Pembangunan
85.	Konsil Kedokteran Indonesia
86.	Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia
87.	Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan
88.	Badan Benih Nasional
89.	Komite Anti Dumping Indonesia
90.	Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012



Gambar 1.1. Peta Kelembagaan Instansi Pemerintah Pusat



Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012



Tabel I.8 Jumlah Pemerintah Kabupaten Tahun 2007-2011

Provinsi	2007	2008	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	18	18	18	18	18
Sumatera Utara	21	23	25	25	25
Sumatera Barat	12	12	12	12	12
Riau	9	9	10	10	10
Kepulauan Riau	4	5	5	5	5
Jambi	9	9	9	9	9
Sumatera Selatan	11	11	11	11	11
Kepulauan Bangka Belitung	6	6	6	6	6
Bengkulu	8	9	9	9	9
Lampung	9	9	12	12	12
DKI Jakarta	1	1	1	1	1
Jawa Barat	17	17	17	17	17
Banten	4	4	4	4	4
Jawa Tengah	29	29	29	29	29
DI Yogyakarta	4	4	4	4	4
Jawa Timur	29	29	29	29	29
Bali	8	8	8	8	8
Nusa Tenggara Barat	7	8	8	8	8
Nusa Tenggara Timur	19	19	20	20	20
Kalimantan Barat	12	12	12	12	12
Kalimantan Tengah	13	13	13	13	13
Kalimantan Selatan	11	11	11	11	11
Kalimantan Timur	10	10	10	10	10
Sulawesi Utara	9	11	11	11	11
Gorontalo	5	5	5	5	5
Sulawesi Tengah	9	10	10	10	10
Sulawesi Selatan	20	21	21	21	21
Sulawesi Barat	5	5	5	5	5
Sulawesi Tenggara	10	10	10	10	10
Maluku	7	9	9	9	9
Maluku Utara	6	6	7	7	7
Papua	20	26	28	28	28
Papua Barat	8	8	10	10	10
Indonesia	370	387	399	399	399

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2012



Tabel I.9 Jumlah Pemerintah Kota Tahun 2007-2011

Provinsi	2007	2008	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	5	5	5	5	5
Sumatera Utara	7	7	8	8	8
Sumatera Barat	7	7	7	7	7
Riau	2	2	2	2	2
Kepulauan Riau	2	2	2	2	2
Jambi	1	2	2	2	2
Sumatera Selatan	4	4	4	4	4
Kepulauan Bangka Belitung	1	1	1	1	1
Bengkulu	1	1	1	1	1
Lampung	2	2	2	2	2
DKI Jakarta	5	5	5	5	5
Jawa Barat	9	9	9	9	9
Banten	3	3	4	4	4
Jawa Tengah	6	6	6	6	6
DI Yogyakarta	1	1	1	1	1
Jawa Timur	9	9	9	9	9
Bali	1	1	1	1	1
Nusa Tenggara Barat	2	2	2	2	2
Nusa Tenggara Timur	1	1	1	1	1
Kalimantan Barat	2	2	2	2	2
Kalimantan Tengah	1	1	1	1	1
Kalimantan Selatan	2	2	2	2	2
Kalimantan Timur	4	4	4	4	4
Sulawesi Utara	4	4	4	4	4
Gorontalo	1	1	1	1	1
Sulawesi Tengah	1	1	1	1	1
Sulawesi Selatan	3	3	3	3	3
Sulawesi Barat	-	-	-	-	-
Sulawesi Tenggara	2	2	2	2	2
Maluku	2	2	2	2	2
Maluku Utara	2	2	2	2	2
Papua	1	1	1	1	1
Papua Barat	1	1	1	1	1
Indonesia	95	96	98	98	98

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2011





Tabel I.10 Daerah Otonom Baru Tahun 1999 - 2008

No.	Provinsi	Jumlah Daerah Otonom Baru			
		Provinsi	Kabupaten	Kota	Total
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	0	10	3	13
2.	Sumatera Utara	0	12	2	14
3.	Sumatera Barat	0	4	1	5
4.	Riau	0	6	1	7
5.	Jambi	0	5	1	5
6.	Sumatera Selatan	0	5	3	8
7.	Bengkulu	0	6	0	6
8.	Lampung	0	6	1	7
9.	Kep. Bangka Belitung	1	4	0	5
10.	Kep. Riau	1	4	2	7
11.	DKI Jakarta	0	0	0	0
12.	Jawa Barat	0	1	4	5
13.	Jawa Tengah	0	0	0	0
14.	Banten	1	0	3	4
15.	Jawa Timur	0	0	1	1
16.	Yogyakarta	0	0	0	0
17.	Bali	0	0	0	0
18.	Nusa Tenggara Barat	0	2	1	3
19.	Nusa Tenggara Timur	0	8	0	8
20.	Kalimantan Barat	0	6	1	7
21.	Kalimantan Tengah	0	8	0	8
22.	Kalimantan Selatan	0	2	1	3
23.	Kalimantan Timur	0	6	1	7
24.	Sulawesi Utara	0	8	0	8
25.	Sulawesi Tengah	0	6	0	6
26.	Sulawesi Selatan	0	3	1	4
27.	Sulawesi Tenggara	0	6	1	7
28.	Gorontalo	1	4	0	5
29.	Sulawesi Barat	1	2	0	3
30.	Maluku	0	7	1	8
31.	Maluku Utara	1	5	2	8
32.	Papua	0	22	0	22
33.	Papua Barat	1	7	1	9
	Total	7	156	32	203

Sumber : Kementerian Dalam Negeri, 2012



Tabel 1.11 Titelatur dan Eselonering pada Kementerian yang melaksanakan Urusan Pemerintahan yang Secara Tegas di sebutkan dalam UUD 1945

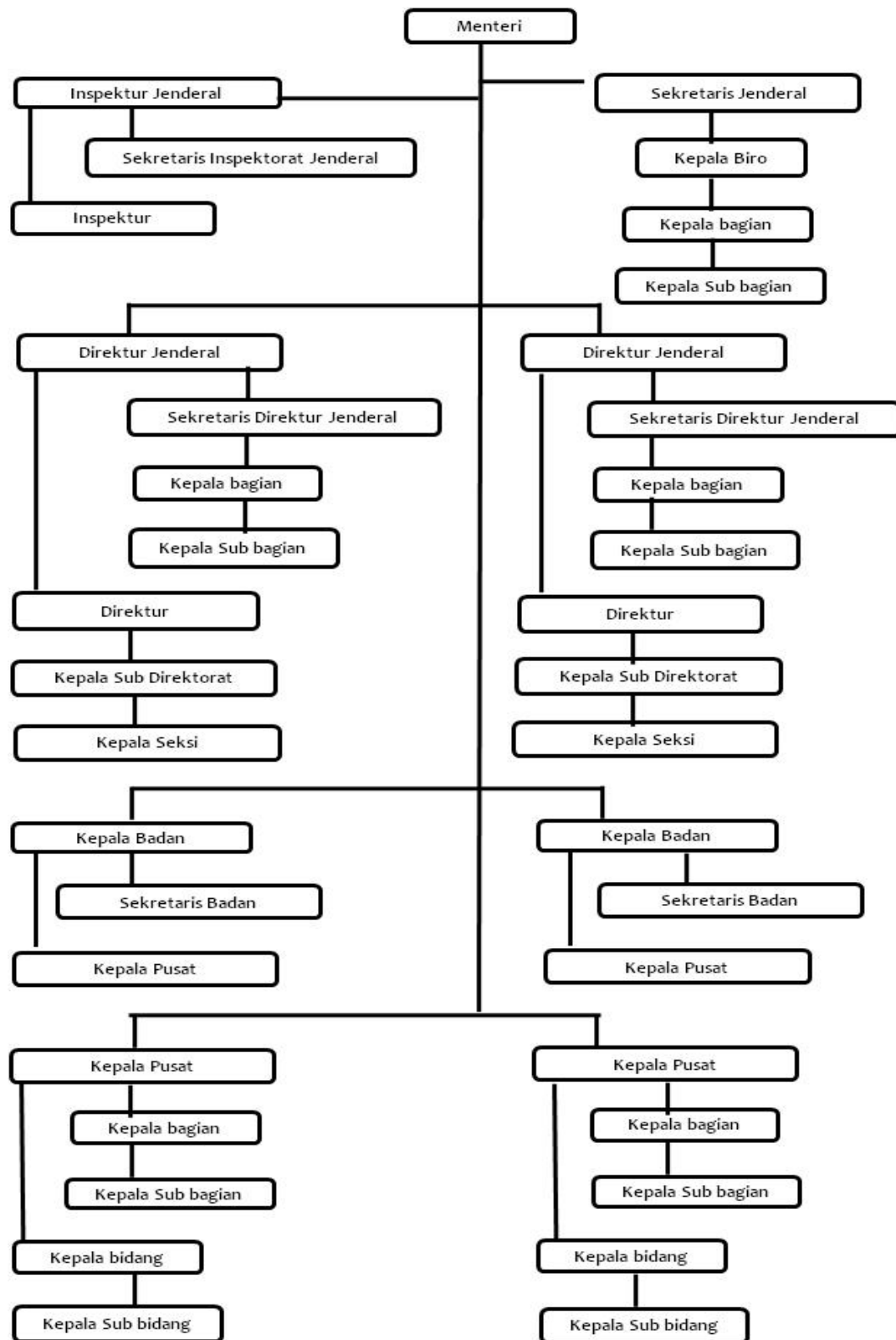
No.	Eselonering	Titelatur
1.	Eselon I	a. Sekretaris jenderal b. Direktur Jenderal c. Kepala badan d. Inspektur jenderal
2.	Eselon II	a. Kepala biro b. Sekretaris direktorat jenderal c. Direktur d. Sekretaris badan e. Kepala pusat f. Sekretaris inspektorat jenderal g. Inspektorat
3.	Eselon III	a. Kepala bagian b. Kepala subdirektorat c. Kepala bidang
4.	Eselon IV	a. Kepala subbagian b. Kepala seksi c. Kepala subbidang

Sumber : Kementerian Pan dan RB, 2012





Gambar 1.2. Titeltatur dan Eselonering pada Kementerian yang melaksanakan Urusan Pemerintahan yang Secara Tegas di sebutkan dalam UUD 1945



Sumber : Kementerian Pan dan RB, 2012



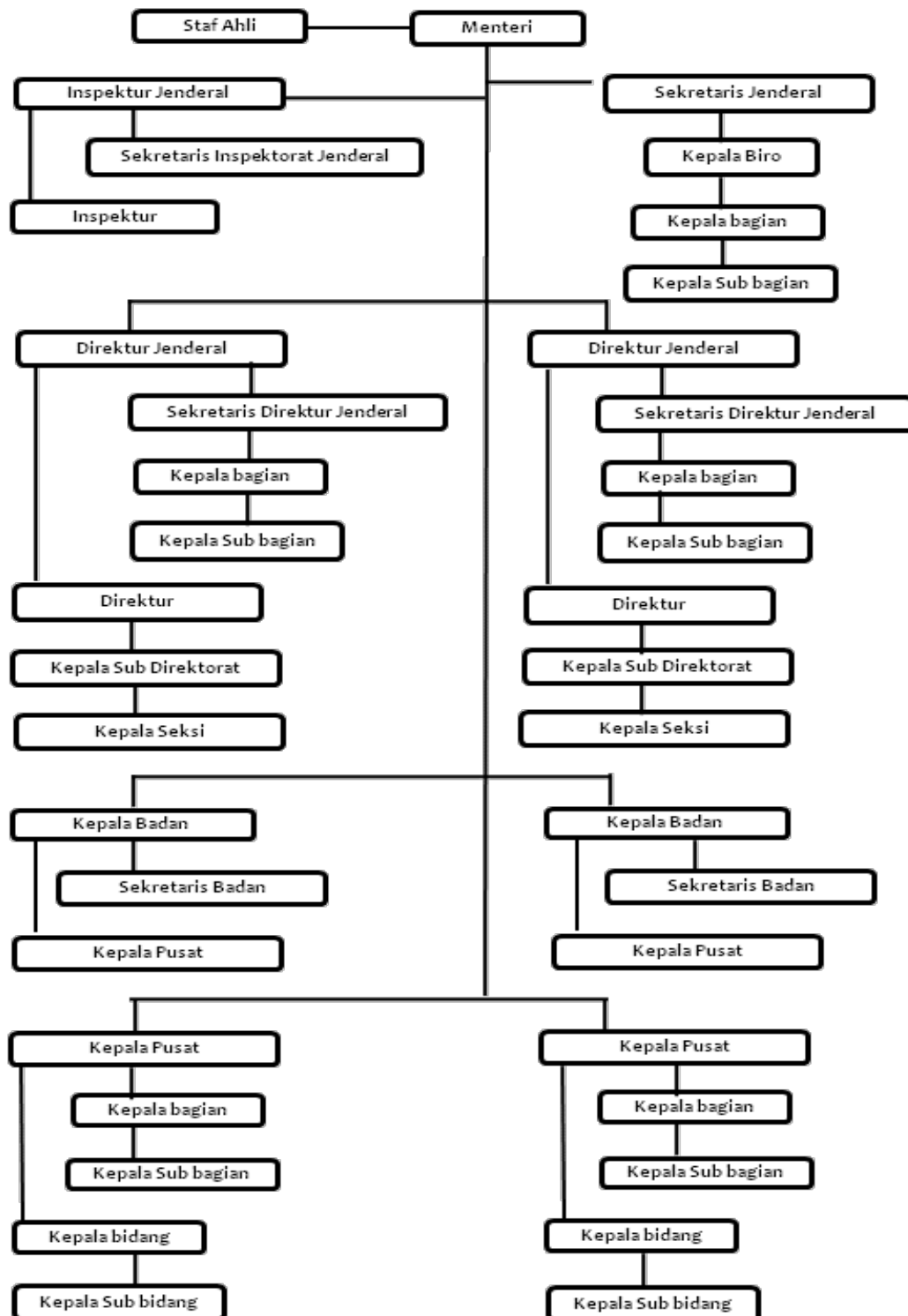
Tabel 1.12 Titelatur dan Eselonering pada Kementerian yang melaksanakan Urusan Pemerintahan yang ruang lingkupnya di sebutkan dalam UUD 1945

No.	Eselonering	Titelatur
1.	Eselon I	a. Sekretaris jenderal b. Direktur jenderal c. Kepala badan d. Inspektur jenderal e. Staf ahli
2.	Eselon II	a. Kepala biro b. Sekretaris direktorat jenderal c. Direktur d. Sekretaris badan e. Kepala pusat f. Sekretaris inspektorat jenderal g. Inspektur
3.	Eselon III	a. Kepala bagian b. Kepala subdirektorat c. Kepala bidang
4.	Eselon IV	a. Kepala subbagian b. Kepala seksi c. Kepala subbidang

Sumber : Kementerian Pan dan RB, 2012



Gambar 1.3. Titeltatur dan Eselonering pada Kementerian yang melaksanakan Urusan Pemerintahan yang ruang lingkupnya di sebutkan dalam UUD 1945



Sumber : Kementerian Pan dan RB, 2012

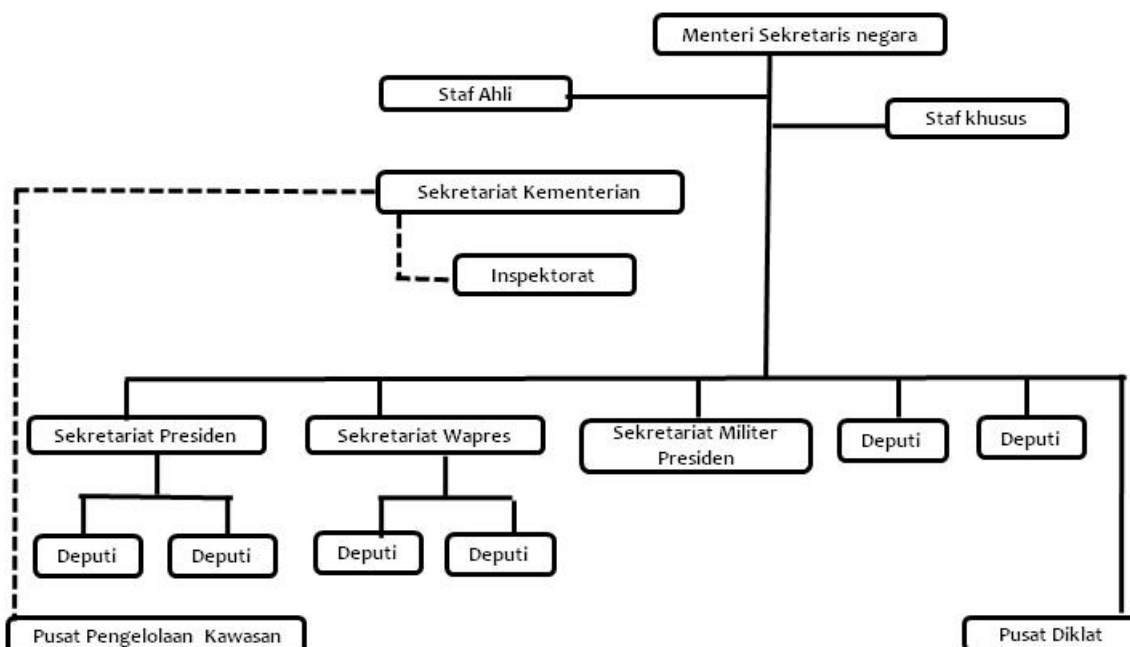


Tabel 1.13 Titelatur dan Eselonering pada Kementerian yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dalam Rangka Penajaman Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pemerintah (Kementerian Kesekretariatan Negara)

No.	Eselonering	Titelatur
1.	Eselon I	a. Kepala rumah tangga Kepresidenan b. Sekretaris wakil presiden c. Sekretaris militer d. Sekretaris menteri sekretaris negara e. Deputi di lingkungan rumah tangga Kepresidenan, sekretariat wakil presiden, dan sekretariat Negara f. Staf ahli
2.	Eselon II	a. Kepala biro b. Kepala pusat
3.	Eselon III	a. Kepala bagian b. Kepala bidang c. Kepala istana d. Kepala unit
4.	Eselon IV	a. Kepala subbagian b. Kepala subbidang

Sumber : Kementerian Pan dan RB, 2012

Gambar 1.4 Titelatur dan Eselonering pada Kementerian yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dalam Rangka Penajaman Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pemerintah (Kementerian Kesekretariatan Negara)



Sumber : Kementerian Pan dan RB, 2012



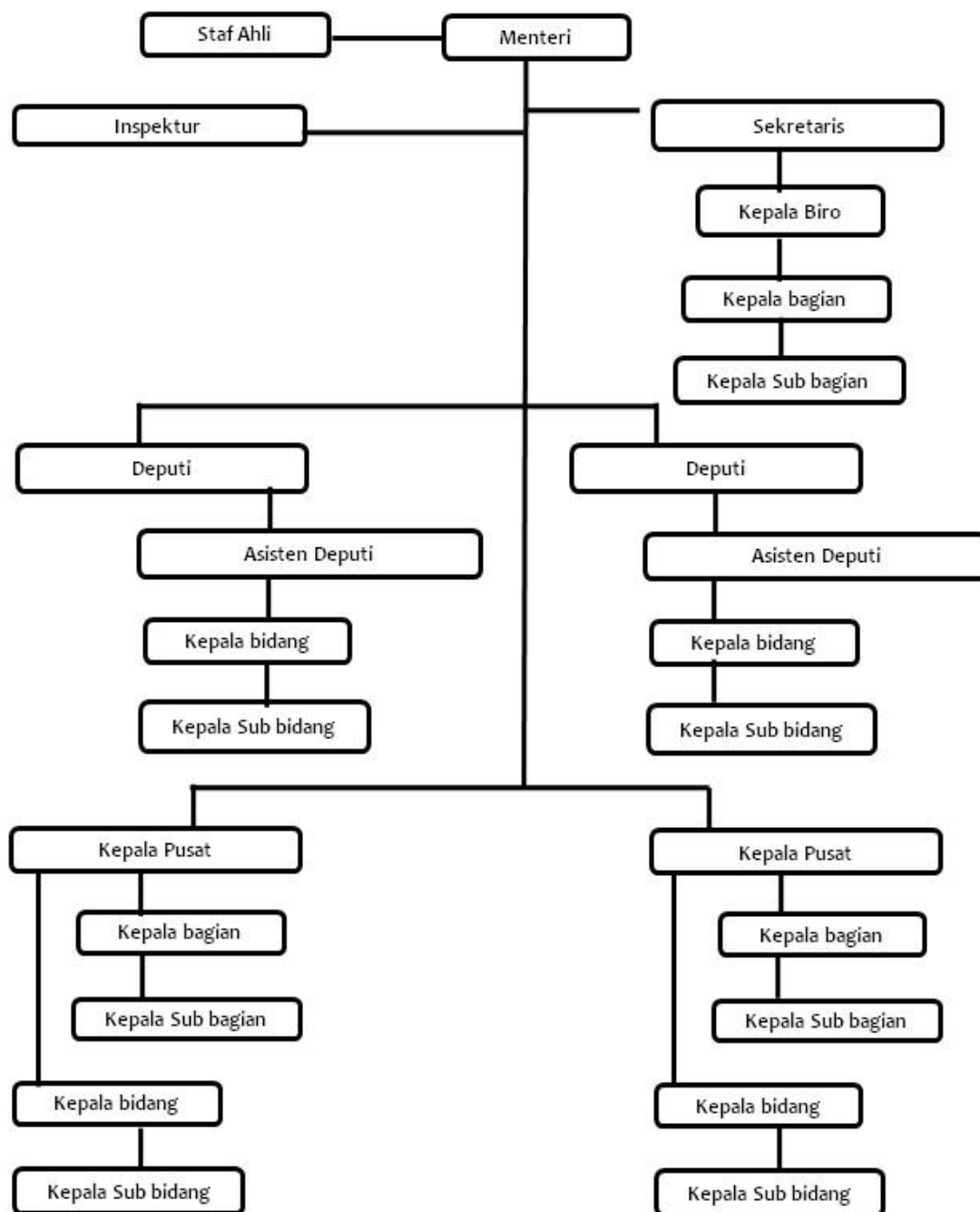
Tabel 1.14 Titeltur dan Eslonering pada Kementerian yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dalam Rangka Penajaman Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pemerintah

No.	Eslonering	Titeltur
1.	Eslon I	a. Sekretaris Kementerian b. Deputi c. Staf ahli
2.	Eslon II	a. Kepala biro b. Asisten deputi c. Kepala pusat c. Inspektur
3.	Eslon III	a. Kepala bagian e. Kepala bidang
4.	Eslon IV	a. Kepala subbagian b. Kepala subbidang

Sumber : Kementerian Pan dan RB, 2012



Gambar 1.5 Titelatur dan Eselonering pada Kementerian yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dalam Rangka Penajaman Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pemerintah



Sumber : Kementerian Pan dan RB, 2012

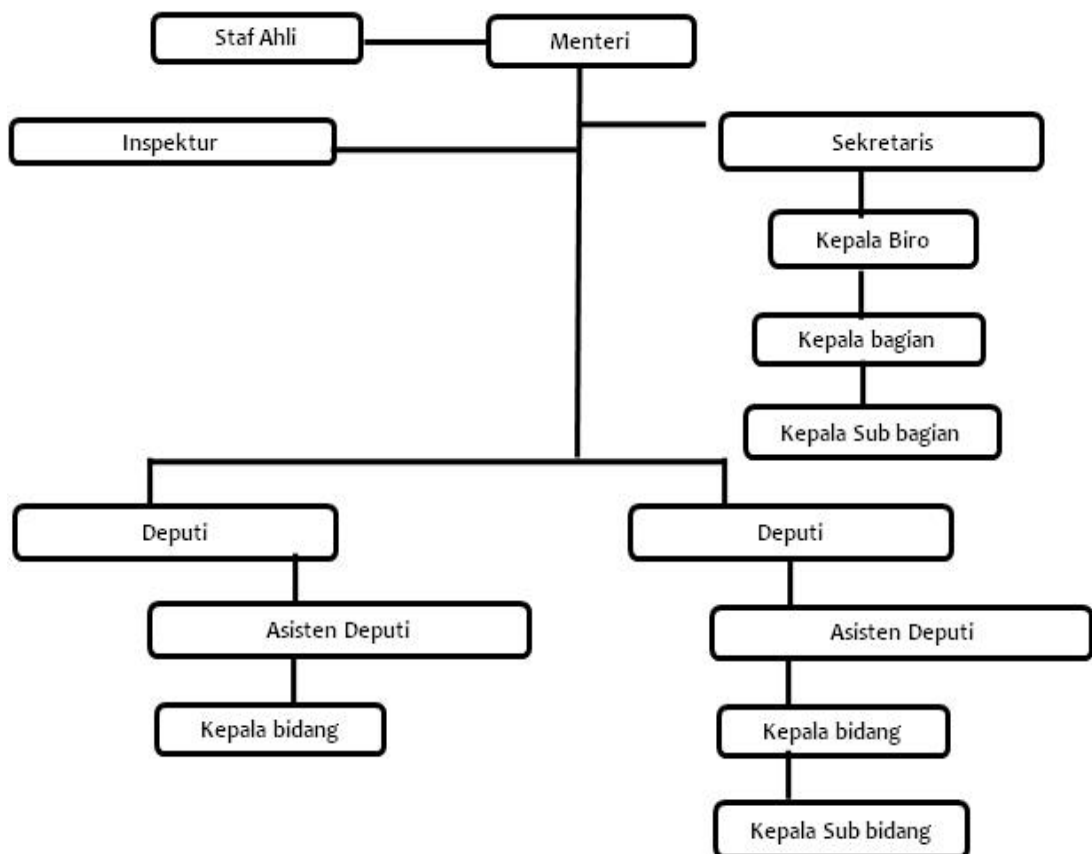


Tabel 1.15 Titeltur dan Eselonering pada Kementerian yang dibentuk untuk keperluan Sinkronisasi dan Koordinasi Urusan Kementerian

No.	Eselonering	Titeltur
1.	Eselon I	a. Sekretaris Kementerian koordinator b. Deputi c. Staf ahli
2.	Eselon II	a. Kepala biro b. Asisten deputi c. Inspektur
3.	Eselon III	a. Kepala bagian b. Kepala bidang
4.	Eselon IV	a. Kepala subbagian b. Kepala subbidang

Sumber : Kementerian Pan dan RB, 2012

Gambar 1.6 Titeltur dan Eselonering pada Kementerian yang dibentuk untuk keperluan Sinkronisasi dan Koordinasi Urusan Kementerian



Sumber : Kementerian Pan dan RB, 2012



Tabel I.16 Titelatur dan Eselonering pada Lembaga Pemerintah Non Kementerian

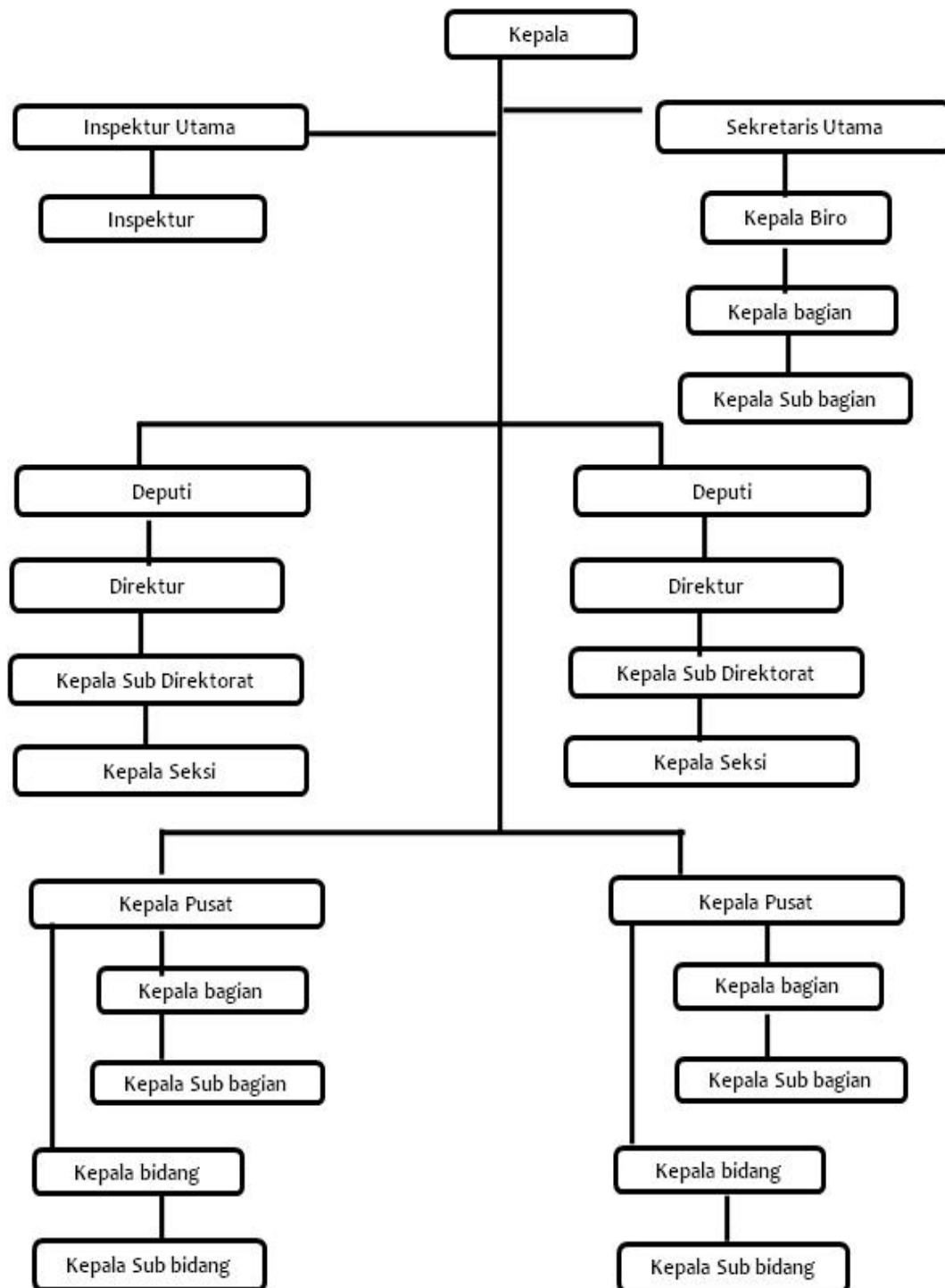
No.	Eselonering	Titelatur
1.	Eselon I	a. Kepala b. Gubernur (Lemhanas) c. Wakil gubernur (Lemhanas) d. Deputi e. Inspektur utama f. Sekretaris utama
2.	Eselon II	a. Kepala biro b. Direktur c. Kepala pusat d. Inspektur
3.	Eselon III	a. Kepala bagian b. Kepala subdirektorat c. Kepala bidang
4.	Eselon IV	a. Kepala subbagian b. Kepala seksi c. Kepala subbidang

Sumber : Kementerian Pan dan RB, 2012





Gambar 1.7. Titeltatur dan Eselonering pada Lembaga Pemerintah Non Kementerian



Sumber : Kementerian Pan dan RB, 2012

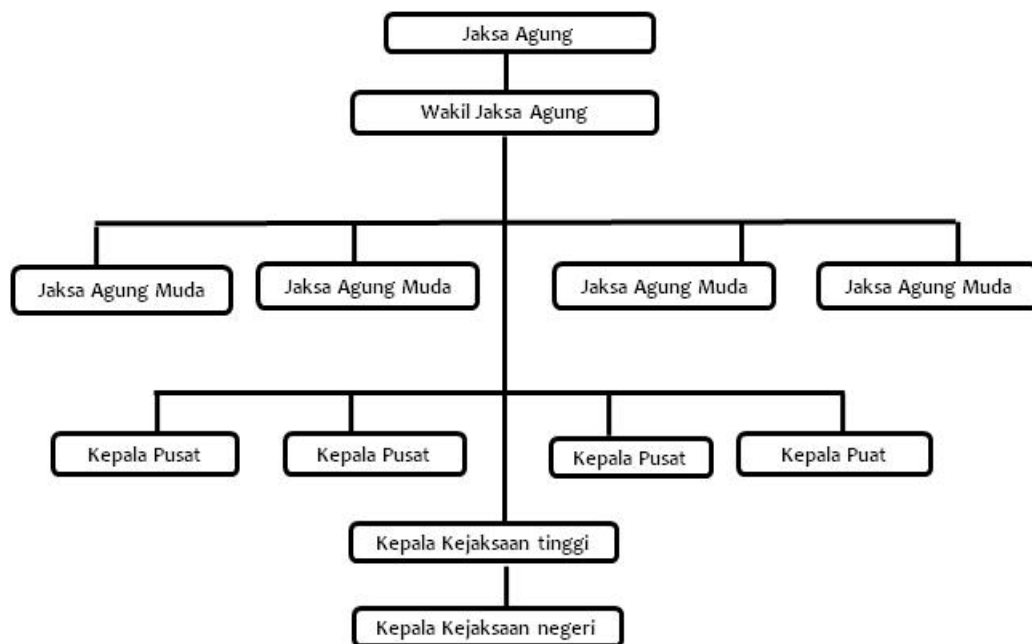


Tabel 1.17 Titelatur dan Eselonering pada Lembaga yang dipimpin pejabat setingkat menteri (Kejaksaan Agung)

No.	Eselonering	Titelatur
1.	Eselon I	a. Wakil jaksa agung b. Jaksa agung muda c. Staf ahli
2.	Eselon II	a. Sekretaris jaksa agung muda b. Kepala biro c. Direktur d. Kepala Pusat e. Inspektur Instansi vertikal: a. Kepala kejaksaan tinggi b. Wakil kepala kejaksaan tinggi
3.	Eselon III	a. Kepala Bagian b. Kepala Subdirektorat d. Inspektur Pembantu Instansi vertikal: a. Kepala kejaksaan negeri type a b. Kepala bagian pada kejaksaan tinggi c. Asisten pada kejaksaan tinggi d. Kepala kejaksaan negeri type b Di lingkungan kejaksaan tinggi, dibentuk juga jabatan tenaga pengkaji
4.	Eselon IV	a. Kepala Subbagian b. Kepala seksi c. Kepala subbidang d. Pemeriksa Instansi vertikal: a. Kepala cabang kejaksaan negeri b. Kepala subbagian c. Kepala seksi
5.	Eselon V	Instansi vertikal: a. Kepala urusan b. Kepala sub seksi

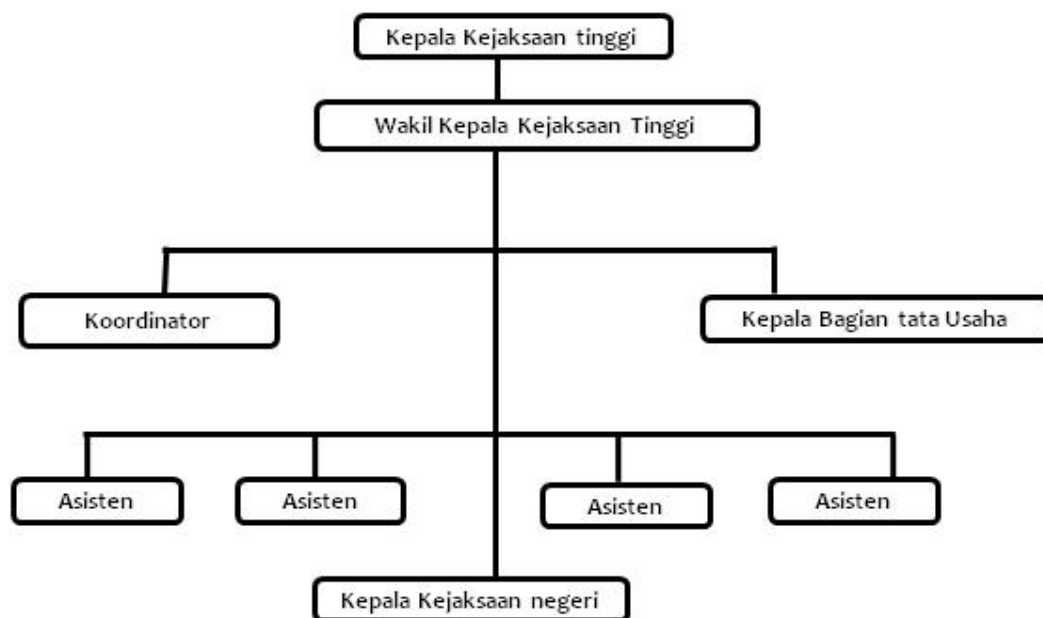
Sumber : Kementerian Pan dan RB, 2012

Gambar 1.8. Titeltatur dan Eselonering pada Kejaksaan Agung



Sumber : Kementerian Pan dan RB, 2012

Gambar 1.9. Titeltatur dan Eselonering pada Kejaksaan Tinggi



Sumber : Kementerian Pan dan RB, 2012



Tabel I.18 Titelatur dan Eselonering pada Lembaga yang dipimpin pejabat setingkat menteri (Kepolisian RI)

No.	Eselonering	Titelatur
1.	Eselon I	a. Wakil kepala kepolisian Negara b. Republik Indonesia (wakapolri); c. Inspektur (irwasum); d. Kepala badan; e. Deputi kapolri; f. Kepala badan; g. Wakil inspektur; h. Kepala sekolah staf dan pimpinan i. Kepolisian; j. Gubernur (PTIK dan AKPOL); k. Kepala lembaga (Lemdiklat); l. Kepala divisi; m. Wakil kepala badan; n. Kepala korps (Korbrimob).
2.	Eselon II	a. Kapolda ; b. Wakil kepala divisi; c. Kepala biro; d. Kepala pusat ; e. Direktur; f. Insvektur wilayah; g. Kepala sekolah (Selapa dan secapa); h. Kepala rumah sakit polri; i. Kepala detasemen (Densus 88); j. Kepala bagian; k. Instruktur bidang.
3.	Eselon III	a. Kepala bagian; b. Kepala sub direktorat; c. Kepala bidang.
4.	Eselon IV	a. Kepala subbagian; b. Kepala seksi; c. Kepala subbidang .
5.	Eselon V	a. Kepala urusan; b. Kepala Subseksi

Sumber : Kementerian Pan dan RB, 2012

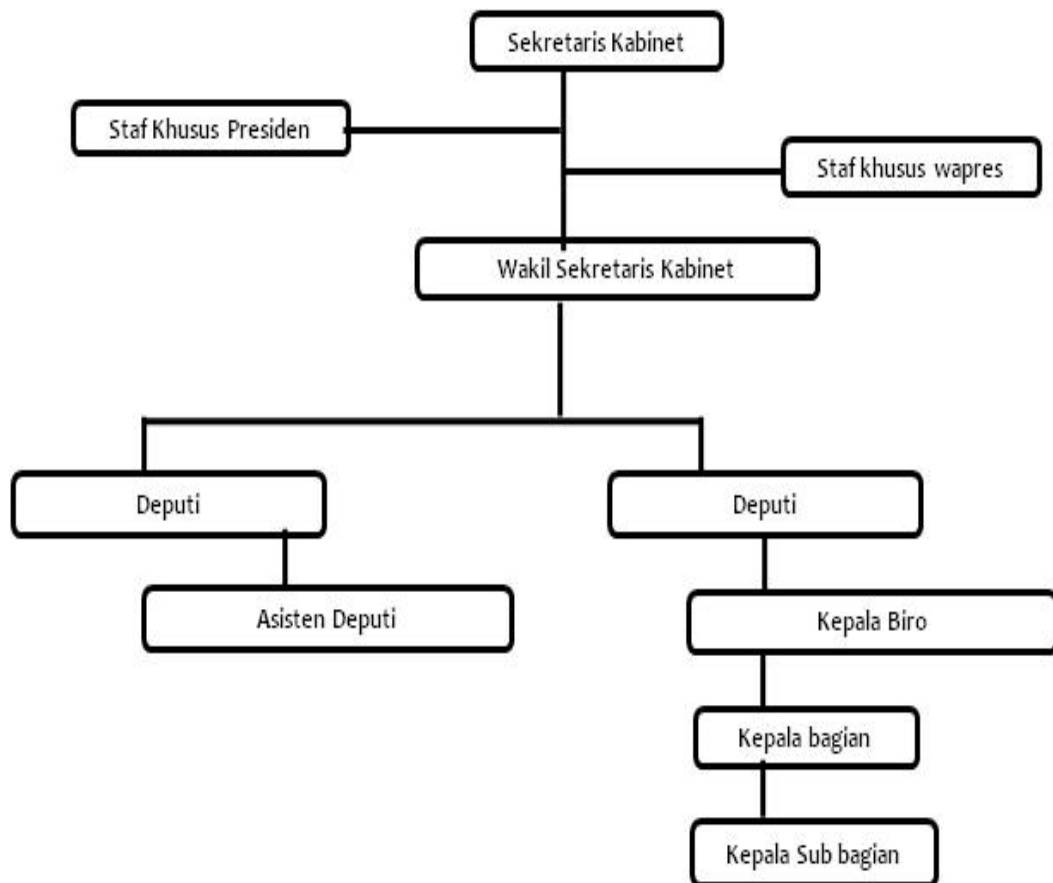


Tabel I.19 Titeltatur dan Eselonering pada Lembaga yang dipimpin pejabat setingkat menteri (Sekretariat Kabinet)

No.	Eselonering	Titeltatur
1.	Eselon I	a. Wakil Sekretaris Kabinet; b. Deputi ; c. Staf ahli .
2.	Eselon II	a. Kepala Biro
3.	Eselon III	a. Kepala bagian
4.	Eselon IV	a. Kepala subbagian.

Sumber : Kementerian Pan dan RB, 2012

Gambar 1.10. Titeltatur dan Eselonering pada Lembaga yang dipimpin pejabat setingkat menteri (Sekretariat Kabinet)



Sumber : Kementerian Pan dan RB, 2012

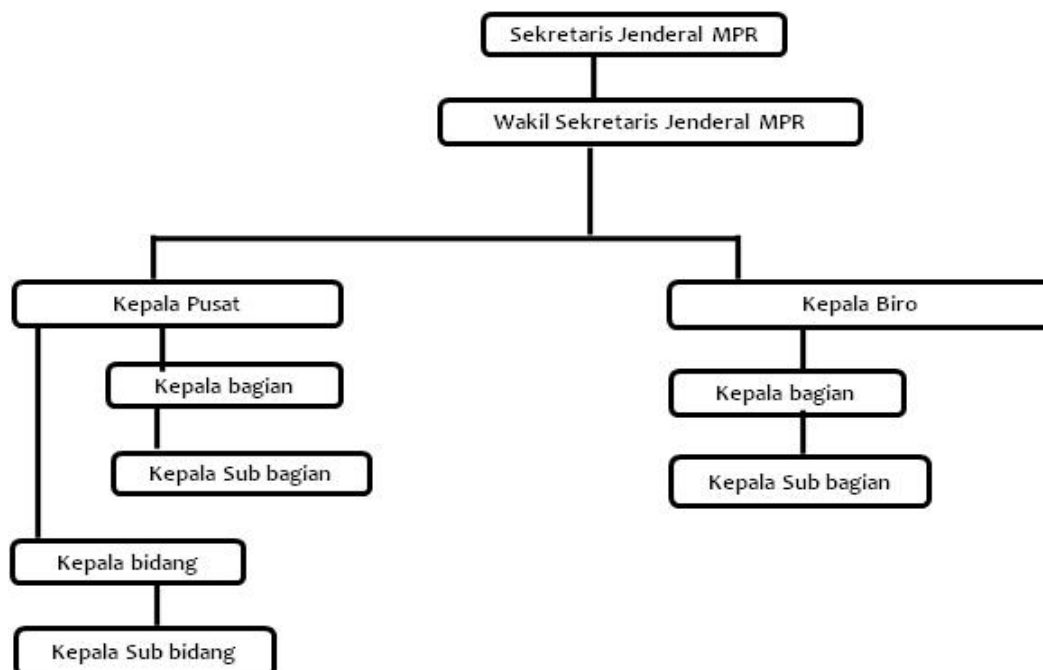


Tabel 1.20 Titelatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat)

No.	Eselonering	Titelatur
1.	Eselon I	a. Sekretaris Jenderal MPR RI b. Wakil Sekretaris Jenderal
2.	Eselon II	a. Kepala Biro b. Kepala Pusat
3.	Eselon III	a. Kepala Bagian b. Kepala Bidang
4.	Eselon IV	a. Kepala Subbagian b. Kepala Subbidang

Sumber : Kementerian Pan dan RB, 2012

Gambar 1.11. Titelatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat)



Sumber : Kementerian Pan dan RB, 2012

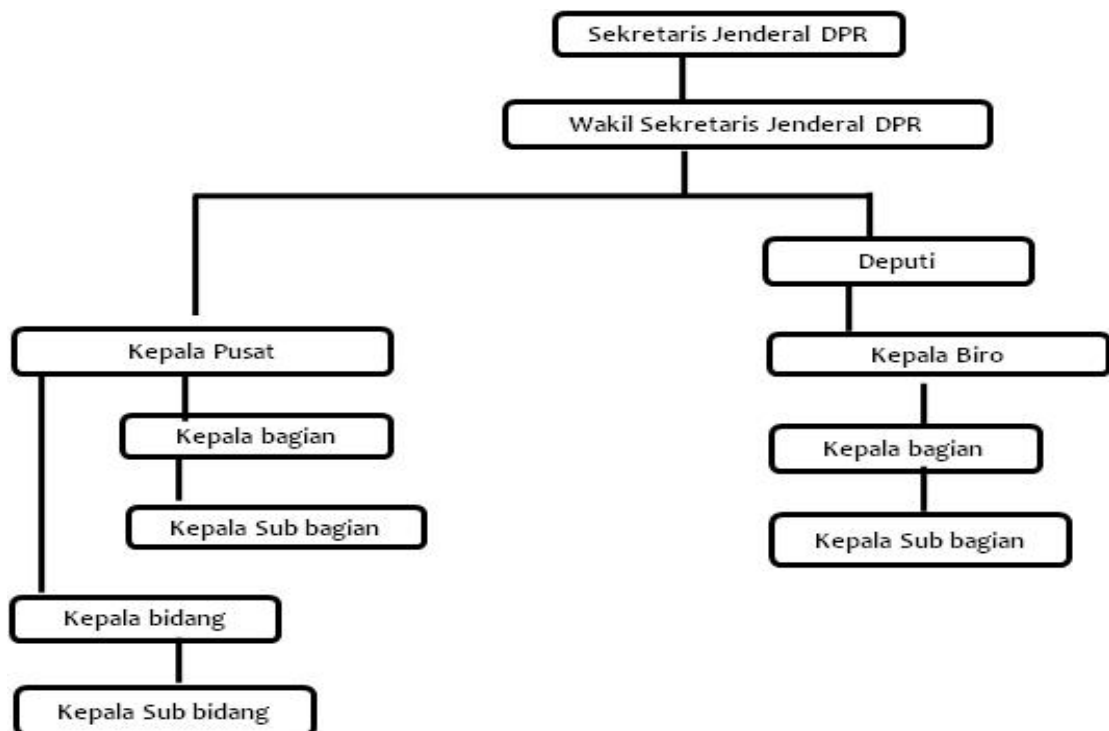


Tabel 1.21 Titeltatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat)

No.	Eselonering	Titeltatur
1.	Eselon I	a. Sekretariat Jenderal DPR RI b. Wakil Sekretaris Jenderal c. Deputi
2.	Eselon II	a. Kepala Biro b. Kepala Pusat
3.	Eselon III	a. Kepala Bagian b. Kepala bidang
4.	Eselon IV	a. Kepala Subbagian b. Kepala Subbidang

Sumber : Kementerian Pan dan RB, 2012

Gambar 1.12. Titeltatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat)



Sumber : Kementerian Pan dan RB, 2012

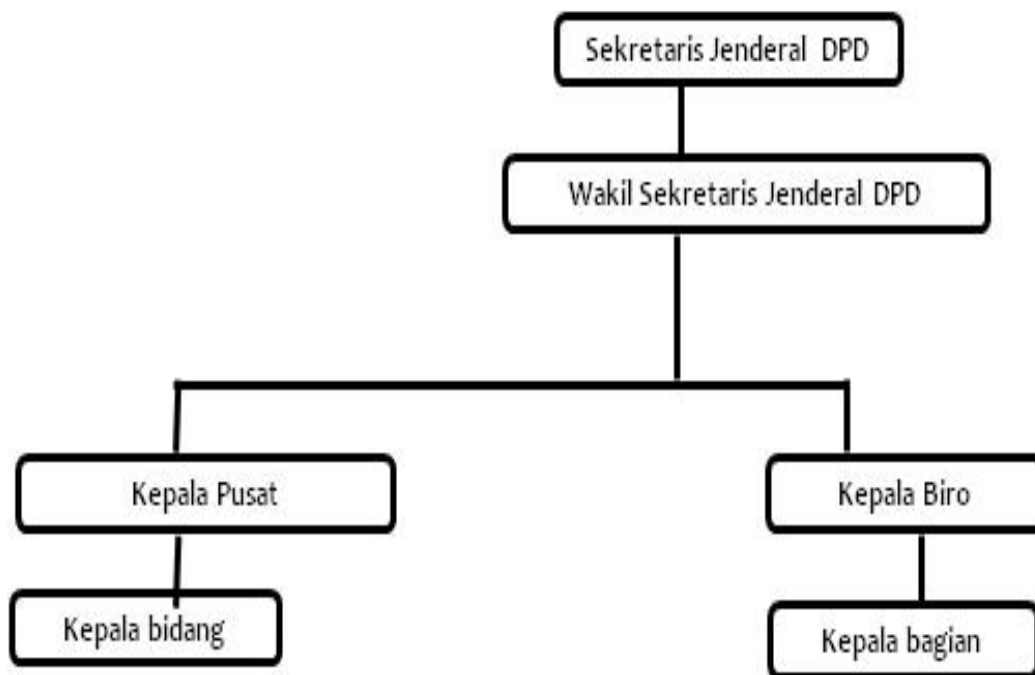


Tabel 1.22 Titelatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah)

No.	Eselonering	Titelatur
1.	Eselon I	a. Sekretaris Jenderal
2.	Eselon II	a. Kepala Biro b. Kepala Pusat
3.	Eselon III	a. Kepala Bagian b. Kepala Bidang
4.	Eselon IV	a. Kepala Subbagian

Sumber : Kementerian Pan dan RB, 2012

Gambar 1.13. Titelatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah)



Sumber : Kementerian Pan dan RB, 2012



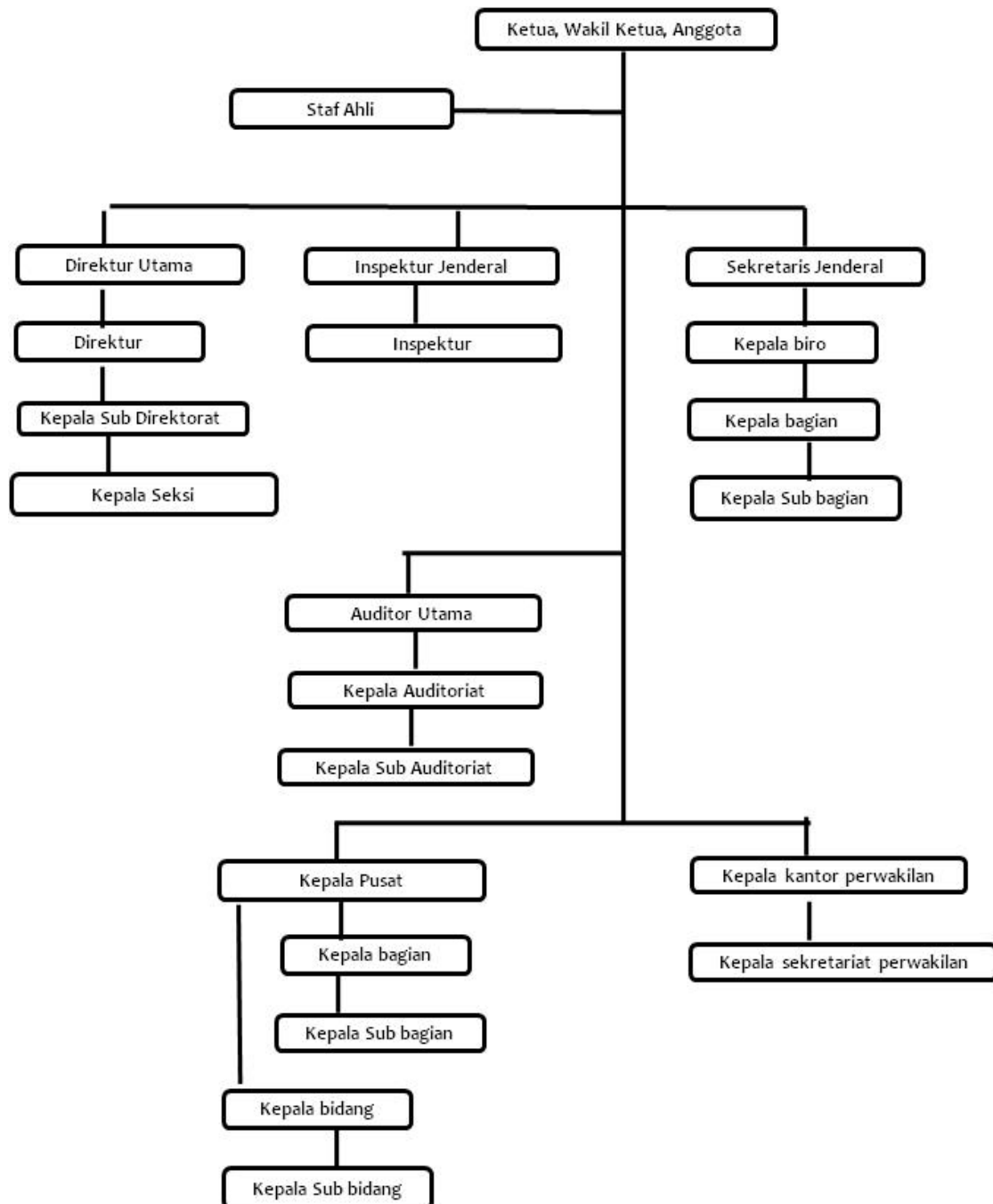
Tabel 1.23 Titeltur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan)

No.	Eselonering	Titeltur
1.	Eselon I	a. Sekretaris Jenderal b. Inspektur Jenderal c. Direktur Utama d. Auditor Utama e. Staf Ahli
2.	Eselon II	a. Kepala Biro b. Inspektur c. Direktur d. Kepala Pusat e. Kepala Auditorat Kepala Kantor Perwakilan
3.	Eselon III	a. Kepala Bagian b. Kepala Bidang c. Kepala Subdirektorat d. Kepala Sekretariat Perwakilan
4.	Eselon IV	a. Kepala Subbagian b. Kepala Subbidang c. Kepala Seksi

Sumber : Kementerian Pan dan RB, 2012



Gambar 1.14 Titeltatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan)



Sumber : Kementerian Pan dan RB, 2012



Tabel I.24 Titeltur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Kesekretariatan Mahkamah Agung)

No.	Eselonering	Titeltur
1.	Eselon I	a. Sekretaris b. Direktur Jenderal c. Kepala Badan
2.	Eselon II	a. Kepala Biro b. Sekretaris Direktorat Jenderal c. Direktur d. Sekretaris Badan e. Kepala Pusat Insansi vertikal (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) : a. Sekretaris Pada Pengadilan Tinggi Tipe A, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Tinggi TUN b. Sekretaris Pada Pengadilan Tinggi , Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan TUN Tipe A c. Wakil Sekretaris Pada Pengadilan Tinggi TUN
3.	Eselon III	a. Kepala Bagian b. Kepala Bidang c. Kepala Subdirektorat Insansi vertikal (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) : a. Wakil Sekretaris Pada pengadilan Tinggi Tipe A, Pengadilan Tinggi b. Sekretaris Pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer Kelas A, Pengadilan TUN Tipe A c. Wakil Sekretaris Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus , Pengadilan Negeri Kelas IA, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan TUN Tipe A Sekretaris Pada Pengadilan Negeri Kelas IB, Pengadilan Agama Kelas IA, Pengadilan Militer Kelas B, Pengadilan TUN tipe B



Lanjutan Tabel I.24

No.	Eselonering	Titelatur
4.	Eselon IV	a. Kepala Subbagian b. Kepala Subbidang c. Kepala seksi Instansi vertikal (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) : a. Kepala Subbagian b. Sekretaris Pengadilan Negeri Kelas II, Pengadilan Agama Kelas IB c. Wakil Sekretaris Pengadilan Negeri Kelas IB, Pengadilan Agama Kelas IA d. Kepala Subbagian pada Pengadilan Agama Kelas IA, Pengadilan Militer Kelas B e. Sekretaris Pada Pengadilan Agama Kelas II f. Wakil Sekretaris Pada Pengadilan Agama Kelas IB
5.	Eselon V	Instansi vertikal (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) : a. Wakil Sekretaris Pada Pengadilan Agama Kelas II b. Kepala Subbagian Pada Pengadilan Agama Kelas IB c. Kepala Urusan Pada Pengadilan Negeri Kelas II, Pengadilan Agama Kelas II

Sumber : Kementerian Pan dan RB, 2012

Tabel I.25 Titelatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sekretariat Panitera Mahkamah Agung)

No.	Eselonering	Titelatur
1.	Eselon I	
2.	Eselon II	a. Sekretaris Panitera
3.	Eselon III	a. Kepala Bagian
4.	Eselon IV	a. Kepala Subbagian

Sumber : Kementerian Pan dan RB, 2012

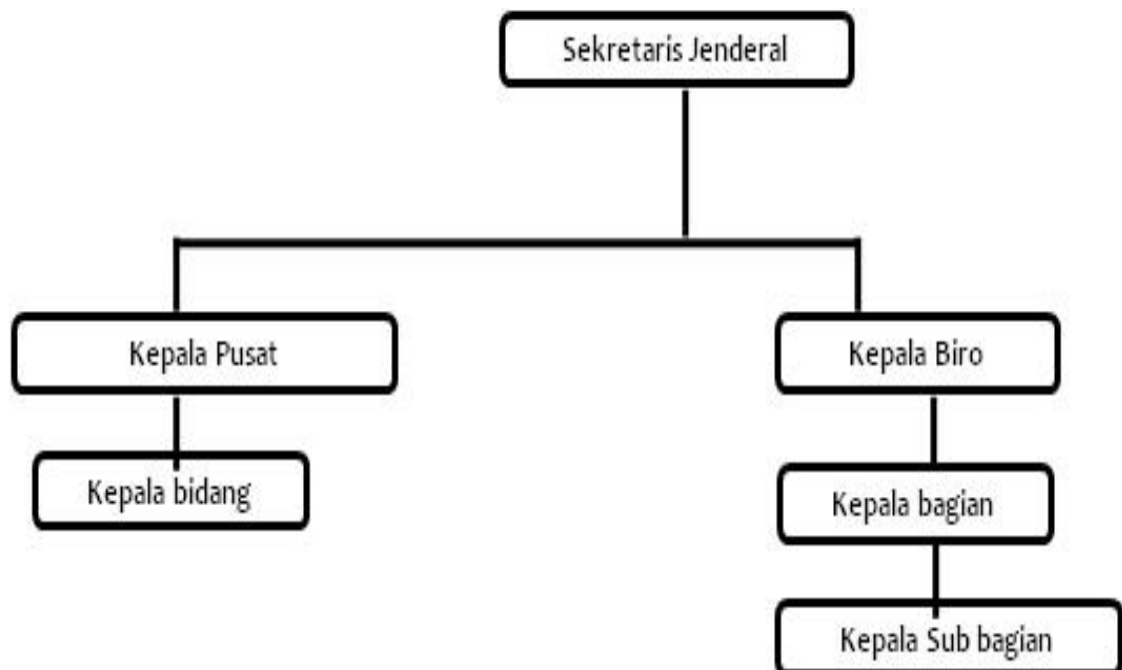


Tabel 1.26 Titeltur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi)

No.	Eselonering	Titeltur
1.	Eselon I	a. Sekretaris Jenderal
2.	Eselon II	a. Kepala Biro b. Kepala Pusat
3.	Eselon III	a. Kepala Bagian b. Kepala Bidang
4.	Eselon IV	a. Kepala Subbagian

Sumber : Kementerian Pan dan RB, 2012

Gambar 1.15 Titeltur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi)



Sumber : Kementerian Pan dan RB, 2012

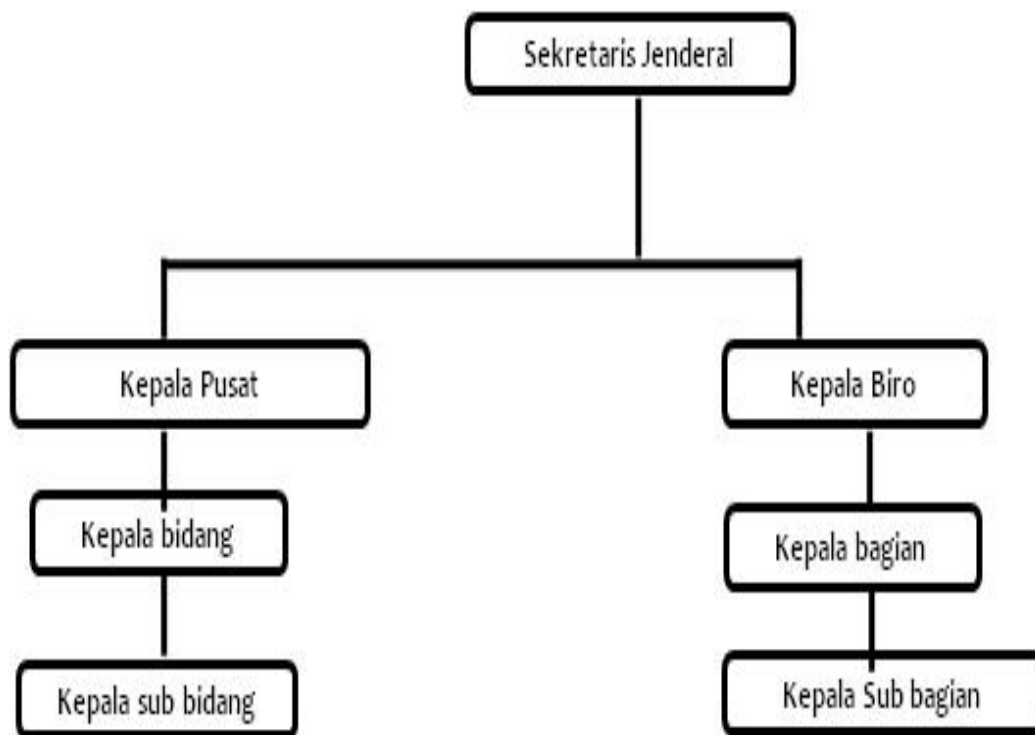


Tabel 1.27 Titeltatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial)

No.	Eselonering	Titeltatur
1.	Eselon I	a. Sekretaris Jenderal
2.	Eselon II	a. Kepala Biro b. Kepala Pusat
3.	Eselon III	a. Kepala Bagian b. Kepala Bidang
4.	Eselon IV	a. Kepala Subbagian b. Kepala Subbidang

Sumber : Kementerian Pan dan RB, 2012

Gambar 1.16. Titeltatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial)



Sumber : Kementerian Pan dan RB, 2012



Tabel I.28 Titelatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Non Struktural

No.	Eselonering	Titelatur
1.	Eselon I	a. Sekretaris Jenderal b. Kepala Pelaksana Harian c. Deputi (Khusus Wantanas) d. Pembantu Deputi (setinggi-tingginya Eselon I.b dan Serendah-rendahnya eselon II.a) (Khusus Wantanas) e.
2.	Eselon II	a. Sekretaris , Untuk Sekretaris LNS eselon II; b. Kepala Biro c. Inspektur d. Kepala Pusat
3.	Eselon III	a. Sekretaris, Untuk Sekretariat LNS eselon III; b. Kepala Bagian c. Kepala Bidang d.
4.	Eselon IV	a. Kepala Subbagian b. Kepala Subbidang

Sumber : Kementerian Pan dan RB, 2012



Tabel 1.29 Nomenklatur dan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Khusus

No.	Instansi Pembina	Nama Jabatan Fungsional Khusus
1.	Kementerian Dalam Negeri	a. Pengawas penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah
2.	Kementerian Luar Negeri	a. Diplomat
3.	Kementerian Pertahanan	a. Kataloger
4.	Kementerian Hukum dan Ham	a. Pemeriksa Merek b. Pemeriksa Paten c. Perancang Peraturan Perundang-undangan
5.	Kementerian Keuangan	a. Penilai Pajak Bumi dan Bangunan b. Pemeriksa Bea dan Cukai c. Pemeriksa Pajak d. Penyuluh Pajak
6.	Kementerian ESDM	a. Pengamat Gunung Api b. Penyelidik Bumi c. Inspektur Ketenaga Listrik d. Inspektur Tambang e. Inspektur Gas dan Minyak Bumi
7.	Kementerian Perindustrian	a. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan
8.	Kementerian Perdagangan	a. Penguji Mutu Barang b. Penera
9.	Kementerian Pertanian	a. Medik Veteriner b. Paramedik Veteriner c. Pengawas Benih Tanaman d. Pengawas Bibit Ternak e. Pengawas Mutu Hasil Pertanian f. Pengawas Mutu Pakan g. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan h. Penyuluh Pertanian i. Analis Pasar Hasil Pertanian
10.	Kementerian Kehutanan	a. Penyuluh Kehutanan b. Polisi Kehutanan c. Pengendali Ekosistem Hutan
11.	Kementerian Perhubungan	a. Pengendali Frekuensi Radio b. Teknisi Penerbangan c. Pengawas Keselamatan Pelayaran d. Penguji Kendaraan Bermotor
12.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	a. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan b. Pengawas Perikanan (Penggabungan dgn Pengawas Benih ikan) c. Penyuluh Perikanan
13.	Kementerian Tenaga Kerja	a. Pengawas KetenagaKerjaan b. Instruktur c. Mediator Hubungan Industrial Pengantar Kerja d. Penggerak Swadaya Masyarakat



Lanjutan Tabel I.29.

No.	Instansi Pembina	Nama Jabatan Fungsional Khusus
14.	Kementerian Pekerjaan umum	a. Teknik Pengairan b. Teknik Penyehatan lingkungan c. Teknik Jalan dan Jembatan d. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan e. Penata Ruang
15.	Kementerian Kesehatan	a. Administrator Kesehatan b. Apoteker c. Asisten poteker d. Bidan e. Dokter f. Dokter Gigi g. Epidiomolog Kesehatan h. Entomolog Kesehatan i. Fisioterafis j. Fisikawan Medis k. Nutrisionis l. Okupasi Terapis m. Ortosis Prostetis n. Penyuluh Kesehatan Masyarakat o. Perawat p. Perawat Gigi q. Perekam Medis r. Pranata Laboratorium Kesehatan s. Psikolog Klinis t. Radiografer u. Refraksionis Optisen v. Sanitarian w. Teknisi Elektromedis x. Teknisi Gigi y. Terapis Tranfusi Darah z. Terapis Wicara aa. Dokter Pendidik Klinis
16.	Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan	a. Dosen b. Guru c. Penilik d. Pamong Belajar e. Pengawas sekolah f. Pengembangan Teknologi Pembelajaran g. Pranata Laboratorium Pendidikan
17.	Kementerian Sosial	a. Pekerja Sosial b. Penyuluh Sosial
18.	Kementerian Agama	a. Penghulu b. Penyuluh Agama
19.	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	a. Pamong Budaya



Lanjutan Tabel I.29.

No.	Instansi Pembina	Nama Jabatan Fungsional Khusus
20.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	a. Adikara Siaran b. Teknisi Siaran c. Andalan Siaran d. Pranata Hubungan Masyarakat
21.	Kementerian Lingkungan Hidup	a. Pengendali Dampak Lingkungan b. Pengawas Lingkungan Hidup
22.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)	a. Perencana
23.	Lembaga Administrasi Negara (LAN)	a. Widyaiswara b. Analis Kebijakan
24.	Arsip Nasional (ANRI)	a. Arsiparis
25.	Badan Kepegawaian Negara (BKN)	a. Analis Kepegawaian
26.	Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS)	a. Pustakawan
27.	Badan Pusat Statistik (BPS)	a. Statistisi b. Pranata Komputer
28.	Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)	a. Pengawas Radiasi
29.	Badan Tenaga Nuklir Nasional	a. Pranata Nuklir
30.	Badan Intelijen Negara (BIN)	a. Agen
31.	Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG)	a. Sandiman b. Operator Trasmisi Sandi
32.	Badan Koodinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)	a. Penyuluh Keluarga Berencana
33.	Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKORSURTANAL)	a. Surveyor Pemetaan
34.	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	a. Auditor
35.	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)	a. Peneliti
36.	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)	a. Teknisi Penelitian dan Perekayasaan b. Perekayasa
37.	Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	a. Pengawas Farmasi dan Makanan
38.	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)	a. Pengamat Meteorologi dan Geofisika
39.	Kejaksaan Agung	a. Jaksa
40.	Sekneg	a. Penerjemah
41.	BPK	a. Pemeriksa

Sumber : Kementerian Pan dan RB, 2012



Tabel 1.30. Jenis dan Nomenklatur Jabatan Fungsional Umum di lingkungan Pemerintah Pusat

No.	Instansi Pengguna	Nama Jabatan Fungsional Umum
KEMENTERIAN KOORDINATOR		
1.	Kementerian Koordinator Bidang Polhukam	a. Analis Polhukam
2.	Kementerian koordinator Bidang Perekonomian	a. Analis Dampak Ekonomi
3.	Kementerian Koordinator Bidang Kesra	a. Analis Kesejahteraan rakyat
KEMENTERIAN NEGARA		
4.	Kementerian Dalam Negeri	a. Satpol PP (nama Jabatan sedang di evaluasi) b. Petugas Pemadam Kebakaran c. Analis Tatapraja d. Analis kesbang Linmas e. Analis Pendapatan Daerah f. Analis Dampak Politik, pertahanan dan keamanan
5.	Kementerian Luar Negeri	a. Legal Advisor perlindungan WNI b. Pengamat Politik Luar Negeri c. Atase Perdagangan d. Petugas Komunikasi Diplomatik
6.	Kementerian Pertahanan	a. Analis Pertahanan Negara
7.	Kementerian Hukum dan HAM	a. Pemeriksa Dokumen Imigrasi b. Petugas Imigrasi c. Komandan/Petugas Lapas d. Legal Drafter
8.	Kementerian Keuangan	a. Bendaharawan b. Penata Laporan keuangan c. Verifikator Keuangan d. Analis Pendapatan Negara e. Analis Belanja Negara f. Analis Kekayaan Negara g. Asisten Akuntan h. Penyusun Anggaran / Analis Anggaran i. Bendahara (gaji, penerimaan, pengeluaran) j. Bendahara Rutin k. Pengadministrasi Barang Milik Negara (BMN) (Kemkeu)
9.	Kementerian ESDM	a. Analis Sumber Daya Terbarukan b. Analis Potensi Tambang
10.	Kementerian Perindustrian	a. Asesor Industri b. Analis Industri
11.	Kementerian Perdagangan	a. Analis Perdagangan Dalam Negeri b. Analis Perdagangan Luar Negeri c. Atase Perdagangan
12.	Kementerian Pertanian	a. Analis Potensi Pangan b. Analis Tanah c. Pengembangan Bibit pertanian



Lanjutan Tabel I. 30.

No.	Instansi Pengguna	Nama Jabatan Fungsional Umum
13.	Kementerian Kehutanan	a. Analis Potensi Hutan b. Pengembangan Bibit Tanaman Hutan/perkebunan
14.	Kementerian Perhubungan	a. Pemandu Lalu Lintas Udara b. Muallim c. Juru Mesin d. Pilot e. Juru Mudi f. Pengawas lalu Lintas Angkutan Darat g. Pengawas Lalu Lintas Perkereta Api h. Pengawas Lalu Lintas Laut
15.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. Penyuluh Perikanan 2. Anak Buah Kapal 3. Analis Alokasi Usaha Penangkapan Ikan 4. Analis Budidaya 5. Analis Kebutuhan Impor 6. Analis Data Spasial 7. Analis dan Penyajian Data Statistik Perikanan Tangkap 8. Analis Mutu Hasil Perikanan 9. Analis Pasar Dalam Negeri 10. Analis Pasar Luar Negeri 11. Analis Pemeriksaan Keselamatan Pelayaran 12. Analis Pengelolaan Kawasan konservasi 13. Analis Pengelolaan Sumber Daya ikan 14. Analis Pengembangan Usaha Pelabuhan Perikanan 15. Analis Potensi Kelautan 16. Analis Sarana Kesyahbandaran 17. Analis sumber daya Pesisir dan lautan 18. Analisis Bahan Organisasi dan Tata Laksana 19. Kelasi 20. Juru Mudi 21. Penyusun Konsep Bahan Bimbingan Teknis Kelaikan Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan 22. Penyusun Konsep Bahan Rumusan Kelaikan Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan 23. Penyusun Konsep Bahan Rumusan Rancang Bangun Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan 24. Petugas Pelayanan penerbitan Dokumen Penangkapan Ikan 25. Petugas Pemantauan Wilayah Pesisir 26. Petugas Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 27. Petugas Tata Laksana Pelayanan Dokumen Penangkapan Ikan



Lanjutan Tabel I. 30.

No.	Instansi Pengguna	Nama Jabatan Fungsional Umum
		28. Syahbandar Perikanan 29. Teknisi Budidaya 30. Teknisi Kelaikan Alat Penangkap Perikanan Teknisi Kelaikan Alat Perikanan 31. Teknisi Perawatan Kapal Pengawas 32. Verifikator Gambar Desain Kapal Perikanan 33. Kepala Kamar Mesin 34. Markonis 35. Masinis 36. Mekanisasi Peralatan 37. Mualim Kapal Perikanan 38. Nahkoda Kapal Perikanan 39. Nahkoda Kapal Pengawas 40. Oiler 41. Operator Aplikasi Sistem PPKA 42. Pelaksana Operasional Kapal 43. Pembantu Teknisi Perawatan Kapal 44. Penata Keselamatan Pelayaran 45. Penata Usaha Informasi Pasar Luar Negeri 46. Penata Usaha Jaringan Distribusi 47. Penata Usaha Bimbingan Teknis Industri 48. Penata Usaha Bimbingan Teknis Mikro, Kecil, dan Menengah 49. Penata Usaha Kelembagaan Pelaku Pasar Hasil Perikanan 50. Penatalaksana Tugas Kesyahbandaran 51. Pencatatan dan Pendokumentasi Pendaftaran Kapal Perikanan 52. Pengadministrasi Konservasi Jenis Ikan 53. Pengadministrasi Konservasi Kawasan 54. Pengadministrasi Mitigasi Bencana Lingkungan 55. Pengadministrasi Pemanfaatan Kawasan dan Jenis Ikan 56. Pengadministrasi Penanggulangan Sumber Daya Pesisir dan Laut 57. Pengadministrasi Identifikasi Pulau-Pulau Kecil 58. Pengadministrasi Sarana Pulau-pulau Kecil 59. Pengadministrasi Sumber Daya Kelautan 60. Pengadministrasi Alat dan Bahan Lab Dan Instalasi



Lanjutan Tabel I. 30.

No.	Instansi Pengguna	Nama Jabatan Fungsional Umum
		61. Pengadministrasi Bahan Teknis Budidaya
		62. Pengadministrasi Bahan Teknis Kesehatan Ikan dan Lingkungan
		63. Pengadministrasi Bahan Teknis Perbenihan
		64. Pengadministrasi Bahan Teknis Prasarana dan sarana Budidaya
		65. Pengadministrasi Bahan Teknis Usaha Budidaya
		66. Pengadministrasi Rencana Tata Ruang dan Zonasi Wilayah
		67. Pengadministrasi Rencana Tata Ruang Laut Nasional
		68. Penggambar Desain Kapal Perikanan
		69. Penyiap Bahan Administrasi Pengusahaan Penangkapan ikan
		70. Penyiap Bahan Perumusan Kebijakan Pengawakan Kapal Perikanan
		71. Penyiap bahan evaluasi dan Laporan Pemulihan Sumber Daya Ikan Perairan Umum
		72. Penyiap Bahan Evaluasi dan laporan pengembangan Kapal Perikanan dan alat Penangkap Ikan
		73. Penyiap Bahan Evaluasi dan Laporan produktivitas kapal penangkap ikan
		74. Penyiap Bahan Evaluasi dan Laporan Tata Kelola Sumber Daya Ikan Perairan Umum
		75. Penyiap Bahan Evaluasi Pelabuhan Perikanan Samudera, Nusantara, dan Pelabuhan Perikan Pantai
		76. Penyiap Bahan Evaluasi Labuhan Pendaratan Ikan dan Pelabuhan Swasta
		77. Penyiap Bahan Evaluasi Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan
		78. Penyiap Bahan Evaluasi Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan
		79. Penelaah Gambar Desain alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan
		80. Pengevaluasi Pemulihan Sumber Daya Ikan Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan
		81. Penyiap Bahan Identifikasi Sumberdaya Daya Ikan Zona Ekonomi eksklusif dan laut Lepas
		82. Penyiap Bahan Pedoman Identifikasi Sumberdaya Daya Ikan Zona Ekonomi eksklusif dan laut Lepas



Lanjutan Tabel I. 30.

No.	Instansi Pengguna	Nama Jabatan Fungsional Umum
		83. Penyiap Bahan Pedoman Tata kelola Sumberdaya Daya Ikan Zona Ekonomi eksklusif dan laut Lepas
		84. Penata Usaha Identifikasi dan Evaluasi Sentra Pengelolaan Produk
		85. Penata Usaha Kemiteraan Usaha Mikro,kecil, dan Menengah
		86. Penata Usaha Kerja sama Industri
		87. Penata Usaha Kimia dan Hayati
		88. Penata Usaha Mikro Biologi dan Organoleptik
		89. Penata usaha Monitoring Cemaran Biologi
		90. Penata usaha Monitoring Cemaran Kimia
		91. Penata Usaha Pelayanan Usaha Besar
		92. Penata Usaha Pelayanan Usaha Mikro , kecil, dan Menengah
		93. Penata Usaha Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar
		94. Penata Usaha Pengembangan Produk Skala Besar
		95. Penata Usaha Peningkatan Akses Pasar
		96. Pengelola Sumber Daya Ikan
		97. Pengelola Informasi dan Publikasi
		98. Pengelola Laboratorium
		99. Pengelola Pemanfaatan BMN
		100. Pengidentifikasi Hasil Pengukuran Dan Dokumen Kapal Perikanan
		101. Pengumpul dan Pengolah Data Statistik Perikanan Tangkap
		102. Penyiap Bahan Kebijakan Tata Kelola Sumber Daya Ikan Zona Ekonomi Eksklusif dan Laut Lepas
		103. Penyiap Bahan Pemantauan dan Evaluasi Ketenaga Kerjaan Perikanan
		104. Penyiap Bahan Pemantauan dan Evaluasi Pengawakan Kapal Perikanan
		105. Penyiap Bahan Pemantauan dan pengembangan kapal perikanan dan Alat penangkap Ikan
		106. Penyiap Bahan Pemantauan Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan
		107. Penyiap Bahan Pemantauan pengembangan usaha penangkapan ikan
		108. Penyiap Bahan Pemantauan Produktivitas Kapal Penangkap ikan



Lanjutan Tabel I. 30.

No.	Instansi Pengguna	Nama Jabatan Fungsional Umum
		109. Penyiap Bahan Pengembangan Sistem informasi Pelabuhan perikanan Samudera, Nusantara, Pantai
		110. Penyiap Bahan Pengembangan Sistem informasi Pelabuhan perikanan Swasta, pangkalan Pendaratan Ikan
		111. Penyiap Bahan Penyusun Pedoman Dan Bimbingan Bidan Identifikasi Dan Kapasitas Nelayan
		112. Penyiap Bahan Penyusun Pedoman Dan Bimbingan Pengelolaan Usaha
		113. Penyiap Bahan Penyusunan Pedoman Bimbingan Teknis Bidang Kenelayanan
		114. Penyiap Bahan Penyusunan Evaluasi dan Laporan Bidang Tata Operasional Pelabuhan perikanan
		115. Penyiap Bahan Penyusunan Evaluasi dan Laporan Bidang Keselamatan Pelayaran
		116. Penyiap Bahan Penyusunan Evaluasi dan Laporan Bidang Pembangunan Pelabuhan Pendaratan Ikan dan Pelabuhan Swasta
		117. Penyiap Bahan Penyusunan Evaluasi dan Laporan Bidang Pengembangan Prasarana Pelabuhan Pendaratan ikan
		118. Penyiap Bahan Penyusunan Evaluasi dan Laporan Bidang Pengembangan Prasarana Pelabuhan Perikanan
		119. Penyiap Bahan Penyusunan Evaluasi dan Laporan Bidang Tata Pemeliharaan dan Rehabilitasi
		120. Penyiap Bahan Penyusunan Evaluasi dan Laporan Bidang Kesyahbandaran
		121. Penyiap Bahan Penyusunan Evaluasi dan Laporan Bidang Pengendalian pembangunan Pelabuhan Perikanan Samudera, Nusantara, Pantai
		122. Penyiap Bahan Penyusunan Evaluasi dan Laporan Bidang Investasi Usaha Penangkapan Ikan
		123. Penyiap Bahan Penyusunan Pedoman Diversifikasi Usaha
		124. Penyiap Bahan Penyusunan pedoman Bimbingan Pembangunan pelabuhan Pendaratan Ikan dan Pelabuhan Swasta



Lanjutan Tabel I. 30.

No.	Instansi Pengguna	Nama Jabatan Fungsional Umum
		125. Penyiap Bahan Penyusunan Pedoman Bimbingan Pengendalian Pembangunan Pelabuhan perikanan samudera, Nusantara, Pantai
		126. Penyiap Bahan Penyusunan Pedoman Bimbingan Tata Pemeliharaan dan Rehabilitasi pelabuhan pendaratan Ikan
		127. Penyiap Bahan Penyusunan Pedoman Bimbingan Kelaikan Kapal
		128. Penyiap Bahan Penyusunan Pedoman Bimbingan Bimbingan Teknis Penerapan Standar Rancangan Bangun dan Konstruksi Kapal
		129. Penyiap Bahan Penyusunan Pedoman Bimtek Pengembangan Prasarana Pelabuhan Pendaratan Ikan
		130. Penyiap Bahan Penyusunan Pedoman dan Bimbingan Kesyahbandaran
		131. Penyiap Bahan Penyusunan Pedoman Identifikasi dan Pengukuran Kapal Perikanan
		132. Penyiap Bahan Penyusunan Pedoman Keselamatan pelayaran
		133. Penyiap Bahan Penyusunan Pedoman Pencatatan dan Dokumentasi Kapal Perikanan
		134. Penyiap Bahan Penyusunan Pedoman, Bimbingan Teknis Pengembangan Prasarana Pelabuhan Perikanan
		135. Penyiap Bahan Penyusunan Pedoman , Bimbingan Teknis Tata Operasional Pelabuhan Perikanan
		136. Penyiapan Bahan Penyusunan Pedoman,Bimtek Investasi Usaha Penangkapan ikan
		137. Penyiapan Bahan Penyusunan Pedoman,Bimtek Permodalan Usaha Penangkapan Ikan
		138. Penyiap Bahan Perumusan Kebijakan Ketenaga Kerjaan Perikanan
		139. Penyiap Bahan Urusan Perifikasi Dokumen Penangkapan ikan perorangan dan Koperasi
		140. Penyiap Bahan Urusan Perifikasi Dokumen Penangkapan ikan Perusahaan Berbadan hukum
		141. Penyiap Bahan Pertifikasi Alokasi Usaha Penangkapan Ikan
		142. Penyiap Bahan Pertifikasi Pengusaha Penangkapan ikan





Lanjutan Tabel I. 30.

No.	Instansi Pengguna	Nama Jabatan Fungsional Umum
		143. Penyiap Bahan Peyusunan Evaluasi dan Laporan Bidang Permodalan Usaha Penangkapan Ikan
		144. Penyusun Bahan Teknis Perbenihan
		145. Penyusun Bahan Teknis Prasarana dan sarana Budidaya
		146. Penyusun Bahan Teknis Usaha Budidaya
		147. Penyusun Bahan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim
		148. Penyusun Bahan Benda Muatan Kapal tenggelam
		149. Penyusunan Bahan Bimbingan Teknis Industri Pengolahan
		150. Penyusunan Bahan Bimbingan Teknis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
		151. Penyusunan Bahan Data dan Informasi Pulau-Pulau Kecil
		152. Penyusunan Bahan Identifikasi Pulau-pulau Kecil
		153. Penyusunan Bahan Implementasi IPTEK
		154. Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi
		155. Penyusun Bahan Informasi Kesehatan Ikan dan Lingkungan
		156. Penyusun Bahan Informasi Perbenihan
		157. Penyusun Bahan Jaringan Pasar Ikan Hias
		158. Penyusun Bahan Jasa Kelautan
		159. Penyusun Bahan Kelembagaan Pasar Hasil Perikanan
		160. Penyusun Bahan Kelembagaan Pelaku Pasar Hasil Perikanan
		161. Penyusun Bahan Pemanfaatan Jenis Ikan
		162. Penyusun Bahan Pemanfaatan Kawasan
		163. Penyusun Bahan Pemantauan dan Evaluasi Imfor
		164. Penyusun Bahan Penanggulangan Pencemaran sumber daya laut
		165. Penyusun Bahan Penanggulangan Pencemaran Sumber Daya Pesisir
		166. Penyusun Bahan Perancangan Konserpasi Jenis Ikan
		167. Penyusun Bahan Perlindungan dan Pelestarian Ikan
		168. Penyusun Bahan Rencana Tata Ruang Laut lintas Wilayah dan Perairan Yurisdiksi
		169. Penyusun Bahan Sarana Pulau-Pulau Kecil
		170. Penyusun Bahan Tata Laksana



Lanjutan Tabel I. 30

No.	Instansi Pengguna	Nama Jabatan Fungsional Umum
		171. Penyusun Bahan Teknis Budidaya 172. Penyusun Bahan Teknis Kesehatan Ikan dan Lingkungan
16.	Kementerian Tenaga Kerja	a. Penelaah Standar Keselamatan Kerja
17.	Kementerian Pekerjaan Umum	a. Pengawas Penyehat Lingkungan b. Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan c. Pengawas Pengairan d. Juru Gambar e. Arsitek f. Desain Interior g. Analis tataguna DAS
18.	Kementerian Pendidikan Nasional	a. Pelindung/pengonservasi Bahasa dan sastra b. Perancang Pengembang Kompetensi Kependidikan c. Pengendali Pengguna Bahasa d. Pengkaji Bahasa e. Penyuluh Bahasa f. Penyusun Acuan Bahasa g. Penyusun pemetaan pendidikan h. Perancang Evaluasi Kursus dan Kesetaraan i. Perancang Program Pendidikan j. Perancang Test Bahasa k. Perancang Sistem Evaluasi Pendidikan l. Perancang Test Bahasa m. Terminilog/Pengembang Istilah
19.	Kementerian Sosial	a. Analis Dampak Sosial
20.	Kementerian Agama	a. Pencatat Nikah b. Penasehat Perkawinan c. Analis Kerukunan Beragama d. Analis Penyelenggara Haji
21.	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	a. Pemandu Wisata b. Analis Potensi Pengembangan Wiasata c. Analis Pengembangan Ekonomi Kreatif d. Verifikator Penyelenggaraan Wisata
22.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	a. Analis sistem Informatika b. Pengendali Teknologi Informasi c. Jurnalis d. Juru Foto e. Juru Kameramen
23.	Kementerian Riset Teknologi	a. Analis Pemanfaatan teknologi b. Analis Pengembangan teknologi c. Penyuluh Koperasi d. Analis Koperasi e. Pengawas Koperasi
24.	Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)	a. Laboran Lingkungan Hidup b. Analis Pemanasan Global c. Analis Daya Dukung Lingkungan d. Analis Daya Tampung Lingkungan





Lanjutan Tabel I. 30.

No.	Instansi Pengguna	Nama Jabatan Fungsional Umum
25.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak	a. Penyuluh Pemberdayaan Perempuan dan Anak b. Analis Anak
26.	Kementerian PAN dan RB	a. Pengawas Pelayanan Publik b. Analis Ketataksanaan c. Analis Kelembagaan d. Analis Perencanaan SDM Aparatur e. Analis Pengembangan SDM Aparatur f. Analis Kesejahteraan SDM Aparatur g. Analis Penegakan Integritas SDM Aparatur h. Analis Pengembangan Database SDM Aparatur i. Analis Kelembagaan / Organisasi
27.	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	a. Analis Pengembangan Daerah Terpencil b. Pengawas Pembangunan Daerah Terpencil
28.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)	a. Analis Program Pembangunan
29.	Kementerian BUMN	a. Pengawas Perusahaan Negara b. Analis Pengembangan Perusahaan
30.	Kementerian Perumahan Rakyat	a. Analis Penyusunan Perencanaan Wilayah b. Analis Penyusunan Penyiapan Lahan c. Pengawas Pelaksanaan Pembangunan Fisik d. Penyusun Perencanaan Wilayah e. Perencanaan Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan
31.	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	a. Pelatih Olahraga
LEMBAGA PEMERINTAHAN NON KEMENTERIAN		
32.	Lembaga Administrasi Negara (LAN)	a. Analis Tata Negara b. Analis Kebutuhan Diklat c. Evaluator program Diklat d. Penyusun Kurikulum Diklat e. Training Offices/Pengelola Pelatihan f. Pengadministrasi Umum g. Pengevaluasi Diklat
33.	Arsip Nasional (ANRI)	a. Analis Pengembangan sistem Kearsipan
34.	Badan Kepegawaian Negara (BKN)	a. Analis Jabatan b. Auditor Kepegawaian c. Asesor Kepegawaian d. Pengadministrasi Kepegawaian e. Analis Data f. Analis Bahan
35.	Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS)	a. Analis Pengembangan elektronik pustaka(e library) b. Asisten pustakawan
36.	Badan Pusat Statistik (BPS)	



Lanjutan Tabel I. 30.

No.	Instansi Pengguna	Nama Jabatan Fungsional Umum
37.	Badan Standarisasi Nasional (BSN)	a. Analis Kompetensi
38.	Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPATEN)	a. Perawatan Peralatan Pengawas b. Pemeroses Penerbitan Izin c. Pemerosesan Penerbitan Izin Petugas fasilitas petugas radiasi
39.	Badan Tenaga Nuklir Nasional	a. Penelaah Standar mutu Bahan dan Peralatan b. Pengelola Pengaman Instalasi Nuklir c. Pengelola sistem jaminan mutu d. Penyiap Bahan Program Jaminan Mutu e. Penyiap Bahan Standar Keselamatan
40.	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)	a. Analis Bina KB b. Analis Bahan Kelangsungan Hidup Ibu c. Analis Bahan Kelangsungan Hidup Bayi dan Anak d. Analis Bahan pencegahan Penyakit Menular e. Analis Bahan Penanggulangan infertilitas penyakit Menular f. Analis pencegahan Kanker alat Produksi g. Analis Jaminan Pelayanan KB h. Analis Jaminan Sarana KB i. Analis Kependudukan j. Analis Penyediaan Sarana KB k. Analis Standarisasi Pelayanan KB l. Analis Monitoring dan Evaluasi Pelayanan KB m. Analis Akses Pelayanan KB n. Analis Kualitas Pelayanan KB o. Analis Bina KB p. Penyusun Bahan Bina q. Penyusun Bahan Jaminan Pelayanan KB r. Penyusun Bahan Akses Pelayanan KB s. Penyusunan Bahan Kualitas Pelayanan KB t. Penyusunan Bahan Kelangsungan Hidup Ibu Penyusunan Bahan u. Penyusunan Bahan Penanggulangan Infertilitas
41.	Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional	a. Analis Penerbangan b. Pengawas Antariksa
42.	Badan Koordinasi Penanaman Modal	a. Perencana Penanaman Modal b. Analis Permodalan Asing
43.	Badan Pertanahan Nasional	a. Analis Peta Wilayah b. Pengawas Pertanahan
44.	Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	a. Analis Obat dan Makanan





Lanjutan Tabel I. 30

No.	Instansi Pengguna	Nama Jabatan Fungsional Umum
45.	Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS)	a. Analis Program
46.	Badan Meteorologi, Klimatologi dan GEOFISIKA	a. Analis Cuaca
47.	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI	a. Analis Tenaga Kerja b. Pengawas Tenaga Kerja c. Program Kebutuhan Tenaga Kerja
48.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	a. Analis Bencana Alam b. Penyuluh Bencana Alam c. Petugas Bencana Alam
49.	Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	a. Analis Barang dan Jasa b. Pengadaan Barang dan Jasa
50.	Badan SAR Nasional	a. Analis SAR b. Penyuluh SAR
51.	Badan Narkotika Nasional	a. Analis Dampak Narkotik b. Penyuluh Narkotik c. Pengawas Rehabilitasi Narkotik
52.	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	a. Analis Dampak Lingkungan b. Penyuluh Kemasyarakatan
LEMBAGA SETINGKAT MENTERI		
53.	Kejaksaan Agung RI	a. Panitera Pengadilan (MA) b. Pengamanan Barang Bukti c. Pengawasan dan Pengamanan Terdakwa
54.	Kepolisian Negara RI	a. Analis Gangguan Keamanan b. Penyuluh Keamanan Masyarakat
55.	Sekretariat Kabinet (Setkab)	a. Analis Program Kebijakan Pemerintah
56.	Sekretariat Jenderal MPR-RI	a. Analis Kepemintahan Daerah b. Analis Kebijakan Pengembangan Pemerintah Daerah
57.	Sekretariat Jenderal DPR-RI	a. Transkriptor b. Analis Anggaran c. Penyusun Risalah
58.	Sekretariat Mahkamah Agung	a. Analis Sengketa Peradilan
59.	Sekretariat DPD-RI	a. Analis Pemerintah Daerah b. Analis Program Daerah
60.	Sekretariat Mahkamah Konstitusi	a. Panitera Pengadilan b. Panitera Muda
61.	Sekretariat Komisi Yudisial	a. Analis Keputusan Pengadilan b. Pengawas Pengadilan
62.	Sekretariat Komisi Nasional HAM	a. Analis Pelanggaran HAM b. Penyuluh Pelanggaran HAM
63.	Sekretariat KPU Pusat/Provinsi/Kab/Kota	a. Analis Pemilihan Umum b. Penyuluh Pemilihan Umum c. Pengawas Pemilihan Umum
64.	Badan Koordinasi Keamanan Laut	a. Analis Keamanan Laut b. Penyuluh Keamanan Laut
65.	PPATK	a. Analis PPATK b. Penyuluh PPATK c. Pengawas PPATK

Sumber : Kementerian Pan dan RB, 2012



Tabel I.31 Nomenklatur Lembaga Pusat yang Memiliki Dokumen Analisis Jabatan Tahun 2012

No	Instansi pusat	Analisis jabatan	
		Uraian jabatan	Peta jabatan
KEMENTERIAN KOORDINATOR			
1.	Kementerian Koordinator bidang Polhukam	V	V
2.	Kementerian Koordinator bidang kesra	V	V
KEMENTERIAN			
3.	Kementerian Dalam Negeri	V	V
4.	Kementerian Luar negeri	V	V
5.	Kementerian Hukum dan Ham	V	V
6.	Kementerian Keuangan	V	V
7.	Kementerian ESDM	V	V
8.	Kementerian Perindustrian	V	V
9.	Kementerian Perdagangan	V	V
10.	Kementerian Pertanian	V	
11.	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	V	V
12.	Kementerian Kesehatan	V	V
13.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	V	V
14.	Kementerian Sosial	V	V
15.	Kementerian Agama		V
16.	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		V
17.	Kementerian Informasi dan Informatika		V
18.	Kementerian Negara Riset dan Teknologi		V
19.	Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan anak	V	V
20.	Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal	V	V
21.	Kementerian Sekretariat Negara	V	V
LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN			
22.	Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS)	V	V
23.	Badan Pusat Statistik (BPS)	V	V
24.	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)	V	V
25.	Lembaga Penerbangan Antriksa Nasional (LAPAN)	V	V
26.	Badan Koordinasi Survei & Pemetaan Nasional (Bakorsurtanal)	V	V
27.	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	V	V
28.	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)	V	V
29.	Badan Koordinasi Penanaman modal	V	V
30.	Badan Pertahanan Nasional (BPN)		V
31.	Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)	V	V
32.	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)	V	V
33.	Badan Nasional Penempatan & Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)	V	V
34.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPN)		V



Lanjutan Tabel I.31

No.	Instansi pusat	Analisis Jabatan	
		Uraian jabatan	Peta jabatan
35.	Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	V	V
36.	Badan SAR Nasional		V
37.	Badan Narkotika Nasional (BNN)	V	V
SEKRETARIAT LEMBAGA NEGARA			
38.	Sekretariat Jendral BPK	V	V
39.	Sekretariat Mahkamah agung	V	V
40.	Sekretariat KPU		V
41.	Badan Koordinasi keamanan laut (BAKORKAMLA)	V	V

Sumber : Kementerian Pan dan RB, 2012

Tabel I.32 Nomenklatur Lembaga Pusat yang Memiliki Dokumen Analisis Beban Kerja Tahun 2012

No.	Jenis Lembaga Pusat	Lembaga Pusat
1.	Kementerian koordinator	a. Kementerian Koordinator bidang Polhukam b. Kementerian Koordinator bidang kesra
2.	Kementerian	a. Kementerian Dalam Negeri b. Kementerian Luar negeri c. Kementerian Hukum dan Ham d. Kementerian Keuangan e. Kementerian Perdagangan f. Kementerian Tenaga Kerja dan TRansmigrasi g. Kementerian Kesehatan h. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan i. Kementerian Sosial j. Kementerian Sekretariat Negara
3.	Lembaga Pemerintah Non Kementerian	a. Badan Pusat Statistik (BPS) b. Lembaga Penerbangan Antriksa Nasional (LAPAN) c. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) d. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) e. Badan Koordinasi Penanaman modal f. Badan Pertahanan Nasional (BPN) g. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) h. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) i. Badan Nasional Penempatan & Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia j. Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah k. Badan Narkotika Nasional (BNN)
4.	Sekretariat lembaga negara	a. Sekretariat Jenderal BPK b. Sekretariat Mahkamah agung

Sumber : Kementerian Pan dan RB, 2012

BAGIAN II

KETATALAKSANAAN



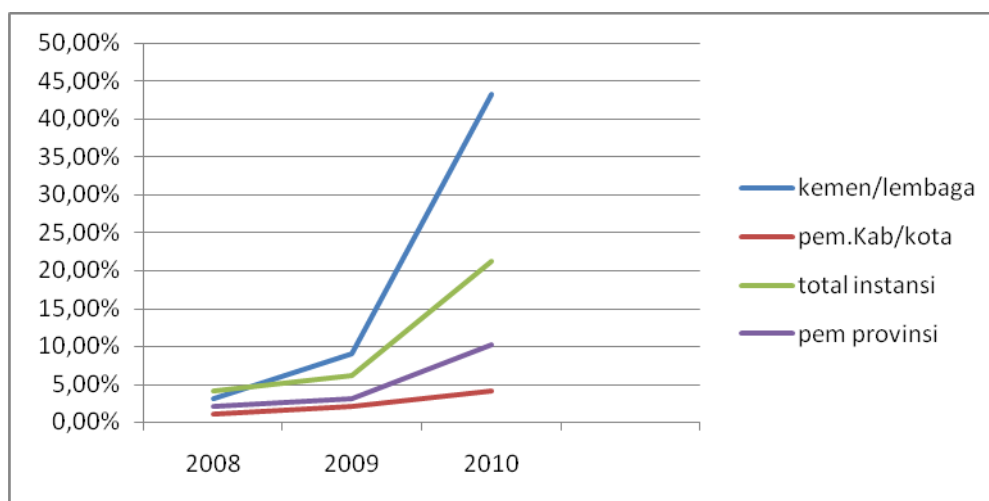
Pada bagian ini disajikan data mengenai ketatalaksanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Data-data tersebut diantaranya adalah data mengenai Sistem Perencanaan Kerja; Sistem Prosedur Kerja; Sistem Pengawasan; dan Sistem Pelaporan.

A. Sistem Perencanaan Kerja

Dalam bagian sistem perencanaan kerja, disajikan data mengenai dokumen perencanaan yang harus disediakan pemerintah pusat maupun daerah. Pada tabel II.1, tabel II.2, dan tabel II.3 berikut ditampilkan data mengenai jumlah Kementerian/Lembaga (K/L) pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang telah memiliki dokumen IKU pada Tahun 2008 – 2010. Sementara itu, tabel II.4, tabel II.5, tabel II.6 dan tabel II.7 menggambarkan data mengenai jumlah Kementerian/Lembaga (K/L) pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang telah memiliki dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2005-2010. Dari kedua tabel berikut dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun jumlah kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang memiliki dokumen perencanaan berupa indikator kinerja utama (IKU) dan Penetapan Kinerja (Tapkin) semakin meningkat. Disatu sisi hal ini dikarenakan adanya kewajiban secara regulasi untuk memilikinya. Tetapi di sisi lain, menunjukkan bahwa pemerintah pusat maupun daerah semakin menyadari pentingnya ketersediaan dokumen perencanaan yang baik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Namun demikian, jika melihat fungsi IKU dan Tapkin, sekalipun terdapat kecenderungan peningkatan, kondisi ini masih dapat digolongkan memprihatinkan. IKU dan Tapkin merupakan ukuran strategis yang harus dicapai oleh suatu institusi. Ketiadaan IKU dan Tapkin tentu akan menyulitkan institusi yang bersangkutan untuk mencapai dan/atau mengukur tercapai tidaknya kinerja yang telah ditentukan.

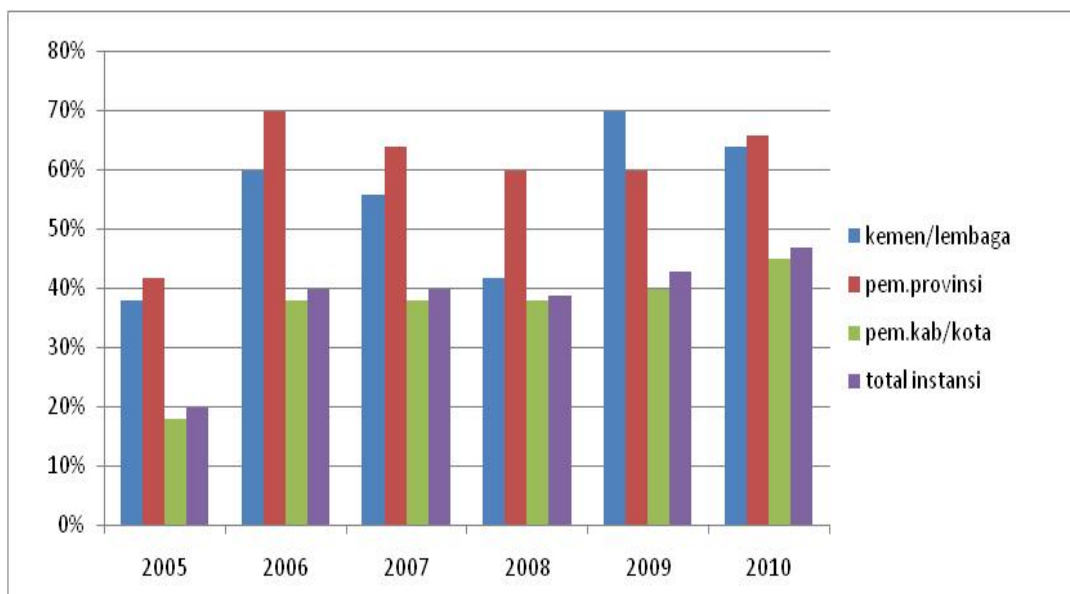


Gambar II.1. Jumlah Lembaga Pusat dan Pemerintah Daerah yang Telah Memiliki Dokumen IKU Tahun 2008-2010



Sumber : Kementerian Pan dan RB, 2012

Gambar II.2. Jumlah Lembaga Pusat dan Pemerintah Daerah yang Telah Memiliki Dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2005-2010



Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012

B. Sistem Prosedur Kerja

Bagian ini menampilkan data mengenai prosedur kerja pemerintah dalam upaya melayani masyarakat. Data disajikan terdiri dari data pelaksanaan standar pelayanan minimum (SPM), pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), dan penerapan *e-government*. Tabel II.8 berikut menyajikan data mengenai 13 jenis

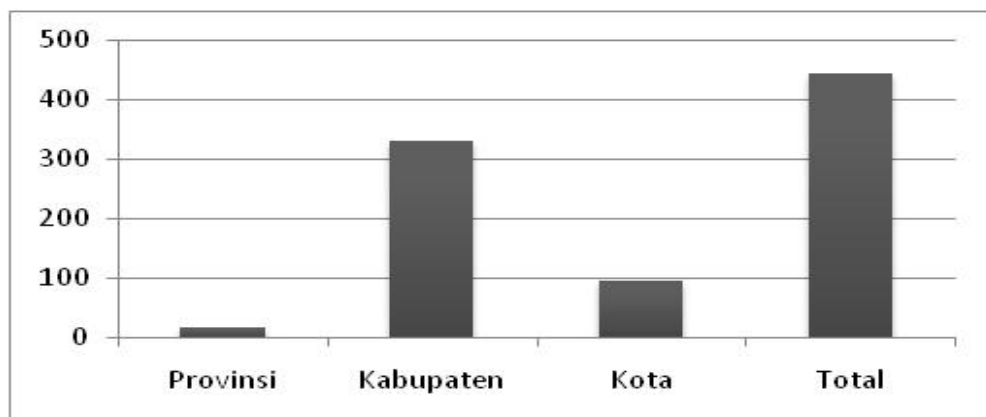


Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang telah diterbitkan. Dokumen Standar Pelayanan Minimum (SPM) ini harus menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menyediakan pelayanan bagi masyarakat.

Berikutnya pada Tabel II.9 ditampilkan data mengenai pemerintah daerah yang telah memiliki sistem pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Pelayanan terpadu satu pintu merupakan inovasi penyelenggaraan pemerintahan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menerima pelayanan, terutama pelayanan pengurusan perizinan. Berdasarkan data yang tersedia pada tabel II.9 terlihat bahwa dari 33 Provinsi yang ada di Indonesia, hanya 11 Provinsi yang telah 100% menerapkan PTSP baik di pemerintah provinsi maupun di pemerintah kab/kota yaitu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Sulawesi Utara. Provinsi lainnya masih berkisar 17 % - 97 % dalam hal melaksanakan PTSP tersebut.

Pada tabel II.10, tabel II.11, tabel II.12 dan tabel II.13 digambarkan data mengenai lembaga pemerintah pusat yang telah menerapkan *e-government* pada tahun 2012. Sementara pada tabel II.14, tabel II.15, dan tabel II.16 disajikan data mengenai pemerintah daerah yang telah memiliki *website*. Penggunaan *e-government* dalam tata kerja pemerintahan sebagian besar masih terbatas pada beberapa jenis, diantaranya adalah penyediaan website lembaga sebagai sarana publikasi informasi kepada masyarakat dan aplikasi untuk manajemen internal instansi pemerintah.

Gambar II.3. Jumlah Pemerintah Daerah yang telah menerapkan PTSP Tahun 2012



Sumber : Kementerian Dalam Negeri, 2012



C. Sistem Pengawasan dan Pengendalian

Sistem pengawasan mutlak diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pengawasan jalannya pemerintahan dapat dilakukan secara internal organisasi ataupun oleh pihak eksternal. Secara internal organisasi, dalam sistem pengawasan pemerintah dikenal sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP). Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) terdiri dari lima unsur, yaitu Lingkungan pengendalian; Penilaian risiko; Kegiatan pengendalian; Informasi dan komunikasi; dan Pemantauan pengendalian intern.

Pada tabel II.17 ditampilkan data mengenai jumlah dan nomenklatur pemerintah pusat yang telah memiliki peraturan kepala kementerian/lembaga mengenai SPIP. Sementara itu, pada tabel II.18 dan tabel II.19 disajikan data pemerintah daerah yang telah memiliki peraturan kepala daerah mengenai SPIP. Pada pemerintah pusat, terdapat 46 Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat yang telah memiliki peraturan kepala kementerian/lembaga mengenai SPIP pada akhir tahun 2011. Sementara pada pemerintah daerah, terdapat 442 pemerintah daerah (pemerintah provinsi/pemerintah kabupaten/pemerintah kota) yang telah memiliki peraturan kepala daerah mengenai SPIP. Dari data tersebut terlihat bahwa belum seluruh lembaga pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang telah memiliki peraturan kepala kementerian/lembaga dan peraturan kepala daerah mengenai SPIP, hal ini dikarenakan sistem ini relatif masih baru. Sebagian besar lembaga pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih dalam tahap sosialisasi dan persiapan dalam penerapan dan pembentukan peraturan mengenai SPIP.





Tabel II.1. Jumlah Kementerian/Lembaga Pusat yang Telah Memiliki Dokumen IKU Tahun 2008-2010

Kementerian/Lembaga Pusat	2008	2009	2010
Jumlah	76	77	81
telah menyusun	2	8	37
persentase	2,63%	10,39%	45,68%

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012

Tabel II.2. Jumlah Pemerintah Daerah Provinsi yang Telah Memiliki Dokumen IKU Tahun 2008-2010

Pemerintah Provinsi	2008	2009	2010
Jumlah	33	33	33
telah menyusun	1	2	19
persentase	3,03%	6,06%	21,21%

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012

Tabel II.3. Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Memiliki Dokumen IKU Tahun 2008-2010

Pemerintah Kabupaten/Kota	2008	2009	2010
Jumlah	472	472	497
telah menyusun	0	3	36
persentase	0,00%	0,64%	7,24%

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012

Tabel II.4. Jumlah Kementerian/Lembaga Pusat yang Telah Memiliki Dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2005-2010

Tahun	Jumlah K/L	Jumlah Yang Telah Menyampaikan	Persentase
2005	66	26	39,39%
2006	68	43	63,24%
2007	72	39	54,17%
2008	76	36	47,37%
2009	77	54	70,13%
2010	81	54	66,67%

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012



Tabel II.5. Jumlah Pemerintah Daerah Provinsi yang Telah Memiliki Dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2005-2010

Tahun	Jumlah Propinsi	Propinsi Telah Yang Menyampaikan	Persentase
2005	32	14	43,75%
2006	32	23	71,88%
2007	33	22	66,67%
2008	33	20	60,61%
2009	33	20	60,61%
2010	33	23	69,70%

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012

Tabel II.6. Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Memiliki Dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2005-2010

Tahun	Jumlah kabupaten/Kota	Kab/ Kota Yang Telah Menyampaikan	Persentase
2005	417	70	16,79%
2006	432	153	35,42%
2007	440	159	36,14%
2008	472	160	33,90%
2009	472	201	42,58%
2010	499	253	50,70%

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012

Tabel II.7. Jumlah Keseluruhan Kementerian/Lembaga Pusat dan Pemerintah Daerah yang Telah Memiliki Dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2005-2010

Tahun	Jumlah K/L, Propinsi, Kab/Kota	Yang Telah Menyampaikan	Persentase
2005	515	110	21,36%
2006	532	219	41,17%
2007	545	220	40,37%
2008	581	216	37,18%
2009	582	275	47,25%
2010	613	330	53,83%

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012



Tabel II.8. Jenis Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang Telah Diterbitkan

No.	SPM di bidang	Peraturan yang Menetapkan SPM
1.	Perumahan Rakyat	Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat RI No. 22/PERMEN/M/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
2.	Pemerintah Dalam Negeri	Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota
3.	Sosial	Peraturan Menteri Sosial RI No. 129/huk /2008 tentang standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial
4.	Kesehatan	Peraturan Menteri Kesehatan RI No.741 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota
5.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No. 01 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
6.	Lingkungan Hidup	Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI No. 19 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
7.	Keluarga Berencana dan Sejahtera	Peraturan Kepala badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional No. 55/hk-010/b5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota
8.	Ketenaga Kerjaan	Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No.PER. 15/MEN/X/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenagakerjaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.PER.04/MEN/IV/2011 Tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.PER.15/MEN/X/2010
9.	Pendidikan	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 15/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota
10.	Pekerjaan Umum	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI No.14/PRT/M/2010 Tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
11.	Ketahanan Pangan	Peraturan Menteri Pertanian RI No.65/Permentan/OT.140/12/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota
12.	Kesenian	Peraturan Menteri Kebudayaan & Pariwisata RI No.PM.106/HK.501/MKP/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian
13.	Komunikasi dan Informasi	Peraturan Menteri Kemkominfo RI No.22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota

Sumber : Kementerian Dalam Negeri, 2012



**Tabel II.9. Data jumlah dan nomenklatur Pemerintah Daerah yang telah menerapkan PTSP
Tahun 2012**

Provinsi	Jumlah Daerah	Daerah yang sudah menerapkan PTSP				
	Total (Prov-Kab-Kota)	Prov	Kab	Kota	Total	%
Nanggroe Aceh Darussalam	24	1	18	5	24	100%
Sumatera Utara	34	1	20	8	29	85%
Sumatera Barat	20	0	11	7	18	90%
Riau	13	1	10	2	13	100%
Jambi	12	1	9	2	12	100%
Sumatera Selatan	16	1	11	4	16	100%
Bengkulu	11	1	9	1	11	100%
Lampung	15	1	12	2	15	100%
Bangka Belitung	8	0	6	1	7	88%
Kepulauan Riau	8	0	2	2	4	50%
DKI Jakarta	7	1	0	5	6	86%
Jawa Barat	27	1	16	9	26	96%
Jawa Tengah	36	0	29	6	35	97%
DI Yogyakarta	6	1	4	1	6	100%
Jawa Timur	39	1	29	9	39	100%
Banten	9	0	4	4	8	89%
Bali	10	1	8	1	10	100%
Nusa Tenggara Barat	11	0	7	2	9	82%
Nusa Tenggara Timur	22	1	17	1	19	86%
Kalimantan Barat	15	0	10	2	12	80%
Kalimantan Tengah	15	0	13	1	14	93%
Kalimantan Selatan	14	1	11	2	14	100%



Lanjutan Tabel II.9.

Provinsi	Jumlah Daerah	Daerah yang sudah menerapkan PTSP				
	Total (Prov-Kab-Kota)	Prov	Kab	Kota	Total	%
Kalimantan Timur	15	1	9	4	14	93%
Sulawesi Utara	16	1	11	4	16	100%
Sulawesi Tengah	12	1	9	1	11	92%
Sulawesi Selatan	25	0	19	3	22	88%
Sulawesi Tenggara	13	0	9	2	11	85%
Gorontalo	7	0	4	1	5	71%
Sulawesi Barat	6	0	3	0	3	50%
Maluku	12	0	2	2	4	33%
Maluku Utara	10	0	1	1	2	20%
Papua	30	1	5	1	7	23%
Papua Barat	12	0	2	0	2	17%
Total		18	330	96		
Total	530				444	84%

Sumber : Kementerian Dalam Negeri, 2012



Tabel II.10. Data jumlah dan nomenklatur Lembaga Tinggi Negara yang telah menerapkan e-Government Tahun 2012

No	Lembaga Tinggi Negara	Jenis E-Government
1.	Majelis permusyawaratan rakyat (MPR.RI)(Sekjen)	a. Website www.mpr.go.id b. CAM LAN Sekretariat Jenderal MPR RI c. Webmail Sekretariat Jenderal MPR RI d. LPSE MPR.go.id
2.	Dewan Perwakilan Rakyat RI. (DPR RI.)(Sekjen)	a. Website DPR http://www.dpr.go.id b. LPSE DPR http://lpse.dpr.go.id c. PUIC website http://ksap.dpr.go.id/puic2012 d. TV Parlemen live streaming e. Keterbukan informasi public http://ppid.dpr.go.id f. SMS Aspirasi g. Laporan singkat rapat-rapat DPR RI http://www.dpr.go.id h. Risalah Rapat Paripurna Rapat DPR RI http://www.dpr.go.id/id/arsip/risalah i. Sistem tata persuratan http://persuratan.dpr.go.id j. Perpustakaan http://perpustakaan.dpr.go.id k. Pengkajian http://pengkajian.dpr.go.id l. Sistem kiosk informasi m. Mail DPR http://mail.dpr.go.id n. Sistem monitoring server online bidang data dan sarana informasi o. Website intranet http://intranet.dpr.go.id/intranew p. Sistem database peraturan perundang-undangan biro hukum dan Panlak UU q. SMS Gateway Anggota DPR r. SMS Gateway setjen s. Sitanang http://sitanang.dpr.go.id t. Sistem Minangwan http://minangwan.dpr.go.id u. SISKAS v. Sistem informasi BDSI http://bdsi.dpr.go.id w. Sistem Informasi Analisa Pemeriksaan BPK dan Pengawasan DPD http://bpkdpd.dpr.go.id x. Informasi hierarki PUU http://www.dpr.go.id/koleksi-puu y. Sistem perencanaan http://perencanaan.dpr.go.id z. Sistem gaji pegawai aa. Sistem absensi elektronik bb. Sistem SIMAK BMN cc. Sistem RKAKL dd. Sistem SAPP ee. Website KORPRI Setjen DPR RI ff. Pusat data network Set. TU Pimpinan Setjen gg. Pusat data network pemberitaan hh. Pusat data network BDSI ii. Pusat Data network kepegawaian jj. Pusat Data network KIP kk. Pusat Data network BKSAP ll. Pusat Data network P3DI mm. Pusat Data network PUU



Lanjutan Tabel II.10.

No	Lembaga Tinggi Negara	Jenis E-Government
		nn. Pusat Data network BURT oo. Pusat Data network pansus pp. Pusat Data network analisa pemeriksaan BPK dan pengawasan DPD qq. Sistem Perundang-undangan SIPUT rr. Sistem Kliping ss. Sistem Arsip Dokumentasi tt. Sistem gaji anggota DPR RI.
3.	Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD.RI.)(Sekjen)	a. Website DPD RI www.dpd.go.id b. Website low center DPD RI c. Webmail DPD RI d. Website ketatanegaraan e. Sistem informasi perpustakaan f. Sistem informasi dokumentasi digital g. SIM keanggotaan dan kepegawaian h. Ipprisalah i. Sistem informasi budget office j. Sistem aplikasi aspirasi masyarakat dan daerah k. Sistem informasi kehadiran anggota DPD RI. l. Sistem informasi perdin m. Microsite
4.	Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden RI	
5.	Mahkamah Agung RI. (MA.RI)	
6.	Mahkamah Konstitusi RI	
7.	Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI)	Sistem Layanan Internal a. SIMHP (sistem informasi manajemen hasil pengawasan) b. SIM Monev KRT c. Communication sistem d. Masaging and collaboration system e. TNDE (disposisi elektronik) f. Aplikasi perjalanan dinas g. Dokumen management system h. Sistem pengelolaan data pegawai i. Sistem pelayanan kepangkatan j. Finger print Sistem Layanan Eksternal a. Website bpkp.go.id b. E-public service c. LPSE d. E-learning e. Aplikasi SIMDA keuangan versi 2.1 f. Aplikasi SIMDA barang milik daerah g. Aplikasi SIMDA gaji h. Aplikasi SIMDA pendapatan



Lanjutan Tabel II.10.

No	Lembaga Tinggi Negara	Jenis E-Government
		i. SIA PDAM j. Sistem informasi pembayaran pelanggan (SIPP)
8.	Komisi Yudisial	

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012

Tabel II.11. Data jumlah dan nomenklatur Kementerian yang telah menerapkan e-Government Tahun 2012

No	Kementerian	Jenis E-Government
KEMENTERIAN		
9.	Kementerian Dalam Negeri	a. LPSE b. e- KTP c. e- AUDIT d. e- library e. e- learning f. website www.depdagri.go.id
10.	Kementerian Luar Negeri	
11.	Kementerian Pertahanan	a. Sistem informasi pertanahan Negara (sisfohasmneg) b. Portal (kemhan.go.id)
12.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	a. Website Kementerian Hukum dan HAM b. Website kanwil 33 propinsi c. Aplikasi LPSE d. Sistem informasi kearsipan dinamis (SIKD) e. Sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG) f. Sistem database pemasyarakatan g. Sistem E-office keimigrasian h. Sistem E-paspor i. Sistem E-filing HAKI j. Sistem administrasi badan hukum k. SIMKA (sistem informasi manajemen kampus) l. CBHRIS (competency based human resources information 14. Sistem) m. Sistem cegah dan tangkal (CEKAL) n. Sistem layanan visa dan izin tinggal o. Sistem penerbitan surat perjalanan republic Indonesia (SPRI) p. sistem fasilitatif keimigrasian q. sistem border control management r. aplikasi realisasi anggaran direktorat jenderal administrasi hukum umum s. Aplikasi pelaporan PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) direktorat jenderal administrasi hukum umum t. Aplikasi Absensi direktorat jenderal administrasi hukum umum



Lanjutan Tabel II.11.

No	Kementerian	Jenis E-Government
		u. Aplikasi pencatatan persuratan Tata Usaha Sekretariat Jenderal direktorat jenderal HUKUM dan HAM v. Sistem otomasi arsip pada direktorat perdata w. Aplikasi database peraturan offline PREMISE x. Aplikasi perpustakaan hukum online y. Sistem informasi perpustakaan balitbang HAM z. CD interaktif Balitbang HAM
13.	Kementerian Keuangan	
14.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	a. Website kementerian ESDM b. Sistem email kementerian c. Tata persuratan dan kearsipan d. Sistem informasi kepegawaian e. Sistem informasi eksekutif f. Sistem informasi keuangan g. Sistem informasi perencanaan h. Sistem informasi legislasi dan regulasi i. Sistem trouble ticket management j. Sistem monitoring jaringan internet kementerian k. Sistem manajemen SPPD l. Sistem manajemen hosting m. Sistem manajemen server virtual n. Sistem video conference o. Sistem informasi investasi barang p. Sistem e-procurement q. Sistem informasi geographic ESDM
15.	Kementerian Perindustrian	a. Situs web kemenperin b. Situs web regulasi c. Situs web LPSE d. Ntranet e. Aplikasi Sipeg f. Aplikasi e-Licensing g. Absensi Online h. Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik i. Aplikasi e-monitoring j. Aplikasi key performance indicators k. Aplikasi laporan mingguan l. e- formulir m. TOEFL Online n. Registrasi CPNS Online o. Ujian Online p. e-mail kemenperin q. teleconference
16.	Kementerian Perdagangan	-
17.	Kementerian Pertanian	-
18.	Kementerian Kehutanan	-



Lanjutan Tabel II.11.

No	Kementerian	Jenis E-Government
19.	Kementerian Perhubungan	a. Website kementerian perhubungan b. Sistem informasi perundang-undangan c. Email kementerian perhubungan d. Sistem informasi kepegawaian e. Sistem informasi pengawasan f. Sistem informasi pemantauan dan pelaporan secara elektronik g. Persuratan elektronik h. Sistem pengadaan barang dan jasa elektronik (LPSE) i. Data warehouse j. Sistem informasi geografis transportasi Indonesia (SIGTI) k. Sistem monitoring jalur ganda Jakarta-Surabaya (Double Track) l. Master Plan percepatan dan perluasan pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3E) m. Sistem Informasi Angkutan dan Sarana Transportasi Indonesia n. Sistem informasi angkutan lebaran o. RTTMC (Road transport and traffic Management center) p. Sistem informasi pengujian kendaraan bermotor q. LRIT (Long range identification and tracking) r. MTSDP Sistem informasi operasional bidang udara a. NSW (national single window) airport net b. NOTAMS (notice to airmen) c. Sistem informasi angkutan udara lebaran, natal, dan tahun baru d. Website ditjen perhubungan udara Sistem informasi operasional bidang perkeretaapian a. Website ditjen perkertaapian b. Database studi/kajian ditjen perkeretaapian (intranet) c. Sistem informasi jadwal kegiatan/rapat d. Database bidang lalu lintas perkeretaapian (intranet) e. Sistem informasi tanggap darurat Sistem informasi operasional KNKT Website KNKT Sistem informasi operasional Badan Pengembangan SDM Perhubungan a. Website Badan Pengembangan SDM Perhubungan b. Email Badan Pengembangan SDM Perhubungan
20.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	a. Website KKP RI b. Website Biro Kepegawaian SEkjen c. Sistem informasi produk hukum d. Sistem informasi analisa beban kerja e. Sistem informasi desiminasi data, statistic kelautan dan perikanan f. Sistem informasi perpustakaan



Lanjutan Tabel II.11

No	Kementerian	Jenis E-Government
		g. Sistem informasi akuntansi h. LPSE KKP i. Website Itjen j. Sistem informasi sumber daya ikan k. Sistem informasi pelabuhan perikanan l. Sistem informasi kapal perikanan dan alat tangkap m. Website pengembangan usaha dan penangkapan ikan n. Website ditjen perikanan budidaya o. Sistem informasi bursa produk perikanan p. Sistem informasi warta pasar ikan q. Sistem informasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan r. GIS s. Website Ditjen KP3K t. Sistem informasi vessel monitoring sistem u. Website Balitbang KP v. Website Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pengolahan Produk dan Bioteknologi KP w. Website Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi KP x. Website Balai Penelitian dan Observasi Laut y. Website Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia KP z. Webmail KKP
21.	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	a. Website b. Aplikasi online information sistem (OLIS) c. Aplikasi informasi pasar kerja/ bursa kerja online d. Aplikasi bursa transmigrasi online e. LPSE f. Aplikasi 3 in 1 g. Aplikasi tenaga kerja asing (TKA) online h. Infrastruktur jaringan komunikasi data kantor Kalibata dan kantor Gatot Subroto
22.	Kementerian Pekerjaan Umum	
23.	Kementerian Kesehatan	Government to Government a. Sistem informasi pendidikan tenaga kesehatan b. Aplikasi kesehatan pelabuhan c. Aplikasi SIM laporan hasil pengolahan d. Aplikasi komunikasi data (SIKNAS Online) e. Aplikasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) f. Sistem informasi Manajemen Badan PPSDM Kesehatan g. Aplikasi tata persuratan h. Aplikasi sistem pelaporan narkotika dan psikotropika (SIPNAP) online i. Sistem pelaporan dinamika obat pedagang besar farmasi (PBF) j. Aplikasi profil kesehatan k. Sistem pelaporan terpadu l. Aplikasi komunikasi data gizi dan KIA terintegrasi



Lanjutan Tabel II.11.

No	Kementerian	Jenis E-Government
		m. Aplikasi digital signage n. Jejaring Gizi dan KIA o. SMS Gateway Government to Business a. Sistem National Single Windows (NSW) b. E – procurement (LPSE) Government to Community a. Website kementerian kesehatan b. Website Ditjen Bina Pelayanan Kefarmasian dan alat kesehatan c. Website promosi kesehatan d. Website Ditjen PP dan PL e. Website Badan PPSPDM Kesehatan f. e- library g. INA CBG's h. Website penyakit menular i. Website ASEAN Plus 3 j. Website Inspektorat Jenderal k. Website Ditjen Bina Gizi dan KIA l. Elastic m. Website BBTCL Surabaya, Yogyakarta dan Jakarta n. Web Sehat negeriku o. Website PPID Kemenkes p. Registrasi Online q. e-planning Government to Employee a. File sharing berbasis web b. e-office c. SIMKEU
24.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	a. Layanan e-office b. Layanan mail kemendikbud c. Aplikasi SIM SchoolNet d. Informasi jardiknas e. Portal Buku Sekolah Elektronik f. Portal Rumah Belajar g. Informasi TV Edukasi h. Streaming Radio Suara Edukasi i. Portal Layanan Prima j. Katalog Online Perpustakaan Kemendikbud k. Layanan Pendataan Pendidikan l. Pendukung DSS Kemdikbud m. Monitoring Rehab Sekolah n. SIMKEU o. Aplikasi sistem informasi kepegawaian (SIMPEG) p. Aplikasi pengelolaan sumber daya manusia (PSDM)



Lanjutan Tabel II.11.

No	Kementerian	Jenis E-Government
		q. Situs BAN PNF r. Pengembangan pangkalan data hasil penelitian “sistem informasi penelitian pendidikan” (SIPP) s. Sistem Informasi Manajemen Pembelajaran berbasis web. t. Layanan Hukum dan organisasi (produk hukum, bantuan hukum, kelembagaan, peraturan perundang-undangan) u. Aplikasi layanan perjalanan dinas luar negeri v. Aplikasi layanan beasiswa unggulan w. Sistem perencanaan dan anggaran x. Layanan penyetaraan ijazah luar negeri online y. Layanan pendaftaran beasiswa bidikmisi z. Sistem informasi pendidikan dan dunia kerja - aa. Aplikasi pencarian data perguruan tinggi, pengajuan NIDN dan evaluasi PT - bb. Pangkalan data pendidikan tinggi - cc. Aplikasi tracer study - dd. Layanan sertifikasi dosen online - ee. Aplikasi pendaftaran pelatihan yang diselenggarakan Dikti - ff. Portal informasi mengenai studi lanjut dan penjelasan beasiswa - gg. Layanan pendaftaran online beasiswa luar negeri Dikti - hh. Layanan pendaftaran online beasiswa unggulan Dikti ii. Layanan pendaftaran online BPPS Dikti - jj. Layanan e-learning Dikti bekerjasama dengan UNESCO - kk. Portal informasi konsorsium sertifikasi guru - ll. Sistem informasi penilaian angka kredit dosen - mm. Mirror open course ware MIT - nn. Portal direktori doctor Indonesia - oo. Portal berita ditjen Dikti, Pengumuman dan informasi seputar Dikti - pp. Portal informasi seputar olimpiade nasional MIPA - qq. Portal produk hukum seputar pendidikan tinggi - rr. Portal pemilihan akademisi berprestasi - ss. Pendaftaran video conference online dan portal INHERENT - tt. Aplikasi video streaming Dikti - uu. Aplikasi izin belajar mahasiswa asing vv. Portal informasi mengenai beasiswa Bidikmisi - ww. Aplikasi Tanya jawab dikti xx. Layanan surat elektronik dikti - yy. Portal produk hukum seputar pendidikan tinggi - zz. Laman sistem informasi kebahasaan dan kesastraan - aaa. KBBI daring - bbb. Glosarium daring



Lanjutan Tabel II.11.

No	Kementerian	Jenis E-Government
		ccc. Laman Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) ddd. Informasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan pendidikan eee. Media dalam penyelenggaraan pelaksanaan akreditasi online fff. Informasi proses dan hasil akreditasi pendidikan non formal ggg. Situs BAN-PT
25.	Kementerian Sosial	a. LPSE b. Sistem informasi pengadaan pegawai c. Sistem informasi kepegawaian (SIMKA) d. Forum IPENSI e. File Respository f. Sistem informasi Manajemen hasil pemeriksaan (SIM HP) g. Sistem informasi manajemen perencanaan h. Website tagana i. Aplikasi permohonan izin UGB dan PUB j. Website direktorat pengumpulan dan pengelolaan sumber dana bantuan social k. Sistem informasi manajemen PKH l. Website kementerian, website UKE, website UPT m. Sistem informasi manajemen cacat n. Sistem informasi manajemen komunitas adat terpencil o. PMKS PSKS p. SIM database kemiskinan q. Vicon r. VOIP s. Mail server t. Sharing data/data center u. Sharing Printer v. Aplikasi dari kementerian lain : RKKL; BMN; SAI; SPM; Laporan Triwulan; dan Aplikasi Gaji
26.	Kementerian Agama	Website kementerian agama
27.	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,	
28.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	
29.	Kementerian Sekretariat Negara	
30.	Kementerian Riset dan Teknologi	a. Web kementerian riset dan teknologi (http://ristek.go.id) b. Pustaka ristek (http://pustaka.ristek.go.id) c. Bisnis innovation center (http://www.bic.web.id) d. Database riptek (http://www.dbripteck.ristek.go.id) e. Online foreign research permit (http://frp.ristek.go.id)



Lanjutan Tabel II.11.

No	Kementerian	Jenis E-Government
		f. Iptek kebencanaan (http://www.pirba.ristek.go.id) g. Komite nasional akreditasi pranata penelitian dan pengembangan (http://www.knapp.ristek.go.id) h. Layanan pengadaan secara elektronik (http://lpse.ristek.go.id/eproc/app) i. PKPP (http://pkpp.ristek.go.id) j. Program intensif (http://insentif.ristek.go.id/main.php) k. Knowledge management sistem l. Monitoring evaluasi (http://monevin.ristek.go.id) m. Reformasi birokrasi (http://rb.ristek.go.id) n. Speklok (http://speklok.ristek.go.id) o. Triple helix conference (http://www.th2012.org) p. Warung informasi teknologi (http://warintek.ristek.go.id) q. IGOS (information Indonesia Go Open Source) r. Jaringan data informasi hukum (http://jdih.ristek.go.id) s. PPID (http://ppid.ristek.go.id) t. SISKAS (sistem informasi keuangan) u. Aplikasi SPM (Surat Perintah Membayar) v. Aplikasi SAI (Sistem Akuntansi Instansi) w. Aplikasi Konfirmasi Setoran x. Aplikasi Gaji y. Absensi z. RKAKL (perencanaan) aa. Renja bb. DIPA cc. Sistem manajemen persuratan dd. Monitoring evaluasi (http://monev.ristek.go.id) ee. Sumur (http://sumur)
31.	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
32.	Kementerian Lingkungan Hidup	a. Aplikasi tata naskah dinas elektronik b. Aplikasi Indonesia National Single Window (INSW) c. Aplikasi pelayanan terpadu d. Aplikasi pengaduan e. Aplikasi portar GIS
33.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	a. Sistem Kepegawaian b. Tata naskah dinas elektronik c. Agenda kegiatan pegawai d. Administrasi cuti online e. Pembuatan DP3 online f. Perpustakaan online g. Agenda ruang rapat h. Intrafax online i. Laporan mingguan online j. Absensi sidik jari online k. Pembuatan berkas SPPD online l. Berita internal



Lanjutan Tabel II.11.

No	Kementerian	Jenis E-Government
		m. Forum diskusi online n. e-pesan o. mailing list p. file library q. modul polling r. layanan SMS alert s. LPSE t. Arsip online
34.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	
35.	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	
36.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional	
37.	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	
38.	Kementerian Perumahan Rakyat	
39.	Kementerian Pemuda Dan Olahraga	a. Sistem informasi manajemen b. Piranti lunak legal dan open source (OSS) c. Aplikasi Geographical Information Sistem (GIS) d. Aplikasi pelaporan e. Pemeliharaan dan perawatan sistem aplikasi
40.	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	a. Pembangunan dan pengembangan portal Kemenko Polhutkam b. Pengembangan jaringan IT Kemenko Polhutkam c. Pembangunan/pengadaan multi language IT Kemenko Polhutkam d. Pembangunan pengamanan jaringan IT Kemenko Polhutkam e. Connecting data ke UKP-PPP f. MuO Kemenko Polhutkam dengan BPK tentang pelaksanaan e-auditing g. Pembangunan simpeg Kemenko Polhutkam.
41.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	a. Website kemenko Bidang Perekonomian b. Webmail c. Sistem informasi manajemen kepegawaian d. Dashboard informasi perekonomian e. Sistem absensi (finger print) dan penggajian f. LPSE g. Sistem penatausahaan barang h. Monitoring dan pelaporan capaian rencana aksi inpres i. Aplikasi tata persuratan j. Sistem perencanaan anggaran (RKA-KL/DPA) k. Sistem pembayaran realisasi anggaran



Lanjutan Tabel II.11.

No	Kementerian	Jenis E-Government
		l. SAKPA (sistem aplikasi kuasa pengguna anggaran) m. Aplikasi perencanaan kas n. Aplikasi SPM (surat perintah membayar) o. Sistem dokumentasi persidangan
42.	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	a. SISKAS b. Aplikasi SPM c. Aplikasi SAI d. Aplikasi AFS (Aplikasi Forecasting Satker) e. RKAKL f. Renja K/L g. Aplikasi penyusunan inisiatif baru h. Aplikasi target pagu PNBP Sismonev i. Sistem web monitoring j. SIMAK BMN k. Aplikasi persediaan l. Sistem informasi terpadu perpustakaan m. Persuratan elektronik n. DMS (document management sistem) o. SMS center p. Web data kesra online q. Web dan web mail r. Aplikasi kepegawaian BKN online s. SAPK (sistem aplikasi pelayanan kepegawaian)

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012

Tabel II.12. Data jumlah dan nomenklatur Lembaga Setingkat Menteri yang telah menerapkan e-Government Tahun 2012

No	Lembaga	Jenis E-Government
43.	Kejaksaan Agung	APLIKASI KHUSUS Manajemen perkara/kasus - Aplikasi perkara pidum - Aplikasi perkara pidsus - Aplikasi perkara datun Manajemen Intelejen yustisi (aplikasi OPSLID) Manajemen supervisi - Aplikasi laporan pengaduan (LAPDU) - Aplikasi IPK (instrumen penilaian kinerja) Manajemen pendidikan (aplikasi pengelolaan diklat) Sistem informasi eksekutif (EIS/DSS) portal internet APLIKASI UMUM Manajemen SDM (aplikasi kepegawaian) Manajemen keuangan (aplikasi keuangan) Manajemen aset (Aplikasi aset) Manajemen humas (website www.kejaksaan.go.id) Manajemen otomasi kantor (Aplikasi persuratan)



Lanjutan Tabel II.12

No	Lembaga	Jenis E-Government
44.	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	-
45.	Kepolisian Negara Republik Indonesia	a. DPP gaji berbasis web, menggunakan teknologi VPN. b. Web polri, berbasis web, menggunakan internet c. SMS center 1120 d. Call center 112 e. SMS center 8383 f. Aplikasi layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) g. Aplikasi early warning sistem (EWS) h. Aplikasi pengelolaan informasi dan dokumentasi (PID) i. Aplikasi informasi kriminal nasional (IKNAS) SK2HP, SPPE. j. SPPKP k. Aplikasi UKP4 l. Aplikasi PPATK m. Sistem informasi penerimaan anggota polri n. Sentra pelayanan masyarakat mobile o. National traffic management (NTMC) p. Sistem manajemen pengelolaan anggaran polri (SMAP) q. Aplikasi perijinan senjata dan bahan peledak yang terkoneksi dengan bea cukai r. Prosedur SKCK dan perijinan orang asing s. Jaringan komunikasi interpol IGCS (I-24/7) t. Elektronik aseanapol database sistem (e-ads) u. Website interpol
46.	UKP4	-

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012

Tabel II.13. Data jumlah dan nomenklatur Lembaga Non Kementerian yang telah menerapkan e-Government Tahun 2012

No	Kementerian / lembaga	Jenis E- Government
47.	Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)	a. Aplikasi RKA-KL b. Aplikasi rencana kerja K/L c. Aplikasi PP no.39 tahun 2009 tentang Laporan Triwulan Kegiatan d. Website ANRI e. Sistem informasi manajemen kepegawaian (Simpeg) f. Sistem jaringan dokumentasi informasi hukum g. LPSE h. Aplikasi penggajian i. Sistem informasi kearsipan dinamis j. SIKS layanan k. Jaringan informasi kearsipan nasional l. ReCIS (Records Center Information Sistem)



Lanjutan Tabel II.13.

No	Kementerian / lembaga	Jenis E- Government
48.	Badan Intelijen Negara (BIN)	-
49.	Badan Kepegawaian Negara (BKN)	-
50.	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)	-
51.	Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)	a. Sistem Otomasi pelayanan perizinan b. Portal NSWI (SPIPISE) c. Data center d. Official website BKPM e. Sistem informasi potensi investasi daerah (SIPID) f. Sistem email
52.	Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal)	-
53.	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)	-
54.	Badan Narkotika Nasional (BNN)	a. Sistem informasi narkoba (SIN)\ b. Sistem informasi prekursor (SIP) c. Geografi Information Sistem (GIS) d. Sistem informasi Tindak Pidana Narkoba e. Sistem informasi tahanan dan narapidana narkoba (SITNN) f. Sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) BNN
55.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP)	-
56.	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)	-
57.	Badan Nasional Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)	a. Sistem jaringan internet virtual private network (VPN) b. Website BNP2TKI c. Sistem informasi peluang kerja luar negeri d. Sistem informasi pelayanan penempatan dan perlindungan TKI (SISKO TKLN = sistem komputerisasi tenaga kerja luar negeri) e. Sistem informasi pelayanan dan pengaduan TKI f. Sistem informasi pelayanan dan pendataan kepulangan TKI (SIPENDAKI) g. Sistem data warehouse penempatan dan perlindungan TKI h. Sistem informasi kepegawaian i. Sistem informasi keuangan j. Sistem informasi barang milik negara
58.	Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	a. e- rekrutment b. SIAP c. Finger Print d. NSW Badan POM (e-bpom)



Lanjutan Tabel II.13.

No	Kementerian / lembaga	Jenis E- Government
		e. Notifikasi kosmetik online sistem f. LPSE
59.	Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten)	a. Sistem Informasi Perizinan dan Inspeksi BAPETEN (BALIS) b. Sistem informasi kepegawaian (SIMKA) c. Sistem informasi perencanaan dan evaluasi kegiatan (SERASI) d. Sistem informasi kearsipan e. e-procurement f. situs Bapeten.go.id g. perpustakaan online Bapeten h. sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bapeten i. Situs Asian Nuclear Safety Network (ANSN) Indonesia j. Open Source softwares
60.	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	Sistem layanan internal a. SIMHP (Sistem informasi manajemen hasil pengawasan) b. SIM Monev RKT c. Communication sistem d. Messaging and Collaboration Sistem e. TNDE (disposisi elektronik) f. Aplikasi perjalanan dinas g. Document management sistem h. Sistem pengelolaan data pegawai i. Sistem pelayanan kepangkatan j. Finger print Sistem layanan eksternal a. Website bpkp.go.id b. e-public service c. LPSE d. e-learning e. Aplikasi Simda keuangan versi 2.1 f. Aplikasi Simda barang milik daerah g. Aplikasi Simda gaji h. Aplikasi Simda pendapatan i. SIA PDAM j. Sistem informasi pembayaran pelanggan (SIPP)
61.	Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi	a. Website reformasi birokrasi b. Pemutakhiran data pegawai c. Lakip d. Keterbukaan informasi publik e. e-jurnal f. Hak kekayaan intelektual BPP Kantajaya (kantor maya) g. Website unit kerja (27 unit) h. LPSE
62.	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)	-



Lanjutan Tabel II.13.

No	Kementerian / lembaga	Jenis E- Government
63.	Badan Pertanahan Nasional (BPN)	a. Website www.bpn.go.id . b. LPSE c. Layanan rakyat untuk sertifikasi tanah (LARASITA)
64.	Badan Pusat Statistik (BPS)	a. e-procurement b. sistem aplikasi diklat c. whistle blower sistem d. sistem manajemen proyek (SIMPRO) e. sistem rencana kegiatan dan anggaran (SIREKA) f. master file desa (MFD) online g. Sistem informasi manajemen tanaman pangan (SIM TP) Sistem informasi manajemen survei pertanian hortikultura (SIMSPH) h. e-questioner i. Sistem informasi manajemen keuangan (SIMKEU) j. Sistem akuntansi instansi (SAI) k. Sistem Rujukan Statistik (SIRUSA) l. Sistem informasi manajemen publikasi (SIMPUB) m. Sistem informasi manajemen mailing list (SIMML) n. Sistem layanan statistik berbasis web (SILASTIK) o. Sistem informasi perpustakaan (SIPUS) p. Sistem pelayanan mobile q. Sistem umpan balik/feedback pengguna data r. SIM hardware s. SIM software t. Sistem informasi buku dan majalah (SIMBUMA) u. Sistem monitoring jaringan v. Community BPS w. Sistem informasi Jaringan (SIMOJAR) x. Sistem informasi presensi y. Sistem informasi kepegawaian (SIMPEG) z. Sistem kerjasama protokol dan penyiapan materi pimpinan (SKPPMP) aa. Sistem informasi akuntansi barang milik negara (SIMAK BMN) e-mail BPS (surat masuk-surat keluar) bb. Sistem informasi kearsipan BPS (SIKAP BPS) Sistem informasi terpadu (SIPADU) STIS cc. e-library dd. e-recruitment mahasiswa STIS ee. e-recruitment pegawai BPS ff. sistem datawarehouse dan repository metadata gg. sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) hh. Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)
65.	Badan SAR Nasional (Basarnas)	a. Website Badan SAR Nasional b. Sistem informasi SAR dan call center call agent
66.	Badan Standarisasi Nasional (BSN)	a. Sistem informasi audit internal (e-audit) b. Pengembangan aplikasi notifikasi regulasi teknis c. SISNI d. Kantanya (kantor maya)



Lanjutan Tabel II.13.

No	Kementerian / lembaga	Jenis E- Government
		e. CD Direktori SNI dan LPK f. DVD Koleksi perpustakaan standarisasi g. Web SISNI dan web BSN h. Transaksi online SNI i. Sistem informasi perpustakaan (SIMPustaka) j. Pengelolaan koleksi perpustakaan digital
67.	Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)	a. Sistem informasi administrasi presensi pegawai b. Sistem informasi tata persuratan (SIAPP) Sistem informasi kepegawaian (SIK) c. Sistem informasi perencanaan Litbangyasa (SIPL) d. Sistem informasi penatausahaan dan pelaporan anggaran (SIPPAN) e. Sistem akuntansi Instansi (SAI) f. Sistem informasi manajemen pengawasan (SIMWAS) g. Situs website h. Email i. Mailing list j. Perpustakaan digital k. Jurnal ilmiah elektronik l. Portal nuklear health center m. Jurnal sains materi Indonesia
68.	Lembaga Administrasi Negara (LAN)	a. Website LAN b. e-office (tata naskah dinas elektronik) c. e-arsip (SIKD) d. e-library e. e-procurement f. e-diklat (SIDA) g. e-kajian h. e-service informasi akademik dan administratif STIA LAN i. e-service informasi pembinaan dan penyelenggaraan diklat
69.	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)	-
70.	Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)	-
71.	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP)	-
72.	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)	-
73.	Lembaga Sandi Negara (Lamsaneg)	Grand desain TI Lembaga Sandi Negara 2010-2014
74.	Badan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas),	a. Layanan perpustakaan dan informasi b. Perpustakaan digital nasional Indonesia (e-library) c. Website perpustakaan nasional d. Sistem informasi manajemen

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012



Tabel II.14. Jumlah Pemerintah Daerah Propinsi yang telah memiliki Website Tahun 2012

No.	Nama Provinsi	Jmlah Provinsi	Provinsi memiliki Website	Persentase
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	1	1	100%
2.	Sumatera Utara	1	1	100%
3.	Sumatera Barat	1	1	100%
4.	Riau	1	1	100%
5.	Jambi	1	1	100%
6.	Sumatera Selatan	1	1	100%
7.	Bengkulu	1	1	100%
8.	Lampung	1	1	100%
9.	Kep. Bangka Belitung	1	1	100%
10.	Kep. Riau	1	1	100%
11.	DKI Jakarta	1	1	100%
12.	Jawa Barat	1	1	100%
13.	Jawa Tengah	1	1	100%
14.	Banten	1	1	100%
15.	Jawa Timur	1	1	100%
16.	Yogyakarta	1	1	100%
17.	Bali	1	1	100%
18.	Nusa Tenggara Barat	1	1	100%
19.	Nusa Tenggara Timur	1	1	100%
20.	Kalimantan Barat	1	1	100%
21.	Kalimantan Tengah	1	1	100%
22.	Kalimantan Selatan	1	1	100%
23.	Kalimantan Timur	1	1	100%
24.	Sulawesi Utara	1	1	100%
25.	Sulawesi Tengah	1	1	100%
26.	Sulawesi Selatan	1	1	100%
27.	Sulawesi Tenggara	1	1	100%
28.	Gorontalo	1	1	100%
29.	Sulawesi Barat	1	1	100%
30.	Maluku	1	1	100%
31.	Maluku Utara	1	1	100%
32.	Papua	1	1	100%
33.	Papua Barat	1	1	100%
	Total	33	33	100%

Sumber : Kementerian Dalam Negeri, 2012, diolah.



Tabel II.15. Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten yang telah memiliki Website Tahun 2012

No.	Nama Provinsi	Jumlah Kabupaten	Total Kabupaten yang memiliki Website	Persentase
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	18	16	89%
2.	Sumatera Utara	25	20	80%
3.	Sumatera Barat	12	11	92%
4.	Riau	10	9	90%
5.	Jambi	9	9	100%
6.	Sumatera Selatan	11	11	100%
7.	Bengkulu	9	8	89%
8.	Lampung	12	11	92%
9.	Kep. Bangka Belitung	6	6	100%
10.	Kep. Riau	5	5	100%
11.	DKI Jakarta	1		0%
12.	Jawa Barat	17	17	100%
13.	Jawa Tengah	29	29	100%
14.	Banten	4	4	100%
15.	Jawa Timur	29	29	100%
16.	Yogyakarta	4	4	100%
17.	Bali	8	8	100%
18.	Nusa Tenggara Barat	8	8	100%
19.	Nusa Tenggara Timur	20	16	80%
20.	Kalimantan Barat	12	12	100%
21.	Kalimantan Tengah	13	13	100%
22.	Kalimantan Selatan	11	11	100%
23.	Kalimantan Timur	10	7	70%
24.	Sulawesi Utara	11	8	73%
25.	Sulawesi Tengah	10	9	90%
26.	Sulawesi Selatan	21	20	95%
27.	Sulawesi Tenggara	10	5	50%
28.	Gorontalo	5	3	60%
29.	Sulawesi Barat	5	4	80%
30.	Maluku	9	3	33%
31.	Maluku Utara	7	5	71%
32.	Papua	28	18	64%
33.	Papua Barat	10	7	70%
	Total	399	346	87%

Sumber : Kementerian Dalam Negeri, 2012, diolah.



Tabel II.16. Jumlah Pemerintah Daerah Kota yang telah memiliki Website Tahun 2012

No.	Nama Provinsi	Jumlah Kota	Total Kota yang memiliki Website	Persentase
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	5	5	100%
2.	Sumatera Utara	8	6	75%
3.	Sumatera Barat	7	7	100%
4.	Riau	2	2	100%
5.	Jambi	2	2	100%
6.	Sumatera Selatan	4	4	100%
7.	Bengkulu	1	1	100%
8.	Lampung	2	2	100%
9.	Kep. Bangka Belitung	1	1	100%
10.	Kep. Riau	2	2	100%
11.	DKI Jakarta	5	5	100%
12.	Jawa Barat	9	9	100%
13.	Jawa Tengah	6	6	100%
14.	Banten	4	4	100%
15.	Jawa Timur	9	9	100%
16.	Yogyakarta	1	1	100%
17.	Bali	1	1	100%
18.	Nusa Tenggara Barat	2	2	100%
19.	Nusa Tenggara Timur	1	1	100%
20.	Kalimantan Barat	2	2	100%
21.	Kalimantan Tengah	1	1	100%
22.	Kalimantan Selatan	2	2	100%
23.	Kalimantan Timur	4	4	100%
24.	Sulawesi Utara	4	4	100%
25.	Sulawesi Tengah	1	1	100%
26.	Sulawesi Selatan	3	3	100%
27.	Sulawesi Tenggara	2	2	100%
28.	Gorontalo	1	1	100%
29.	Sulawesi Barat			
30.	Maluku	2	1	50%
31.	Maluku Utara	2	2	100%
32.	Papua	1		0%
33.	Papua Barat	1	1	100%
	Total	98	94	96%

Sumber : Kementerian Dalam Negeri, 2012, diolah.



Tabel II.17. Data jumlah dan nomenklatur Pemerintah Pusat yang telah memiliki Peraturan Menteri/Kepala K/L mengenai SPIP Tahun 2010 – 2011

No.	Kementerian/Lembaga	Peraturan Kepala Kementerian/Lembaga
1.	Majelis Permusyawaratan Rakyat	-
2.	Dewan Perwakilan Rakyat	Perka Nomor 01A/PER-SEKJEN/2010 tgl 3 Maret 2010
3.	Badan Pemeriksa Keuangan	-
4.	Mahkamah Agung	-
5.	Kejaksaan Agung	-
6.	Sekretariat Negara	-
7.	Kementerian Dalam Negeri	Permen Nomor 40 Tahun 2010 tgl 25 Juni 2010
8.	Kementerian Luar Negeri	Permen Nomor 12 Tahun 2011 tgl 6 Desember 2011
9.	Kementerian Pertahanan	Permen Nomor 21 tahun 2010 tgl 16 Desember 2010
10.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Permen Nomor M.HH-02.PW.02.03 Thn 2011 tgl 25 Agustus 2011
11.	Kementerian Keuangan	Permen Nomor 152/KMK.09/2011 tgl 12 Mei 2011
12.	Kementerian Pertanian	Permen Nomor 23/Permentan/OT.140/5/2009 tgl 13 Mei 2009
13.	Kementerian Perindustrian	Permen Nomor 199/M-IND/4/2011 tgl 1 April 2011
14.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-
15.	Kementerian Perhubungan	Permen Nomor PM 78 Tahun 2011 tgl 11 Agustus 2011
16.	Kementerian Pendidikan Nasional	Permen Nomor 47 Tahun 2011 tgl 19 Oktober 2011
17.	Kementerian Kesehatan	Permen Nomor 238/Menkes/SK/IV/2009 tgl 2 April 2009
18.	Kementerian Agama	Permen Nomor 24 tahun 2011 tgl 16 Desember 2011
19.	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Permen Nomor PER.19/MEN/XII/2011 tgl 7 Desember 2011
20.	Kementerian Sosial	Permen Nomor 91 Tahun 2011 tgl 3 Agustus 2011
21.	Kementerian Kehutanan	Permen Nomor P.27/Menhut-II/2010 tgl 10 Juni 2010
22.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Permen Nomor PER.20/MEN/2011 tgl 4 Agustus 2011
23.	Kementerian Pekerjaan Umum	Permen Nomor 02/IN/M/2011 tgl 14 April 2011
24.	Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan	-
25.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	-
26.	Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat	Permen Nomor 05 Tahun 2011 tgl 21 November 2011
27.	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	Permen Nomor PM.97/UM.001/MPEK/2011 tgl 28 November 2011
28.	Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara	-
29.	Kementerian Negara Riset dan Teknologi	Permen Nomor 06/M/PER/XII/2011 tgl 8 Desember 2011



Lanjutan Tabel II.17.

No.	Kementerian/Lembaga	Peraturan Kepala Kementerian/Lembaga
30.	Kementerian Lingkungan Hidup	Permen Nomor 114 Tahun 2011 tgl 20 Juni 2011
31.	Kementerian Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	-
32.	Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-
33.	Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	-
34.	Badan Intelijen Negara	-
35.	Lembaga Sandi Negara	-
36.	Dewan Ketahanan Nasional	-
37.	Badan Pusat Statistik	Perka Nomor 26 Tahun 2011 tgl 17 Oktober 2011
38.	Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Permen Nomor 5 Tahun 2011 tgl 30 November 2011
39.	Badan Pertanahan Nasional	Perka Nomor 18 Tahun 2010 tgl 6 Desember 2010
40.	Perpustakaan Nasional	-
41.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-
42.	Kepolisian RI	-
43.	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	Perka Nomor HK.04.1.23.08.11.07430 Tahun 2011 tgl 19 Agustus 2011
44.	Lembaga Ketahanan Nasional	-
45.	Badan Koordinasi Penanaman Modal	-
46.	Badan Narkotika Nasional	-
47.	Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal	Permen Nomor 10 Tahun 2011 tgl 19 Agustus 2011
48.	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional	Perka Nomor 173/PER/B3/2011 tgl 26 Juli 2011
49.	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	-
50.	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	Perka Nomor KEP.03 Tahun 2011 tgl 10 November 2011
51.	Komisi Pemilihan Umum	
52.	Mahkamah Konstitusi	Perka Nomor 10 Tahun 2011 tgl 1 Desember 2011
53.	Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan	-
54.	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	Perka Nomor 1012/A/2011 tgl 21 November 2011
55.	Badan Tenaga Nuklir Nasional	Perka Nomor 201/KA/XI/2011 tgl 30 Vovember 2011



Lanjutan Tabel II.17.

No.	Kementerian/Lembaga	Peraturan Kepala Kementerian/Lembaga
56.	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	Perka Nomor 347 Tahun 2011 tgl 31 Oktober 2011
57.	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	Perka Nomor 367 Tahun 2011 tgl 19 Oktober 2011
58.	Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional	Perka Nomor 181.1.Tahun 2011 tgl 26 Desember 2011
59.	Badan Standarisasi Nasional	Perka Nomor 13 Tahun 2011 tgl 10 November 2011
60.	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	Perka Nomor 11 Tahun 2011 tgl 11 November 2011
61.	Lembaga Administrasi Negara	Perka Nomor 19 Tahun 2011 tgl 20 Oktober 2011
62.	Arsip Nasional Republik Indonesia	Perka Nomor 10 Tahun 2011 tgl 18 November 2011
63.	Badan Kepegawaian Negara	-
64.	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Perka Nomor KEP-882/K/SU/201 tgl 29 Juli 2011
65.	Kementerian Perdagangan	Permen Nomor 970/M-DAG/KEP/9/2011 tgl 28 September 2011
66.	Kementerian Negara Perumahan Rakyat	Permen Nomor 22 tahun 2011 tgl 6 Oktober 2011
67.	Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga	-
68.	Komisi Pemberantasan Korupsi	-
69.	Dewan Perwakilan Daerah	-
70.	Komisi Yudisial	Perka Nomor 2 Tahun 2011 tgl 1 Desember 2011
71.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Perka Nomor 203 tahun 2011 tgl 30 November 2011
72.	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	Perka Nomor PER.15/KA/XII/2011 tgl 19 Desember 2011
73.	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	-
74.	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Perka Nomor 9 Tahun 2011 tgl 5 September 2011
75.	Basarnas	Perka Nomor PK.16 Tahun 2011 tgl 1 November 2011
76.	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)	-
77.	Otorita Batam	-
78.	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)	-
79.	Sekretariat Kabinet	-
80.	Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)	-

Sumber : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 2012



Tabel II.18. Data jumlah dan nomenklatur Pemerintah Daerah yang telah memiliki Peraturan Kepala Daerah mengenai SPIP Tahun 2010 – 2011

No.	Pemerintah Daerah	Peraturan Kepala Daerah
81.	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	Pergub Nomor 09 Tahun 2010 tgl 22 April 2010
82.	Kab. Aceh Barat	Perbup Nomor 11 Tahun 2011 tgl 20 Juli 2011
83.	Kab. Aceh Besar	Perbup Nomor 12 Tahun 2010 tgl 29 Juni 2010
84.	Kab. Aceh Selatan	Perbup Nomor 7 Tahun 2010 tgl 13 Juli 2011
85.	Kab. Aceh Singkil	Perbup Nomor 20 Tahun 2011 tgl 21 September 2011
86.	Kab. Aceh Tengah	Perbup Nomor 19 Tahun 2010 tgl 31 Juni 2010
87.	Kab. Aceh Tenggara	Perbup Nomor 117 Tahun 2010 tgl 29 Agustus 2010
88.	Kab. Aceh Timur	Perbup Nomor 9 Tahun 2011 tgl 11 Mei 2010
89.	Kab. Aceh Utara	Perbup Nomor 11 Tahun 2011 tgl 4 Juli 2011
90.	Kab. Bireun	Perbup Nomor 12 Tahun 2011 tgl 27 Juni 2011
91.	Kab. Pidie	Perbup Nomor 3 Tahun 2010 tgl 28 April 2010
92.	Kab. Simeulue	Perbup Nomor 10 Tahun 2011 tgl 9 Mei 2011
93.	Kota Banda Aceh	Perwali Nomor 21 Tahun 2010 tgl 05 April 2010
94.	Kota Sabang	Perwali Nomor 21 Tahun 2010 tgl 12 Oktober 2010
95.	Kota Langsa	Perwali Nomor 40 Tahun 2010 tgl 28 Desember 2010
96.	Kota Lhokseumawe	Perwali Nomor 06 Tahun 2011 21 Maret 2011
97.	Kab. Nagan Raya	Perbup Nomor 3 Tahun 2011 tgl 27 Juni 2011
98.	Kab. Aceh Jaya	Perbup Nomor 5 Tahun 2010 tgl 15 April 2010
99.	Kab. Aceh Barat Daya	Perbup Nomor 16 Tahun 2011 tgl 4 Juli 2011
100.	Kab. Gayo Lues	Perbup Nomor 7 Tahun 2010 tgl 24 Juni 2010
101.	Kab. Aceh Tamiang	Perbup Nomor 9 Tahun 2011 tgl 18 Juli 2011
102.	Kab. Bener Meriah	Perbup Nomor 32 Tahun 2010 tgl 18 November 2010
103.	Kota Subulussalam	Perwali Nomor 19 Tahun 2010 tgl 19 Agustus 2010
104.	Kab. Pidie Jaya	Perbup Nomor 12 Tahun 2011 tgl 13 Juli 2011
105.	Provinsi Sumatera Utara	Pergub Nomor 33/2011 tgl 18 Mei 2011
106.	Kab. Asahan	Perbup Nomor 24 Tahun 2011 tgl 4 Juli 2011
107.	Kab. Dairi	Perbup Nomor 06/2011 tgl 27 Juni 2011
108.	Kab. Deli Serdang	Perbup Nomor 495/2011 tgl 6 Juni 2011
109.	Kab. Tanah Karo	Perbup Nomor 05/2010 tgl 29 Januari 2010
110.	Kab. Labuhan Batu	Perbup Nomor 58 Tahun 2011 tgl 29 November 2011
111.	Kab. Langkat	Perbup Nomor 19 Tahun 2011 tgl 8 Juli 2011
112.	Kab. Mandailing Natal	Perbup Nomor 57/2011 tgl 26 Mei 2011
113.	Kab. Nias	Perbup Nomor 19 Tahun 2011 tgl 21 Desember 2011
114.	Kab. Simalungun	Perbup Nomor 12 Tahun 2011 tgl 8 April 2011
115.	Kab. Tapanuli Selatan	Perbup Nomor 49/PR/2011 tgl 20 September 2011
116.	Kab. Tapanuli Tengah	Perbup Nomor 04 Tahun 2010 tgl 28 Juli 2010
117.	Kab. Tapanuli Utara	Perbup Nomor 04 Tahun 2010 tgl 23 Maret 2010
118.	Kab. Toba Samosir	Perbup Nomor 37 Tahun 2011 tgl 19 Desember 2011
119.	Kota Binjai	Perwali Nomor 061-4724/2010 tgl 30 Juli 2010
120.	Kota Medan	Perwali Nomor 23/2011 tgl 12 Mei 2011
121.	Kota Pematang Siantar	Perwali Nomor 12 Tahun 2011 tgl 20 September 2011
122.	Kota Sibolga	Perwali Nomor 180/15/2011 tgl 11 Mei 2011
123.	Kota Tanjung Balai	Perwali Nomor 13/2010 tgl 18 November 2010
124.	Kota Tebing Tinggi	Perwali Nomor 07/2011 tgl 2 Mei 2011



Lanjutan Tabel II.18.

No.	Pemerintah Daerah	Peraturan Kepala Daerah
125.	Kota Padang Sidempuan	Perwali Nomor 16.B/PW/2010 tgl 29 September 2010
126.	Kab. Pakpak Bharat	Perbup Nomor 7 Tahun 2011 tgl 27 Juli 2011
127.	Kab. Nias Selatan	Perbup Nomor 09 Tahun 2011 tgl 10 Mei 2011
128.	Kab. Humbang Hasundutan	Perbup Nomor 13/2010 tgl 19 November 2010
129.	Kab. Serdang Berdagai	Perbup Nomor 34 Tahun 2011 tgl 16 Agustus 2011
130.	Kab. Samosir	Perbup Nomor 3/2011 tgl 8 April 2011
131.	kab. Batu bara	Perbup Nomor 12/2011 tgl 11 April 2011
132.	Kab. Labuhan Batu Utara	Perbup Nomor 06/2011 tgl 20 Juni 2011
133.	Kab. Labuhan Batu Selatan	Perbup Nomor 15/2011 tgl 22 April 2011
134.	Kab. Padang Lawas Utara	Perbup Nomor 08/2011 tgl 4 Mei 2011
135.	Kab. Padang Lawas	Perbup Nomor 08 Tahun 2010 tgl 3 Mei 2010
136.	Kab Nias Utara	Perbup Nomor 13/2011 tgl 4 Agustus 2011
137.	Kab Nias Barat	Perbup Nomor 11 Tahun 2011 tgl 30 September 2011
138.	Kota Gunung Sitoli	Perwali Nomor 7/2011 tgl 9 Mei 2011
139.	Provinsi Sumatera Barat	Pergub Nomor 40 Tahun 2009 tgl 30 September 2009
140.	Kab. Limapuluh Kota	-
141.	Kab. Agam	-
142.	Kab. Kepulauan Mentawai	-
143.	Kab. Padang Pariaman	-
144.	Kab. Pasaman	Perbup Nomor 18 Tahun 2010 tgl 19 Juli 2010
145.	Kab. Sijunjung	Perbup Nomor 8 Tahun 2011 tgl 08 Maret 2011
146.	Kab. Solok	Perbup Nomor 38 Tahun 2011 tgl 11 Juli 2011
147.	Kab. Solok	
148.	Kab. Tanah Datar	Perbup Nomor 68 Tahun 2009 tgl 3 Desember 2009
149.	Kota Bukit Tinggi	Perwali Nomor 18 Tahun 2010 tgl 23 Desember 2010
150.	Kota Padang Panjang	Perwali Nomor 16 Tahun 2011 tgl 21 Noovember 2011
151.	Kota Padang	
152.	Kota Payakumbuh	Perwali Nomor 6 Tahun 2011 tgl 21 Maret 2011
153.	Kota Sawahlunto	Perwali Nomor 67 Tahun 2010 tgl 10 Juli 2010
154.	Kota Solok	Perwali Nomor 6 Tahun 2011 tgl 21 Maret 2011
155.	Kota Pariaman	Perwali Nomor 67 Tahun 2010 tgl 10 Juli 2010
156.	Kab. Pasaman Barat	
157.	Kab. Dharmasraya	
158.	Kab. Solok Selatan	
159.	Provinsi Riau	Pergub Nomor 31 Tahun 2010 tgl 31 Agustus 2010
160.	Kab. Bengkalis	Perbup Nomor 340/KPTS/XII/2010 tgl 28 Desember 2010
161.	Kab. Indragiri Hilir	
162.	Kab. Indragiri Hulu	Perbup Nomor 36 Tahun 2010 tgl 11 Oktober 2010
163.	Kab. Kampar	Perbup Nomor 28 Tahun 2010 tgl 8 September 2010
164.	Kab. Kuantan Singingi	
165.	Kab. Pelalawan	



Lanjutan Tabel II.18.

No.	Pemerintah Daerah	Peraturan Kepala Daerah
166.	Kab. Rokan Hilir	Perbup Nomor 26 Tahun 2009 tgl 28 Desember 2009
167.	Kab. Rokan Hulu	Perbup Nomor 5 Tahun 2011 tgl 21 Febreuari 2011
168.	Kab. Siak	Perbup Nomor 31 Tahun 2011 tgl 21 Juli 2011
169.	Kota Dumai	Perwali Nomor 23 Tahun 2010 tgl 15 September 2010
170.	Kota Pekanbaru	Perwali Nomor 24 Tahun 2010 tgl 21 Desember 2010
171.	Kab Kep. Meranti	Perbup Nomor 52 Tahun 2010 tgl 10 November 2010
172.	Provinsi Kepulauan Riau	Pergub Nomor 16 Tahun 2010 tgl 5 Mei 2010
173.	Kab. Bintan	Perbup Nomor 16 Tahun 2010 tgl 18 April 2010
174.	Kab. Natuna	
175.	Kab. Karimun	
176.	Kota Batam	
177.	Kota Tanjung Pinang	Perwali Nomor 31 Tahun 2011 tgl 15 Juli 2011
178.	Kab. Lingga	Perbup Nomor 5 Tahun 2011 tgl 28 Januari 2011
179.	Kab. Kepulauan Anambas	Perbup Nomor 15 Tahun 2011 tgl 08 Agustus 2011
180.	Provinsi Jambi	Pergub Nomor 47 Tahun 2011 tgl 02 Desember 2011
181.	Kab. Batanghari	
182.	Kab. Bungo	
183.	Kab. Kerinci	Perbup Nomor 23 Tahun 2011 tgl 11 November 2011
184.	Kab. Merangin	Perbup Nomor 28 Tahun 2010 tgl 22 Oktober 2010
185.	Kab. Muaro Jambi	
186.	Kab. Sarolangun	
187.	Kab. Tanjung Jabung Barat	
188.	Kab. Tanjung Jabung Timur	Perbup Nomor 15 Tahun 2010, tgl 18 Mei 2010
189.	Kab. Tebo	
190.	Kota Jambi	
191.	Kota Sungai Penuh	Perwali Nomor 22 Tahun 2010. tgl 6 Juni 2010
192.	Provinsi Sumatera Selatan	Pergub Nomor 51 Tahun 2010 tgl 21 September 2010
193.	Kab. Lahat	Perbup Nomor 1 Tahun 2011 tgl 03 Januari 2011
194.	Kab. Musi Banyuasin	Perbup Nomor 5 Tahun 2011 tgl 19 Januari 2011
195.	Kab. Musi Rawas	Perbup Nomor 11 Tahun 2010 tgl 16 Juni 2010
196.	Kab. Muara Enim	Perbup Nomor 42 Tahun 2010 tgl 31 Desember 2010
197.	Kab. Ogan Komering Ilir	Perbup Nomor 2 Tahun 2011 tgl 17 Januari 2011
198.	Kab. Ogan Komering Ulu	Perbup Nomor 5 Tahun 2010 tgl 06 Oktober 2010
199.	Kota Palembang	Perwali Nomor 46 Tahun 2010 tgl 15 September 2010
200.	Kota Pagar Alam	Perwali Nomor 2 Tahun 2011 tgl 20 Januari 2011
201.	Kota Lubuk Linggau	Perwali Nomor 19 Tahun 2010 tgl 16 September 2010
202.	Kota Prabumulih	Perwali Nomor 2 Tahun 2011 tgl 13 Januari 2011
203.	Kab. Banyuasin	Perbup Nomor 633 Tahun 2010 tgl 29 Oktober 2010
204.	Kab. Ogan Ilir	Perbup Nomor 3 Tahun 2011 tgl 14 Januari 2011
205.	Kab. OKU Timur	Perbup Nomor 14 Tahun 2010 tgl 31 Agustus 2010
206.	Kab. OKU Selatan	Perbup Tahun 2010



Lanjutan Tabel II.18.

No.	Pemerintah Daerah	Peraturan Kepala Daerah
207.	Kab. Empat lawang	Perbup Nomor 5 Tahun 2011 tgl 24 Februari 2011
208.	Provinsi Bengkulu	Pergub Nomor 9 Tahun 2010 tgl 12 Oktober 2010
209.	Kab. Bengkulu Selatan	Perbup Nomor 19 Tahun 2009 tgl 16 Desember 2009
210.	Kab. Bengkulu Utara	Perbup Nomor 9 Tahun 2010 tgl 3 Mei 2010
211.	Kab. Rejang Lebong	Perbup Nomor 12 Tahun 2010 tgl 15 Juni 2010
212.	Kota Bengkulu	Perwali Nomor 30 Tahun 2009 tgl 30 Desember 2009
213.	Kab. Kaur	Perbup Nomor 11 Tahun 2010 tgl 20 Juli 2010
214.	Kab. Seluma	Perbup Nomor 11 Tahun 2010 tgl 16 November 2010
215.	Kab. Mukomuko	Perbup Nomor 8 Tahun 2010 tgl 18 Maret 2010
216.	Kab. Lebong	Perbup Nomor 367 Tahun 2010 tgl 6 Agustus 2010
217.	Kab. Kepahiang	Perbup Nomor 07 Tahun 2010 tgl 15 April 2010
218.	Kab. Bengkulu Tengah	Perbup Nomor 29 Tahun 2010 tgl 15 April 2010
219.	Provinsi Lampung	Pergub Nomor 12 Tahun 2010 tgl 19 April 2010
220.	Kab. Lampung Barat	Perbup Nomor 10 Tahun 2010 tgl 17 Februari 2010
221.	Kab. Lampung Selatan	Perbup Nomor 3 Tahun 2010 tgl 9 Maret 2010
222.	Kab. Lampung Tengah	Perbup Nomor 9 Tahun 2010 tgl 3 Mei 2010
223.	Kab. Lampung Utara	Perbup Nomor 6 Tahun 2010 tgl 15 Februari 2010
224.	Kab. Lampung Timur	Perbup Nomor 14 Tahun 2010 tgl 3 Mei 2010
225.	Kab. Tanggamus	Perbup Nomor 7 Tahun 2010 tgl 12 April 2010
226.	Kab. Tulang Bawang	Perbup Nomor 6 Tahun 2010 tgl 11 Februari 2010
227.	Kab. Way Kanan	Perbup Nomor 10 Tahun 2010 tgl 12 April 2010
228.	Kota Bandar Lampung	Perwali Nomor 22 Tahun 2010 tgl 29 April 2010
229.	Kota Metro	Perwali Nomor 4 Tahun 2010 tgl 15 Maret 2010
230.	Kab. Pesawaran	Perbup Nomor 2 Tahun 2010 tgl 12 April 2010
231.	Kab Tulang Bawang Barat	Perbup Nomor 4 Tahun 2010 tgl 28 Januari 2010
232.	Kab Mesuji	Perbup Nomor 10 Tahun 2010 tgl 15 Februari 2010
233.	Kab Pringsewu	Perbup Nomor 6 Tahun 2010 tgl 11 Maret 2010
234.	Provinsi DKI Jakarta	Pergub Nomor 171 Tahun 2010 tgl 23 September 2010
235.	Provinsi Jawa Barat	Pergub Nomor 10 Tahun 2011 tgl 23 Februari 2011
236.	Kab. Bandung	
237.	Kab. Bekasi	
238.	Kab. Bogor	
239.	Kab. Ciamis	Perbup Nomor 20 Tahun 2011 tgl 13 April 2011
240.	Kab. Cianjur	
241.	Kab. Cirebon	Perbup Nomor 14 Tahun 2011 tgl 11 April 2011
242.	Kab. Garut	
243.	Kab. Indramayu	
244.	Kab. Karawang	Perbup Nomor 43 Tahun 2010 tgl 09 Desember 2010
245.	Kab. Kuningan	
246.	Kab. Majalengka	
247.	Kab. Purwakarta	
248.	Kab. Subang	
249.	Kab. Sukabumi	Perbup Nomor 24 Tahun 2010 tgl 19 Desember 2010



Lanjutan Tabel II.18.

No.	Pemerintah Daerah	Peraturan Kepala Daerah
250.	Kab. Sumedang	
251.	Kab. Tasikmalaya	Perbup Nomor 12 Tahun 2011 tgl 21 April 2011
252.	Kota Bandung	Perwali Nomor 944 Tahun 2010 tgl 30 Desember 2010
253.	Kota Bekasi	Perwali Nomor 30 Tahun 2010 tgl 13 Oktober 2010
254.	Kota Bogor	Perwali Nomor 2 Tahun 2011 tgl 03 Januari 2011
255.	Kota Cirebon	
256.	Kota Depok	Perwali Nomor 49 Tahun 2010 tgl 28 Desember 2010
257.	Kota Sukabumi	
258.	Kota Cimahi	
259.	Kota Tasikmalaya	Perwali Nomor 32 Tahun 2011 tgl 07 April 2011
260.	Kota Banjar	Perwali Nomor 22 Tahun 2011 tgl 28 Juli 2011
261.	Kab. Bandung Barat	Perbup Nomor 30 Tahun 2010 tgl 10 Desember 2010
262.	Provinsi Banten	Pergub Nomor 26 Tahun 2010 tgl 27 Desember 2010
263.	Kab. Lebak	
264.	Kab. Pandeglang	Perbup Nomor 19 Tahun 2010 tgl 28 Juli 2010
265.	Kab. Serang	Perbup Nomor 45 Tahun 2010 tgl 12 Agustus 2010
266.	Kab. Tangerang	Perbup Nomor 12 Tahun 2010 tgl 21 Desember 2010
267.	Kota Cilegon	
268.	Kota Tangerang	Perwali Nomor 41 Tahun 2010 tgl 31 Desember 2010
269.	Kota Serang	
270.	Kota Tangerang Selatan	Perwali Nomor 69 Tahun 2011 tgl 11 Juli 2011
271.	Provinsi Jawa Tengah	Pergub Nomor 89 Tahun 2010 tgl 23 Agustus 2010
272.	Kab. Banjarnegara	Perbup Nomor 351 Tahun 2010 tgl 25 Mei 2010
273.	Kab. Banyumas	Perbup Nomor 64 Tahun 2010 tgl 16 Februari 2010
274.	Kab. Batang	Perbup Nomor 11 Tahun 2011 tgl 07 Februari 2011
275.	Kab. Blora	Perbup Nomor 84 Tahun 2010 tgl 19 November 2010
276.	Kab. Boyolali	Perbup Nomor 19 Tahun 2009 tgl 20 November 2009
277.	Kab. Brebes	Perbup Nomor 023.A Tahun 2010 tgl 18 Juni 2010
278.	Kab. Cilacap	Perbup Nomor 71 Tahun 2010 tgl 19 Oktober 2010
279.	Kab. Demak	Perbup Nomor 13 Tahun 2010 tgl 31 Mei 2010
280.	Kab. Grobogan	Perbup Nomor 15 Tahun 2011 tgl 16 April 2011
281.	Kab. Jepara	Perbup Nomor 37 Tahun 2009 tgl 01 Desember 2009
282.	Kab. Karanganyar	Perbup Nomor 18 Tahun 2010 tgl 11 Maret 2010
283.	Kab. Kebumen	Perbup Nomor 7 Tahun 2011 tgl 14 Januari 2011
284.	Kab. Kendal	Perbup Nomor 36 Tahun 2010 tgl 29 Oktober 2010
285.	Kab. Klaten	Perbup Nomor 7 Tahun 2011 tgl 02 Maret 2011
286.	Kab. Kudus	-
287.	Kab. Magelang	-
288.	Kab. Pati	Perbup Nomor 12 Tahun 2011 tgl 09 Februari 2011
289.	Kab. Pekalongan	Perbup Nomor 14 Tahun 2010 tgl 03 Mei 2010
290.	Kab. Pemasang	Perbup Nomor 69 Tahun 2007 tgl 28 Desember 2007
291.	Kab. Purbalingga	Perbup Nomor 88 Tahun 2011 tgl 08 Oktober 2011
292.	Kab. Purworejo	Perbup Nomor 9 Tahun 2010 tgl 28 Maret 2010
293.	Kab. Rembang	Perbup Nomor 21 Tahun 2011 tgl 26 April 2011
294.	Kab. Semarang	Perbup Nomor 74 Tahun 2011 tgl 04 Juli 2011
295.	Kab. Sragen	Perbup Nomor 79 Tahun 2009 tgl 31 Desember 2009
296.	Kab. Sukoharjo	Perbup Nomor 54 Tahun 2010 tgl 28 Desember 2010



Lanjutan Tabel II.18.

No.	Pemerintah Daerah	Peraturan Kepala Daerah
297.	Kab. Tegal	Perbup Nomor 43 Tahun 2010 tgl 08 Desember 2010
298.	Kab. Temanggung	Perbup Nomor 59 Tahun 2010 tgl 15 Desember 2010
299.	Kab. Wonogiri	Perbup Nomor 23 Tahun 2011 tgl 07 Juni 2011
300.	Kab. Wonosobo	Perbup Nomor 37 Tahun 2010 tgl 01 November 2010
301.	Kota Magelang	Perwali Nomor 14 Tahun 2011 tgl 26 Mei 2011
302.	Kota Pekalongan	Perwali Nomor 10 Tahun 2010 tgl 30 Maret 2010
303.	Kota Salatiga	Perwali Nomor 34 Tahun 2011 tgl 12 September 2011
304.	Kota Semarang	Perwali Nomor 24 Tahun 2010 tgl 20 Oktober 2010
305.	Kota Surakarta	Perwali Nomor 20 Tahun 2009 tgl 01 Desember 2009
306.	Kota Tegal	Perwali Nomor 02 Tahun 2011 tgl 13 Januari 2011
307.	Provinsi DI Yogyakarta	Pergub Nomor 52 Tahun 2010 tgl 21 Desember 2010
308.	Kab. Bantul	Perbup Nomor 10 Tahun 2011 tgl 25 Januari 2011
309.	Kab. Gunung Kidul	Perbup Nomor 6 Tahun 2011 tgl 11 Maret 2011
310.	Kab. Kulon Progo	Perbup Nomor 16 Tahun 2010 tgl 26 April 2010
311.	Kab. Sleman	Perbup Nomor 35 Tahun 2010 tgl 1 sept 2010
312.	Kota Yogyakarta	Perwali Nomor 61 Tahun 2010 tgl 07 September 2010
313.	Provinsi Jawa Timur	Pergub Nomor 66 thn 2010 tgl 27 Agustus 2010
314.	Kab. Bangkalan	Perbup Nomor 29 thn 2010 tgl 28 September 2010
315.	Kab. Banyuwangi	Perbup Nomor 31 thn 2010 tgl 7 Oktober 2010
316.	Kab. Blitar	Perbup Nomor 26 thn 2010 tgl 4 Oktober 2010
317.	Kab. Bojonegoro	Perbup Nomor 41 thn 2010 tgl 30 September 2010
318.	Kab. Bondowoso	Perbup Nomor 18 thn 2010 tgl 16 Oktober 2010
319.	Kab. Gresik	Perbup Nomor 36 th 2010 tgl 5 Oktober 2010
320.	Kab. Jember	Perbup Nomor 22 thn 2010 tgl 18 Juni 2010
321.	Kab. Jombang	Perbup Nomor 10 thn 2010 tgl 7 Oktober 2010
322.	Kab. Kediri	Perbup Nomor 26 thn 2010 tgl 7 Oktober 2010
323.	Kab. Lamongan	Perbup Nomor 39 Tahun 2010 tgl 07 Oktober 2010
324.	Kab. Lumajang	Perbup Nomor 14 Tahun 2010 tgl 28 September 2010
325.	Kab. Madiun	Perbup Nomor 26 thn 2010 tgl 1 Juli 2010
326.	Kab. Magetan	Perbup Nomor 46 thn 2010 tgl 6 Oktober 2010
327.	Kab. Malang	Perbup Nomor 21 Tahun 2010 tgl 25 Oktober 2010
328.	Kab. Mojokerto	Perbup Nomor 52 Tahun 2010 tgl 30 Agustus 2010
329.	Kab. Nganjuk	Perbup Nomor 38 Tahun 2010 tgl 06 Oktober 2010
330.	Kab. Ngawi	Perbup Nomor 269 Tahun 2010 tgl 06 Oktober 2010
331.	Kab. Pacitan	Perbup Nomor 26 Tahun 2010 tgl 14 Oktetober 2010
332.	Kab. Pamekasan	Perbup Nomor 37 A thn 2010 tgl 4 Oktober 2010
333.	Kab. Pasuruan	Perbup Nomor 32 Tahun 2010 tgl 06 Oktober 2010
334.	Kab. Ponorogo	Perbup Nomor 30 thn 2010 tgl 4 Oktober 2010
335.	Kab. Probolinggo	Perbup Nomor 22 Tahun 2010 tgl 22 Oktober 2010
336.	Kab. Sampang	Perbup Nomor 23 th 2010 tgl 8 September 2010
337.	Kab. Sidoarjo	Perbup Nomor 23 Tahun 2010 tgl 08 Oktober 2010
338.	Kab. Situbondo	Perbup Nomor 25 thn 2010 tgl 23 Februari 2010
339.	Kab. Sumenep	Perbup Nomor 14 Tahun 2010 tgl 04 Oktober 2010
340.	Kab. Trenggalek	Perbup Nomor 72 Tahun 2010 tgl 08 Oktober 2010
341.	Kab. Tuban	Perbup Nomor 21 thn 2010 tgl 5 Oktober 2010
342.	Kab. Tulungagung	Perbup Nomor 43 thn 2009 tgl 7 Desember 2009
343.	Kota Blitar	Perwali Nomor 18 thn 2010 tgl 23 Agustus 2010



Lanjutan Tabel II.18.

No.	Pemerintah Daerah	Peraturan Kepala Daerah
344.	Kota Kediri	Perwali Nomor 37 thn 2010 tgl 5 Oktober 2010
345.	Kota Madiun	Perwali Nomor 23 Tahun 2010 tgl 06 Oktober 2010
346.	Kota Malang	Perwali Nomor 39 thn 2010 tgl 27 September 2010
347.	Kota Mojokerto	Perwali Nomor 52 thn 2010 tgl 30 Agustus 2010
348.	Kota Pasuruan	Perwali Nomor 11 Tahun 2011 tgl 04 Februari 2011
349.	Kota Probolinggo	Perwali Nomor 32 th 2010 tgl 4 Oktober 2010
350.	Kota Surabaya	Perwali Nomor 51 th 2010 tgl 7 Oktober 2010
351.	Kota Batu	Perwali Nomor 33 thn 2010 tgl 23 September 2010
352.	Provinsi Kalimantan Barat	Pergub Nomor 30 Tahun 2010 tgl 23 Agustus 2010
353.	Kab. Bengkayang	Perbup Nomor 28 Tahun 2010 tgl 05 Maret 2010
354.	Kab. Landak	Perbup Nomor 08 Tahun 2010 tgl 14 September 2010
355.	Kab. Kapuas Hulu	Perbup Nomor 19 Tahun 2010 tgl 29 September 2010
356.	Kab. Ketapang	Perbup Nomor 17 Tahun 2010 tgl 24 Nopember 2010
357.	Kab. Pontianak	Perbup Nomor 22 Tahun 2010 tgl 11 Oktober 2010
358.	Kab. Sambas	Perbup Nomor 26 Tahun 2010 tgl 11 Nopember 2010
359.	Kab. Sanggau	Perbup Nomor 27 Tahun 2010 tgl 18 Agustus 2010
360.	Kab. Sintang	Perbup Nomor 135 Tahun 2010 tgl 02 September 2010
361.	Kota Pontianak	Perwali Nomor 06 Tahun 2010 tgl 18 Januari 2010
362.	Kota Singkawang	Perwali Nomor 25 Tahun 2010 tgl 20 Oktober 2010
363.	Kab. Sekadau	Perbup Nomor 19 Tahun 2010 tgl 02 Agustus 2010
364.	Kab. Melawi	Perbup Nomor 30 Tahun 2010 tgl 24 September 2010
365.	Kab. Kayong Utara	Perbup Nomor 11 Tahun 2010 tgl 04 Oktober 2010
366.	Kab. Kubu Raya	Perbup Nomor 46 Tahun 2010 tgl 24 Juni 2010
367.	Provinsi Kalimantan Tengah	Pergub Nomor 41 Tahun 2009 tgl 31 Desember 2009
368.	Kab. Barito Selatan	Perbup Nomor 11 Tahun 2011 tgl 09 Maret 2011
369.	Kab. Barito Utara	Perbup Nomor 18 Tahun 2010 tgl 01 Maret 2010
370.	Kab. Kapuas	Perbup Nomor 15 Tahun 2010 tgl 14 Juli 2010
371.	Kab. Kotawaringin Barat	Perbup Nomor 10 Tahun 2011 tgl 20 April 2011
372.	Kab. Kotawaringin Timur	Perbup Nomor 16 Tahun 2010 tgl 31 Mei 2010
373.	Kota Palangkaraya	Perbup Nomor 53 Tahun 2010 tgl 26 Oktober 2010
374.	Kab. Barito Timur	Perbup Nomor 81 Tahun 2010 tgl 28 Desember 2010
375.	Kab. Murung Raya	Perbup Nomor 12 Tahun 2010 tgl 01 Oktober 2010
376.	Kab. Pulang Pisau	Perbup Nomor 09 Tahun 2010 tgl 07 Januari 2010
377.	Kab. Gunung Mas	Perbup Nomor 25 Tahun 2009 tgl 30 Desember 2009
378.	Kab. Lamandau	Perbup Nomor 17 Tahun 2011 tgl 21 Maret 2011
379.	Kab. Sukamara	Perbup Nomor 5 Tahun 2011 tgl 04 April 2011
380.	Kab. Katingan	Perbup Nomor 24 Tahun 2010 tgl 14 Desember 2010
381.	Kab. Seruyan	Perbup Nomor 14 Tahun 2011 tgl 20 April 2011
382.	Provinsi Kalimantan Selatan	Pergub No.22 Tahun 2010 tgl 28 Juni 2010
383.	Kab. Banjar	Perbup No.18 Tahun 2010 tgl 5 Juli 2010
384.	Kab. Barito Kuala	Perbup No.12 Tahun 2010 tgl 5 Juli 2010



Lanjutan Tabel II.18.

No.	Pemerintah Daerah	Peraturan Kepala Daerah
385.	Kab. Hulu Sungai Selatan	Perbup No.14 Tahun 2010 tgl 23 Agustus 2010
386.	Kab. Hulu Sungai Tengah	Perbup Nomor 1 Tahun 2011 7 Januari 2011
387.	Kab. Hulu Sungai Utara	Perbup No.11 Tahun 2010 tgl 26 Agustus 2010
388.	Kab. Kota Baru	Perbup No.31 Tahun 2010 tgl 30 Agustus 2010
389.	Kab. Tabalong	Perbup No.18 Tahun 2010 tgl 20 September 2010
390.	Kab. Tanah Laut	Perbup No.69 Tahun 2010 tgl 21 Juli 2010
391.	Kab. Tapin	Perbup No.09 Tahun 2010 tgl 15 Juli 2010
392.	Kota Banjarbaru	Perwali Nomor 2 Tahun 2011 tgl 14 Januari 2010
393.	Kota Banjarmasin	Perwali Nomor 28 Tahun 2010 tgl 28 Juni 2010
394.	Kab. Balangan	Perbup No.22 Tahun 2010 tgl 14 Juni 2010
395.	Kab. Tanah Bumbu	Perbup No.18 Tahun 2010 tgl 15 Nopember 2010
396.	Provinsi Kalimantan Timur	Pergub Nomor 89 Tahun 2009 tgl 15 Desember 2009
397.	Kab. Berau	Perbup Nomor 10 Tahun 2010 tgl 06 September 2010
398.	Kab. Bulungan	Perbup Nomor 14 Tahun 2010 tgl 27 Oktober 2010
399.	Kab. Kutai Kartanegara	
400.	Kab. Kutai Barat	
401.	Kab. Kutai Timur	Perbup Nomor 02 Tahun 2011 tgl 02 Februari 2011
402.	Kab. Malinau	Perbup Nomor 20 Tahun 2010 tgl 05 Oktober 2010
403.	Kab. Nunukan	Perbup Nomor 57 Tahun 2010 tgl 12 Oktober 2010
404.	Kab. Paser	Perbup Nomor 25 Tahun 2010 tgl 14 Oktober 2010
405.	Kota Balikpapan	Perwali Nomor 20 Tahun 2010 tgl 14 September 2010
406.	Kota Bontang	Perwali Nomor 20 Tahun 2010 tgl 05 Juli 2010
407.	Kota Samarinda	Perwali Nomor 31 Tahun 2010 tgl 13 Oktober 2010
408.	Kota Tarakan	Perwali Nomor 66 Tahun 2009, tgl 10 November 2009
409.	Kab. Penajam Paser Utara	
410.	Kab Tana Tidung	Perbup Nomor 12 Tahun 2010
411.	Provinsi Sulawesi Utara	Pergub Nomor 23 Tahun 2010 tgl 21 Juli 2010
412.	Kab. Bolaang Mongondow	Perbup Nomor 11 Tahun 2010 tgl 26 Juli 2010
413.	Kab. Minahasa	Perbup Nomor 9 Tahun 2010 tgl 12 Januari 2011
414.	Kab. Sangihe	Perbup Nomor 21 Tahun 2010 tgl 28 Okt 2010
415.	Kota Bitung	Perwali Nomor 29 Tahun 2010 tgl 29 November 2010
416.	Kota Manado	Perwali Nomor 58a Tahun 2011 tgl 28 April 2011
417.	Kab. Kepulauan Talaud	Perbup Nomor 16 Tahun 2010 tgl 08 Februari 2010
418.	Kab. Minahasa Selatan	Perbup Nomor 128 Tahun 2011 tgl 17 Juli 2011
419.	Kota Tomohon	Perwali Nomor 24 Tahun 2011 tgl 24 Agustus 2011
420.	Kab. Minahasa Utara	Perbup Nomor 5 Tahun 2010 tgl 10 Nov 2010
421.	Kota Kotamobagu	Perwali Nomor 22 Tahun 2010 tgl 23 November 2010
422.	Kab. Bolaang Mangondow Utara	Perbup Nomor 16 Tahun 2010 tgl 12 Juli 2010
423.	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	Perbup Nomor 12 Tahun 2010 tgl 13 Agustus 2010
424.	Kab. Minahasa Tenggara	Perbup Nomor 5 Tahun 2010 tgl 11 Oktober 2010



Lanjutan Tabel II.18.

No.	Pemerintah Daerah	Peraturan Kepala Daerah
425.	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Perbup Nomor 6 Tahun 2010 tgl 16 Juni 2010
426.	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Perbup Nomor 88 Tahun 2010 tgl 14 Juni 2010
427.	Provinsi Sulawesi Tengah	-
428.	Kab. Banggai	-
429.	Kab. Banggai Kepulauan	-
430.	Kab. Buol	-
431.	Kab. Toli Toli	-
432.	Kab. Donggala	-
433.	Kab. Morowali	-
434.	Kab. Poso	-
435.	Kota Palu	-
436.	Kab. Parigi Moutong	-
437.	Kab. Tojo Una Una	-
438.	Kab. Sigi	-
439.	Provinsi Sulawesi Selatan	Pergub Nomor 62 Tahun 2010 tgl 12 Oktober 2010
440.	Kab. Bantaeng	Perbup Nomor 35 Tahun 2011 tgl 09 November 2011
441.	Kab. Barru	
442.	Kab. Bone	Perbup Nomor 25 Tahun 2010 tgl 4 November 2010
443.	Kab. Bulukumba	Perbup Nomor 31 Tahun 2010 tgl 28 Oktober 2010
444.	Kab. Enrekang	
445.	Kab. Gowa	Perbup Nomor 36 Tahun 2010 tgl 29 Oktober 2010
446.	Kab. Jeneponto	Perbup Nomor 7 Tahun 2010 tgl 5 Oktober 2010
447.	Kab. Luwu	
448.	Kab. Luwu Utara	Perbup Nomor 11 Tahun 2010 tgl 19 Oktober 2010
449.	Kab. Maros	Perbup Nomor 17 Tahun 2011 tgl 17 Januari 2011
450.	Kab. Pangkajene Kepulauan	Perbup Nomor 7 Tahun 2011 tgl 26 Januari 2011
451.	Kab. Pinrang	Perbup Nomor 20 Tahun 2010 tgl 19 Oktober 2010
452.	Kab. Kepulauan Selayar	
453.	Kab. Sidenreng Rappang	
454.	Kab. Sinjai	Perbup Nomor 7 Tahun 2010 tgl 6 Mei 2010
455.	Kab. Soppeng	Perbup Nomor 25 Tahun 2010 tgl 19 Oktober 2010
456.	Kab. Takalar	
457.	Kab. Tana Toraja	Perbup Nomor 23 Tahun 2010 tgl 27 Oktober 2010
458.	Kab. Wajo	
459.	Kota Parepare	Perwali Nomor 23 Tahun 2010 tgl 29 Oktober 2010
460.	Kota Makassar	Perwali Nomor 33 Tahun 2010 tgl 12 Oktober 2010
461.	Kota Palopo	Perwali Nomor 14 Tahun 2010 tgl 18 Oktober 2010
462.	Kab. Luwu Timur	
463.	Kab. Tana Toraja Utara	
464.	Provinsi Sulawesi Barat	Pergub Nomor 9 Tahun 2010 tgl 25 Oktober 2010
465.	Kab. Majene	



Lanjutan Tabel II.18.

No.	Pemerintah Daerah	Peraturan Kepala Daerah
466.	Kab. Mamuju	Perbup Nomor 9 Tahun 2010 tgl Oktober 2010
467.	Kab. Polewali Mandar	
468.	Kab. Mamasa	
469.	Kab. Mamuju Utara	
470.	Provinsi Sulawesi Tenggara	Pergub Nomor 17 Tahun 2010 tgl 19 Juli 2010
471.	Kab. Buton	Perbup Nomor 7 Tahun 2011 tgl 16 Maret 2011
472.	Kab. Konawe	Perbup Nomor 21 Tahun 2010 tgl 29 November 2010
473.	Kab. Kolaka	Perbup Nomor 2 Tahun 2010 tgl 18 Januari 2010
474.	Kab. Muna	Perbup Nomor 10 Tahun 2010 tgl 15 Oktober 2010
475.	Kota Kendari	Perwali Nomor 3 Tahun 2010 tgl 18 Januari 2010
476.	Kota Bau bau	Perwali Nomor 29 Tahun 2010 tgl 6 Oktober 2010
477.	Kab. Konawe Selatan	Perbup Nomor 5 Tahun 2010 tgl 6 September 2010
478.	Kab. Bombana	Perbup Nomor 13 Tahun 2010 tgl 5 November 2010
479.	Kab. Wakatobi	Perbup Nomor 2A Tahun 2010 tgl 2 Januari 2010
480.	Kab. Kolaka Utara	Perbup Nomor 800/146 Tahun 2010 tgl 1 Juli 2010
481.	Kab. Konawe Utara	Perbup Nomor 14 Tahun 2010 tgl 23 Desember 2010
482.	Kab. Buton Utara	Perbup Nomor 23 Tahun 2010 tgl 18 September 2010
483.	Provinsi Bali	Pergub Nomor 27 Tahun 2010 tgl 29 Juli 2010
484.	Kab. Badung	Perbup Nomor 28 Tahun 2010 tgl 8 Juni 2010
485.	Kab. Bangli	Perbup Nomor 25 Tahun 2010 tgl 29 Oktober 2010
486.	Kab. Buleleng	Perbup Nomor 37 Tahun 2010 tgl 30 Agustus 2010
487.	Kab. Gianyar	Perbup Nomor 61 Tahun 2009 tgl 23 Desember 2009
488.	Kab. Jembrana	Perbup Nomor 26 Tahun 2010 tgl 14 Juni 2010
489.	Kab. Karangasem	Perbup Nomor 26 Tahun 2010 tgl 2 Juli 2010
490.	Kab. Klungkung	Perbup Nomor 18 Tahun 2010 tgl 8 Oktober 2010
491.	Kab. Tabanan	Perbup Nomor 16 Tahun 2010 tgl 7 Mei 2010
492.	Kota Denpasar	Perwali Nomor 20 Tahun 2010 tgl 23 Juli 2010
493.	Provinsi Nusa Tenggara Barat	
494.	Kab. Bima	Perbup Nomor 5 Tahun 2010 tgl 11 Juni 2010
495.	Kab. Dompu	Perbup Nomor 30 Tahun 2010 tgl 9 September 2010
496.	Kab. Lombok Barat	Perbup Nomor 24 Tahun 2010 tgl 8 Juni 2010
497.	Kab. Lombok Tengah	Perbup Nomor 32 Tahun 2011 tgl 17 Desember 2011
498.	Kab. Lombok Timur	Perbup Nomor 31 Tahun 2010 tgl 1 Juni 2010
499.	Kab. Sumbawa	Perbup Nomor 43 Tahun 2010 tgl 4 Juni 2010
500.	Kota Mataram	Perwali Nomor 13 Tahun 2010 tanggal 21 Juni 2010
501.	Kota Bima	Perwali Nomor 04 Tahun 2010 tgl 15 Juni 2010
502.	Kab. Sumbawa Barat	Perbup Nomor 26 Tahun 2010 tgl 17 September 2010
503.	Kab. Lombok Utara	Perbup Nomor 7 Tahun 2010 tgl 24 Mei 2010
504.	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pergub Nomor 39 Tahun 2010 tgl 15 November 2010
505.	Kab. Alor	Perbup Nomor 13 Tahun 2010 tgl 11 November 2010
506.	Kab. Belu	Perbup Nomor 23 Tahun 2010 tgl 13 Oktober 2010
507.	Kab. Ende	Perbup Nomor 21 Tahun 2010 tgl 15 November 2010



Lanjutan Tabel II.18.

No.	Pemerintah Daerah	Peraturan Kepala Daerah
508.	Kab. Flores Timur	Perbup Nomor 13 Tahun 2010 tgl 15 November 2010
509.	Kab. Kupang	Perbup Nomor 15 Tahun 2010 tgl 11 Agustus 2010
510.	Kab. Lembata	Perbup Nomor 14 Tahun 2010 tgl 15 November 2010
511.	Kab. Manggarai	Perbup Nomor 24 Tahun 2010 tgl 28 Desember 2010
512.	Kab. Ngada	Perbup Nomor 16 Tahun 2010 13 November 2010
513.	Kab. Sikka	Perbup Nomor 10 Tahun 2010 tgl 15 November 2010
514.	Kab. Sumba Barat	Perbup Nomor 10 Tahun 2010 tgl 15 Desember 2010
515.	Kab. Sumba Timur	Perbup Nomor 10 Tahun 2010 tgl 15 November 2010
516.	Kab. Timor Tengah Selatan	Perbup Nomor 11 Tahun 2010 tgl 10 April 2010
517.	Kab. Timor Tengah Utara	Perbup Nomor 14 Tahun 2010 tgl 7 September 2010
518.	Kota Kupang	Perwali Nomor 11A Tahun 2010 tgl 17 September 2010
519.	Kab. Rote Ndao	Perbup Nomor 14 Tahun 2010 tgl 15 November 2010
520.	Kab. Manggarai Barat	Perbup Nomor 19 Tahun 2010 tgl 30 November 2010
521.	Kab. Nagekeo	Perbup Nomor 17 Tahun 2010 tgl 15 November 2010
522.	Kab. Sumba Barat Daya	Perbup Nomor 26 Tahun 2010 tgl 15 November 2010
523.	Kab. Sumba Tengah	Perbup Nomor 12 Tahun 2010 tgl 15 November 2010
524.	Kab. Manggarai Timur	Perbup Nomor 22 Tahun 2010 tgl 15 Desember 2010
525.	Kab Sabu Raijua	Perbup Nomor 12 Tahun 2010 tgl 15 November 2010
526.	Provinsi Maluku	Pergub Nomor 02 Tahun 2010 tgl 22 Januari 2010
527.	Kab. Maluku Tenggara Barat	Perbup Nomor 02 Tahun 2010 tgl 20 Januari 2010
528.	Kab. Maluku Tengah	Perbup Nomor 40 Tahun 2010 tgl 28 Desember 2010
529.	Kab. Maluku Tenggara	Perbup Nomor 02 Tahun 2010 tgl 25 Januari 2010
530.	Kab. Buru	Perbup Nomor 14 Tahun 2011 tgl 30 Mei 2011
531.	Kota Ambon	Perwali Nomor 14 Tahun 2011 tgl 28 Februari 2011
532.	Kab. Seram Bagian Barat	Perbup Nomor 04 Tahun 2011 tgl 20 Juli 2011
533.	Kab. Seram Bagian Timur	Perbup Nomor 36 Tahun 2011 tgl 06 Juni 2011
534.	Kab. Kepulauan Aru	Perbup Nomor 04 Tahun 2010 tgl 03 Maret 2010
535.	Kab. Maluku Barat Daya	Perbup PerBub No.08/2011 tgl 18 Juni 2011
536.	Kota Tual	Perwali Nomor 04 Tahun 2010 tgl 23 Januari 2010
537.	Kab. Buru Selatan	Perbup Nomor 15 Tahun 2011 tgl 16 Agustus 2011
538.	Provinsi Maluku Utara	Pergub Nomor 22 Tahun 2010 tgl 01 November 2010
539.	Kab. Halmahera Tengah	Perbup Nomor 06 Tahun 2011 tgl 07 Maret 2011
540.	Kab. Halmahera Barat	Perbup Nomor 08 Tahun 2010 tgl 06 Desember 2010
541.	Kota Ternate	Perwali Nomor 07 Tahun 2011 tgl 04 april 2011
542.	Kab. Halmahera Timur	Perbup Nomor 04 Tahun 2011 tgl 09 April 2011
543.	Kota Tidore Kepulauan	Perwali Nomor 15 Tahun 2011 tgl 05 Mei 2011
544.	Kab. Kepulauan Sula	Perbup Nomor 04 Tahun 2011 tgl 30 Maret 2011
545.	Kab. Halmahera Selatan	Perbup Nomor 04 Tahun 2010 tgl 21 April 2010
546.	Kab. Halmahera Utara	
547.	Kab. Morotai	
548.	Provinsi Papua	Pergub Nomor 188.3/046 Tahun 2011 tgl 06 Januari 2011
549.	Kab. Biak Numfor	



Lanjutan Tabel II.18.

No.	Pemerintah Daerah	Peraturan Kepala Daerah
550.	Kab. Jayapura	Perbup Nomor 32 Tahun 2009 tgl 14 Desember 2009
551.	Kab. Jayawijaya	
552.	Kab. Merauke	
553.	Kab. Mimika	Perbup Nomor 13 Tahun 2010 tgl 28 September 2010
554.	Kab. Nabire	Perbup Nomor 15 Tahun 2011 tgl 05 November 2011
555.	Kab. Paniai	Perbup Nomor 52 Tahun 2010
556.	Kab. Puncak Jaya	Perbup Nomor 58 Tahun 2010 tgl 22 November 2010
557.	Kab. Kepulauan Yapen	Perbup Nomor No.6 Tahun 2011 tgl 04 April 2011
558.	Kota Jayapura	Perwali Nomor 06 Tahun 2010 tgl 6 Juli 2010
559.	Kab. Sarmi	Perbup Nomor 72 Tahun 2010 tgl 5 Juli 2010
560.	Kab. Keerom	
561.	Kab. Yahukimo	
562.	Kab. Pegunungan Bintang	Perbup Nomor 700/154 Tahun 2010 tgl 1 September 2010
563.	Kab. Tolikara	
564.	Kab. Boven Digoel	
565.	Kab. Mappi	
566.	Kab. Asmat	Perbup Nomor 16 Tahun 2010 tgl 11 November 2010
567.	Kab. Waropen	Perbup Nomor 44 Tahun 2010 tgl 8 Juni 2010
568.	Kab. Supiori	
569.	Kab. Mamberamo Raya	Perbup Nomor 06 Tahun 2010 tgl 23 September 2010
570.	Kab. Mamberamo Tengah	
571.	Kab. Yalimo	
572.	Kab. Lanny Jaya	
573.	Kab. Nduga	
574.	Kab. Dogiyai	
575.	Kab. Puncak	
576.	Kab. Intan Jaya	
577.	Kab. Deiyai	
578.	Provinsi Papua Barat	Pergub Nomor 900/10/V/2011 tgl 18 Mei 2011
579.	Kab. Sorong	Perbup Nomor 91 Tahun 2010 tgl 22 Maret 2010
580.	Kab. Manokwari	
581.	Kab. Fak Fak	
582.	Kota Sorong	Perwali Nomor 04 Tahun 2010 tgl 9 April 2010
583.	Kab. Sorong Selatan	
584.	Kab. Raja Ampat	Perbup Nomor 6 Tahun 2011 tgl 6 Oktober 2011
585.	Kab. Teluk Bintuni	Perbup Nomor 06 Tahun 2011 tgl 26 Juli 2011
586.	Kab. Teluk Wondama	
587.	Kab. Kaimana	
588.	Kab. Tambrauw	Perbup Nomor 48 Tahun 2010 tgl 25 Oktober 2010
589.	Kab. Maybrat	

Sumber : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 2012



Tabel II.19. Rekapitulasi jumlah Pemerintah Daerah yang telah memiliki Peraturan Kepala Daerah mengenai SPIP Tahun 2010 – 2011

No.	Pemerintah Daerah	Jumlah Pemda	Pemda yang telah memiliki Perkada	%
1.	Provinsi	33	33	100
2.	Kabupaten	398	323	81,15
3.	Kota	93	86	92,47
		524	442	84,35

Sumber : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 2012





BAGIAN III

SUMBER DAYA MANUSIA

APARATUR



Bagian ini menyajikan kondisi sumber daya manusia aparatur dalam mendukung terlaksananya pemerintahan dan pembangunan di era reformasi dalam bentuk data statistik. Sumber daya manusia aparatur yang dimaksudkan dalam bagian III ini adalah mereka yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS). Data yang disajikan meliputi Jumlah PNS secara umum, jumlah PNS berdasarkan pendidikan, berdasarkan usia, berdasarkan golongan ruang, berdasarkan jenis kelamin. Selain jumlah PNS disajikan pula tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural, fungsional umum, fungsional tertentu, fungsional peneliti, fungsional guru, dosen, fungsional tenaga kesehatan, dan fungsional auditor. Selanjutnya sebelum mengakhiri bagian ini disajikan tentang Diklat PNS, Lembaga kediklatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota serta akreditasinya. Untuk mengakhiri bagian ini disajikan tentang kesejahteraan PNS dan data mengenai pensiun PNS.

A. Jumlah Pegawai Negeri Sipil

Bagian ini akan mengemukakan data jumlah PNS yang berstatus PNS pusat maupun daerah secara umum pada tahun 2011-2012, tidak diklasifikasikan berdasarkan jabatan. Jumlah umum PNS ini ditampilkan pada tabel Tabel III.1. Data mengenai jumlah PNS pusat dan PNS daerah menurut pendidikan disajikan pada tabel III.2, tabel III.3, tabel III.4. Data tentang jumlah PNS pusat dan PNS daerah menurut kelompok umur disajikan pada tabel III.5, tabel III.6, tabel III.7. dan jumlah PNS pusat dan PNS daerah menurut golongan/ruang ditampilkan pada tabel III.8, tabel III.9, tabel III.10.

Dari data yang ditampilkan terlihat bahwa jumlah PNS baik PNS pusat maupun daerah, mengalami penurunan pada tahun 2012, yaitu sebanyak 4,570,818 orang PNS menjadi 4,547,099 orang PNS. Salah satu penyebabnya adalah adanya kebijakan moratorium penerimaan CPNS beberapa tahun belakangan ini. Dilihat dari segi pendidikan, selama tahun 2011 – 2012 baik PNS pusat maupun daerah mayoritas memiliki pendidikan SLTA dan Sarjana. Sementara dari sisi kelompok umur, diketahui bahwa tahun 2012 ini, jumlah PNS terbanyak adalah berusia antara 46-50 tahun. Bila dilihat dari golongan/ruang, pada tahun 2011 maupun 2012, PNS yang terbanyak adalah PNS golongan IVa.



B. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan

Bagian ini secara spesifik membahas pengangkatan PNS dalam jabatan, baik jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum. Menurut PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural, jabatan struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural tidak dapat merangkap jabatan struktural lain maupun dengan jabatan fungsional.

Sementara itu, menurut Keppres No. 87 Th. 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional, Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu secara mandiri. Dan menurut Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2011, jabatan fungsional umum merupakan kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada beban tugas yang diberikan oleh atasan.

Bila pada bagian kelembagaan ditampilkan data mengenai jenis dan nomenklatur jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum, pada bagian ini data yang disajikan adalah mengenai jumlah PNS pusat dan PNS daerah yang menduduki jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum. Untuk data mengenai pengangkatan PNS dalam jabatan struktural, tersedia data mengenai PNS Pemerintah Pusat dan Daerah yang menduduki jabatan struktural menurut kelompok usia; menurut pendidikan; menurut jenis kelamin dan menurut golongan/ruang. Beberapa hal yang menarik untuk dicermati adalah mengenai jumlah PNS yang menduduki jabatan struktural ternyata meningkat selama dua tahun terakhir. Selain itu, diketahui bahwa PNS yang sedang menduduki jabatan struktural paling banyak berada pada kelompok umur 46 – 50 tahun dan 51-55 tahun.

Dari segi pendidikan, PNS yang menduduki jabatan struktural paling banyak mempunyai pendidikan sarjana, yaitu sebanyak 160,338 orang pada tahun 2012. Fenomena ini seharusnya menjadi perhatian bagi pemangku kepentingan di bidang SDM kepegawaian untuk dapat meningkatkan pendidikan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural tersebut. Hal ini dikarenakan sebagai pemangku jabatan struktural, harus memiliki pengetahuan yang luas mengenai substansi tugas dan fungsinya dan juga harus memiliki kemampuan manajerial yang baik. Data lain yang menarik untuk dilihat adalah persentase PNS yang menduduki jabatan struktural berdasarkan jenis kelamin. Diketahui bahwa sebagian besar PNS yang menduduki jabatan struktural adalah laki-laki. Sudah seharusnya PNS perempuan juga ikut duduk dalam posisi manajerial di pemerintahan. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian pemangku





kepentingan untuk melibatkan lebih banyak PNS perempuan untuk menduduki jabatan struktural.

Untuk data yang terkait mengenai pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional tertentu, tersedia data pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional tertentu; jumlah PNS pusat dan PNS daerah yang menduduki jabatan fungsional tertentu menurut usia, menurut pendidikan, menurut jenis kelamin dan menurut golongan/ruang. Tersedia juga data mengenai jabatan fungsional peneliti; jabatan fungsional dosen dan guru; Jabatan fungsional tenaga kesehatan; dan jabatan fungsional auditor.

Sementara itu, untuk pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional umum, tersedia data jumlah PNS pusat dan PNS daerah yang menduduki jabatan fungsional umum; jumlah PNS pusat dan PNS daerah yang menduduki jabatan fungsional umum menurut usia, menurut pendidikan, menurut jenis kelamin dan menurut golongan/ruang. Dari data yang ada terlihat bahwa jumlah PNS yang menduduki jabatan fungsional umum berkurang pada tahun 2012. Bila pada tahun 2011, ada sebanyak 2,302,613 orang, maka pada tahun 2012, ada sebanyak 2,237,044 orang. Pengurangan ini salah satunya terjadi karena ada PNS yang pensiun, sementara itu tidak ada penerimaan CPNS baru karena kebijakan moratorium penerimaan PNS.

C. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil

Bagian ini menampilkan data pendidikan dan pelatihan PNS. Data tersebut antara lain mencakup jumlah PNS yang pernah mengikuti diklat prajabatan, diklat kepemimpinan dan diklat teknis fungsional. Selain itu ditampilkan pula data mengenai lembaga diklat pemerintah pusat dan daerah yang sudah diakreditasi. Data mengenai widyaiswara sebagai unsur pengajar dalam diklat aparatur juga akan disajikan untuk melengkapi bagian ini.

Tabel III.82 dan tabel III.83 menyajikan data Jumlah PNS yang pernah mengikuti Diklat Prajabatan, PIM I, II, III, IV dan diklat fungsional serta diklat teknis. Dari kedua tabel tersebut terlihat bahwa jumlah PNS yang pernah mengikuti diklat dari tahun 2007 sampai tahun 2011 cenderung fluktuatif bahkan untuk keikutsertaan dalam diklat fungsional dan teknis mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

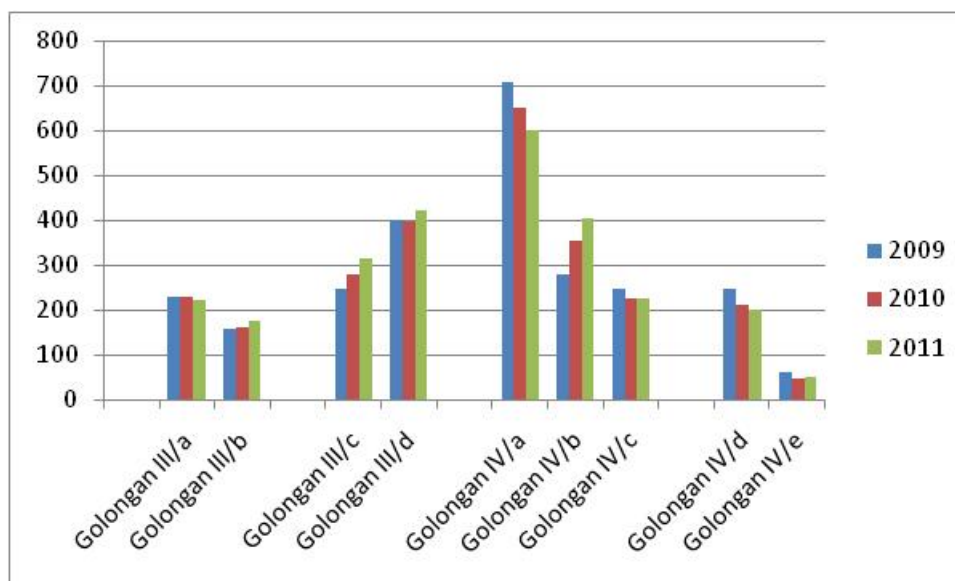
Untuk tabel berikutnya, yaitu tabel III.84, tabel III.85, tabel III.86, tabel III.87, tabel III.88, dan tabel III.89 menampilkan data mengenai program diklat dan lembaga diklat pemerintah yang sudah diakreditasi. Lembaga diklat pemerintah tersebut dapat merupakan lembaga diklat Kementerian; Lembaga Non Kementerian; Pemerintah Provinsi; dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk lembaga diklat Kementerian dan Lembaga Non Kementerian sudah diakreditasi untuk menyelenggarakan diklat kepemimpinan (prajabatan, diklat PIM II, III, dan IV) dan diklat teknis fungsional. Sementara itu, lembaga diklat Pemerintah Provinsi; dan Pemerintah Kabupaten/Kota sudah diakreditasi untuk menyelenggarakan diklat kepemimpinan sebatas untuk diklat prajabatan, diklat PIM III dan IV.



Akreditasi mengenai lembaga diklat diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah. Menurut peraturan ini akreditasi lembaga diklat merupakan penilaian kelayakan Lembaga Diklat Pemerintah dalam menyelenggarakan Program Diklat tertentu yang ditetapkan dalam Surat Keputusan dan Sertifikat Akreditasi oleh Instansi Pembina. Adapun tujuan akreditasi lembaga diklat adalah menetapkan kelayakan Lembaga Diklat Pemerintah dalam menyelenggarakan Program Diklat tertentu bagi PNS. Akreditasi Lembaga Diklat Pemerintah dilakukan terhadap beberapa unsur, yaitu tenaga kediklatan; program diklat; dan fasilitas diklat.

Selain jumlah PNS yang sudah mengikuti diklat dan lembaga diklat yang sudah diakreditasi, penting juga untuk mengetahui jumlah widyaiswara yang tersedia. Dalam tabel III.90 dan tabel III.91 disajikan jumlah widyaiswara pemerintah pusat dan daerah menurut jenjang dan golongan/ruang. Dari data yang tersedia dapat disimpulkan bahwa jumlah widyaiswara dari tahun 2009 – 2011 stagnan dan tidak mengalami peningkatan yang cukup berarti.

Grafik III.1. Jumlah PNS Kementerian/Lembaga yang Menduduki Jabatan Widyaiswara Berdasarkan Jenjang dan Golongan Ruang

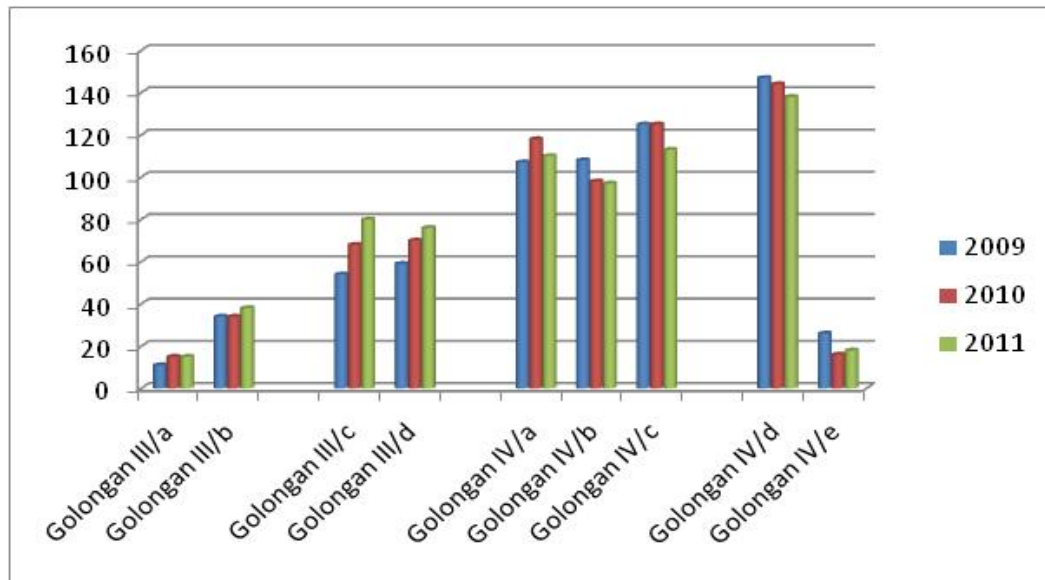


Sumber : Lembaga Administrasi Negara (LAN), 2012





Grafik III.2. Jumlah PNS Pemerintah Daerah yang Menduduki Jabatan Widyaiswara Berdasarkan Jenjang dan Golongan Ruang



Sumber : Lembaga Administrasi Negara (LAN), 2012

D. Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil

Terkait dengan kesejahteraan PNS, beberapa data yang penting untuk disajikan adalah data mengenai gaji pokok pegawai; tunjangan jabatan; dan asuransi kesehatan PNS. Tabel III.92, tabel III.93, tabel III.94, dan tabel III.95 memaparkan data time series tahun 2009-2012 gaji pokok PNS golongan I sampai golongan IV. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa dari tahun 2009 hingga tahun 2012, gaji pokok PNS mengalami beberapa kali kenaikan sebesar 5-10 %.

Sementara itu, tabel III.96 Menjelaskan mengenai tunjangan jabatan struktural eselon I-IV dan tabel III.97. menjelaskan mengenai tunjangan jabatan fungsional tertentu. Dari tabel tersebut terlihat bahwa tunjangan jabatan untuk jabatan struktural selama sepuluh tahun terakhir mengalami peningkatan.

Selain data gaji dan tunjangan, kesejahteraan PNS juga dapat dilihat dari pemanfaatan asuransi kesehatan. Pada tabel III.98, tabel III.99. dan tabel III.100. ditampilkan data mengenai kepesertaan dalam asuransi kesehatan (askes). Data yang tersedia menunjukkan bahwa pada tahun 2012 peserta askes yang terbanyak (71, 13%) adalah PNS aktif. Dari segi golongan/ruang, pada tahun 2012 peserta askes yang terbanyak (43,73%) adalah PNS golongan/ruang III. Sementara bila dilihat dari segi usia, pada tahun 2012 peserta askes yang terbanyak (28,90%) adalah berusia 41 s.d 55 tahun; sebanyak 27,53% berusia Diatas 56 tahun dan sebanyak 24,81% berusia 6 s.d 25 tahun.



E. Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Bagian disiplin PNS memaparkan data mengenai PNS yang terkena hukuman disiplin per bulan februari 2011. Pada Tabel III.101. berikut terlihat bahwa PNS paling banyak menerima hukuman disiplin tingkat ringan (456 pegawai). Sementara itu sebanyak 172 PNS menerima hukuman disiplin tingkat berat.

F. Pensiun Pegawai Negeri Sipil

Bagian ini akan menyajikan data yang terkait dengan pensiun PNS, diantaranya adalah data mengenai anggaran pensiun dan jumlah PNS yang pensiun. Tabel III.102. menjabarkan mengenai total uang pensiun per kelompok dari tahun 2007 hingga 2011. Dari tabel tersebut terlihat bahwa total uang pensiun per kelompok dari tahun 2007 hingga 2011 mengalami peningkatan. Pada tahun 2007, total uang pensiun sebesar 2 triliun rupiah sementara pada tahun 2011 meningkat menjadi 3,9 triliun. Hal ini salah satunya disebabkan karena kenaikan jumlah PNS yang pensiun seperti dapat dilihat pada tabel III.103 yaitu pada tahun 2007 jumlah PNS yang pensiun sebanyak 2.027.033 PNS dan pada tahun 2011 jumlah PNS yang pensiun meningkat menjadi 2.291.201 pegawai. Selain bertambahnya jumlah PNS yang pensiun, kenaikan anggaran pensiun ini juga disebabkan karena naiknya gaji pokok PNS. Gaji pokok PNS merupakan salah satu aspek yang diperhitungkan dalam menentukan uang pensiun pegawai, bila gaji pokok PNS naik, maka uang pensiun PNS juga akan naik.

Tabel III.1. Jumlah PNS Berstatus PNS Instansi Pusat dan PNS Pemerintah Daerah





Tahun	2011	2012
Instansi Pusat	923,761	919,235
Pemerintah Provinsi	316,271	313,566
Pemerintah Kab/Kota	3,330,786	3,314,298
Total	4,570,818	4,547,099

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, 2012

Tabel III.2. Jumlah PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) Menurut Pendidikan

Pendidikan	PNS Total	
	2011	2012
SD	83,437	79,602
SLTP	123,834	119,161
SLTA	1,515,080	1,477,787
D1	75,541	72,928
D II	692,502	674,853
D III	430,672	428,478
D IV	19,049	19,864
S 1	1,514,906	1,547,306
S 2	107,619	118,648
S 3	8,178	8,472
Total	4,570,818	4,547,099

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, 2012

Tabel III.3. Jumlah PNS Pusat Menurut Pendidikan

Pendidikan	PNS Pusat	
	2011	2012
SD	14,692	14,064
SLTP	24,050	23,057
SLTA	291,733	285,730
D1	14,579	14,398
D II	45,220	43,044
D III	81,446	80,377
D IV	10,744	10,863
S 1	356,131	358,491
S 2	77,170	80,944
S 3	7,996	8,267
Total	923,761	919,235

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, 2012

Tabel III.4. Jumlah PNS Daerah Menurut Pendidikan



Pendidikan	Provinsi		Kab/Kota	
	2011	2012	2011	2012
SD	8,421	7,939	60,324	57,599
SLTP	11,025	10,432	88,759	85,672
SLTA	124,795	122,059	1,098,552	1,069,998
D1	3,660	3,557	57,302	54,973
D II	18,710	17,921	628,572	613,888
D III	35,031	34,608	314,195	313,493
D IV	1,301	1,375	7,004	7,626
S 1	105,214	106,256	1,053,561	1,082,559
S 2	8,031	9,333	22,418	28,371
S 3	83	86	99	119
Total	316,271	313,566	3,330,786	3,314,298

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, 2012

Tabel III.5. Jumlah Total PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) Menurut K. umur

Usia	Total	
	2011	2012
18 - 20	3,677	2,970
21 - 25	159,559	142,729
26 - 30	505,241	495,061
31 - 35	581,585	582,718
36 - 40	587,892	581,770
41 - 45	829,290	819,195
46 - 50	942,636	946,912
51 - 55	740,218	749,347
56 - 60	213,868	218,340
61 - 65	6,465	7,568
65 +	387	489
Total	4,570,818	4,547,099

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, 2012

Tabel III.6. Jumlah PNS Pusat Menurut Kelompok Umur

Usia	Pusat	
	2011	2012
18 - 20	2,509	2,006
21 - 25	48,401	44,051
26 - 30	113,999	111,876
31 - 35	131,869	131,730
36 - 40	140,085	138,734
41 - 45	162,319	162,694
46 - 50	155,048	156,225

Lanjutan Tabel III.6.





Usia	Pusat	
	2011	2012
51 - 55	132,582	132,530
56 - 60	30,276	32,022
61 - 65	6,286	6,885
65 +	387	482
Total	923,761	919,235

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, 2012

Tabel III.7. Jumlah PNS Daerah Menurut Kelompok Umur

Usia	Provinsi		Kab/Kota	
	2011	2012	2011	2012
18 - 20	220	177	948	787
21 - 25	8,259	7,395	102,899	91,283
26 - 30	27,471	26,841	363,771	356,344
31 - 35	35,825	36,042	413,891	414,946
36 - 40	37,560	37,448	410,247	405,588
41 - 45	50,023	49,282	616,948	607,219
46 - 50	71,035	70,599	716,553	720,088
51 - 55	73,028	72,585	534,608	544,232
56 - 60	12,737	13,049	170,855	173,269
61 - 65	113	148	66	535
65 +	-	-	-	7
Total	316,271	313,566	3,330,786	3,314,298

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, 2012

Tabel III.8. Jumlah Total PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) Menurut Golongan/Ruang

Gol/ Ruang	Total	
	2011	2012
Ia	20,654	16,090
Ib	13,926	17,119
Ic	42,927	36,693
Id	26,641	29,288
IIa	424,797	371,890
IIb	386,522	405,000
IIc	344,966	344,023
IId	182,059	184,823
IIIa	696,935	668,451
IIIb	561,007	575,750

Lanjutan Tabel III.8.



Gol/ Ruang	Total	
	2011	2012
IIIc	394,642	404,004
IIId	489,196	487,044
IVa	855,854	863,045
IVb	103,702	113,394
IVc	19,995	22,298
IVd	5,187	6,069
IVe	1,808	2,118
Total	4,570,818	4,547,099

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, 2012

Tabel III.9. Jumlah PNS Pusat Menurut Golongan/Ruang

Gol/ Ruang	Pusat	
	2011	2012
Ia	1,665	1,396
Ib	2,011	2,054
Ic	5,565	5,000
Id	6,351	5,896
IIa	78,033	71,615
IIb	68,383	66,636
IIc	74,457	74,937
IIId	47,578	48,814
IIIa	183,572	178,540
IIIb	162,472	164,568
IIIc	91,766	95,154
IIId	90,516	91,500
IVa	71,741	72,322
IVb	24,475	24,065
IVc	9,658	10,351
IVd	3,854	4,444
IVe	1,664	1,943
Total	923,761	919,235

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, 2012

Tabel III.10. Jumlah PNS Daerah Menurut Golongan/Ruang





Gol/ Ruang	Provinsi		Kab/Kota	
	2011	2012	2011	2012
Ia	1,644	1,318	17,345	13,376
Ib	1,074	1,289	10,841	13,776
Ic	4,080	3,508	33,282	28,185
Id	1,863	2,212	18,427	21,180
IIa	36,146	31,376	310,618	268,899
IIb	16,254	20,347	301,885	318,017
IIc	23,307	21,753	247,202	247,333
IId	14,603	14,433	119,878	121,576
IIIa	48,938	46,790	464,425	443,121
IIIb	55,556	56,239	342,979	354,943
IIIc	29,938	29,605	272,938	279,245
IIId	38,921	39,627	359,759	355,917
IVa	34,842	35,304	749,271	755,419
IVb	6,622	6,980	72,605	82,349
IVc	1,799	1,962	8,538	9,985
IVd	637	754	696	871
IVe	47	69	97	106
Total	316,271	313,566	3,330,786	3,314,298

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, 2012

Tabel III.11. Data Umum Total Jumlah PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) yang Menduduki Jabatan Struktural, Fungsional tertentu dan Fungsional Umum

Jabatan	Total	
	2011	2012
Jabatan Struktural	104,032	273,403
Jabatan Fungsional tertentu	2,164,171	2,034,362
Jabatan Rangkap	2	2,290
Jabatan Fungsional Umum	2,302,613	2,237,044
Total	4,570,818	4,547,099

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, 2012

Tabel III.12. Data Umum PNS Pusat yang Menduduki Jabatan Struktural, Fungsional tertentu dan Fungsional Umum



Jabatan	Pusat	
	2011	2012
Jabatan Struktural	15,918	58,919
Jabatan Fungsional tertentu	285,949	268,706
Jabatan Rangkap	1	1,838
Jabatan Fungsional Umum	621,893	589,772
Total	923,761	919,235

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, 2012

Tabel III.13. Data Umum PNS Daerah yang Menduduki Jabatan Struktural, Fungsional tertentu dan Fungsional Umum

Jabatan	Provinsi		Kab/Kota	
	2011	2012	2011	2012
Jabatan Struktural	10,442	25,798	77,672	188,686
Jabatan Fungsional tertentu	71,776	64,471	1,806,446	1,701,185
Jabatan Rangkap	-	22	1	430
Jabatan Fungsional Umum	234,053	223,275	1,446,667	1,423,997
Total	316,271	313,566	3,330,786	3,314,298

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, 2012

Tabel III.14. Data Umum Jumlah PNS Pusat dan PNS Daerah yang Menduduki Jabatan Struktural

Jabatan	Pusat		Provinsi		Kab/Kota		Total	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Jabatan Struktural	15,918	58,919	10,442	25,798	77,672	188,686	104,032	273,403

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, 2012

Tabel III.15. Jumlah PNS (PNS Pusat dan Daerah) yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Kelompok Umur



Usia	Total	
	2011	2012
18 - 20	-	-
21 - 25	181	540
26 - 30	1,391	4,276
31 - 35	4,251	12,996
36 - 40	8,661	24,403
41 - 45	17,300	45,795
46 - 50	31,295	80,180
51 - 55	37,145	94,270
56 - 60	3,743	10,730
61 - 65	57	192
65 +	8	21
Total	104,032	273,403

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, 2012

Tabel III.16. Jumlah PNS Pusat yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Kelompok Umur

Usia	Pusat	
	2011	2012
18 - 20	-	-
21 - 25	2	9
26 - 30	98	707
31 - 35	546	2,940
36 - 40	1,561	6,148
41 - 45	2,918	11,285
46 - 50	4,311	15,522
51 - 55	5,239	18,587
56 - 60	1,183	3,547
61 - 65	52	153
65 +	8	21
Total	15,918	58,919

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, 2012

Tabel III.17. Jumlah PNS Daerah yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Kelompok Umur



Usia	Provinsi		Kab/Kota	
	2011	2012	2011	2012
18 - 20	-	-	-	-
21 - 25	-	12	179	519
26 - 30	38	122	1,255	3,447
31 - 35	150	524	3,555	9,532
36 - 40	528	1,529	6,572	16,726
41 - 45	1,455	3,564	12,927	30,946
46 - 50	3,241	7,906	23,743	56,752
51 - 55	4,481	10,713	27,425	64,970
56 - 60	546	1,409	2,014	5,774
61 - 65	3	19	2	20
65 +	-	-	-	-
Total	10,442	25,798	77,672	188,686

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, 2012

Tabel III.18. Jumlah Total PNS (PNS Pusat dan Daerah) yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Pendidikan

Pendidikan	Total	
	2011	2012
SD	13	69
SLTP	55	234
SLTA	19,110	56,118
D1	315	872
D II	1,640	5,011
D III	4,668	12,539
D IV	909	3,602
S 1	63,050	160,338
S 2	13,886	33,807
S 3	386	813
Total	104,032	273,403

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, 2012

Tabel III.19. Jumlah PNS Pusat yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Pendidikan

Pendidikan	Pusat
------------	-------



	2011	2012
SD	1	15
SLTP	5	39
SLTA	1,188	8,251
D1	24	123
D II	90	558
D III	396	1,647
D IV	199	1,750
S 1	8,587	32,245
S 2	5,089	13,574
S 3	339	717
Total	15,918	58,919

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, 2012

Tabel III.20. Jumlah PNS Daerah yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Pendidikan

Pendidikan	Provinsi		Kab/Kota	
	2011	2012	2011	2012
SD	1	2	11	52
SLTP	2	11	48	184
SLTA	620	2,090	17,302	45,777
D1	6	29	285	720
D II	102	234	1,448	4,219
D III	297	787	3,975	10,105
D IV	67	187	643	1,665
S 1	7,264	17,788	47,199	110,305
S 2	2,059	4,623	6,738	15,610
S 3	24	47	23	49
Total	10,442	25,798	77,672	188,686

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, 2012

Tabel III.21. Jumlah Total PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Jenis Kelamin



Jenis Kelamin	Total	
	2011	2012
Laki-laki	76,591	202,595
Perempuan	27,441	70,808
Total	104,032	273,403

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, 2012

Tabel III.22. Jumlah PNS Pusat yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Pusat	
	2011	2012
Laki-laki	11,632	44,563
Perempuan	4,286	14,356
Total	15,918	58,919

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, 2012

Tabel III.23. Jumlah PNS Daerah yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Provinsi		Kab/Kota	
	2011	2012	2011	2012
Laki-laki	7,436	18,418	57,523	139,614
Perempuan	3,006	7,380	20,149	49,072
Total	10,442	25,798	77,672	188,686

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, 2012

Tabel III.24. Jumlah Total PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Golongan/Ruang

Gol/ Ruang	Total	
	2011	2012
Ia	2	11
Ib	3	14
Ic	2	47
Id	5	22
Ila	85	386
Ilb	85	464
Ilc	128	508
Ild	238	936
IIla	1,955	7,874
IIlb	7,577	26,687

Lanjutan Tabel III.24.



Gol/ Ruang	Total	
	2011	2012
IIIc	18,429	53,189
IIId	35,393	91,712
IVa	20,845	48,704
IVb	14,396	30,825
IVc	3,840	9,518
IVd	809	2,036
IVe	240	470
Total	104,032	273,403

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, 2012

Tabel III.25. Jumlah PNS Pusat yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Golongan/Ruang

Gol/ Ruang	Pusat	
	2011	2012
Ia	-	-
Ib	1	-
Ic	-	3
Id	1	3
IIa	3	34
IIb	12	96
IIc	12	108
IId	20	204
IIIa	153	1,596
IIIb	614	6,272
IIIc	2,162	10,199
IIId	4,682	19,733
IVa	3,517	9,610
IVb	3,162	7,512
IVc	800	1,861
IVd	550	1,252
IVe	229	436
Total	15,918	58,919

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, 2012

Tabel III.26. Jumlah PNS Daerah yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Golongan/Ruang



Gol/ Ruang	Provinsi		Kab/Kota	
	2011	2012	2011	2012
Ia	-	-	2	11
Ib	-	1	2	13
Ic	-	-	2	44
Id	-	-	4	19
Ila	3	7	79	345
Ilb	-	13	73	355
Ilc	2	23	114	377
Ild	2	38	216	694
IIla	44	282	1,758	5,996
IIlb	317	1,080	6,646	19,335
IIlc	1,090	3,256	15,177	39,734
IIId	3,737	9,596	26,974	62,383
IVa	2,751	5,987	14,577	33,107
IVb	1,940	4,058	9,294	19,255
IVc	400	1,010	2,640	6,647
IVd	152	428	107	356
IVe	4	19	7	15
Total	10,442	25,798	77,672	188,686

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, 2012

Tabel III.27. Jumlah PNS Pusat dan PNS Daerah yang Menduduki Jabatan Fungsional tertentu

Jabatan	Pusat		Provinsi		Kab/Kota		Total	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Jabatan Fungsional tertentu	285,949	268,706	71,776	64,471	1,806,446	1,701,185	2,164,171	2,034,362

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, 2012

Tabel III.28. Jumlah Total PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) yang Menduduki Jabatan Fungsional tertentu Menurut Kelompok Umur





Usia	Total	
	2011	2012
18 - 20	230	6
21 - 25	32,855	6,513
26 - 30	104,672	74,566
31 - 35	169,368	139,951
36 - 40	243,399	219,771
41 - 45	463,728	446,544
46 - 50	552,333	544,991
51 - 55	402,844	406,425
56 - 60	188,085	188,067
61 - 65	6,279	7,082
65 +	378	446
Total	2,164,171	2,034,362

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, 2012

Tabel III.29. Jumlah PNS Pusat yang Menduduki Jabatan Fungsional tertentu Menurut Kelompok Umur

Usia	Pusat	
	2011	2012
18 - 20	1	-
21 - 25	2,957	520
26 - 30	16,619	11,491
31 - 35	35,109	29,748
36 - 40	48,769	45,856
41 - 45	63,871	63,065
46 - 50	50,107	49,890
51 - 55	41,714	40,948
56 - 60	20,281	20,272
61 - 65	6,143	6,477
65 +	378	439
Total	285,949	268,706

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, 2012

Tabel III.30. Jumlah PNS Daerah yang Menduduki Jabatan Fungsional tertentu Menurut Kelompok Umur



Usia	Provinsi		Kab/Kota	
	2011	2012	2011	2012
18 - 20	10	-	219	6
21 - 25	1,615	179	28,283	5,814
26 - 30	2,782	1,114	85,271	61,961
31 - 35	4,151	2,668	130,108	107,535
36 - 40	6,390	5,470	188,240	168,445
41 - 45	10,965	10,088	388,892	373,391
46 - 50	18,860	18,092	483,366	477,009
51 - 55	18,195	18,044	342,935	347,433
56 - 60	8,719	8,700	159,085	159,095
61 - 65	89	116	47	489
65 +	-	-	-	7
Total	71,776	64,471	1,806,446	1,701,185

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, 2012

Tabel III.31. Jumlah Total PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) yang Menduduki Jabatan Fungsional tertentu Menurut Pendidikan

Pendidikan	Total	
	2011	2012
SD	179	181
SLTP	1,551	1,509
SLTA	510,413	472,427
D1	46,367	35,037
D II	592,493	570,645
D III	188,977	153,483
D IV	3,471	3,527
S 1	757,510	735,766
S 2	56,172	54,742
S 3	7,038	7,045
Total	2,164,171	2,034,362

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, 2012

Tabel III.32. Jumlah PNS Pusat yang Menduduki Jabatan Fungsional tertentu Menurut Pendidikan





Pendidikan	Pusat	
	2011	2012
SD	42	45
SLTP	220	217
SLTA	32,385	30,791
D1	1,353	1,275
D II	30,200	30,150
D III	22,900	18,550
D IV	2,339	2,178
S 1	140,396	132,110
S 2	49,144	46,410
S 3	6,970	6,980
Total	285,949	268,706

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, 2012

Tabel III.33. Jumlah PNS Daerah yang Menduduki Jabatan Fungsional tertentu Menurut Pendidikan

Pendidikan	Provinsi		Kab/Kota	
	2011	2012	2011	2012
SD	2	2	135	134
SLTP	73	66	1,258	1,226
SLTA	13,275	11,858	464,753	429,778
D1	2,250	2,077	42,764	31,685
D II	16,069	15,336	546,224	525,159
D III	12,117	9,156	153,960	125,777
D IV	145	147	987	1,202
S 1	26,538	24,517	590,576	579,139
S 2	1,280	1,295	5,748	7,037
S 3	27	17	41	48
Total	71,776	64,471	1,806,446	1,701,185

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, 2012

Tabel III.34. Jumlah Total PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) yang Menduduki Jabatan Fungsional tertentu Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Total
---------------	-------



	2011	2012
Laki-laki	931,309	883,982
Perempuan	1,232,862	1,150,078
Total	2,164,171	2,034,060

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, 2012

Tabel III.35. Jumlah PNS Pusat yang Menduduki Jabatan Fungsional tertentu Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Pusat	
	2011	2012
Laki-laki	156,160	157,528
Perempuan	852,073	410,196
Total	1,008,233	567,724

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, 2012

Tabel III.36. Jumlah PNS Daerah yang Menduduki Jabatan Fungsional tertentu Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Provinsi		Kab/Kota	
	2011	2012	2011	2012
Laki-laki	37,187	24,868	737,962	701,586
Perempuan	90,369	32,464	290,420	707,418
Total	127,556	57,332	1,028,382	1,409,004

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, 2012

Tabel III.37. Jumlah Total PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) yang Menduduki Jabatan Fungsional tertentu Menurut Golongan/Ruang

Gol/ Ruang	Total	
	2011	2012
Ia	-	3
Ib	2	1
Ic	8	12
Id	10	15
IIa	45,831	36,507
IIb	108,689	85,647
IIc	104,440	83,522

Lanjutan Tabel III.37.

Gol/ Ruang	Total	
	2011	2012





Gol/ Ruang	Total	
	2011	2012
IId	73,182	62,135
IIIa	189,863	153,308
IIIb	214,740	205,726
IIIc	219,679	211,136
IIId	326,128	310,912
IVa	796,096	791,899
IVb	70,532	77,554
IVc	10,393	10,949
IVd	3,197	3,499
IVe	1,381	1,537
Total	2,164,171	2,034,362

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, 2012

Tabel III.38. Jumlah PNS Pusat yang Menduduki Jabatan Fungsional tertentu Menurut Golongan/Ruang

Gol/ Ruang	Pusat	
	2011	2012
Ia	-	-
Ib	1	1
Ic	1	1
Id	1	1
IIa	2,475	2,322
IIb	7,993	8,622
IIc	10,519	7,571
IId	9,198	8,147
IIIa	38,862	33,664
IIIb	42,335	37,693
IIIc	45,796	44,815
IIId	44,405	42,852
IVa	57,180	56,443
IVb	15,724	14,588
IVc	7,583	7,803
IVd	2,606	2,781
IVe	1,270	1,402
Total	285,949	268,706

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, 2012

Tabel III.39. Jumlah PNS Daerah yang Menduduki Jabatan Fungsional tertentu Menurut Golongan/Ruang



Gol/ Ruang	Provinsi		Kab/Kota	
	2011	2012	2011	2012
Ia	-	-	-	3
Ib	-	-	1	-
Ic	1	1	6	10
Id	-	-	9	14
Ila	314	191	43,042	33,994
Ilb	1,033	652	99,663	76,373
Ilc	3,519	1,509	90,402	74,442
Ild	3,166	2,335	60,818	51,653
IIla	5,606	4,467	145,395	115,177
IIlb	7,285	6,136	165,120	161,897
IIlc	8,260	7,208	165,623	159,113
IIId	13,329	12,788	268,394	255,272
IVa	26,211	25,994	712,705	709,462
IVb	2,154	2,186	52,654	60,780
IVc	664	710	2,146	2,436
IVd	202	246	389	472
IVe	32	48	79	87
Total	71,776	64,471	1,806,446	1,701,185

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, 2012

Tabel III.40. Jumlah PNS yang Menduduki Jabatan Peneliti Menurut Jenjang

No	Nama Instansi	Peneliti Pertama	Peneliti Muda	Peneliti Madya	Peneliti Utama	Jumlah
1	Kementerian Pertanian	407	583	565	278	1833
2	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	392	349	392	209	1342
3	Badan Tenaga Nuklir Nasional	69	88	193	81	431
4	Kementerian Kehutanan	112	138	115	36	401
5	Kementerian Kelautan&Perikanan	110	119	103	59	391
6	Kementerian Kesehatan	130	101	104	29	364
7	Kementerian Pendidikan&Kebudayaan	105	117	100	10	332
8	Kementerian Perindustrian	88	100	114	10	312
9	Kementerian Pariwisata & Ekonomi Kreatif	33	103	133	24	293
10	Kementerian ESDM	138	46	75	31	290
11	Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional	74	85	89	30	278

Lanjutan Tabel III.40.

No	Nama Instansi	Peneliti	Peneliti	Peneliti	Peneliti	Jumlah
----	---------------	----------	----------	----------	----------	--------



		Pertama	Muda	Madya	Utama	
12	BPPT	4	38	137	77	256
13	Kementerian Pekerjaan Umum	64	45	75	23	207
14	Kementerian Agama	43	41	52	34	170
15	Kementerian Dalam Negeri	61	54	41	8	164
16	Kementerian Perhubungan	38	28	48	5	119
17	Kementerian Komunikasi & Informatika	34	19	43	6	102
18	Kementerian Sosial	7	22	43	2	74
19	Kemhumham	24	8	23	6	61
20	BMKG	45	10	1		56
21	Bakosurtanal	6	11	24	5	46
22	Kementerian Keuangan	9	15	14	2	40
23	Lembaga Administrasi Negara	9	17	11	1	38
24	Sekretaris Jenderal DPR RI	2	6	23	4	35
25	BKKBN	9	5	19	2	35
26	Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi	6	9	14	4	33
27	Kementerian Koperasi	9	4	16	2	31
28	Kejaksaan Agung	4	7	11	3	25
29	Badan Pusat Statistik	2	11	4	3	20
30	Badan Standarisasi Nasional	8	2	4		14
31	Kementerian Perdagangan	7	3	1		11
32	Badan Pengawas Tenaga Nuklir		3	7		10
33	Badan Pertanahan Nasional	1	2	4	1	8
34	Mahkamah Agung RI	5				5
	JUMLAH	2055	2189	2598	985	7827

Lanjutan Tabel III.40.

No	Nama Instansi	Prof. Riset	Prof Riset yg aktif	Pensiun/ Wafat/ diberhentikan
1	Kementerian Pertanian	97	69	28
2	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	93	63	30
3	Badan Tenaga Nuklir Nasional	47	33	14
4	Kementerian Kehutanan	15	10	5
5	Kementerian Kelautan&Perikanan	17	9	8
6	Kementerian Kesehatan	5	4	1
7	Kementerian Pendidikan&Kebudayaan	0	0	0

Lanjutan Tabel III.40.



No	Nama Instansi	Prof. Riset	Prof Riset yg aktif	Pensiun/ Wafat/ diberhentikan
8	Kementerian Perindustrian	0	0	0
9	Kementerian Pariwisata & Ekonomi Kreatif	3	3	0
10	Kementerian ESDM	21	16	5
11	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	13	5	8
12	BPPT	25	24	1
13	Kementerian Pekerjaan Umum	11	7	4
14	Kementerian Agama	9	5	4
15	Kementerian Dalam Negeri	0	0	0
16	Kementerian Perhubungan	2	0	2
17	Kementerian Komunikasi & Informasi	2	2	0
18	Kementerian Sosial	0	0	0
19	KEMHUMHAM	0	0	0
20	BMKG	1	0	1
21	BAKOSURTANAL	2	2	0
22	Kementerian Keuangan	1	1	0
23	Lembaga Administrasi Negara	0	0	0
24	Sekretaris Jenderal DPR RI	0	0	0
25	BKKBN	0	0	0
26	Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi	1	1	0
27	Kementerian Koperasi	0	0	0
28	Kejaksaan Agung	0	0	0
29	Badan Pusat Statistik	1	1	0
30	Badan Standarisasi Nasional	0	0	0
31	Kementerian Perdagangan	0	0	0
32	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	1	1	0
33	Badan Pertanahan Nasional	0	0	0
34	Mahkamah Agung RI	0	0	0
	JUMLAH	367	256	111

Sumber : Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2012





Tabel III.41. Jumlah PNS yang Menduduki Jabatan Dosen Menurut Lembaga

No.	Lembaga	Tahun				
		2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011
1	Universitas	137,988	149,014	137,213	136,763	123,099
2	Institut	10,041	10,786	9,442	9,737	10,444
3	Sekolah Tinggi	49,415	52,878	47,116	53,221	41,697
4	Akademi	23,032	24,644	22,622	21,631	19,568
5	Politeknik	12,137	13,035	12,388	12,038	12,699
Jumlah		232,613	250,357	228,781	233,390	207,507

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012

Tabel III.42. Jumlah PNS yang Menduduki Jabatan Dosen Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Tahun				
		2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011
1	<= D4	5,291	6,369	3,364	...	...
2	S-1	123,152	132,171	115,729	106,420	79,081
3	Spesialis 1	2,600	2,792	2,218	1,802	...
4	Spesialis 2	449	482	374	...	1,831
5	S-2	87,336	93,725	91,824	40,097	38,853
6	S-3	12,257	13,181	12,608	9,969	10,111
7	Profesi	1,528	1,637	2,664	...	...
8	Tidak Tetap		...	...	75,102	77,631
Jumlah		232,613	250,357	228,781	233,390	207,507

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012

Tabel III.43. Jumlah Guru berstatus PNS yang tersedia di Seluruh Kabupaten/Kota

NO	Kategori	NEGERI						TOTAL
		TK	SD	SMP	SLB	SMA	SMK	
1	Total guru di kabupaten/ kot12a tahun 2008	4,700	1,241,921	345,829	2,603	147,126	61,156	1,803,335
2	Total guru di kabupaten/ kota tahun 2009	5,168	1,359,738	374,966	4,526	160,548	67,789	1,972,735
3	Total guru di kabupaten/ kota tahun 2010	6,139	1,434,731	395,900	5,498	170,880	76,810	2,089,958

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012



Tabel III.44. Jumlah Guru berstatus guru swasta yang tersedia di Seluruh Kabupaten/Kota

NO	Kategori	SWASTA						
		TK	SD	SMP	SLB	SMA	SMK	TOTAL
1	Total guru di kabupaten / kota tahun 2008	192,115	108,562	118,913	7,719	73,545	70,533	571,387
2	Total guru di kabupaten / kota tahun 2009	218,254	123,321	127,949	10,074	77,921	77,057	634,576
3	Total guru di kabupaten / kota tahun 2010	246,338	137,912	137,930	10,713	83,507	84,846	701,246

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012

Tabel III.45. Jumlah PNS yang Menduduki Jabatan Guru TK Menurut Status Kepegawaian

No.	Status Kepegawaian	Tahun				
		2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011
1	PNS	39,215	43,225	44,254	58,699	53,993
2	Non PNS	183,269	190,338	189,501	218,136	213,583
Jumlah		222,484	233,563	233,755	276,835	267,576

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012

Tabel III.46. Jumlah PNS yang Menduduki Jabatan Guru SD Menurut Status Kepegawaian

No.	Status Kepegawaian	Tahun				
		2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011
1	PNS	973,150	1,002,604	1,079,243	1,106,430	1,056,209
2	Non PNS	412,526	442,528	490,083	521,554	588,716
Jumlah			1,385,676	1,445,132	1,569,326	1,627,984

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012



Tabel III.47. Jumlah PNS yang Menduduki Jabatan Guru SMP Menurut Status Kepegawaian

No.	Status Kepegawaian	Tahun				
		2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011
1	PNS	326,831	322,466	335,513	343,643	346,898
2	Non PNS	297,895	299,412	293,523	293,305	210,007
Jumlah		624,726	621,878	629,036	636,948	556,905

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012

Tabel III.48. Jumlah PNS yang Menduduki Jabatan Guru SMA Menurut Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Tahun				
		2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011
1	PNS	127,968	137,876	149,586	161,027	162,480
2	Non PNS	157,850	167,976	164,803	166,136	102,032
Jumlah		285,818	305,852	314,389	327,163	264,512

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012

Tabel III.49. Jumlah PNS yang Menduduki Jabatan Guru SMK Menurut Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Tahun				
		2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011
1	PNS	55,454	64,375	70,955	82,782	78,000
2	Non PNS	153,637	166,412	175,063	187,619	97,656
Jumlah		209,091	230,787	246,018	270,401	175,656

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012

Tabel III.50. Jumlah PNS yang Menduduki Jabatan Guru SLB Menurut Status Kepegawaian

No.	Status Kepegawaian	Tahun				
		2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011
1	PNS	8,366	8,562	9,635	10,175	8,936
2	Non PNS	6,732	7,418	8,412	8,749	7,166
Jumlah		15,098	15,980	18,047	18,924	16,102

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012



Tabel III.51. Jumlah PNS yang Menduduki Jabatan Guru SD Menurut Usia

No.	Kelompok Umur	Tahun					
		2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010		2010/2011
1	< 20	-	-	-	-	<= 30	380,456
2	20 - 29	230,084	288,203	336,028	393,626	31-35	156,673
3	30 - 39	352,425	328,217	357,961	348,792	36-40	146,005
4	40 - 49	530,559	546,721	573,202	558,961	41-45	273,807
5	50 - 59	239,836	267,495	283,894	313,336	46-50	310,528
6	> 59	32,772	14,496	18,241	13,269	51-55	229,673
7						>=56	147,783
Jumlah		1,385,676	1,445,132	1,569,326	1,627,984		1,644,925

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012

Tabel III.52. Jumlah PNS yang Menduduki Jabatan Guru SMP Menurut Usia

No.	Kelompok Umur	Tahun					
		2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010		2010/2011
1	< 20	-	-	-	-	<= 30	97,961
2	20 - 29	100,602	115,223	120,963	129,802	31-35	80,223
3	30 - 39	221,732	217,018	211,798	204,329	36-40	79,920
4	40 - 49	234,717	219,809	223,652	225,065	41-45	110,830
5	50 - 59	59,629	62,651	65,059	70,835	46-50	106,763
6	> 59	8,046	7,177	7,564	6,917	51-55	59,042
7						>=56	22,166
Jumlah		624,726	621,878	629,036	636,948		556,905

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012

Tabel III.53. Jumlah PNS yang Menduduki Jabatan Guru SMA Menurut Usia

No.	Kelompok Umur	Tahun					
		2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010		2010/2011
1	< 20	-	-	-	-	<= 30	46,204
2	20 - 29	56,361	61,855	65,577	70,171	31-35	44,118
3	30 - 39	111,553	117,698	116,261	118,117	36-40	40,089
4	40 - 49	88,170	94,315	98,477	100,927	41-45	48,302
5	50 - 59	25,495	27,686	30,513	34,055	46-50	44,712
6	> 59	4,239	4,298	3,561	3,893	51-55	28,546
7						>=56	12,541
Jumlah		285,818	305,852	314,389	327,163		264,512

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012



Tabel III.54. Jumlah PNS yang Menduduki Jabatan Guru SMK Menurut Usia

No.	Kelompok Umur	Tahun					
		2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010		2010/2011
1	< 20	-	-	-	-	<= 30	37,742
2	20 - 29	41,037	46,088	49,101	59,302	31-35	32,506
3	30 - 39	82,391	90,986	97,011	102,513	36-40	28,381
4	40 - 49	62,044	68,230	72,905	79,317	41-45	28,943
5	50 - 59	19,301	20,949	22,362	24,593	46-50	26,076
6	> 59	4,318	4,534	4,639	4,676	51-55	15,088
7						>=56	6,920
Jumlah		209,091	230,787	246,018	270,401		175,656

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012

Tabel III.55. Jumlah PNS yang Menduduki Jabatan Guru TK Menurut Ijasah Tertinggi

No.	Tingkat Pendidikan	Tahun					
		2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010		2010/2011
1	SLTA Keguruan	66,932	64,775	65,090	57,156		
2	SLTA Non Keguruan	65,760	62,334	61,749	72,901		

Lanjutan Tabel III.55.

No.	Tingkat Pendidikan	Tahun					
		2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010		2010/2011
3	D1	13,729	14,582	14,551	14,881		
4	D2	45,324	59,181	59,303	83,942		
5	D3/Sarmud	5,982	6,624	6,623	8,566		
6	S1	24,232	25,522	25,886	38,688	< S1	212,688
7	S2	525	545	553	701	>= S1	54,888
Jumlah		222,484	233,563	233,755	276,835		267,576

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012

Tabel III.56. Jumlah PNS yang Menduduki Jabatan Guru SD Menurut Ijasah Tertinggi



No.	Tingkat Pendidikan	Tahun					
		2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010		2010/2011
1	< D1	415,681	377,476	364,084	327,065		
2	D1	21,562	19,028	21,579	20,946		
3	D2	653,111	691,443	739,600	800,787		
4	D3/Sarmud	37,487	37,022	41,433	42,373		
5	S1	255,404	317,355	398,664	431,018	< S1	1,061,227
6	S2	2,431	2,808	3,966	5,795	> =S1	583,698
Jumlah		1,385,676	1,445,132	1,569,326	1,627,984		1,644,925

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012

Tabel III.57. Jumlah PNS yang Menduduki Jabatan Guru SMP Menurut Ijasah Tertinggi

No.	Tingkat Pendidikan	Tahun					
		2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010		2010/2011
1	< D1	-	-	-	-		
2	D1	73,553	48,914	43,328	47,751		
3	D2	46,689	36,545	35,302	33,215		
4	D3/ Sarmud	106,887	90,731	81,695	70,349		
5	S1	386,486	437,473	453,249	473,428	< S1	108,793
6	S2	11,111	8,215	15,462	12,205	> =S1	448,112
Jumlah		624,726	621,878	629,036	636,948		556,905

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012

Tabel III.58. Jumlah PNS yang Menduduki Jabatan Guru SMA Menurut Ijasah Tertinggi

No.	Tingkat Pendidikan	Tahun					
		2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010		2010/2011
1	< D1	-	-	-	-		
2	D1	6,831	6,932	6,982	7,840		
3	D2	5,405	5,174	5,094	5,323		
4	D3/Sarmud	36,600	34,550	30,369	28,240		
5	S1	230,856	252,303	262,612	275,469	< S1	17,296
6	S2	6,126	6,893	9,332	10,291	> =S1	247,216
Jumlah		285,818	305,852	314,389	327,163		264,512

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012

Tabel III.59. Jumlah PNS yang Menduduki Jabatan Guru SMK Menurut Ijasah Tertinggi



No.	Tingkat Pendidikan	Tahun					
		2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010		2010/2011
1	< D1	-	-	-	-		
2	D1	8,235	8,041	8,365	8,862		
3	D2	5,183	4,553	4,773	5,132		
4	D3/Sarmud	37,526	40,572	42,869	36,944		
5	S1	152,722	173,424	185,764	213,164	< S1	18,445
6	S2	5,425	4,197	4,247	6,299	> =S1	157,211
Jumlah		209,091	230,787	246,018	270,401		175,656

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012

Tabel III.60. Jumlah PNS yang Menduduki Jabatan Guru SLB Menurut Ijazah Tertinggi

No.	Tingkat Pendidikan	Tahun					
		2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010		2010/2011
1	PK	1,078	1,155	1,283	1,352		
2	SGPLB	5,919	6,187	7,063	7,432		
3	SM-PLB	450	474	557	593		
4	SM Lain	130	147	155	161		
5	S1-PLB	5,853	6,246	7,100	7,439		
6	S1 Lain	553	582	635	652	< S1	6,079
7	S2, S3 PLB	94	94	102	107	> =S1	10,023
8	Lain-lain	1,021	1,095	1,152	1,188		
Jumlah		15,098	15,980	18,047	18,924		16,102

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012

Tabel III.61. Jumlah PNS yang Menduduki Jabatan Guru TK Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Tahun				
		2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011
1	Laki-laki	7,656	7,753	7,770	9,247	8,541
2	Perempuan	214,828	225,810	225,985	267,588	259,035
Jumlah		222,484	233,563	233,755	276,835	267,576

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012

Tabel III.62. Jumlah PNS yang Menduduki Jabatan Guru SD Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Tahun				
		2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011
1	Laki-laki	587,802	591,701	635,247	1,430,853	624,241
2	Perempuan	797,874	853,431	934,079	197,131	1,020,684
Jumlah		1,385,676	1,445,132	1,569,326	1,627,984	1,644,925

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012



Tabel III.63. Jumlah PNS yang Menduduki Jabatan Guru SMP Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Tahun				
		2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011
1	Laki-laki	322,345	316,755	318,628	310,338	248,832
2	Perempuan	302,381	305,123	310,408	326,610	308,073
Jumlah		624,726	621,878	629,036	636,948	556,905

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012

Tabel III.64. Jumlah PNS yang Menduduki Jabatan Guru SMA Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Tahun				
		2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011
1	Laki-laki	151,663	159,864	189,200	165,457	121,930
2	Perempuan	134,155	145,988	125,189	161,706	142,582
Jumlah		285,818	305,852	314,389	327,163	264,512

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012

Tabel III.65. Jumlah PNS yang Menduduki Jabatan Guru SMK Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Tahun				
		2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011
1	Laki-laki	127,043	139,749	148,826	159,917	92,948
2	Perempuan	82,048	91,038	97,192	110,484	82,708
Jumlah		209,091	230,787	246,018	270,401	175,656

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012

Tabel III.66. Jumlah PNS yang Menduduki Jabatan Guru SLB Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Tahun				
		2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011
1	Laki-laki	5,582	5,895	7,008	7,618	5,326
2	Perempuan	9,516	10,085	11,025	11,306	10,776
Jumlah		15,098	15,980	18,033	18,924	16,102

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012

Tabel III.67. Jumlah PNS yang Menduduki Jabatan Tenaga Kesehatan



No	SDM Kesehatan	Jumlah		
		2009	2010	2011
	Medis			
1	Dokter Spesialis	13.682	8.403	16.836
2	Dokter Umum	28.332	25.333	32.492
3	Dokter Gigi	9.774	8.731	10.164
	Keperawatan			
4	Perawat	173.948	160.074	220.575
5	Perawat Gigi	10.384	9.723	13.601
6	Bidan	93.889	96.551	124.164
	Kefarmasian			
7	sarjana farmasi dan apoteker	8.291	6.264	8.676
8	asisten apoteker	11.662	11.758	17.598
	Kesehatan Masyarakat			
9	Sarjana Kesmas	16.341	21.364	45.490
10	Sanitarian	12.517	13.505	16.164
11	Tenaga Gizi	12.762	12.823	15.716
12	Keterampilan Fisik	2.985	2.587	3.292
13	Keteknisian Medis	15.483	9.099	8.804
14	Analisis Kesehatan		5.530	11.795
	Jumlah	410.050	391.745	545.367

Sumber : Profil Kesehatan 2009, Profil Kesehatan 2010, Profil Kesehatan 2011, Kementerian Kesehatan

Tabel III.68. Jumlah Total PNS (Pusat-Daerah) yang Menduduki Jabatan Auditor

No.	Klasifikasi Auditor	2011
Auditor Ahli		
1	Utama	8
2	Madya	1.223
3	Muda	2.556
4	Pertama	1.612
	Jumlah	5399
Auditor Terampil		
1	Penyelia	1.171
2	Pelaksana Lanjutan	681
3	Pelaksana	586
	Jumlah	2.438

Sumber : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 2012



Tabel III.69. Jumlah Umum PNS Pusat dan PNS Daerah yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum

	Pusat		Provinsi		Kab/Kota		Total	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
J. F Umum	621,893	589,772	234,053	223,275	1,446,667	1,423,997	2,302,613	2,237,044

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, 2012

Tabel III.70. Jumlah Total PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut kelompok Umur

Usia	Total	
	2011	2012
18 – 20	3,447	2,964
21 – 25	126,523	135,675
26 – 30	399,178	416,211
31 – 35	407,966	429,725
36 – 40	335,832	337,430
41 – 45	348,262	326,437
46 – 50	359,006	321,089
51 – 55	300,229	248,096
56 – 60	22,040	19,181
61 – 65	129	219
65 +	1	17
Total	2,302,613	2,237,044

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, 2012

Tabel III.71. Jumlah PNS Pusat yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Kelompok Umur

Usia	Pusat	
	2011	2012
18 – 20	2,508	2,006
21 – 25	45,442	43,521
26 – 30	97,282	99,676
31 – 35	96,214	99,000
36 – 40	89,755	86,568
41 – 45	95,530	87,971
46 – 50	100,629	90,322
51 – 55	85,629	72,595
56 – 60	8,812	7,914



Lanjutan Tabel III.71.

Usia	Pusat	
	2011	2012
61 – 65	91	182
65 +	1	17
Total	621,893	589,772

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, 2012

Tabel III.72. Jumlah PNS Daerah yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Kelompok Umur

Usia	Provinsi		Kab/Kota	
	2011	2012	2011	2012
18 – 20	210	177	729	781
21 – 25	6,644	7,204	74,437	84,950
26 – 30	24,651	25,605	277,245	290,930
31 – 35	31,524	32,850	280,228	297,875
36 – 40	30,642	30,448	215,435	220,414
41 – 45	37,603	35,628	215,129	202,838
46 – 50	48,934	44,597	209,443	186,170
51 – 55	50,352	43,819	164,248	131,682
56 – 60	3,472	2,935	9,756	8,332
61 – 65	21	12	17	25
65 +	-	-	-	-
Total	234,053	223,275	1,446,667	1,423,997

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, 2012

Tabel III.73. Jumlah Total PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Pendidikan

Pendidikan	Total	
	2011	2012
SD	83,245	79,352
SLTP	122,228	117,418
SLTA	985,557	949,182
D1	28,859	37,018
D II	98,369	99,189
D III	237,027	262,442
D IV	14,669	12,733
S 1	694,344	649,368
S 2	37,561	29,776



Lanjutan Tabel III.73.

Pendidikan	Total	
	2011	2012
S 3	754	566
Total	2,302,613	2,237,044

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, 2012

Tabel III.74. Jumlah PNS Pusat yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Pendidikan

Pendidikan	Pusat	
	2011	2012
SD	14,649	14,004
SLTP	23,825	22,801
SLTA	258,160	246,664
D1	13,202	13,000
D II	14,930	12,333
D III	58,150	60,174
D IV	8,206	6,934
S 1	207,147	192,672
S 2	22,937	20,667
S 3	687	523
Total	621,893	589,772

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, 2012

Tabel III.75. Jumlah PNS Daerah yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Pendidikan

Pendidikan	Provinsi		Kab/Kota	
	2011	2012	2011	2012
SD	8,418	7,935	60,178	57,413
SLTP	10,950	10,355	87,453	84,262
SLTA	110,900	108,110	616,497	594,408
D1	1,404	1,451	14,253	22,567
D II	2,539	2,351	80,900	84,505
D III	22,617	24,665	156,260	177,603
D IV	1,089	1,041	5,374	4,758
S 1	71,412	63,935	415,785	392,761
S 2	4,692	3,411	9,932	5,698
S 3	32	21	35	22
Total	234,053	223,275	1,446,667	1,423,997

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, 2012



Tabel III.76. Jumlah Total PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Total	
	2011	2012
Laki-laki	1,395,276	1,297,922
Perempuan	907,337	939,122
Total	2,302,613	2,237,044

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, 2012

Tabel III.77. Jumlah PNS Pusat yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Pusat	
	2011	2012
Laki-laki	397,140	368,122
Perempuan	224,753	221,650
Total	621,893	589,772

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, 2012

Tabel III.78. Jumlah PNS Daerah yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Provinsi		Kab/Kota	
	2011	2012	2011	2012
Laki-laki	148,835	138,115	849,301	791,685
Perempuan	85,218	85,160	597,366	632,312
Total	234,053	223,275	1,446,667	1,423,997

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, 2012

Tabel III.79. Jumlah Total PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Golongan/Ruang

Gol/ Ruang	Total	
	2011	2012
Ia	20,652	16,076
Ib	13,921	17,104
Ic	42,917	36,634
Id	26,626	29,251
IIa	378,881	334,996
IIb	277,748	318,879
IIc	240,398	259,992



Lanjutan Tabel III.79.

Gol/ Ruang	Total	
	2011	2012
IId	108,639	121,751
IIIa	505,117	507,263
IIIb	338,690	343,285
IIIc	156,534	139,562
IIId	127,675	83,674
IVa	38,912	21,802
IVb	18,774	4,656
IVc	5,762	1,612
IVd	1,181	427
IVe	186	80
Total	2,302,613	2,237,044

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, 2012

Tabel III.80. Jumlah PNS Pusat yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Golongan/Ruang

Gol/ Ruang	Pusat	
	2011	2012
Ia	1,665	1,396
Ib	2,009	2,053
Ic	5,564	4,996
Id	6,349	5,892
IIa	75,555	69,259
IIb	60,378	57,918
IIc	63,926	67,258
IId	38,360	40,463
IIIa	144,557	143,274
IIIb	119,523	120,557
IIIc	43,808	40,037
IIId	41,429	28,259
IVa	11,044	5,800
IVb	5,589	1,699
IVc	1,275	522
IVd	698	315
IVe	164	74
Total	621,893	589,772

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, 2012





Tabel III.81. Jumlah PNS Daerah yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Golongan/Ruang

Gol/ Ruang	Provinsi		Kab/Kota	
	2011	2012	2011	2012
Ia	1,644	1,318	17,343	13,362
Ib	1,074	1,288	10,838	13,763
Ic	4,079	3,507	33,274	28,131
Id	1,863	2,212	18,414	21,147
IIa	35,829	31,178	267,497	234,559
IIb	15,221	19,682	202,149	241,279
IIc	19,786	20,221	156,686	172,513
IId	11,435	12,060	58,844	69,228
IIIa	43,288	42,041	317,272	321,948
IIIb	47,954	49,023	171,213	173,705
IIIc	20,588	19,139	92,138	80,386
IIId	21,855	17,240	64,391	38,175
IVa	5,880	3,318	21,988	12,684
IVb	2,528	731	10,657	2,226
IVc	735	237	3,752	853
IVd	283	78	200	34
IVe	11	2	11	4
Total	234,053	223,275	1,446,667	1,423,997

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, 2012

Tabel III.82. Jumlah PNS yang Pernah Ikut Diklat PIM I, II, III, IV dan Prajabatan

No	Jenis diklat	Tahun				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Diklat Prajabatan Gol. I/II	116516	185411	160410	144308	128364
2	Diklat Prajabatan Gol. III	57641	57257	80727	114884	105729
3	Diklatpim Tk. IV	12796	11323	12880	13071	13339
4	Diklatpim Tk. III	6888	5902	6433	5883	5662
5	Diklatpim tk. II	2857	2306	2325	2090	1910
6	Diklatpim Tk. I	72	81	57	30	59
	JUMLAH TOTAL	218344	282290	281518	296467	269945

Sumber : Lembaga Administrasi Negara (LAN), 2012



Tabel III.83. Jumlah PNS yang Pernah Ikut Diklat Fungsional dan Teknis

No	Jenis diklat	Tahun				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Diklat Fungsional	5658	5365	5116	4181	3631
2	diklat teknis	15916	14645	13570	12020	11251
	JUMLAH TOTAL	21574	20010	18686	16201	14882

Sumber : Lembaga Administrasi Negara (LAN), 2012

Tabel III.84. Jumlah Keseluruhan Lembaga Diklat dan Program Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan Kementerian yang Sudah Diakreditasi Tahun 2011

No.	Instansi	Lembaga diklat		Nama diklat					
				Prajab gol					
				I		II		III	
1	KEMENTERIAN AGAMA	1	BADAN LITBANG AGAMA DAN DIKLAT KEAGAMAAN	?		?		?	
2	KEMENTERIAN ESDM	2	PUSDIKLAT TEKNOLOGI MINERAL DAN BATU BARA	?		?		?	
		3	PUSDIKLAT MINYAK DAN GAS BUMI	?		?		?	
3	KEMENTERIAN KEHUTANAN	4	PUSDIKLAT KEHUTANAN	?		?		?	
			Re-Akreditasi 2011	?		?		?	
4	KEMENTERIAN PENDIDIKAN	5	PUSDIKLAT PNS	?		?		?	
			Re-Akreditasi 2011	?		?		?	
5	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM	6	PUSDIKLAT PNS	?		?		?	
			RE AKREDITASI 2010						
6	KEMENTERIAAN PERTANIAN	7	PMPSDM PERTANIAN	?		?		?	
			Re-Akreditasi 2011	?		?		?	

Lanjutan Tabel III.84.

No.	Instansi	Lembaga diklat		Nama diklat					
				Prajab gol					
				I		II		III	
7	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	8	BADAN DIKLAT	?		?		?	
8	KEMENTERIAN PERTAHANAN	9	PUSDIKLAT	?		?		?	
9	KEMENTERIAN SOSIAL	10	PUSDIKLAT PNS	?		?		?	
10	KEMENTERIAN PU	11	PUSDIKLAT PNS						
			TEMPAT PENYELENGGARAAN:						
			1. BALAI DIKLAT WILAYAH I MEDAN	?		?		?	
			2. BALAI DIKLAT WILAYAH II BANDUNG	?		?		?	
			3. BALAI DIKLAT WILAYAH III YOGYAKARTA	?		?		?	
			4. BALAI DIKLAT WILAYAH IV SURABAYA	?		?		?	
			5. BALAI DIKLAT WILAYAH V MAKASSAR	?		?		?	
			6. BALAI DIKLAT WILAYAH VI DKI JAKARTA	?		?		?	
11	KEMENTERIAN BUDPAR	12	BALAI DIKLAT PEGAWAI	?		?		?	
12	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	13	PUSDIKLAT PNS	?		?		?	
	TIDAK TERAKREDITASI		Re-Akreditasi 2011						
13	KEMENTERIAN KEUANGAN	14	PUSDIKLAT PNS BADAN DIKLAT KEUANGAN	?		?		?	
14	KEMENTERIAN NAKERTRANS	15	PUSDIKLAT PNS	?		?		?	
			Re-Akreditasi 2011	?		?		?	
15	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	16	PUSDIKLAT	?		?		?	
16	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	17	PUSDIKLAT PERDAGANGAN	?		?		?	
17	KEMENTERIAN KESEHATAN	18	PUSDIKLAT KESEHATAN BPP SDM KESEHATAN	?		?		?	
		19	BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN CILANDAK					?	
		20	BALAI PELATIHAN KESEHATAN SALAMAN	?		?			



Lanjutan Tabel III.84.

No.	Instansi	Lembaga diklat	Nama diklat					
			Prajab gol					
			I		II		III	
18	KEMENTERIAN INFORMASI DAN TELEKOMUNIKASI	21	PUSDIKAT PEGAWAI	?	?	?	?	
19	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	22	PUSAT PELATIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN					
			DILAKSANAKAN OLEH:					
			1. BALAI DIKLAT APARATUR SUKAMANDI	?	?	?	?	
			Re-Akreditasi 2011	?	?	?	?	
			2. BALAI DIKLAT PERIKANAN TEGAL	?	?	?	?	
			3. BALAI DIKLAT PERIKANAN AERTEMBAGA	?	?	?	?	
			4. BALAI DIKLAT PERIKANAN BANYUWANGI	?	?	?	?	
			5. BALAI DIKLAT PERIKANAN BELAWAN	?	?	?	?	
			6. BALAI DIKLAT PERIKANAN AMBON	?	?	?	?	

Lanjutan Tabel III.84.

No.	Instansi	Lembaga diklat	Diklatpim tingkat							
			I	II	III	IV				
1	KEMENTERIAN AGAMA	1	BADAN LITBANG AGAMA DAN DIKLAT KEAGAMAAN			?	?			
2	KEMENTERIAN ESDM	2	PUSDIKLAT TEKNOLOGI MINERAL DAN BATU BARA			?	?			
		3	PUSDIKLAT MINYAK DAN GAS BUMI			?	?			
3	KEMENTERIAN KEHUTANAN	4	PUSDIKLAT KEHUTANAN			?	?			
			Re-Akreditasi 2011			?	?			
4	KEMENTERIAN PENDIDIKAN	5	PUSDIKLAT PNS			?	?			
			Re-Akreditasi 2011			?	?			
5	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM	6	PUSDIKLAT PNS			?	?			
			RE AKREDITASI 2010							

Lanjutan Tabel III.84.

No.	Instansi	Lembaga diklat	Diklatpim tingkat			
			I	II	III	IV
6	KEMENTERAIAN PERTANIAN	7 PMPSDM PERTANIAN			?	?
		Re-Akreditasi 2011			?	?
7	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	8 BADAN DIKLAT			?	?
8	KEMENTERIAN PERTAHANAN	9 PUSDIKLAT			?	?
9	KEMENTERIAN SOSIAL	10 PUSDIKLAT PNS			?	?
10	KEMENTERIAN PU	PUSDIKLAT PNS				
		TEMPAT PENYELENGGARAAN:				
		1. BALAI DIKLAT WILAYAH I MEDAN			?	?
		2. BALAI DIKLAT WILAYAH II BANDUNG			?	?
		3. BALAI DIKLAT WILAYAH III YOGYAKARTA			?	?
		4. BALAI DIKLAT WILAYAH IV SURABAYA			?	?
		5. BALAI DIKLAT WILAYAH V MAKASSAR			?	?
		6. BALAI DIKLAT WILAYAH VI DKI JAKARTA			?	?
11	KEMENTERIAN BUDPAR	12 BALAI DIKLAT PEGAWAI			?	?
12	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	13 PUSDIKLAT PNS			?	?
	TIDAK TERAKREDITASI	Re-Akreditasi 2011				
13	KEMENTERIAN KEUANGAN	14 PUSDIKLAT PNS BADAN DIKLAT KEUANGAN			?	?
14	KEMENTERIAN NAKERTRANS	15 PUSDIKLAT PNS			?	?
		Re-Akreditasi 2011			?	?
15	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	16 PUSDIKLAT			?	?
16	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	17 PUSDIKLAT PERDAGANGAN			?	?
17	KEMENTERIAN KESEHATAN	18 PUSDIKLAT KESEHATAN BPP SDM KESEHATAN			?	?
		19 BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN CILANDAK			?	
		20 BALAI PELATIHAN KESEHATAN SALAMAN				?



Lanjutan Tabel III.84.

No.	Instansi	Lembaga diklat	Diklatpim tingkat			
			I	II	III	IV
18	KEMENTERIAN INFORMASI	21 PUSDIKAT PEGAWAI			?	?
	DAN TELEKOMUNIKASI					
19	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	PUSAT PELATIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN				
		DILAKSANAKAN OLEH:				
		1. BALAI DIKLAT APARATUR SUKAMANDI			?	?
		Re-Akreditasi 2011			?	?
		2. BALAI DIKLAT PERIKANAN TEGAL				?
		3. BALAI DIKLAT PERIKANAN AERTEMBAGA				?
		4. BALAI DIKLAT PERIKANAN BANYUWANGI				
		5. BALAI DIKLAT PERIKANAN BELAWAN				
		6. BALAI DIKLAT PERIKANAN AMBON				
		22				

Sumber : Lembaga Administrasi Negara (LAN), 2012

Tabel III.85. Jumlah Keseluruhan Lembaga Diklat dan Program Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan Lembaga Non Kementerian yang Sudah Diakreditasi Tahun 2011

No.	Instansi	Lembaga diklat	Nama diklat			
			Prajab gol			
			I	II	III	
1	BPS	1 PUSDIKLAT	?	?	?	
		Re-Akreditasi 2011	?	?	?	
2	LAN	2 PUSDIKLAT SPIMNAS	?	?	?	
		3 PUSAT KAJIAN DAN DIKLAT APARATUR II	?	?	?	
		4 PUSAT KAJIAN DAN DIKLAT APARATUR I	?	?	?	
3	KEJAKSAAN AGUNG	5 PUSDIKLAT	?	?	?	
4	BPN	6 PUSDIKLAT	?	?	?	
5	BPKP	7 PUSDIKLAT PENGAWASAN	?	?	?	
		RE AKREDITASI 2010	?	A	?	A
6	POLRI	8 PUSDIKMIN POLRI	?	?	?	
7	BKN	9 PUSDIKLAT	?	?	?	
8	BIN	10 PUSDIKLAT	?	?	?	

Lanjutan Tabel III.85.

No.	Instansi	Lembaga diklat	Nama diklat					
			Prajab gol					
			I	II	III	IV	V	VI
9	BKKBN	11	PUSLAT PNSDAN TENAGA PROG BKKBN	?	?	?	?	?
			RE AKREDITASI 2010					
			?	A	?	A	?	A
10	LIPI	12	PUSAT PEMBINAAN DIKLAT PENELITI LIPI	?	?	?	?	?
11	BPK	13	PUSDIKLAT PEGAWAI	?	?	?	?	?
12	Kementerian Negara LH	14	PUSDIKLAT KEMENTERIAN LH	?	B	?	B	?
13	Mahkamah Agung	15	PUSDIKLAT MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN	?	B	?	B	?

Lanjutan Tabel III.85.

No.	Instansi	Lembaga diklat	Nama diklat							
			Diklatpim tingkat							
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1	BPS	1	PUSDIKLAT			?		?		
			Re-Akreditasi 2011							
					?		?			
2	LAN	2	PUSDIKLAT SPIMNAS	?	?	?		?		
		3	PUSAT KAJIAN DAN DIKLAT APARATUR II		?	?		?		
		4	PUSAT KAJIAN DAN DIKLAT APARATUR I		?	?		?		
3	KEJAKSAAN AGUNG	5	PUSDIKLAT			?		?		
4	BPN	6	PUSDIKLAT			?		?		
5	BPKP	7	PUSDIKLAT PENGAWASAN			?		?		
			RE AKREDITASI 2010							
					?	A	?	A		
6	POLRI	8	PUSDIKMIN POLRI			?		?		
7	BKN	9	PUSDIKLAT			?		?		
8	BIN	10	PUSDIKLAT			?		?		
9	BKKBN	11	PUSLAT PNSDAN TENAGA PROG BKKBN			?		?		
			RE AKREDITASI 2010							
					?	A	?	A		
10	LIPI	12	PUSAT PEMBINAAN DIKLAT PENELITI LIPI			?		?		
11	BPK	13	PUSDIKLAT PEGAWAI			?		?		
12	Kementerian Negara LH	14	PUSDIKLAT KEMENTERIAN LH			?	B	?	B	
13	Mahkamah Agung	15	PUSDIKLAT MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN			?	C	?	C	

Sumber : Lembaga Administrasi Negara (LAN), 2012



Tabel III.86. Jumlah Keseluruhan Lembaga Diklat dan Program Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan Pemerintah Provinsi yang Sudah Diakreditasi Tahun 2011

No.	Instansi	Lembaga diklat	Nama diklat					
			Prajab gol					
			I		II		III	
1	Prov. Sumbar	1	BANDIKLAT PROV	?	?	?	?	?
			Re-Akreditasi 2011	?	?	?	?	?
2	PROV. LAMPUNG	2	BANDIKLAT PROV	?	?	?	?	?
			RE-AKREDITASI 2011	?	?	?	?	?
3	PROV. JAWA TENGAH	3	BANDIKLAT PROV	?	?	?	?	?
			RE AKREDITASI 2010	?	A	?	A	?
4	PROV. JAWA TIMUR	4	BANDIKLAT PROV	?	?	?	?	?
			RE AKREDITASI 2010	?	B	?	B	?
5	PROV. KALIMANTAN TIMUR	5	BANDIKLAT PROV	?	?	?	?	?
			RE-AKREDITASI 2011	?	?	?	?	?
6	PROV. DIY	6	BANDIKLAT PROV	?	?	?	?	?
			Re-Akreditasi 2011	?	?	?	?	?
7	PROV. JABAR	7	BANDIKLAT DAERAH PROV	?	?	?	?	?
			RE AKREDITASI 2010	?	A	?	A	?
			AKREDITASI PIM II 2010	?	?	?	?	?
8	PROV. KALTENG	8	BANDIKLAT PROV	?	?	?	?	?
	TIDAK TERAKREDITASI		Re-Akreditasi 2011	?	?	?	?	?
9	PROV. SULSEL	9	BPSDM APARATUR PROV	?	?	?	?	?
			RE AKREDITASI 2010	?	B	?	B	?
10	PROV. BENGKULU	10	BANDIKLAT PROV	?	?	?	?	?
			RE AKREDITASI 2011	?	?	?	?	?
11	PROV. NAD	11	BANDIKLAT PROV	?	?	?	?	?
	Tidak terakreditasi		RE AKREDITASI 2010	X	X	X	X	X
			Re-Akreditasi 2011	?	?	?	?	?
12	PROV. KALBAR	12	BANDIKLAT PROV	?	?	?	?	?
	TIDAK TERAKREDITASI		Re-Akreditasi 2011	?	?	?	?	?
13	PROV. NTT	13	BANDIKLAT PROV	?	?	?	?	?
	TIDAK TERAKREDITASI		Re-Akreditasi 2011	?	?	?	?	?
14	PROV. BALI	14	BANDIKLAT PROV	?	?	?	?	?
			Re-Akreditasi 2011	?	?	?	?	?
15	PROV. PAPUA	15	BANDIKLAT PROV	?	?	?	?	?
	TIDAK TERAKREDITASI		Re-Akreditasi 2011	?	?	?	?	?
16	PROV. NTB	16	BANDIKLAT PROV	?	?	?	?	?
			RE AKREDITASI 2010	?	B	?	B	?
17	PROV. SULTENG	17	BANDIKLAT PROV	?	?	?	?	?
			Re-Akreditasi 2011	?	?	?	?	?
18	PROV. MALUKU	18	BANDIKLAT PROV	?	?	?	?	?
	TIDAK TERAKREDITASI		Re-Akreditasi 2011	?	?	?	?	?

Lanjutan Tabel III.86.

No.	Instansi	Lembaga diklat	Nama diklat					
			Prajab gol					
			I	II	III	IV	V	VI
19	PROV. SULTRA	19	BANDIKLAT PROV	?	?	?	?	?
			Re-Akreditasi 2011	?	?	?	?	?
20	PROV. RIAU	20	BADAN ADM DAN DIKLAT PROV	?	?	?	?	?
			Re-Akreditasi 2011	?	?	?	?	?
21	PROV. SUMSEL	21	BANDIKLAT PROV	?	?	?	?	?
			Re-Akreditasi 2011	?	?	?	?	?
22	PROV. SUMUT	22	BANDIKLAT PROV	?	?	?	?	?
			RE AKREDITASI 2010	?	C	?	C	?
23	PROV. KALSEL	23	BANDIKLAT PROV	?	?	?	?	?
	TIDAK TERAKREDITASI		Re-Akreditasi 2011	?	?	?	?	?
24	PROV. JAMBI	24	BANDIKLAT PROV	?	?	?	?	?
			Re-Akreditasi 2011	?	?	?	?	?
25	PROV. SULUT	25	BANDIKLAT PROV	?	?	?	?	?
			RE AKREDITASI 2010	?	C	?	C	?
26	PROV. BABEL	26	BANDIKLAT PROV	?	?	?	?	?
			Re-Akreditasi 2011	?	?	?	?	?
27	PROV. BANTEN	27	BANDIKLAT PROV	?	?	?	?	?
			Re-Akreditasi 2011	?	?	?	?	?
28	PROV. GORONTALO	28	BADAN KEPEG DAN DIKLAT PROV	?	?	?	?	?
	TIDAK TERAKREDITASI		Re-Akreditasi 2011	?	?	?	?	?
29	PROV. DKI	29	KANTOR DIKLAT PROV	?	?	?	?	?
			Re-Akreditasi 2011	?	?	?	?	?
30	PROV. MALUKU UTARA	30	BANDIKLAT PROV	?	?	?	?	?
	TIDAK TERAKREDITASI		Re-Akreditasi 2011	?	?	?	?	?

Lanjutan Tabel III.86.

No.	Instansi	Lembaga diklat	Nama diklat							
			Diklatpim tingkat							
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1	PROV. SUMBAR	1	BANDIKLAT PROV	?	?	?	?	?	?	?
			Re-Akreditasi 2011	?	?	?	?	?	?	?
2	PROV. LAMPUNG	2	BANDIKLAT PROV	?	?	?	?	?	?	?
			Re-Akreditasi 2011	?	?	?	?	?	?	?
3	PROV. JAWA TENGAH	3	BANDIKLAT PROV	?	?	?	?	?	?	?
			RE AKREDITASI 2010	?	A	?	A	?	A	?
4	PROV. JAWA TIMUR	4	BANDIKLAT PROV	?	?	?	?	?	?	?
			RE AKREDITASI 2010	?	B	?	B	?	B	?



Lanjutan Tabel III.86.

No.	Instansi	Lembaga diklat	Nama diklat							
			Diklatpim tingkat							
			I	II	III	IV				
5	PROV. KALIMANTAN TIMUR	5	BANDIKLAT PROV							
			Re-Akreditasi 2011							
6	PROV. DIY	6	BANDIKLAT PROV							
			Re-Akreditasi 2011							
7	PROV. JABAR	7	BANDIKLAT DAERAH PROV							
			RE AKREDITASI 2010							
			AKREDITASI PIM II 2010							
8	PROV. KALTENG	8	BANDIKLAT PROV							
	tidak terakreditasi		Re-Akreditasi 2011							
9	PROV. SULSEL	9	BPSDM APARATUR PROV							
			RE AKREDITASI 2010							
10	PROV. BENGKULU	10	BANDIKLAT PROV							
			RE AKREDITASI 2011							
11	PROV. NAD	11	BANDIKLAT PROV							
	Tidak terakreditasi		RE AKREDITASI 2010							
			Re-Akreditasi 2011							
12	PROV. KALBAR	12	BANDIKLAT PROV							
	TIDAK TERAKREDITASI		Re-Akreditasi 2011							
13	PROV. NTT	13	BANDIKLAT PROV							
	TIDAK TERAKREDITASI		Re-Akreditasi 2011							
14	PROV. BALI	14	BANDIKLAT PROV							
			Re-Akreditasi 2011							
15	PROV. PAPUA	15	BANDIKLAT PROV							
	TIDAK TERAKREDITASI		Re-Akreditasi 2011							
16	PROV. NTB	16	BANDIKLAT PROV							
			RE AKREDITASI 2010							
17	PROV. SULTENG	17	BANDIKLAT PROV							
			Re-Akreditasi 2011							
18	PROV. MALUKU	18	BANDIKLAT PROV							
	tidak terakreditasi		Re-Akreditasi 2011							
19	PROV. SULTRA	19	BANDIKLAT PROV							
			Re-Akreditasi 2011							
20	PROV. RIAU	20	BADAN ADM DAN DIKLAT PROV							
			Re-Akreditasi 2011							
21	PROV. SUMSEL	21	BANDIKLAT PROV							
			Re-Akreditasi 2011							

Lanjutan Tabel III.86.

No.	Instansi	Lembaga diklat	Nama diklat							
			Diklatpim tingkat							
			I	II	III	IV				
22	PROV. SUMUT	22	BANDIKLAT PROV							
			RE AKREDITASI 2010							
23	PROV. KALSEL	23	BANDIKLAT PROV							
	TIDAK TERAKREDITASI		Re-Akreditasi 2011							
24	PROV. JAMBI	24	BANDIKLAT PROV							
			Re-Akreditasi 2011							
25	PROV. SULUT	25	BANDIKLAT PROV							
			RE AKREDITASI 2010							
26	PROV. BABEL	26	BANDIKLAT PROV							
			Re-Akreditasi 2011							
27	PROV. BANTEN	27	BANDIKLAT PROV							
			Re-Akreditasi 2011							
28	PROV. GORONTALO	28	BADAN KEPEG DAN DIKLAT PROV							
	TIDAK TERAKREDITASI		Re-Akreditasi 2011							
29	PROV. DKI	29	KANTOR DIKLAT PROV							
			Re-Akreditasi 2011							
30	PROV. MALUKU UTARA	30	BANDIKLAT PROV							
	TIDAK TERAKREDITASI		Re-Akreditasi 2011							

Sumber : Lembaga Administrasi Negara (LAN), 2012

Tabel III.87. Jumlah Keseluruhan Lembaga Diklat dan Program Diklat Kepemimpinan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Sudah Diakreditasi Tahun 2011

No.	Instansi	Lembaga diklat	Nama diklat kepemimpinan					
			Prajab gol					
			I	II	III			
1	KAB. BIAK NUMFOR PROV.PAPUA	1	BANDIKLAT KABUPATEN					
2	KAB. MIMIKA PROV PAPUA	2	BANDIKLAT KABUPATEN					
3	KOTA JAYAPURA PROV. PAPUA	3	BANDIKLAT KOTA					
4	KAB. SUKABUMI PROV JABAR	4	BADIKLAT KABUPATEN SUKABUMI PROV JABAR					



Lanjutan Tabel III.87.

NO.	INSTANSI	LEMBAGA DIKLAT	NAMA DIKLAT KEPEMIMPINAN							
			DIKLATPIM TINGKAT							
			I	II	III	IV				
1	KAB. BIAK NUMFOR PROV.PAPUA	1	BANDIKLAT KABUPATEN							
2	KAB. MIMIKA PROV PAPUA	2	BANDIKLAT KABUPATEN							
3	KOTA JAYAPURA PROV. PAPUA	3	BANDIKLAT KOTA							
4	KAB. SUKABUMI PROV JABAR	4	BADIKLAT KABUPATEN SUKABUMI PROV JABAR							B

Sumber : Lembaga Administrasi Negara (LAN), 2012

Tabel III.88. Jumlah Keseluruhan Lembaga Diklat dan Program Diklat Teknis dan Fungsional Kementerian yang Sudah Diakreditasi Tahun 2011

No	Instansi	Lembaga diklat		Nama diklat		Program diklat	
						DF	DT
1	Kementerian Pertanian	1	Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara Bogor	1	Kesehatan Hewan Bagi Asisten Dokter Hewan		X
				2	Pemeriksaan Kebuntingan Bagi Petugas		X
		2	Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku Sulsel	1	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian		X
				2	Penanganan Alat-alat Mekanisme Pertanian		X
				3	Tata Guna Air		X
				4	Pelatihan Budi Daya Jagung Bagi Penyuluh Pertanian		X
				5	Pelatihan Teknologi Budi daya Melon		X
				6	Pelatihan Teknologi Penangan Pasca Panen Kakao		X
				7	Pelatihan pengelolaan Limbah Pertanian dan Pupuk Organik		X
				8	Budidaya dan Pasca Panen Padi		X



Lanjutan Tabel III.88.

N o	Instansi	Lembaga diklat		Nama diklat		Program diklat			
						DF		DT	
		3	Pusat Pelatihan Manajemen Kepemimpinan Pertanian Ciawi	1	Perencanaan Pertanian			X	
				2	Metodologi dan Informasi Pertanian			X	
				3	Diklat Teknis Dasar Bagi Guru Pertanian			X	B
				4	Kewirausahaan Bagi Petani Muda			X	
				5	Metodologi Bagi Pengelola Gapoktan (P4S)			X	
		4	Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan Jawa Timur	1	Agribisnis Tanaman Obat Rimpang			X	
				2	Agribisnis Holtikultura (Bawang Merah)			X	
				3	Agribisnis Holtikultura (cabai)			X	
		5	Balai Pelatihan Pertanian Jambi	1	Karet			X	
				2	Pelatihan budidaya Jamur Tiram			X	
				3	Pelatihan Pasca Panen Kakao			X	
				4	Pelatihan Budidaya Durian			X	
				5	Teknologi Budidaya Kelapa Sawit			X	
		6	balai besar pelatihan peternakan kupang ntt	1	Agribisnis Sapi Potong			X	
				2	Pengolahan Hasil Peternakan			X	
				3	Agribisnis Ternak Kambing			X	
				4	Agribisnis Induk dan Pedet Sapi			X	
		7	balai besar pelatihan peternakan batu malang	1	Budidaya Ternak			X	
				2	Agribisnis Sapi Perah			X	
				3	Pakan Ternak			X	
		8	balai besar pelatihan pertanian lembang jawa barat	1	Agribisnis Berbasis Holtikultura			X	
				2	Pasca Panen Pengolahan dan Hasil Sayuran dan Buah-Buahan			X	
				3	Teknologi Kultur Jaringan Komoditas Holtikultura			X	
				4	Sistem Jaminan Mutu Komoditas Holtikultura			X	
				5	Budidaya Krisan			X	
				6	Pengolahan Tanaman terpadu komoditas cabe			X	
				7	pengelolaan sayuran, bunga dan buah			X	
				8	Metodologi penyuluhan pertanian partisipatif			X	



Lanjutan Tabel III.88.

No	Instansi	Lembaga diklat		Nama diklat		Program diklat	
						DF	DT
		9	balai besar pelatihan pertanian binuang kalimantan selatan	1	Pengolahan Rawa Pasang Surut		X
				2	Optimalisasi Rancang Bangun Paket Teknologi Lahan Rawa Pasang Surut		X
				3	Pelatihan Teknis Budaya Padi Organik		X
				4	Agribisnis Karet		X
				5	Agribisnis Kelapa Sawit		X
		10	balai besar pelathan pertanian cihea	1	Optimalisasi Lahan Kering		X
				2	Pengolahan Hasil Buah-buahan		X
		11	balai pelatihan pertanian lampung	1	Budidaya Tanaman Pisang		X
				2	Sayuran Organik Dataran Rendah		X
2	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	1	balai pendidikan dan pelatihan perhubungan darat bekasi	1	Analisis Dampak Lalu Lintas		X A
				2	Manajemen Transportasi Perkantoran		X A
		2	balai pendidikan dan pelatihan perhubungan darat tegal	1	Diklat Teknis Orientasi Lalulintas Angkutan Jalan		X B
				2	Diklat Teknis Manajemen Terminal Angkutan Jalan		X B
				3	Keselamatan Lalu lintas		X B
				4	Surveyor dan Supervisi Lalu Lintas Angkutan Jalan		X B
				5	Pengawasan Jalan Raya		X B
		3	balai pendidikan dan pelatihan perhubungan darat bali	1	Diklat Teknis Orientasi Lalulintas Angkutan Jalan		X B
				2	Diklat Teknis Manajemen Terminal Angkutan Jalan		X C
				3	Diklat Fungsiona Pengujian Kendaraan Bermotor		X B
				4	Diklat Teknsi Operator Jembatan Timbang		X B
				5	Diklat Teknis Alat Pemberi Sinyal Lalu Lintas (APILL)		X B
		4	balai pendidikan dan pelatihan perhubungan darat palembang	1	Diklat Teknis Orientasi Lalulintas Angkutan Jalan		X B
				2	Diklat Teknis Manajemen Terminal Angkutan Jalan		X B
				3	Diklat Fungsiona Pengujian Kendaraan Bermotor		X B

Lanjutan Tabel III.88.

No	Instansi	Lembaga diklat		Nama diklat		Program diklat			
						DF		DT	
				4	Orientasi Lalu Lintas Angkutan Sungan dan Danau Penyebrangan			X	B
				5	Teknis Operasional Lalu Lintas Angkutan Sungan dan Danau Penyebrangan			X	B
				6	Manajemen OperasionalLalu Lintas Angkutan Sungan dan Danau Penyebrangan			X	B
3	KEMENTERIAN KESEHATAN	1	balai besar pelatihat kesehatan ciloto	1	Diklat Teknis Basic Traumatic Center Life Support			X	B
				2	Diklat Teknis Petugas Pemeriksa Kesehatan Calon Jemaah Haji			X	B
				3	Diklat Teknis Teknis Tim Kesehatan HAJi Indonesia			X	B
				4	Diklat Teknis Bidan Poskesdes			X	B
				5	Diklat Fungsional Entomolog Kesehatan	X	B		
				6	Diklat Fungsional Administrator Kesehatan	X	B		
4	KEMENTERIAN SOSIAL	1	pusdiklat kementerian sosial	1	Diklat Fungsional Dasar Pekerja Sosial	X	B		
TOTAL PROGAM DIKLAT TERAKREDITASI						3		69	

Sumber : Lembaga Administrasi Negara (LAN), 2012

Catatan :

DF : Diklat Fungsional

DT : Diklat Teknis



Tabel III.89. Jumlah Keseluruhan Lembaga Diklat dan Program Diklat Teknis dan Fungsional Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang Sudah Diakreditasi Tahun 2011

No.	Instansi		Nama diklat		Program diklat			
					DF		DT	
1	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)	PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN	1	PEMBENTUKAN AUDITOR TERAMPIL	X			
			2	PEMBENTUKAN AUDITOR AHLI	X			
			3	PENJENJANGAN AUDITOR KETUA TIM	X			
			4	MANAJERIAL PENGAWASAN			X	
			5	PENGADAAN BARANG DAN JASA			X	
			6	AUDIT PENGADAAN BARANG DAN JASA			X	
			7	PENJENJANGAN AUDITOR PENGENDALI MUTU	X			
			8	PENJENJANGAN AUDITOR PENGENDALI TEKNIS	X			
2	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN)	PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI	1	ANALIS KEPEGAWAIAN TERAMPIL	X			
			2	ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI	X			
			3	PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI			X	
			4	MUTASI KEPEGAWAIAN			X	
			5	PEMBERHENTIAN DAN PENSUN			X	
			6	KOMPENSASI			X	

Lanjutan Tabel III.89.

No.	Instansi		Nama diklat		Program diklat			
					DF		DT	
3	BADAN INTELEGENT NEGARA (BIN)	PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI	1	DASAR INTELIGEN	X			
			2	INTELIGEN STRATEGIS TINGKAT I	X			
			3	INTELIGEN STRATEGIS TINGKAT II	X			
			4	TRADE CRAFT			X	
			5	KONTRA INTELIGEN			X	
			6	PENGGALANGAN DASAR			X	
			7	PENGGALANGAN LANJUT			X	
4	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI)	PUSAT PEMBINAAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENELITI	1	PENELITI TINGKAT PERTAMA	X			
			2	METODE PENELITIAN DAN PENGOLAHAN DATA			X	
			3	PEMASYARAKATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA			X	
5	PERPUSTAKAAN NASIONAL	PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERPUSTAKAAN	1	CALON PUSTAKAWAN TINGKAT AHLI	X			
			2	PUSTAKAWAN TINGKAT AHLI (ALIH JALUR)	X			
6	LEMBAGA SANDI NEGARA	PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1	DIKLAT TEKNIS SANDIMAN DASAR			X	C
			2	DIKLAT TEKNIS SANDIMAN LANJUTAN			X	C
			3	DIKLAT TEKNIS SANDIMAN			X	C



Lanjutan Tabel III.89

No.	Instansi		Nama diklat		Program diklat			
					DF		DT	
	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (ANRI)	PUSAT PENDIDIKAN DAN PEALTIHAN KEARSIPAN	1	DIKLAT FUNGSIONAL PEMBENTUKAN ARSIPARIS TINGKAT TERAMPIL	X	B		
			2	DIKLAT FUNGSIONAL PEMBENTUKAN ARSIPARIS TINGKAT AHLI	X	B		
6	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK)	PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1	Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) bagi Ketua Tim			X	B
			2	Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) bagi Anggota Tim			X	B
			3	Pemeriksa Kinerja Ketua TIM			X	B
			4	Pemeriksa Kinerja Anggota Tim			X	A
TOTAL PROGRAM DIKLAT TERAKREDITASI					15		20	

Sumber : Lembaga Administrasi Negara (LAN), 2012

Catatan :

DF : Diklat Fungsional

DT : Diklat Teknis





Tabel III.90. Jumlah PNS Kementerian/Lembaga yang Menduduki Jabatan Widyaiswara Menurut Jenjang dan Golongan Ruang

NO.	KLASIFIKASI WI	JUMLAH		
		2009	2010	2011
Widyaiswara Pertama				
1.	Golongan III/a	230	230	223
2.	Golongan III/b	156	160	174
Widyaiswara Muda				
3.	Golongan III/c	247	277	314
4.	Golongan III/d	399	398	420
Widyaiswara Madya				
5.	Golongan IV/a	707	649	599
6.	Golongan IV/b	279	353	404
7.	Golongan IV/c	248	224	224
Widyaiswara Utama				
8.	Golongan IV/d	248	212	199
9.	Golongan IV/e	61	45	50
	Total	2575	2548	2607

Sumber : Lembaga Administrasi Negara (LAN), 2012

Tabel III.91. Jumlah PNS Pemerintah Daerah yang Menduduki Jabatan Widyaiswara Menurut Jenjang dan Golongan Ruang

NO.	KLASIFIKASI WI	JUMLAH		
		2009	2010	2011
Widyaiswara Pertama				
1.	Golongan III/a	11	15	15
2.	Golongan III/b	34	34	38
Widyaiswara Muda				
3.	Golongan III/c	54	68	80
4.	Golongan III/d	59	70	76
Widyaiswara Madya				
5.	Golongan IV/a	107	118	110
6.	Golongan IV/b	108	98	97
7.	Golongan IV/c	125	125	113
Widyaiswara Utama				
8.	Golongan IV/d	147	144	138
9.	Golongan IV/e	26	16	18
	Total	671	688	685

Sumber : Lembaga Administrasi Negara (LAN), 2012



Tabel III.92. Data time Series Gaji Pokok PNS Golongan I

MKG	Golongan I/a			MKG	Golongan I/b		
	2010	2011	2012		2010	2011	2012
0	1,095,000	1,15,000	1,260,000	0			
1				1			
2	1,121,900	1,207,500	1,297,600	2			
3				3	1,183,700	1,276,000	1,372,700
4	1,149,400	1,240,900	1,336,400	4			
5				5	1,212,800	1,311,300	1,413,700
6	1,177,700	1,275,300	1,376,300	6			
7				7	1,242,600	1,404,600	1,455,900
8	1,206,600	1,310,500	1,417,400	8			
9				9	1,273,100	1,384,800	1,499,400
10	1,236,200	1,346,800	1,459,700	10			
11				11	1,304,300	1,423,100	1,544,100
12	1,266,600	1,384,000	1,305,300	12			
13				13	1,336,300	1,462,500	1,590,300
14	1,297,700	1,422,300	1,548,200	14			
15				15	1,369,100	1,503,000	1,637,700
16	1,329,500	1,461,600	1,594,400	16			
17				17	1,402,800	1,544,500	1,686,600
18	1,362,200	1,502,000	1,642,000	18			
19				19	1,437,200	1,587,200	1,737,000
20	1,395,600	1,543,600	1,691,000	20			
21				21	1,472,500	1,631,100	1,788,900
22	1,429,900	1,586,300	1,741,500	22			
23				23	1,508,600	1,676,200	1,842,300
24	1,465,000	1,630,100	1,793,500	24			
25				25	1,545,700	1,722,600	1,897,300
26	1,500,900	1,675,200	1,847,000	26			
27				27	1,583,600	1,770,200	1,953,900





Lanjutan Tabel III.92.

MKG	Golongan I/c			MKG	Golongan I/d		
	2010	2011	2012		2010	2011	2012
0				0			
1				1			
2				2			
3	1,233,800	1,330,000	1,430,800	3	1,286,000	1,386,300	1,491,300
4				4			
5	1,264,100	1,366,800	1,473,500	5	1,317,500	1,424,600	1,535,800
6				6			
7	1,295,100	1,404,600	1,517,500	7	1,349,900	1,464,000	1,581,700
8				8			
9	1,326,900	1,443,400	1,562,800	9	1,383,000	1,504,500	1,628,900
10				10			
11	1,359,500	1,483,300	1,677,500	11	1,417,000	1,546,100	1,677,500
12				12			
13	1,392,900	1,524,400	1,657,500	13	1,451,800	1,588,900	1,727,600
14				14			
15	1,427,100	1,566,500	1,707,000	15	1,487,400	1,632,800	1,779,200
16				16			
17	1,462,100	1,609,900	1,758,000	17	1,523,900	1,677,900	1,832,300
18				18			
19	1,498,000	1,654,400	1,810,500	19	1,561,400	1,724,400	1,887,000
20				20			
21	1,534,800	1,700,100	1,864,500	21	1,599,700	1,772,000	1,943,400
22				22			
23	1,572,500	1,747,100	1,920,200	23	1,639,000	1,821,100	2,001,400
24				24			
25	1,611,100	1,795,500	1,977,500	25	1,611,100	1,871,400	2,061,200
26				26			
27	1,650,600	1,845,100	2,036,600	27	1,650,600	1,923,200	2,122,700

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011; dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012



Tabel III.93. Data time Series Gaji Pokok PNS Golongan II

MKG	Golongan II/a			MKG	Golongan II/b		
	2010	2011	2012		2010	2011	2012
0	1,390,100	1,505,400	1,624,700	0			
1	1,407,200	1,526,200	1,648,900	1			
2				2			
3	1,411,800	1,568,400	1,698,200	3	1,502,700	1,634,800	1,770,000
4				4			
5	1,477,100	1,611,800	1,748,900	5	1,539,600	1,680,000	1,822,900
6				6			
7	1,513,400	1,656,400	1,801,100	7	1,577,400	1,726,400	1,877,300
8				8			
9	1,550,600	1,702,200	1,854,900	9	1,616,200	1,774,200	1,933,300
10				10			
11	1,588,600	1,749,300	1,910,300	11	1,655,800	1,823,200	1,991,100
12				12			
13	1,627,600	1,797,600	1,967,300	13	1,696,500	1,873,700	1,967,300
14				14			
15	1,667,600	1,847,300	2,026,000	15	1,738,100	1,925,500	2,026,000
16				16			
17	1,708,600	1,898,400	2,086,500	17	1,856,200	1,978,700	2,174,800
18				18			
19	1,750,500	1,950,900	2,148,800	19	1,824,500	2,033,500	2,148,800
20				20			
21	1,793,500	2,004,900	2,213,000	21	1,869,300	2,089,700	2,306,600
22				22			
23	1,837,500	2,060,300	2,279,100	23	1,915,200	2,147,500	2,375,500
24				24			
25	1,882,600	2,117,300	2,347,100	25	1,962,300	2,206,900	2,446,400
26				26			
27	1,928,800	2,175,900	2,417,200	27	2,010,400	2,267,900	2,519,400
28				28			
29	1,976,200	2,236,100	2,489,400	29	2,059,800	2,330,600	2,594,700
30				30			
31	2,024,700	2,297,900	2,563,700	31	2,110,400	2,395,100	2,672,100
32				32			
33	2,074,400	2,361,400	2,640,200	33	2,162,200	2,461,300	751.9

Lanjutan Tabel III.93.

MKG	Golongan II/c			MKG	Golongan II/d		
	2010	2011	2012		2010	2011	2012
0				0			
1				1			
2				2			
3	1,566,300	1,703,900	1,844,900	3	1,632,600	1,776,000	1,922,900
4				4			
5	1,604,800	1,751,000	1,900,000	5	1,672,600	1,825,100	1,980,300
6				6			
7	1,644,200	1,799,500	1,956,700	7	1,713,700	1,875,600	2,039,500
8				8			
9	1,684,500	1,849,200	2,015,100	9	1,755,800	1,927,400	2,100,400
10				10			
11	1,725,900	1,900,400	2,075,300	11	1,798,900	1,980,800	2,163,100
12				12			
13	1,768,300	1,952,900	2,137,200	13	1,843,100	2,035,500	2,277,700
14				14			
15	1,811,700	2,006,900	2,201,100	15	1,888,300	2,091,800	2,294,200
16				16			
17	1,856,200	2,062,400	2,266,800	17	1,934,700	2,149,700	2,362,700
18				18			
19	1,901,700	2,119,500	2,334,500	19	1,982,200	2,209,100	2,433,200
20				20			
21	1,948,400	2,178,100	2,404,200	21	2,030,800	2,270,200	2,505,900
22				22			
23	1,996,300	2,238,300	2,475,900	23	2,080,700	2,333,000	2,580,700
24				24			
25	2,045,300	2,300,200	2,549,900	25	2,131,800	2,397,500	2,657,700
26				26			
27	2,010,400	2,363,900	2,626,000	27	2,184,100	2,463,800	2,737,100
28				28			
29	2,146,900	2,429,200	2,704,400	29	2,237,700	2,532,000	2,818,800
30				30			
31	2,199,600	2,496,400	2,765,200	31	2,292,700	2,602,000	2,903,000
32				32			
33	2,253,600	2,565,400	2,868,300	33	2,349,000	2,674,000	2,989,600

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011; dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012



Tabel III.94. Data time Series Gaji Pokok PNS Golongan III

MKG	Golongan III/a			MKG	Golongan III/b		
	2010	2011	2012		2010	2011	2012
0	1,743,400	1,902,300	2,064,100	0	1,817,100	1,982,800	2,151,400
1				1			
2	1,786,200	1,954,900	2,125,700	2	1,861,800	2,037,600	2,215,700
3				3			
4	1,830,100	2,009,000	2,189,200	4	1,907,500	2,094,000	2,281,800
5				5			
6	1,875,000	2,064,500	2,245,600	6	1,954,300	2,151,900	2,349,900
7				7			
8	1,921,000	2,121,600	2,321,900	8	2,002,300	2,211,400	2,420,100
9				9			
10	1,968,200	2,180,300	2,391,200	10	2,051,400	2,272,500	2,492,400
11				11			
12	2,016,500	2,240,600	2,462,600	12	2,101,800	2,335,400	2,566,800
13				13			
14	2,066,000	2,302,600	2,536,100	14	2,153,400	2,400,000	2,643,400
15				15			
16	2,116,700	2,366,300	2,611,900	16	2,206,300	2,466,400	2,722,300
17				17			
18	2,168,700	2,431,700	2,689,800	18	2,260,400	2,534,600	2,803,600
19				19			
20	2,222,000	2,499,000	2,770,100	20	2,315,900	2,604,700	2,887,300
21				21			
22	2,276,500	2,568,100	2,852,900	22	2,372,800	2,676,700	2,973,500
23				23			
24	2,332,400	2,639,100	2,938,000	24	2,431,100	2,750,700	3,062,300
25				25			
26	2,389,700	2,712,100	3,025,800	26	2,490,700	2,826,800	3,153,700
27				27			
28	2,448,300	2,787,100	3,116,100	28	2,551,900	2,905,000	3,247,900
29				29			
30	2,508,400	2,864,200	3,209,100	30	2,614,600	2,985,300	3,344,900
31				31			
32	2,570,000	2,943,400	3,305,000	32	2,678,700	3,067,900	3,444,800



Lanjutan Tabel III.94.

MKG	Golongan III/c			MKG	Golongan III/d		
	2010	2011	2012		2010	2011	2012
0	1,894,000	2,066,600	2,242,400	0	1,974,100	2,154,100	2,337,300
1				1			
2	1,940,500	2,123,800	2,309,400	2	2,022,600	2,213,600	2,407,100
3				3			
4	1,988,100	2,182,500	2,378,300	4	2,072,200	2,274,900	2,478,900
5				5			
6	2,037,000	2,242,900	2,449,300	6	2,123,100	2,337,800	2,552,900
7				7			
8	2,087,000	2,304,900	2,522,500	8	2,175,300	2,402,400	2,629,200
9				9			
10	2,138,200	2,368,700	2,597,800	10	2,228,700	2,468,900	2,707,700
11				11			
12	2,190,700	2,434,200	2,675,300	12	2,283,400	2,537,100	2,788,500
13				13			
14	2,244,500	2,501,500	2,755,200	14	2,339,400	2,607,300	2,871,800
15				15			
16	2,299,600	2,570,700	2,837,500	16	2,396,900	2,679,400	2,957,500
17				17			
18	2,356,100	2,641,800	2,922,200	18	2,455,700	2,753,500	3,045,800
19				19			
20	2,413,900	2,714,800	3,009,500	20	2,516,000	2,829,700	3,136,800
21				21			
22	2,473,200	2,789,900	3,099,300	22	2,577,800	2,907,900	3,230,400
23				23			
24	2,533,900	2,867,100	3,191,900	24	2,641,100	2,988,400	3,326,900
25				25			
26	2,596,100	2,946,400	3,287,200	26	2,705,900	3,071,000	3,426,200
27				27			
28	2,659,800	3,027,800	3,385,300	28	2,772,400	3,155,900	3,528,500
29				29			
30	2,725,200	3,111,600	3,486,400	30	2,840,400	3,243,200	3,633,800
31				31			
32	2,792,100	3,197,600	3,590,500	32	2,910,200	3,332,900	3,742,300

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011; dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012



Tabel III.95. Data time Series Gaji Pokok PNS Golongan IV

MKG	Golongan IV/a			Golongan IV/b		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
0	2,057,600	2,245,200	2,436,100	2,144,700	2,340,200	2,539,200
1						
2	2,108,100	2,307,300	2,508,900	2,197,300	2,404,900	2,615,000
3						
4	2,159,900	2,371,100	2,583,800	2,251,300	2,471,400	2,693,100
5						
6	2,212,900	2,436,700	2,660,900	2,306,500	2,539,700	2,773,500
7						
8	2,267,300	2,504,000	2,740,400	2,363,200	2,610,000	2,856,300
9						
10	2,322,900	2,573,300	2,822,200	2,421,200	2,682,100	2,941,600
11						
12	2,380,000	2,644,500	2,906,500	2,480,600	2,756,300	3,029,400
13						
14	2,438,400	2,717,600	2,993,200	2,541,500	2,832,600	3,119,900
15						
16	2,498,300	2,792,800	3,082,600	2,603,900	2,910,900	3,213,000
17						
18	2,559,600	2,870,000	3,174,700	2,667,900	2,991,400	3,308,900
19						
20	2,622,400	2,949,400	3,269,400	2,733,400	3,074,100	3,407,700
21						
22	2,686,800	3,030,900	3,367,100	2,800,500	3,159,100	3,509,500
23						
24	2,752,800	3,114,800	3,467,600	2,869,200	3,246,500	3,614,300
25						
26	2,820,400	3,200,900	3,571,100	2,939,700	3,336,300	3,722,200
27						
28	2,889,600	3,289,400	3,677,800	3,011,900	3,428,600	3,833,300
29						
30	2,960,600	3,380,400	3,787,600	3,085,800	3,523,400	3,947,800
31						
32	3,033,300	3,473,900	3,900,600	3,161,600	3,620,800	4,065,600



Lanjutan Tabel III.95.

MKG	Golongan IV/c			Golongan IV/d		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
0	2,235,400	2,439,100	2,646,600	2,329,900	2,542,300	2,758,500
1						
2	2,290,300	2,506,600	2,725,600	2,387,100	2,612,600	2,840,900
3						
4	2,346,500	2,575,900	2,807,000	2,445,800	2,648,900	2,925,700
5						
6	2,404,100	2,647,200	2,890,800	2,505,800	2,759,100	3,013,100
7						
8	2,563,100	2,720,400	2,977,100	2,567,300	2,835,400	3,103,100
9						
10	2,523,600	2,795,600	3,066,000	2,630,400	2,913,900	3,195,700
11						
12	2,585,600	2,872,900	3,157,600	2,694,900	2,994,400	3,291,100
13						
14	2,649,000	2,952,400	3,251,800	2,761,100	3,077,300	3,389,400
15						
16	2,714,100	3,034,000	3,348,900	2,828,900	3,162,400	3,490,600
17						
18	2,780,700	3,117,900	3,448,900	2,898,300	3,249,800	3,594,800
19						
20	2,849,000	3,204,200	3,551,900	2,969,500	3,339,700	3,702,100
21						
22	2,918,900	3,292,800	3,657,900	3,042,400	3,432,100	3,812,700
23						
24	2,990,600	3,383,800	3,767,200	3,117,100	3,527,000	3,926,500
25						
26	3,064,000	3,477,400	3,879,600	3,193,600	3,624,500	4,043,700
27						
28	3,139,300	3,573,600	3,995,500	3,272,100	3,724,800	4,164,500
29						
30	3,216,300	3,672,400	4,114,800	3,352,400	3,827,800	4,288,800
31						
32	3,295,300	3,774,000	4,237,600	3,434,700	3,933,600	4,416,900



Lanjutan Tabel III.95.

MKG	Golongan IV/e		
	2010	2011	2012
0	4,428,500	2,649,900	2,875,200
1			
2	2,488,100	2,723,100	2,961,100
3			
4	2,549,200	2,798,400	3,049,500
5			
6	2,611,800	2,875,800	3,140,500
7			
8	2,657,900	2,955,400	3,234,300
9			
10	2,741,600	3,037,100	3,330,900
11			
12	2,808,900	3,121,100	3,430,300
13			
14	2,877,900	3,207,400	3,532,800
15			
16	2,948,600	3,296,100	3,638,200
17			
18	3,020,900	3,387,300	3,746,900
19			
20	3,095,100	3,481,000	3,858,700
21			
22	3,171,100	3,577,200	3,973,900
23			
24	3,249,000	3,676,200	4,092,600
25			
26	3,328,700	3,777,800	4,214,800
27			
28	3,410,500	3,882,300	4,340,600
29			
30	3,494,200	3,989,700	4,470,200
31			
32	3,580,000	4,100,000	4,603,700

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011; dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012





Tabel III.96. Data Tunjangan Jabatan Struktural

No	Jabatan	Tunjangan jabatan PNS		
		Keppres NO.99/2000	Perpres NO.3/2006	Perpres NO.26/2007
1.	Eselon IA	4.500.000	4.500.000	5.500.000
2.	Eselon IB	3.500.000	3.500.000	4.375.000
3.	Eselon IIA	2.500.000	2.500.000	3.250.000
4.	Eselon IIB	1.500.000	1.500.000	2.025.000
5.	Eselon IIIA	600,000	900,000	1.260.000
6.	Eselon IIIB	450,000	675,000	980,000
7.	Eselon IVA	240,000	360,000	540,000
8.	Eselon IVB	210,000	315,000	490,000
9.	Eselon VA	150,000	225,000	360,000

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, 2012

Tabel III.97. Data Tunjangan Jabatan Fungsional tertentu

No.	Jabatan fungsional	Nilai tunjangan		No. Keppres
		Tertinggi	Terendah	
1.	Peneliti	Rp.1.400.000,-	Rp. 325.000,-	No. 30 Tahun 2007
2.	Widyaiswara	Rp.1.400.000,-	Rp. 325.000,-	No. 59 Tahun 2007
3.	Perawat	A.Rp. 850.000,- T.Rp. 500.000,-	A.Rp. 300.000,- T.Rp. 220.000,-	No. 54 Tahun 2007
4.	Pengawas Ketenagakerjaan	A.Rp. 500.000,- T.Rp. 325.000,-	A.Rp. 270.000,- T.Rp. 240.000,-	No. 51 Tahun 2007
5.	Pengamat Meteorologi dan Geofisika	A.Rp. 700.000,- T.Rp. 325.000,-	A.Rp. 300.000,- T.Rp. 240.000,-	No. 56 Tahun 2007
6.	Penyuluh Kehutanan	A.Rp. 550.000,- T.Rp. 300.000,-	A.Rp. 270.000,- T.Rp. 240.000,-	No. 33 Tahun 2007
7.	Pranata Hubungan Masyarakat	A.Rp. 650.000,- T.Rp. 300.000,-	A.Rp. 270.000,- T.Rp. 220.000,-	No. 29 Tahun 2007
8.	Pekerja Sosial	A.Rp. 790.000,- T.Rp. 525.000,-	A.Rp. 300.000,- T.Rp. 220.000,-	No. 61 Tahun 2007
9.	Pengawas Keselamatan Pelayaran			
10.	Teknisi Penerbangan	Rp.500.000,-	Rp. 260.000,-	No. 69 Tahun 2007
11.	Penguji Mutu Barang	A.Rp. 500.000,- T.Rp. 325.000,-	A.Rp. 270.000,- T.Rp. 240.000,-	No. 70 Tahun 2007
12.	Jaksa	Rp.2.500.000,-	Rp. 600.000,-	No. 158 Tahun 2000
13.	Pemeriksa Bea dan Cukai	A.Rp. 1.000.000,- T.Rp. 550.000,-	A.Rp. 325.000,- T.Rp. 240.000,-	No. 53 Tahun 2007



Lanjutan Tabel III.97.

No.	Jabatan fungsional	Nilai tunjangan		No. Keppres
		Tertinggi	Terendah	
14.	Pranata Komputer	A.Rp. 1.200.000,- T.Rp. 425.000,-	A.Rp. 300.000,- T.Rp. 220.000,-	No. 39 Tahun 2007
15.	Teknisi Siaran	Rp.300.000,-	Rp. 220.000,-	No. 68 Tahun 2007
16.	Andalan Siaran	Rp.300.000,-	Rp. 220.000,-	No. 68 Tahun 2007
17.	Adikara Siaran	Rp.300.000,-	Rp. 220.000,-	No. 68 Tahun 2007
18.	Polisi Kehutanan	Rp.550.000,-	Rp. 220.000,-	No. 49 Tahun 2007
19.	Instruktur	A.Rp. 500.000,- T.Rp. 325.000,-	A.Rp. 270.000,- T.Rp. 240.000,-	No. 58 Tahun 2006
20.	Pranata Nuklir	A.Rp. 1.400.000,- T.Rp. 450.000,-	A.Rp. 325.000,- T.Rp. 220.000,-	No. 55 Tahun 2007
21.	Pengawas Radiasi	A.Rp. 1.400.000,- T.Rp. 450.000,-	A.Rp. 325.000,- T.Rp. 220.000,-	No. 57 Tahun 2007
22.	Agen (BIN)	A.Rp. 1.100.000,- T.Rp. 550.000,-	A.Rp. 300.000,- T.Rp. 240.000,-	No. 48 Tahun 2007
23.	Teknisi Litkayasa	Rp.450.000,-	Rp. 220.000,-	No. 31 Tahun 2006
24.	Arsiparis	A.Rp. 700.000,- T.Rp. 350.000,-	A.Rp. 275.000,- T.Rp. 240.000,-	No. 46 Tahun 2007
25.	Stastisi	A.Rp. 900.000,- T.Rp. 500.000,-	A.Rp. 300.000,- T.Rp. 220.000,-	No. 40 Tahun 2007
26.	Penera	A.Rp. 500.000,- T.Rp. 325.000,-	A.Rp. 270.000,- T.Rp. 240.000,-	No. 70 Tahun 2007
27.	Pengendali Ekosistem Hutan	A.Rp. 600.000,- T.Rp. 325.000,-	A.Rp. 270.000,- T.Rp. 220.000,-	No. 34 Tahun 2007
28.	Operator Transmisi Sandi	A.Rp. 957.000,- T.Rp. 495.000,-	A.Rp. 264.000,- T.Rp. 197.000,-	No. 105 Tahun 2006
29.	Sandiman	Rp.400.000,-	Rp. 197.000,-	No. 105 Tahun 2006
30.	Penyuluh Perindustrian	A.Rp.5.000.000,- T.Rp. 300.000,-	A.Rp. 270.000,- T.Rp. 240.000,-	No. 60 Tahun 2007
31.	Perekayasa	Rp.1.400.000,-	Rp. 325.000,-	No. 31Tahun 2007
32.	Pemeriksa Paten	Rp.1.100.000,-	Rp. 300.000,-	No. 41 Tahun 2007
33.	Pemeriksa Merek	A.Rp.900.000,- T.Rp. 525.000,-	A.Rp. 300.000,- T.Rp. 240.000,-	No. 41 Tahun 2007
34.	Pemeriksa Pajak	A.Rp.1.000.000,- T.Rp. 550.000,-	A.Rp. 325.000,- T.Rp. 240.000,-	No. 53 Tahun 2007
35.	Guru	Rp. 289.000,-	Rp. 186.000,-	No. 58 Tahun 2007
36.	Penggerak Swadaya Masyarakat	A.Rp.500.000,- T.Rp. 325.000,-	A.Rp. 270.000,- T.Rp. 220.000,-	No. 63 Tahun 2007



Lanjutan Tabel III.97.

No.	Jabatan fungsional	Nilai tunjangan		No. Keppres
		Tertinggi	Terendah	
37.	Auditor	A.Rp.1.200.000,- T.Rp. 425.000,-	A.Rp. 300.000,- T.Rp. 240.000,-	No. 66 Tahun 2007
38.	Pengawas Sekolah	Rp. 550.000,-	Rp. 368.750,-	No. 3 Tahun 2003
39.	Pengamat Gunung Api	A.Rp.400.000,- T.Rp. 260.000,-	A.Rp. 260.000,- T.Rp. 230.000,-	No. 67 Tahun 2007
40.	Dokter	Rp.1.400.000,-	Rp. 325.000,-	No. 54 Tahun 2007
41.	DOKter gigi	Rp.1.400.000,-	Rp. 325.000,-	No. 54 Tahun 2007
42.	Diplomat			
43.	Pustakawan	A.Rp.700.000,- T.Rp. 350.000,-	A.Rp. 275.000,- T.Rp. 240.000,-	No. 47 Tahun 2007
44.	Penilai Pajak Bumi dan Bangunan	A.Rp.1.000.000,- T.Rp. 550.000,-	A.Rp. 325.000,- T.Rp. 240.000,-	No. 53 Tahun 2007
45.	Penyuluh KB	A.Rp.500.000,- T.Rp. 300.000,-	A.Rp. 270.000,- T.Rp. 220.000,-	No. 57 Tahun 2007
46.	Penyuluh Pertanian	A.Rp.600.000,- T.Rp. 300.000,-	A.Rp. 270.000,- T.Rp. 240.000,-	No. 32 Tahun 2007
47.	Pamong Belajar	Rp. 289.000,-	Rp. 186.000,-	No. 58 Tahun 2006
48.	Dosen	A.Rp.1.350.000,- T.Rp. 5.500.000,-	A.Rp. 375.000,- T.Rp. 1.350.000,-	No. 65 Tahun 2007
49.	Penyuluh Agama	A.Rp.500.000,- T.Rp. 300.000,-	A.Rp. 270.000,- T.Rp. 240.000,-	No. 50 Tahun 2007
50.	Analisis Kepegawaian	A.Rp.500.000,- T.Rp. 350.000,-	A.Rp. 275.000,- T.Rp. 240.000,-	No. 45 Tahun 2007
51.	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan	A.Rp.660.000,- T.Rp. 300.000,-	A.Rp. 275.000,- T.Rp. 240.000,-	No. 32 Tahun 2007
52.	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	A.Rp.600.000,- T.Rp. 300.000,-	A.Rp. 270.000,- T.Rp. 240.000,-	No. 32 Tahun 2007
53.	Pengawas Benih Tanaman	A.Rp.600.000,- T.Rp. 300.000,-	A.Rp. 270.000,- T.Rp. 240.000,-	No. 32 Tahun 2007
54.	Pengawas Benih Ikan	A.Rp.920.000,- T.Rp. 300.000,-	A.Rp. 275.000,- T.Rp. 240.000,-	No. 32 Tahun 2007
55.	Medik Veteriner	Rp.950.000,-	Rp. 300.000,-	No. 32 Tahun 2007
56.	Paramedik Veteriner	Rp.300.000,-	Rp. 240.000,-	No. 32 Tahun 2007
57.	Pengawas Bibit Ternak	A.Rp.600.000,- T.Rp. 300.000,-	A.Rp. 270.000,- T.Rp. 240.000,-	No. 32 Tahun 2007



Lanjutan Tabel III.97.

No.	Jabatan fungsional	Nilai tunjangan		No. Keppres
		Tertinggi	Terendah	
58.	Pamong Budaya	A.Rp.530.000,- T.Rp. 300.000,-	A.Rp. 270.000,- T.Rp. 240.000,-	No. 74 Tahun 2007
59.	Penyelidik Bumi	Rp.1.200.000,-	Rp. 300.000,-	No. 38 Tahun 2007
60.	Teknik Pengairan	A.Rp.1.050.000,- T.Rp. 300.000,-	A.Rp. 275.000,- T.Rp. 240.000,-	No. 36 Tahun 2007
61.	Teknik Jalan dan Jembatan	A.Rp.1.050.000,- T.Rp. 300.000,-	A.Rp. 275.000,- T.Rp. 240.000,-	No. 36 Tahun 2007
62.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	A.Rp.1.050.000,- T.Rp. 300.000,-	A.Rp. 275.000,- T.Rp. 240.000,-	No. 36 Tahun 2007
63.	Teknik Penyehatan Lingkungan	A.Rp.1.050.000,- T.Rp. 300.000,-	A.Rp. 275.000,- T.Rp. 240.000,-	No. 36 Tahun 2007
64.	Pengawas Perikanan	A.Rp.920.000,- T.Rp. 300.000,-	A.Rp. 270.000,- T.Rp. 240.000,-	No. 32 Tahun 2007
65.	Pengawas Farmasi dan Makanan	A.Rp.1.400.000,- T.Rp. 500.000,-	A.Rp. 325.000,- T.Rp. 260.000,-	No. 52 Tahun 2007
66.	Apoteker	Rp.1.400.000,-	Rp. 325.000,-	No. 54 Tahun 2007
67.	Asisten Apoteker	Rp.500.000,-	Rp. 220.000,-	No. 54 Tahun 2007
68.	Pranata Laboratorium Kesehatan	A.Rp.850.000,- T.Rp. 500.000,-	A.Rp. 300.000,- T.Rp. 220.000,-	No. 54 Tahun 2007
69.	Pengantar Kerja	A.Rp.500.000,- T.Rp. 325.000,-	A.Rp. 270.000,- T.Rp. 240.000,-	No. 62 Tahun 2007
70.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	A.Rp.850.000,- T.Rp. 500.000,-	A.Rp. 300.000,- T.Rp. 240.000,-	No. 54 Tahun 2007
71.	Epidemolog Kesehatan	A.Rp.850.000,- T.Rp. 500.000,-	A.Rp. 300.000,- T.Rp. 220.000,-	No. 54 Tahun 2007
72.	Entomolog Kesehatan	A.Rp.850.000,- T.Rp. 500.000,-	A.Rp. 300.000,- T.Rp. 220.000,-	No. 54 Tahun 2007
73.	Sanitarian	A.Rp.850.000,- T.Rp. 500.000,-	A.Rp. 300.000,- T.Rp. 220.000,-	No. 54 Tahun 2007
74.	Mediator Hubungan Industrial			
75.	Perancang peraturan perundang-undangan	Rp.1.400.000,-	Rp. 325.000,-	No. 43 Tahun 2007
76.	Administrator Kesehatan	A.Rp.850.000,-	A.Rp. 300.000,-	No. 54 Tahun 2007
77.	Perencana	Rp.1.400.000,-	Rp. 325.000,-	No. 44 Tahun 2007



Lanjutan Tabel III.97.

No.	Jabatan fungsional	Nilai tunjangan		No. Keppres
		Tertinggi	Terendah	
78.	Perawat Gigi	A.Rp.500.000,-	A.Rp. 220.000,-	No. 54 Tahun 2007
79.	Nutrisionis	A.Rp.850.000,- T.Rp. 500.000,-	A.Rp. 300.000,- T.Rp. 240.000,-	No. 54 Tahun 2007
80.	Bidan	Rp.500.000,-	Rp. 240.000,-	No. 54 Tahun 2007
81.	Penilik	Rp.289.000,-	Rp.186.000,-	No. 58 Tahun 2006
82.	Inspektur Ketenagalistrikan	Rp.1.050.000,-	Rp. 325.000,-	No. 71 Tahun 2007
83.	Inspektur Tambang	Rp.1.050.000,-	Rp. 325.000,-	No. 71 Tahun 2007
84.	Inspektur Minyak dan Gas	Rp.1.050.000,-	Rp. 325.000,-	No. 71 Tahun 2007
85.	Pengendali Dampak Lingkungan	A.Rp.975.000,- T.Rp. 400.000,-	A.Rp. 310.000,- T.Rp. 240.000,-	No. 35 Tahun 2007
86.	Radiografer	Rp.500.000,-	Rp. 240.000,-	No. 54 Tahun 2007
87.	Surveyor Pemetaan	A.Rp.920.000,- T.Rp. 300.000,-	A.Rp. 270.000,- T.Rp. 220.000,-	No. 37 Tahun 2007
88.	Perekam Medis	Rp.500.000,-	Rp. 240.000,-	No. 54 Tahun 2007
89.	Teknisi Elektromagnetis	Rp.500.000,-	Rp. 240.000,-	No. 54 Tahun 2006
90.	Penguji Kendaraan Bermotor			
91.	Fisioterapis			
92.	Pengawas Mutu Pakan	A.Rp.600.000,- T.Rp. 300.000,-	A.Rp. 270.000,- T.Rp. 220.000,-	No. 75 Tahun 2007
93.	Penghulu	Rp.500.000,-	Rp. 260.000,-	No. 73 Tahun 2007
94.	Pengendali Frekwensi Radio			
95.	Refraksionis Optisien			
96.	Terapis Wicara			
97.	Ortotis Prostetis			
98.	Okupasi Terapis			
99.	Penyuluh Pajak			
100.	Pengawas Mutu Hasil Pertanian			
101.	Penerjemah			
102.	Teknisi Transfusi Darah			
103.	Teknisi Gigi			
104.	Kataloger			



Lanjutan Tabel III.97.

No.	Jabatan fungsional	Nilai tunjangan		No. Keppres
		Tertinggi	Terendah	
105.	Penata Ruang			
106.	Penyuluh Sosial			
107.	Psikolog Klinis			
108.	Fisikawan Medis			
109.	Dokter Pendidik Klinis			
110.	Penyuluh Perikanan			
111.	Pengembang Teknologi Pembelajaran			
112.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah			
113.	Pranata Laboratorium Pendidikan			
114.	Pemeriksa			

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012

Tabel.III.98. Data Peserta Askes Sosial Menurut Jenis Kepesertaan

No	Jenis Kepesertaan	Tahun 2010			
		Peserta	Keluarga	Jumlah	Proporsi (%)
1	2	3	4	5=3+4	6
1	PNS Aktif	4,639,439	6,755,171	11,394,610	68,81%
2	Penerimaan Pensiun PNS	1,817,654	1,463,458	3,281,112	19,80%
3	Penerimaan Pensiun TNI/POLRI	704,058	486,615	1,190,673	7,20%
4	Veteran/Perintis Kemerdekaan	530,83	127,798	658,628	4,00%
5	PTT (Dokter/Bidan)	31,667		31,667	0,20%
6	Jamkesmas	831	1,504	2,335	0,01%
7	Jamkestama				
	Jumlah	7,724,479	8,834,546	16,559,025	100,00%



Lanjutan Tabel.III.98.

No	Jenis Kepesertaan	Tahun 2011			
		Pesrta	Keluarga	Jumlah	Proporsi (%)
1	2	3	4	5=3+4	6
1	PNS Aktif	4,718,001	6,943,742	11,661,743	70,75%
2	Penerimaan Pensiun PNS	1,684,802	1,357,771	3,042,573	18,50%
3	Penerimaan Pensiun TNI/POLRI	471,086	471,086	1,148,666	7,00%
4	Veteran/Perintis Kemerdekaan	460,104	122,686	582,79	3,50%
5	PTT (Dokter/Bidan)	41,313		41,313	0,25%
6	Jamkesmen	972	1,791	2,763	0,02%
7	Jamkestama	763	1,72	2,483	0,02%
	Jumlah	7,583,535	8,898,796	16,482,231	100,00%

Lanjutan Tabel.III.98.

No	Jenis Kepesertaan	Tahun 2012			
		Peserta	Keluarga	Jumlah	Proporsi (%)
1	2	3	4	5=3+4	6
1	PNS Aktif	4,728,628	7,040,908	11,769,536	71,13%
2	Penerimaan Pensiun PNS	1,664,201	1,346,299	3,010,500	18,19%
3	Penerimaan Pensiun TNI/POLRI	673,984	472,3	1,146,284	6,93%
4	Veteran/Perintis Kemerdekaan	447,808	123,175	570,983	3,45%
5	PTT (Dokter/Bidan)	43,379		43,379	0,26%
6	Jamkesmen	989	1,884	2,833	0,02%
7	Jamkestama	166	1,701	2,467	0,01%
	Jumlah	7,559,755	8,986,227	16,545,982	100,00%

Sumber : PT. Askes Persero, 2012

Tabel III.99. Data Peserta Askes Sosial Menurut Golongan Kepegawaian

No	Jenis Kepesertaan	Tahun 2010		
		Peserta	Keluarga	Jumlah
1	2	3	4	5=3+4
1	Golongan I	351,19	441,87	973,06
2	Golongan II	2,426,862	2,529,841	4,956,703
3	Golongan III	3,450,296	4,037,949	7,488,245
4	Golongan IV	1,316,131	1,824,886	3,141,017
	Jumlah	7,724,479	8,834,546	16,559,025



Lanjutan Tabel III.99.

No	Jenis Kepesertaan	Tahun 2011			
		Proporsi (%)	Peserta	Keluarga	Jumlah
1	2	6	3	4	5=3+4
1	Golongan I	5,88%	491,871	434,648	926,519
2	Golongan II	29,93%	2,294,987	2,481,034	4,776,021
3	Golongan III	45,22%	3,289,136	3,909,659	7,198,795
4	Golongan IV	18,97%	1,507,541	2,073,455	3,580,996
	Jumlah	100,00%	7,583,535	8,898,796	16,482,331

Lanjutan Tabel III.99.

No	Jenis Kepesertaan	Tahun 2012				
		Proporsi (%)	Peserta	Keluarga	Jumlah	Proporsi (%)
1	2	6	3	4	5=3+4	6
1	Golongan I	5,62%	483,619	433,401	917,02	5,54%
2	Golongan II	28,98%	2,276,381	2,526,656	4,803,037	29,03%
3	Golongan III	43,68%	3,279,572	3,279,572	7,235,004	43,73%
4	Golongan IV	21,73%	1,520,183	1,520,183	3,590,921	21,70%
	Jumlah	100,00%	7,559,755	8,986,227	16,545,982	100,00%

Sumber : PT. Askes Persero, 2012

Tabel.III.100. Data Peserta Askes Sosial Menurut Kelompok Umur

No	Kelompok Umur	Tahun 2010			
		Jenis kelamin		Jumlah	Proporsi (%)
		Laki-laki	Perempuan		
1	2	3	4	5=3+4	6
1	0 s.d 5 tahun	227,362	224,475	501,837	3,03%
2	6 s.d 25 tahun	2,103,119	1,999,100	4,102,219	24,77%
3	26 s.d 40 tahun	1,002,535	1,446,401	2,448,936	14,79%
4	41 s.d 55 tahun	2,261,151	2,552,772	4,813,923	29,07%
5	Diatas 56 tahun	2,456,637	2,235,473	4,692,110	28,34%
	Jumlah	8,100,804	8,458,221	16,559,025	100,00%



Lanjutan Tabel.III.100.

No	Kelompok Umur	Tahun 2011			
				Jumlah	Proporsi (%)
		Laki-laki	Perempuan		
1	2	3	4	5=3+4	6
1	0 s.d 5 tahun	314,195	246,263	560,458	3,40%
2	6 s.d 25 tahun	2,108,310	1,981,417	4,089,727	24,81%
3	26 s.d 40 tahun	1,004,340	1,487,664	2,532,004	15,36%
4	41 s.d 55 tahun	2,208,900	2,554,417	4,763,317	28,90%
5	Diatas 56 tahun	2,328,442	2,208,383	4,536,825	27,53%
	Jumlah	8,004,187	8,478,144	16,482,331	100,00%

Sumber : PT. Askes Persero, 2012

Tabel III.101. Jumlah PNS yang Terkena Hukuman Disiplin Per Bulan Februari Tahun 2011

No.	Jenis hukuman disiplin	Jumlah
01	Tegoran Lisan	102
02	Tegoran Tertulis	250
03	Pernyataan Tidak Puas	104
JUMLAH HUKUMAN DISIPLIN TK RINGAN		456
04	Penundaan Kenaikan Gaji Berkala	46
05	Penurunan Gaji Sebesar 1 Kali KGB	43
06	Penundaan Kenaikan Pangkat	44
JUMLAH HUKUMAN DISIPLIN TK SEDANG		133
07	Penurunan Pangkat	95
08	Pembebasan Dari Jabatan	26
09	Pemberhentian Dengan Hormat	17
10	Pemberhentian Tidak Dengan Hormat	34
JUMLAH HUKUMAN DISIPLIN TK BERAT		172
11	Pemberhentian Sementara	8
12	Pemberhentian Pembayaran Gaji	10
13	Pengaktifan Kembali	1
TIDAK TERMASUK HUKUMAN DISIPLIN		19
JUMLAH SELURUHNYA		780

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012



Tabel III.102. Data Uang Pensiun PNS Per Kelompok

No	Kelompok pensiun	2007	2008	2009
1	Sipil Pusat	1.068.018.708.331	1.275.366.429.795	1.454.884.704.439
2	Pejabat Negara	9.025.652.631	8.893.379.794	8.733.601.177
3	ABRI	248.545.044.393	279.249.854.873	296.207.160.707
4	Veteran/ Dahor	106.237.076.296	123.569.477.440	150.449.729.379
5	PKRI/KNIP	1.370.719.200	1.586.832.050	1.741.327.184
6	Sipil Daerah	615.225.489.868	875.412.951.272	1.157.994.524.746
	JUMLAH	2.048.422.690.719	2.564.078.925.224	3.070.011.047.632

Lanjutan Tabel III.102.

No	Kelompok pensiun	2010	2011
1	Sipil Pusat	1.535.706.061.466	1.710.719.286.964
2	Pejabat Negara	9.820.334.172	9.878.118.729
3	ABRI	293.588.487.693	302.282.977.025
4	Veteran/ Dahor	153.681.754.153	161.530.171.172
5	PKRI/KNIP	1.627.824.604	1.643.755.035
6	Sipil Daerah	1.405.183.215.979	1.781.204.939.633
	JUMLAH	3.399.607.678.067	3.967.259.248.558

Sumber : PT. Taspen Persero, 2012

Tabel III.103. PNS yang Pensiun Menurut Kelompok

No	Kelompok pensiun	2007	2008	2009	2010	2011
1	Sipil Pusat	1.016.779	1.013.782	1.009.296	1.001.614	987.862
2	Pejabat Negara	5.099	5.075	5.078	5.425	5.491
3	ABRI	279.765	267.903	255.683	242.942	229.648
4	Veteran/Dahor	177.520	172.508	184.760	181.689	178.069
5	PKRI/KNIP	1.538	1.469	1.396	1.257	1.152
6	Sipil Daerah	546.332	634.710	716.744	805.424	888.979
	JUMLAH	2.027.033	2.095.447	2.172.957	2.238.351	2.291.201

Sumber : PT. Taspen Persero, 2012



Tabel III.104. PNS yang Pensiun Menurut Kelompok Menurut Golongan/Ruang

Kelompok pensiun	GOL	2007	2008	2009	2010	2011
1.Sipil Pusat	1	158.089	148.880	139.544	130.551	121.607
	2	307.147	299.957	292.141	283.937	274.811
	3	369.180	370.846	372.423	373.198	371.840
	>= 4	182.363	194.099	205.188	213.928	219.604
2.Pejabat Negara	>= 4	5.099	5.075	5.078	5.425	5.491
3. ABRI	1	53.791	51.565	49.288	46.935	44.363
	2	182.384	174.969	167.290	159.533	151.070
	3	26.674	25.231	23.730	22.188	20.644
	>= 4	16.916	16.138	15.375	14.286	13.571
4.Veteran/Dahor	1	18.266	17.884	17.339	16.676	16.029
	2	10.314	9.718	9.045	8.473	7.869
	3	32.573	30.918	28.837	26.779	24.909
	4	116.367	113.988	129.539	129.761	129.262
5.PKRI/KNIP	1	1.529	1.467	1.396	1.257	1.152
	2	2	0	0	0	0
	3	3	1	0	0	0
	>= 4	4	1	0	0	0
6.Sipil Daerah	1	64.611	61.890	58.614	55.904	53.019
	2	169.012	192.157	204.962	218.958	230.707
	3	166.758	193.250	218.803	244.859	269.039
	>= 4	145.951	187.413	234.365	285.703	336.214
		2.027.033	2.095.447	2.172.957	2.238.351	2.291.201

Sumber : PT. Taspen Persero, 2012

Tabel III.105. PNS yang Pensiun Menurut Kelompok Menurut Jenis Kelamin

No.	Kelompok pensiun	Jenis Kelamin	2007	2008	2009
1	Sipil Pusat	L	487.400	481.341	474.376
	Sipil Pusat	P	529.379	532.441	534.920
2	Pejabat Negara	L	3.023	2.993	2.990
	Pejabat Negara	P	2.076	2.082	2.088
3	ABRI	L	101.393	92.216	83.332
	ABRI	P	178.372	175.687	172.351
4	PKRI/KNIP	L	346	361	366
	PKRI/KNIP	P	1.192	1.108	1.030
5	Veteran/Dahor	L	77.893	73.137	86.161
	Veteran/Dahor	P	99.627	99.371	98.599
6	Sipil Daerah	L	302.786	357.964	406.947
	Sipil Daerah	P	243.546	276.746	309.797
	Total		2.027.033	2.095.447	2.172.957



Lanjutan Tabel III.105.

No.	Kelompok pensiun	Jenis Kelamin	2010	2011
1	Sipil Pusat	L	466.525	455.598
	Sipil Pusat	P	535.089	532.264
2	Pejabat Negara	L	3.310	3.353
	Pejabat Negara	P	2.115	2.138
3	ABRI	L	75.332	67.581
	ABRI	P	167.610	162.067
4	PKRI/KNIP	L	311	273
	PKRI/KNIP	P	946	879
5	Veteran/Dahor	L	84.818	83.772
	Veteran/Dahor	P	96.871	94.297
6	Sipil Daerah	L	458.550	505.553
	Sipil Daerah	P	346.874	383.426
	Total		2.238.351	2.291.201

Sumber : PT. Taspen Persero, 2012









BAGIAN IV

KEUANGAN YANG MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI (RB)

Bagian ini menyajikan data keuangan yang mendukung reformasi birokrasi. Aspek keuangan memang bukan merupakan dimensi yang terkait langsung dengan aparatur. Namun, aspek keuangan sangat mempengaruhi kinerja aparatur, sehingga banyak data mengenai keuangan yang juga harus disajikan untuk dapat melengkapi analisis mengenai aparatur dan kinerjanya. Data-data mengenai keuangan yang ditampilkan dalam bagian ini diantaranya adalah data mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Alokasi Belanja Negara untuk Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Pendapatan Asli Daerah; Dana Perimbangan; dan Alokasi Belanja Pemerintah Daerah.

A. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tabel IV.1. memaparkan mengenai total anggaran pendapatan dan belanja negara dari tahun 2009 hingga 2011. Dari tabel tersebut terlihat bahwa pendapatan negara dari tahun 2009 hingga 2011 mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2009 sekitar 985 miliar rupiah menjadi sekitar 1.104 miliar rupiah pada tahun 2011. Demikian pula untuk belanja negara. Belanja negara dari tahun 2009 hingga 2011 mengalami peningkatan yaitu sebesar 1.037 miliar rupiah pada tahun 2009 menjadi 1.229 miliar rupiah pada tahun 2011.

B. Alokasi Belanja Negara untuk Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur

Data di bawah ini memuat Alokasi Belanja Negara untuk sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, mulai dari tahun 2007 hingga tahun 2011 beserta data pada tahun berjalan yaitu tahun 2012. Untuk komponen anggaran pendidikan mencakup 3 (tiga) hal diantaranya Anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat, Anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, dan Anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan (dana pengembangan pendidikan nasional). Untuk Anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat dan Anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, mengalami peningkatan yang cukup signifikan di setiap tahunnya. Sedangkan, untuk Anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan (dana pengembangan pendidikan nasional) cukup bervariasi di setiap tahunnya, dimana tahun 2011 mengalami kenaikan



dibandingkan tahun 2010, namun mengalami penurunan kembali pada tahun 2012. Untuk lebih jelasnya, data mengenai alokasi Belanja Negara untuk Sektor Pendidikan disajikan pada Tabel IV.2.

Sementara itu, tabel IV.3 memuat informasi mengenai Alokasi Belanja Negara pada Sektor Kesehatan baik yang berasal dari Belanja Pemerintah Pusat maupun melalui transfer daerah. Untuk Anggaran kesehatan melalui belanja pemerintah pusat, pada tahun 2005 hingga tahun 2007 mengalami kenaikan realisasi di setiap tahunnya, yang semula sekitar 11 milyar pada tahun 2005 menjadi 19 milyar pada tahun 2006 dan kemudian meningkat lagi menjadi sekitar 20 milyar pada tahun 2007. Sementara pada tahun 2008, mengalami sedikit penurunan yaitu sekitar 594 juta dibandingkan tahun sebelumnya, namun untuk tahun 2009 dan 2010 mengalami peningkatan kembali. Sedangkan untuk tahun 2011 dan tahun 2012 data APBN nya tersedia namun data realisasinya belum ada.

Tabel berikutnya berisi informasi mengenai data alokasi Belanja Negara dalam hal infrastruktur, dimana Kementerian Negara/Lembaga menjadi penyumbang terbesar dalam pemakaian belanja Negara bila dibandingkan dengan total pemakaian belanja Negara untuk Non Kementerian/Lembaga. Berdasarkan data pada tahun 2005 hingga tahun 2011, dari 14 (empat belas) Kementerian Negara/Lembaga, Kementerian Pekerjaan Umum menempati urutan pertama dalam hal penggunaan alokasi belanja Negara untuk sektor infrastruktur, sedangkan Pengembangan Otorita Batam menempati urutan terendah dalam penggunaan alokasi Belanja Negara untuk sektor infrastruktur. Meskipun demikian, baik Kementerian Negara/ Lembaga Non Kementerian Negara/Lembaga cukup fluktuatif dalam penggunaan Belanja Negara di sektor infrastruktur, kadang mengalami peningkatan ataupun penurunan untuk masing-masing instansi. Untuk lebih lengkapnya, pada Tabel IV.4. disajikan data Alokasi Belanja Negara untuk Sektor Infrastruktur secara lebih terinci.

C. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tabel IV.5 dan Tabel IV.6 memaparkan data mengenai total anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota pada tahun 2007-2011. Dilihat dari data yang ditampilkan dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2011 total Anggaran Pendapatan dan Belanja seluruh Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Dengan adanya peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah ini diharapkan juga adanya peningkatan dalam hal ketersediaan fasilitas publik dan kualitas pelayanan publik.

D. Pendapatan Asli Daerah

Tabel IV.7 dan tabel IV.8 menunjukkan Jumlah Pemerintah daerah berdasarkan persentase kontribusi PAD terhadap Anggaran Pendapatan. Dalam penyajian data, dirumuskan tiga kategori untuk melihat seberapa besar kontribusi PAD terhadap anggaran pendapatan daerah. Tiga kategori yang dimaksud pertama adalah Daerah



yang memiliki kontribusi PAD kurang dari 25% dari anggaran pendapatan; kedua, Daerah yang memiliki kontribusi PAD antara 25%-50% dari anggaran pendapatan; dan ketiga Daerah yang memiliki kontribusi PAD lebih dari 50% dari anggaran pendapatan.

Dari tahun 2007 hingga tahun 2011 terlihat bahwa sebagian besar PAD pemerintah daerah kabupaten/kota memberikan kontribusi yang kecil terhadap total keseluruhan pendapatan pemerintah daerah kabupaten/kota tersebut. Hal ini menunjukkan sebagian besar pemerintah daerah kabupaten/kota belum mampu untuk mengoptimalkan potensi daerahnya sebagai sumber pendapatan asli daerah. Sementara itu, dilihat dari Total PAD Pemerintah Provinsi maupun PAD Pemerintah Kabupaten/Kota, dari tahun 2007 hingga tahun 2011 menunjukkan kenaikan jumlah PAD yang cukup signifikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel IV.9.

E. Dana Perimbangan

Tabel IV.10 dan tabel IV.11 menunjukan Jumlah Pemda (Propinsi/Kab/Kota) berdasarkan persentase kontribusi DAU terhadap Anggaran Pendapatan dan pada tabel IV.12 menunjukkan total alokasi untuk Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Pemerintah Daerah baik DAU Provinsi maupun DAU Kabupaten/Kota. Dalam penyajian data, dirumuskan tiga kategori untuk melihat seberapa besar kontribusi DAU terhadap anggaran pendapatan daerah. Tiga kategori yang dimaksud pertama adalah Daerah yang memiliki kontribusi DAU lebih dari 75% dari anggaran pendapatan; kedua, Daerah yang memiliki kontribusi DAU antara 50%-75% dari anggaran pendapatan; dan ketiga Daerah yang memiliki kontribusi DAU kurang dari 50% dari anggaran pendapatan.

Dari tabel IV.10 dan tabel IV.11 dapat dilihat bahwa dari tahun 2007 hingga tahun 2011 Dana Alokasi Umum (DAU) memberikan kontribusi besar, yaitu antara 50%-75% dari pendapatan sebagian besar pemerintah daerah kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah daerah kabupaten/kota belum mandiri karena masih tergantung dari dana transfer pemerintah pusat sebagai sumber utama pendapatan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya.

Tabel IV.13, tabel IV.14 dan tabel IV.15 berikut menampilkan data mengenai Jumlah Pemda (Propinsi/Kab/Kota) berdasarkan persentase kontribusi DAK terhadap Anggaran Pendapatan dan total jumlah alokasi untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Pemerintah Daerah baik DAK Provinsi maupun DAK Kabupaten/Kota. Sama seperti dalam menampilkan data mengenai DAU, dirumuskan tiga kategori untuk melihat seberapa besar kontribusi DAK terhadap anggaran pendapatan daerah. Tiga kategori yang dimaksud pertama adalah Daerah yang memiliki kontribusi DAK lebih dari 75% dari anggaran pendapatan; kedua, Daerah yang memiliki kontribusi DAK antara 50%-75% dari anggaran pendapatan; dan ketiga Daerah yang memiliki kontribusi DAK kurang dari 50% dari anggaran pendapatan.





Dari tabel IV.13 dan tabel IV.14 terlihat bahwa sejak tahun 2007 hingga tahun 2011 kontribusi DAK terhadap anggaran pendapatan daerah tidak besar, anggaran pendapatan sebagian besar pemerintah kabupaten/kota hanya disumbang kurang dari 50% dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Tabel berikutnya, yaitu tabel IV.16, tabel IV.17 dan tabel IV.18 menunjukkan kontribusi dana bagi hasil (DBH) bagi anggaran pendapatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Sama seperti dalam menampilkan data mengenai DAU dan DAK, dirumuskan tiga kategori untuk melihat seberapa besar kontribusi DBH terhadap anggaran pendapatan daerah. Tiga kategori yang dimaksud pertama adalah Daerah yang memiliki kontribusi DBH lebih dari 50% dari anggaran pendapatan; kedua, Daerah yang memiliki kontribusi DBH antara 50%-75% dari anggaran pendapatan; dan ketiga Daerah yang memiliki kontribusi DBH kurang dari 25% dari anggaran pendapatan.

Tabel IV.16 dan tabel IV.17 menunjukkan bahwa dana bagi hasil (DBH) hanya menyumbang kurang dari 25% dari anggaran pendapatan sebagian besar pemerintah kabupaten/kota. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dana alokasi umum (DAU) merupakan dana transfer yang memberikan kontribusi tinggi bagi anggaran pendapatan pemerintah daerah.

F. Alokasi Belanja Pemerintah Daerah

Data pada sub bagian ini menjelaskan mengenai alokasi belanja pemerintah daerah untuk belanja pegawai; belanja sektor pendidikan; belanja sektor kesehatan dan belanja sektor infrastruktur. Dalam menyajikan data mengenai alokasi belanja pemerintah daerah, juga dirumuskan beberapa kategorisasi untuk melihat perbandingan antara belanja pemda untuk belanja pegawai, belanja sektor pendidikan, sektor kesehatan dan sektor infrastruktur dengan total belanja pemerintah daerah. Untuk melihat belanja pegawai pemda dirumuskan tiga kategori, yaitu pemerintah daerah yang memiliki belanja pegawai lebih dari 75% dari total anggaran belanja; pemerintah daerah yang memiliki belanja pegawai antara 50%-75% dari total anggaran belanja; dan kategori pemerintah daerah yang memiliki belanja pegawai kurang dari 50% dari total anggaran belanja. Sementara itu, untuk melihat belanja sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dirumuskan dua kategori, yaitu pemerintah daerah yang memiliki belanja sektor pendidikan/ kesehatan/ infrastruktur sama dengan/ lebih dari 20% dari total anggaran belanja; dan pemerintah daerah yang memiliki belanja sektor pendidikan/ kesehatan/ infrastruktur kurang dari 20% dari total anggaran belanja.

Tabel IV.19., tabel IV.20 dan Tabel IV.21 menunjukan Jumlah Pemda (Provinsi/Kab/Kota) berdasarkan persentase Anggaran Belanja Pegawai terhadap Total Anggaran Belanja serta Total Dana Belanja Pegawai Provinsi/Kabupaten/Kota. Bila dilihat dari total dana belanja pegawai provinsi maupun kabupaten/kota antara tahun 2007 hingga tahun 2011 mengalami kenaikan. Sementara itu, dilihat dari tabel





IV.19, dan tabel IV.20 tampak bahwa pada tahun 2007 belanja pegawai dari sebagian besar pemerintah provinsi/kabupaten/kota dibawah 50% dari total belanja daerah, namun pada tahun 2011, belanja pegawai dari sebagian besar pemerintah kabupaten/kota antara 50%-75% dari total belanja daerah. Hal ini menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini dapat disebabkan beberapa faktor diantaranya adalah bertambahnya jumlah pegawai; bertambahnya nominal gaji pokok pegawai; dan kebijakan pemberian tunjangan kinerja daerah (TKD) bagi pegawai pemerintah daerah. Seharusnya belanja daerah lebih banyak digunakan untuk pembangunan dan menyediakan pelayanan publik bagi masyarakat, bukan untuk belanja pegawai.

Tabel IV.22. dan tabel IV.23. menunjukkan Jumlah Pemda (Propinsi/Kab/Kota) berdasarkan persentase Anggaran Belanja Sektor Pendidikan terhadap Total Anggaran Belanja serta Total Dana Belanja sektor pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota. Dari tabel IV.22. dan tabel IV.23 terlihat bahwa sebagian besar pemerintah kabupaten/kota sudah memiliki anggaran belanja untuk sektor pendidikan lebih dari 20% dari total belanja. Hal ini disebabkan adanya aturan yang mengharuskan pemerintah pusat dan daerah mengalokasikan minimal 20% anggarannya untuk membiayai sektor pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Selain itu, komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan tampak dari peningkatan total dana alokasi sektor pendidikan secara umum dari seluruh provinsi/kabupaten/kota seperti diperlihatkan pada tabel IV.24.

Tidak seperti anggaran belanja untuk sektor pendidikan, anggaran belanja untuk sektor kesehatan kurang diperhatikan oleh pemerintah daerah. Tabel IV.25 dan tabel IV.26 menunjukkan hanya sedikit pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang memiliki anggaran kesehatan lebih dari 20% dari total anggaran belanjanya. Padahal, pelayanan kesehatan yang memadai dan berkualitas juga merupakan aspek yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, tabel IV.27. menunjukkan total dana belanja sektor kesehatan Provinsi/ Kabupaten/Kota. Tabel IV.27. menunjukkan bahwa total dana belanja sektor kesehatan Provinsi/ Kabupaten/Kota mengalami peningkatan selama tahun 2007 hingga tahun 2011.

Tabel IV.28., tabel IV.29 dan Tabel IV.30. menunjukkan Jumlah Pemda (Propinsi/Kab/Kota) berdasarkan persentase Anggaran Belanja Sektor Infrastruktur terhadap Total Anggaran Belanja dan Total Dana Belanja sektor infrastruktur Provinsi/ Kabupaten/Kota. Tabel IV.30. menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun total anggaran pemerintah daerah untuk sektor infrastruktur semakin meningkat. Dengan meningkatnya Belanja Sektor Infrastruktur Pemerintah daerah diharapkan dapat berbanding lurus dengan ketersediaan dan kelayakan fasilitas publik saat ini khususnya dalam hal infrastruktur. Walaupun bila dilihat dari persentase anggaran untuk sektor infrastruktur, hanya sedikit pemerintah daerah yang telah mengalokasikan anggarannya lebih dari 20% untuk sektor infrastruktur seperti dapat dilihat pada tabel IV.28 dan tabel IV.29.



Tabel IV.1. Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (dalam miliaran rupiah)

Rincian/description	2009	2010	2011
1	2	3	4
Pendapatan dan hibah/revenue and grants	985 725	949 656	1 104 902
Penerimaan dalam negeri/domestic revenue	984 786	984 149	1 101 162
Penerimaan pajak/tax revenue	725 843	742 738	850 255
pajak dalam negeri/ domestic taxes	697 347	715 535	827 246
pajak perdagangan internasional/internasional trade taxes	28 496	27 203	23 009
Penerimaan Bukan Pajak/Non Tax Revenue	258 944	205 411	250 907
penerimaan sumber daya alam/natural resources revenue	173 496	132 030	163 119
Bagian Laba BUMN/Profit Transfer from SOE	30 794	24 000	27 590
penerimaan bukan pajak lainnya/other non-tax revenue	49 211	39 894	45 167
pendapatan badan layanan umum (BLU)	5 442	9 487	15 031
Hibah / grants	939	1 507	3 740
Pengeluaran / expenditures	1 037 067	1 047 666	1 229 558
Pengeluaran pemerintah pusat/central government expenditures	716 376	725 243	836 578
Belanja pegawai/personel expenditures	143 556	160 364	180 825
Belanja barang/material expenditures	77 688	107 090	137 850
Belanja modal/capital edvenditures	93 802	82 176	135 854
Pembayaran bunga utang/interest payments subsidi	101 658	115 595	115 209
Subsidi/subsidies	166 701	157 820	187 624
Subsidi BBM/Oil subsidy	103 568	106 527	136 614
Subsidi non BBM/Non-Oil subsidy	63 133	51 293	51 010
Belanja hibah/grants	-	7 192	771
Bantuan social/social edventures	67 848	64 291	63 184
Belanja lainnya/Other edventures	65 123	30 715	15 261
Pengeluaran untuk daerah/Expenditure for regions	320 691	322 423	392 980
Dana pertimbangan/Balance funds	296 952	306 023	334 324
Dana bagi hasil/revenue sharing	85 719	81 405	83 558
Dana alpkasi umum/general allocation funds	186 414	203 485	225 533
Dana alokasi khusus/Specifik allocation funds	24 819	21 133	25 233

Lanjutan Tabel IV.1.

Rincian/description	2009	2010	2011
1	2	3	4
Dana otonomi khusus dan penyeimbang/Special autoumous region and balancing funds	23 739	16 400	58 656
Keseimbangan Primer/Primary Balance	50 316	17 585	-9 447
Surplus/Defisit anggaran/Overall balance	-51 342	98 010	-124 656
Pembiayaan bersih/Financing Net	51 342	98 010	124 656
Pembiayaan dalam negeri/Domestic financing	60 790	107 891	125 266
Perbankan dalam negeri/Domestic bank financing	16 629	7 129	12 657
Nonperbankan dalam negeri/domestic non-banking financing	44 161	100 762	112 609
Pembiayaan Luar Negeri/Foreign financing	-9 448	-9 881	-610
Pinjaman bruto luar negeri/Gross drawing	52 161	57 606	58 933
Penerusan pinjaman/subsidiary loan agreement	-	-8 644	-11 725
Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri/Amortizations	-61 609	-58 843	-47 818

Sumber : Badan Pusat Statistik 2012

Tabel IV.2. Alokasi Belanja Negara untuk Sektor Pendidikan (dalam miliaran rupiah)

Komponen Anggaran Pendidikan	2007	2008	2009
1. Anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat	55.668,20	58.565,40	90.632,20
2. Anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah	86.534,40	95.620,10	117.654,40
a. DAK bidang pendidikan	5.195,30	7.015,40	9.334,90
b. BA pendidikan yang dialokasikan dalam DAU-Non gaji	6.591,50	7.180,30	13.425,40
c. BA pendidikan yang dialokasikan dalam DAU-Gaji pendidik	74.747,60	81.424,40	84.557,40
d. BA pendidik yang dialokasikan dalam DBH	-	-	609,7
e. BA pendidik yang dialokasikan dalam dana otsus	-	-	2.237,00
f. Dana tambahan penghasil guru PNSD	-	-	7.490,00
g. Tunjangan profesi guru	-	-	-
h. Dana insentif daerah	-	-	-
i. Dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah (DPPID) Pendidikan	-	-	-
j. Bantuan operasional sekolah	-	-	-
3. Anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan (dana pengembangan pendidikan nasional)	-	-	-
4. Anggaran pendidikan (1+2+3)	142.202,50	154.185,50	208.286,60
5. Total belanja Negara	752.373,30	989.493,80	1.000.843,90
Rasio anggaran pendidikan (4:5) x 100%	18,9	15,6	20,8



Lanjutan Tabel IV.2.

Komponen Anggaran Pendidikan	2010	2011	2012
1. Anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat	96.480,30	105.356,40	102.518,30
2. Anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah	127.749,10	158.966,50	186.439,50
a. DAK bidang pendidikan	9.334,90	10.041,30	10.041,30
b. BA pendidikan yang dialokasikan dalam DAU-Non gaji	11.365,70	11.276,60	10.838,60
c. BA pendidikan yang dialokasikan dalam DAU-Gaji pendidik	84.557,40	93.013,10	103.016,90
d. BA pendidik yang dialokasikan dalam DBH	748,5	882,4	815,6
e. BA pendidik yang dialokasikan dalam dana otsus	2.309,90	2.706,40	3.285,80
f. Dana tambahan penghasil guru PNSD	5.800,00	3.696,20	2.898,90
g. Tunjangan profesi guru	10.994,90	18.537,70	30.559,80
h. Dana insentif daerah	1.387,80	1.387,80	1.387,80
i. Dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah (DPPID) Pendidikan	1.250,00	613	-
j. Bantuan operasional sekolah	-	16.812,00	23.594,80
3. Anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan (dana pengembangan pendidikan nasional)	1.000,00	2.617	1.000,00
4. Anggaran pendidikan (1+2+3)	225.229,30	266.940,60	289.957,80
5. Total belanja Negara	1.126.146,50	1.320.751,30	1.435.406,70
Rasio anggaran pendidikan (4:5) x 100%	20	20,2	20,2

Sumber : Kementerian Keuangan, 2012



Tabel IV.3. Alokasi Belanja Negara untuk Sektor Kesehatan (dalam miliaran rupiah)

Komponen Anggaran Kesehatan	2005	2006	2007
	Realisasi	Realisasi	Realisasi
1. Anggaran kesehatan melalui belanja pemerintah pusat	11.859,70	19.578,00	20.646,90
A. Melalui kementerian negara/lembaga	11.474,90	19.091,50	19.971,60
1. Kementerian Kesehatan	7.944,40	12.260,50	15.588,40
2. Badan Pengawas Obat dan Makanan	229,8	302,4	378
3. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional	7,7	337,2	468,3
4. Kementerian Pendidikan Nasional	4,8	10,1	17,7
5. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,9	0,3	32,7
6. Kementerian Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	-	3,5	3,6
7. Kementerian ESDM	71,3	102,1	26,6
8. Kementerian PU	2.741,8	5.188,50	940,5
9. Kementerian lingkungan hidup	5,5	-	46,6
10. Kementerian Ristek	-	-	-
11. Kementerian Pertanian	35,4	191,9	-
12. Kementerian Kelautan dan Perikanan	-	-	53,8
13. Kementerian Lainnya	433,3	695,1	2.415,50
Total anggaran K/L	120.823,00	189.361,20	225.014,20
B. Melalui Non-Kementrian Negara / lembaga BA 999	384,8	486,5	675,3
1. Subsidi untuk air bersih	-	-	-
2. Askes PNS (belanja pegawai)	384,8	486,5	675,3
2. Anggaran kesehatan melalui transfer daerah	886,3	2.930,00	3.875,70
1. DAK kesehatan	620,0	2.406,80	3.381,30
2. Dana otonomi khusus kesehatan papua dan papua barat	266,3	523,2	494,4
3. Total anggaran kesehatan (1+2)	12.746,00	22.50,0	24.522,60
4. Total belanja negara	517.517,60	699.099,20	752.373,30
Rasio anggaran kesehatan = $(3:4) \times 100\%$	2,5	3,5	3,3



Lanjutan Tabel IV.3.

Komponen Anggaran Kesehatan	2008	2009	2010
	Realisasi	Realisasi	Realisasi
1. Anggaran kesehatan melalui belanja pemerintah pusat	20.052,10	23.242,50	28.176,30
A. Melalui kementerian negara/lembaga	18.898,90	21.720,50	26.230,10
1. Kementerian Kesehatan	15.898,90	18.023,60	22.445,40
2. Badan Pengawas Obat dan Makanan	395,3	349,7	410
3. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional	479,8	626,9	797,5
4. Kementerian Pendidikan Nasional	10,9	-	9,7
5. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	41	58,4	26,2
6. Kementerian Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	3,1	8,9	3,4
7. Kementerian ESDM	71,9	16,6	54,1
8. Kementerian PU	1.454,20	1.986,50	1.699,30
9. Kementerian lingkungan hidup	58,1	46,1	29,6
10. Kementerian Ristek	24,2	20,6	18,5
11. Kementerian Pertanian	402,2	477,1	529,9
12. Kementerian Kelautan dan Perikanan	68,7	106,1	206,5
13. Kementerian Lainnya	3,4	-	-
Total anggaran K/L	259.701,90	306.999,50	330.492,60
B. Melalui Non-Kementrian Negara / lembaga BA 999	1.153,20	1.522,00	1.946,20
1. Subsidi untuk air bersih	-	-	-
2. Askes PNS (belanja pegawai)	1.153,20	1.522,00	1.946,20
2. Anggaran kesehatan melalui transfer daerah	4.355,90	4.576,60	3.407,30
1. DAK kesehatan	3.817,40	4.017,40	2.829,80
2. Dana otonomi khusus kesehatan papua dan papua barat	538,5	559,2	577,5
3. Total anggaran kesehatan (1+2)	24.408,00	27.819,10	31.583,60
4. Total belanja negara	989.493,70	937.382,00	1.056.510,30
Rasio anggaran kesehatan = (3:4) x 100%	2,5	3	3



Lanjutan Tabel IV.3.

Komponen Anggaran Kesehatan	2011	2012	
	APBN	APBN	Realisasi
1. Anggaran kesehatan melalui belanja pemerintah pusat	40.135,20	44.195,20	
A. Melalui kementerian negara/lembaga	37.827,40	41.519,00	
1. Kementerian Kesehatan	17.657,10	29.915,80	
2. Badan Pengawas Obat dan Makanan	928,8	1.104,10	
3. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional	2.413,20	2.593,70	
4. Kementerian Pendidikan Nasional	-	393,7	
5. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	108,8	128,2	
6. Kementerian Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	3,5	36,2	
7. Kementerian ESDM	-	-	
8. Kementerian PU	6.148,50	6.438,70	
9. Kementerian Lingkungan Hidup	75	81,9	
10. Kementerian Ristek	24,6	22	
11. Kementerian Pertanian	194	362,1	
12. Kementerian Kelautan dan Perikanan	35,7	51,7	
13. Kementerian Lainnya	238,4	390,8	
Total anggaran K/L	432.779,30	508.359,60	
B. Melalui Non-Kementrian Negara / lembaga BA 999	2.307,80	2.676,30	
1. Subsidi untuk air bersih	50	30	
2. Askes PNS (belanja pegawai)	2.257,80	2.646,30	
2. Anggaran kesehatan melalui transfer daerah	3.677,40	3.814,15	
1. DAK kesehatan	3.000,80	3.005,90	
2. Dana otonomi khusus kesehatan papua dan papua barat	676,6	808,6	
3. Total anggaran kesehatan (1+2)	43.812,60	48.009,70	
4. Total belanja negara	1.229.558,50	1.418.497,70	
Rasio anggaran kesehatan = (3:4) x 100%	3,6	3,4	

Sumber : Kementerian Keuangan, 2012



Tabel IV.4. Alokasi Belanja Negara untuk Sektor Infrastruktur (dalam miliar rupiah)

Uraian	2005	2006	2007
	realisasi	realisasi	realisasi
1. Kementerian negara/lembaga	23.809,80	46.150,2	50.965,70
1. Kementerian Pekerjaan Umum	13.328,90	19.186,70	22.769,50
2. Kementerian Perhubungan	3.978,50	6.769,70	9.070,40
3. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	3.117,10	4.657,60	5.141,60
4. Kementerian Dalam Negeri	637,6	1.158,00	3.118,20
5. Kementerian Kelautan dan Perikanan	1.745,80	2.566,30	2.343,10
6. Kementerian Komunikasi dan Informatika	429,1	1.235,70	1.016,00
7. Kementerian Negara Perumahan Rakyat	84,1	369,2	419,6
8. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	73,9	230,2	384,8
9. Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi NAD dan Nias	414,7	9.976,70	6.532,80
10. Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana			46,7
11. Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo			113,9
12. Badan SAR Nasional			
13. Badan Pengembangan Wilayah Suramadu			
14. Pengembangan Otorita Batam			
2. Non K/L	2.304,30	7.853,40	8.857,80
1. Resiko Kenaikan Harga Tanah			
2. Investasi Pemerintah untuk Infrastruktur		2.000,00	2.000,00
3. PSO	675,5	1.215,00	1.025,10
4. Kredit Program KPRSH & Rusunami	110,1	252	300
5. Dana Alokasi Khusus	1.518,70	3.811,40	4.782,70
6. Tambahan Otonomi Khusus Infrastruktur		575	750
7. Dana Kontijensi PLN			
8. Dana Kontijensi PDAM			
9. Pinjaman pada PT PLN			
10. Dana Bergulir Perdagangan Tanah			
11. Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas Sabang			
12. Pengembangan Otorita Batam			
13. Merauke Integrated Food And Energy Estate			
14. PMN untuk PT SMI			
15. PMN untuk PT PII			
16. Pengembangan Kawasan Bintan-Karimun			
Total	26.114,2	54,003	59.814,40



Lanjutan Tabel IV.4.

Uraian	2008	2009	2010
	realisasi	realisasi	realisasi
1. Kementerian negara/lembaga	68.023,30	78.116,80	75.385,70
1. Kementerian Pekerjaan Umum	30.670,00	40.082,70	32.107,90
2. Kementerian Perhubungan	13.477,10	15.557,30	15.420,10
3. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	5.442,50	6.577,20	5.534,10
4. Kementerian Dalam Negeri	5.303,00	8.315,10	13.403,30
5. Kementerian Kelautan dan Perikanan	2.398,90	3.205,60	3.380,80
6. Kementerian Komunikasi dan Informatika	996	1.360,00	2.196,70
7. Kementerian Negara Perumahan Rakyat	590,8	1.277,50	913,9
8. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	918,4	931,2	1.040,00
9. Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi NAD dan Nias	7.619,10		
10. Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana	94,5	104,4	239,4
11. Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	513	705,8	636,9
12. Badan SAR Nasional			512,6
13. Badan Pengembangan Wilayah Suramadu			
14. Pengembangan Otorita Batam			
2. Non K/L (Miliar Rupiah)	10.633,90	13.227,60	23.985,20
1. Resiko Kenaikan Harga Tanah	264,9	400,8	352,8
2. Investasi Pemerintah untuk Infrastruktur		500	3.610,50
3. PSO	1.688,40	1.289,80	1.373,90
4. Kredit Program KPRSH & Rusunami	800	774,8	416
5. Dana Alokasi Khusus	6.550,50	7.192,20	4.493,10
6. Tambahkan Otonomi Khusus Infrastruktur	330	2.070,00	1.400,00
7. Dana Kontijensi PLN			
8. Dana Kontijensi PDAM			
9. Pinjaman pada PT PLN			7.500,00
10. Dana Bergulir Perdagangan Tanah			2.300,00
11. Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas Sabang			398,9
12. Pengembangan Otorita Batam			140
13. Merauke Integrated Food and Energy Estate			
14. PMN untuk PT SMI	1.000,00		1.000,00
15. PMN untuk PT PII		1.000,00	1.000,00
16. Pengembangan Kawasan Bintan dan Karimun			
Total	78.657,20	91.344,40	99.370,90



Lanjutan Tabel IV.4.

Uraian	2011		2012	
	APBN-P	realisasi sementara	APBN	Realisasi
1. Kementerian negara/lembaga (miliar rupiah)	129.721,00	104.866,20	142.634,80	
1. Kementerian Pekerjaan Umum	56.535,30	50.393,20	62.563,10	
2. Kementerian Perhubungan	23.134,60	19.784,80	28.117,70	
3. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	15.674,90	8.895,10	15.804,70	
4. Kementerian Dalam Negeri	16.792,70	12.815,20	17.134,40	
5. Kementerian Kelautan dan Perikanan	5.559,20	4.972,80	5.993,30	
6. Kementerian Komunikasi dan Informatika	3.452,30	1.842,30	3.246,00	
7. Kementerian Negara Perumahan Rakyat	3.462,00	2.325,20	4.604,10	
8. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	1.263,40	1.005,80	1.018,30	
9. Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi NAD dan Nias				
10. Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana	938,9	1.147,20	995,1	
11. Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	1.286,10	571	1.606,90	
12. Badan SAR Nasional	1.329,20	1.041,50	1.111,70	
13. Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	292,5	69,1	299,6	
14. Pengembangan Otorita Batam			140	
2. Non K/L (Miliar Rupiah)	22.051,70	20.756,70	18.837,50	
1. Resiko Kenaikan Harga Tanah	610	406,2	500	
2. Investasi Pemerintah Untuk Infrastruktur	4.571,6	4.571,00	6.008,90	
3. PSO	1.849,40	1.833,90	2.045,70	
4. Kredit Program KPRSH & Rusunami	696,2	611,8		
5. Dana Alokasi Khusus	6.051,00	6.051,00	6.327,40	
6. Tambahkan Otonomi Khusus Infrastruktur	1.400,00	1.400,00	1.000,00	
7. Dana Kontijensi PLN	889		623,3	
8. Dana Kontijensi PDAM	15		10	
9. Pinjaman pada PT PLN				



Lanjutan Tabel IV.4.

Uraian	2011		2012	
	APBN-P	realisasi sementara	APBN	Realisasi
10. Dana Bergulir Perdagangan Tanah	3.850,00	3.850,00	900	
11. Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas Sabang	392,2	392,2	392,2	
12. Pengembangan Otorita Batam	140	140		
13. Merauke Integrated Food And Energy Estate	87,3			
14. PMN untuk PT SMI				
15. PMN untuk PT PII	1.500,00	1.500,00	1.000.0	
16. Pengembangan Kawasan Bintan dan Karimun			30	
Total	151.772,70	125.622,80	161.472,30	

Sumber : Kementerian Keuangan, 2012

Tabel IV.5.Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi (dalam jutaan rupiah)

No.	Total Anggaran	Tahun				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Pendapatan	61.789.054	84.655.533	95.914.448	102.318.459	119.039.549
2	Belanja	60.343.144	96.117.708	105.595.353	113.133.300	127.918.631

Sumber : Kementerian Keuangan, 2012, diolah.

Tabel IV.6.Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (dalam jutaan rupiah)

No	Total Anggaran	Tahun				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Pendapatan	223.619.239	261.816.092	285.556.369	300.722.924	359.537.250
2	Belanja	230.710.884	294.059.551	323.732.942	330.431.867	386.037.182

Sumber : Kementerian Keuangan, 2012, diolah.



Tabel IV.7. Jumlah Pemda Propinsi berdasarkan persentase kontribusi PAD terhadap Anggaran Pendapatan

No.	Kategori Kontribusi PAD	2007	2008	2009	2010	2011
1	kontribusi PAD kurang dari 25% dari anggaran pendapatan	9	9	9	7	7
2	kontribusi PAD antara 25%-50% dari anggaran pendapatan	13	16	15	16	17
3	kontribusi PAD lebih dari 50% dari anggaran pendapatan	11	8	9	10	9
	tidak ada data PAD					
	Jumlah	33	33	33	33	33

Sumber : Kementerian Keuangan, 2012, diolah.

Tabel IV.8. Jumlah Pemda Kabupaten/Kota berdasarkan persentase kontribusi PAD terhadap Anggaran Pendapatan

No.	Kategori Kontribusi PAD	2007	2008	2009	2010	2011
1	kontribusi PAD kurang dari 25% dari anggaran pendapatan	390	446	469	483	489
2	kontribusi PAD antara 25%-50% dari anggaran pendapatan	3		3	5	
3	kontribusi PAD lebih dari 50% dari anggaran pendapatan	40	2	1	2	2
	tidak ada data PAD	1	3	4	1	
	Jumlah	434	451	477	491	491

Sumber : Kementerian Keuangan, 2012, diolah.





Tabel IV.9. Data Total PAD Provinsi/Kabupaten/Kota (dalam dalam jutaan rupiah)

No	Total PAD	Tahun				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	PAD Provinsi	35.191.327	37.054.225	42.506.578,0	47.331.011	59.597.218
2	PAD Kabupaten/Kota	17.003.188	16.921.757	20.230.160,0	24.521.348	30.796.040

Sumber : Kementerian Keuangan, 2012, diolah.

Tabel IV.10. Jumlah Pemda Propinsi berdasarkan persentase kontribusi DAU terhadap Anggaran Pendapatan

No.	Kategori Kontribusi DAU	2007	2008	2009	2010	2011
1	kontribusi DAU lebih dari 75% dari anggaran pendapatan	2	1			
2	kontribusi DAU antara 50%-75% dari anggaran pendapatan	12	12	9	9	9
3	kontribusi DAU kurang dari 50% dari anggaran pendapatan	13	19	24	24	24
	tidak ada data DAU	6	1			
	Jumlah	33	33	33	33	

Sumber : Kementerian Keuangan, 2012, diolah.

Tabel IV.11. Jumlah Pemda Kab/Kota berdasarkan persentase kontribusi DAU terhadap Anggaran Pendapatan

No.	Kategori Kontribusi DAU	2007	2008	2009	2010	2011
1	kontribusi DAU lebih dari 75% dari anggaran pendapatan	43	76	53	67	34
2	kontribusi DAU antara 50%-75% dari anggaran pendapatan	303	320	354	351	385
3	kontribusi DAU kurang dari 50% dari anggaran pendapatan	49	47	70	64	72
	tidak ada data DAU	39	8		9	
	Jumlah	434	451	477	491	491

Sumber : Kementerian Keuangan, 2012, diolah.



Tabel IV.12. Data Total DAU Provinsi/Kabupaten/Kota (dalam jutaan rupiah)

No	Total DAU	Tahun				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	DAU Provinsi	13.719.919	17.824.574	18.623.293	19.298.968	21.951.716
2	DAU Kabupaten / Kota	132.630.884	160.385.932	167.603.412	173.926.648	203.764.809

Sumber : Kementerian Keuangan, 2012, diolah.

Tabel IV.13. Jumlah Pemda Propinsi berdasarkan persentase kontribusi DAK terhadap Anggaran Pendapatan

No	Kategori Kontribusi DAK	2007	2008	2009	2010	2011
1	kontribusi DAK lebih dari 75% dari anggaran pendapatan					
2	kontribusi DAK antara 50%-75% dari anggaran pendapatan					
3	kontribusi DAK kurang dari 50% dari anggaran pendapatan	2	25	27	33	33
	Tidak ada data DAK	31	8	6		
	Jumlah	33	33	33	33	33

Sumber : Kementerian Keuangan, 2012, diolah.

Tabel IV.14. Jumlah Pemda Kab/Kota berdasarkan persentase kontribusi DAK terhadap Anggaran Pendapatan

No	Kategori Kontribusi DAK	2007	2008	2009	2010	2011
1	kontribusi DAK lebih dari 75% dari anggaran pendapatan	1	1			
2	kontribusi DAK antara 50%-75% dari anggaran pendapatan	2		1		
3	kontribusi DAK kurang dari 50% dari anggaran pendapatan	389	446	476	486	491
	Tidak ada data DAK	42	4		5	
	Jumlah	434	451	477	491	491

Sumber : Kementerian Keuangan, 2012, diolah.





Tabel IV.15. Data Total DAK Provinsi/Kabupaten/Kota (dalam jutaan rupiah)

No	Total DAK	Tahun				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	DAK Provinsi	775.000	1.536.739	1.298.100	774.378	1.211.645
2	DAK Kabupaten/Kota	16.403.742	20.994.989	23.850.049	20.603.883	23.974.796

Sumber : Kementerian Keuangan, 2012, diolah.

Tabel IV.16. Jumlah Pemda Propinsi berdasarkan persentase kontribusi Dana Bagi Hasil terhadap Anggaran Pendapatan

No	Kategori Kontribusi DBH	2007	2008	2009	2010	2011
1	kontribusi DBH lebih dari 50% dari anggaran pendapatan	1	2	2	2	2
2	kontribusi DBH antara 50%-75% dari anggaran pendapatan	3	4	4	3	3
3	kontribusi dana bagi hasil (DBH) kurang dari 25% dari anggaran pendapatan	29	27	27	28	28
	tidak ada data DBH					
	Jumlah	33	33	33	33	33

Sumber : Kementerian Keuangan, 2012, diolah.

Tabel IV.17. Jumlah Pemda Kab/Kota berdasarkan persentase kontribusi Dana Bagi Hasil terhadap Anggaran Pendapatan

No	Kategori Kontribusi DBH	2007	2008	2009	2010	2011
1	kontribusi DBH lebih dari 50% dari anggaran pendapatan	23	27	27	30	23
2	kontribusi DBH antara 50%-75% dari anggaran pendapatan	45	41	48	48	39
3	kontribusi dana bagi hasil (DBH) kurang dari 25% dari anggaran pendapatan	366	382	402	413	429
	tidak ada data DBH		1			
	Jumlah	434	451	477	491	491

Sumber : Kementerian Keuangan, 2012, diolah.



Tabel IV.18. Data Total Dana Bagi hasil Provinsi/ Kabupaten/Kota (dalam jutaan rupiah)

No	Total DBH	Tahun				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	DBH Provinsi	7.296.898	21.016.883	23.711.948	25.053.679	24.290.622,04
2	DBH Kabupaten/ Kota	47.247.199	53.219.886	59.668.966	64.584.195	65.694.702,18

Sumber : Kementerian Keuangan, 2012, diolah.

Tabel IV.19. Jumlah Pemda Propinsi berdasarkan persentase Anggaran Belanja Pegawai terhadap Total Anggaran Belanja

No	Kategori Belanja Pegawai	2007	2008	2009	2010	2011
1	Belanja pegawai lebih dari 75% dari anggaran belanja	1				
2	Belanja pegawai antara 50%-75% dari anggaran belanja	1	1			
3	Belanja pegawai kurang dari 50% dari anggaran belanja	31	32	33	33	33
	tidak ada data belanja pegawai					
	Jumlah	33	33	33	33	33

Sumber : Kementerian Keuangan, 2012, diolah.

Tabel IV.20. Jumlah Pemda Kab/Kota berdasarkan persentase Anggaran Belanja Pegawai terhadap Total Anggaran Belanja

No	Kategori Belanja Pegawai	2007	2008	2009	2010	2011
1	Belanja pegawai lebih dari 75% dari anggaran belanja	1	1	3	1	
2	Belanja pegawai antara 50%-75% dari anggaran belanja	137	184	228	149	308
3	Belanja pegawai kurang dari 50% dari anggaran belanja	289	265	246	341	183
	tidak ada data belanja pegawai	7	1			
	Jumlah	434	451	477	491	491

Sumber : Kementerian Keuangan, 2012, diolah.



Tabel IV.21. Total Dana Belanja Pegawai Provinsi/Kabupaten/Kota (dalam jutaan rupiah)

No	Total Belanja Pegawai	Tahun				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Belanja Pegawai Provinsi	19.389.461	26.182.236	27.173.002	29.838.269,99	31.557.445,83
2	Belanja Pegawai Kabupaten / Kota	99.867.917	130.907.247	153.134.592	168.740.121,97	197.519.916,36

Sumber : Kementerian Keuangan, 2012, diolah.

Tabel IV.22. Jumlah Pemda Propinsi berdasarkan persentase Anggaran Belanja Sektor Pendidikan terhadap Total Anggaran Belanja

No	Kategori Belanja untuk Sektor Pendidikan	2007	2008	2009	2010	2011
1	belanja sektor pendidikan sama dengan/lebih dari 20% dari anggaran belanja	13	0	25	2	1
2	belanja sektor pendidikan kurang dari 20% dari anggaran belanja	6	33	8	31	32
	Tidak ada data belanja sektor pendidikan	14				
	Jumlah	33	33	33	33	33

Sumber : Kementerian Keuangan, 2012, diolah.

Tabel IV.23. Jumlah Pemda Kab/Kota berdasarkan persentase Anggaran Belanja Sektor Pendidikan terhadap Total Anggaran Belanja

No	Kategori Belanja untuk Sektor Pendidikan	2007	2008	2009	2010	2011
1	belanja sektor pendidikan sama dengan/lebih dari 20% dari anggaran belanja	288	330	465	401	433
2	belanja sektor pendidikan kurang dari 20% dari anggaran belanja	9	121	12	85	58
	Tidak ada data belanja sektor pendidikan	137				
	Jumlah	434	451	477	486	491

Sumber : Kementerian Keuangan, 2012, diolah.



Tabel IV.24. Total Dana Belanja sektor pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota (dalam jutaan rupiah)

No	Total Belanja Sektor Pendidikan	Tahun				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Belanja Sektor Pendidikan Pemerintah Provinsi	1.879.082,11	8.062.123	10.551.632	14.399.235,95	15.086.335,50
2	Belanja Sektor Pendidikan Pemerintah Kabupaten/ Kota	47.060.576,96	83.612.396	101.046.699	102.654.816,82	141.577.318,34

Sumber : Kementerian Keuangan, 2012, diolah.

Tabel IV.25. Jumlah Pemda Propinsi berdasarkan persentase Anggaran Belanja Sektor Kesehatan terhadap Total Anggaran Belanja

No	Kategori Belanja untuk Sektor Kesehatan	2007	2008	2009	2010	2011
1	belanja sektor kesehatan sama dengan/lebih dari 20% dari anggaran belanja	13	0	19		1
2	belanja sektor kesehatan kurang dari 20% dari anggaran belanja	6	33	14	33	32
	Tidak ada data belanja sektor kesehatan	14				
	Jumlah	33	33	33	33	33

Sumber : Kementerian Keuangan, 2012, diolah.

Tabel IV.26. Jumlah Pemda Kab/Kota berdasarkan persentase Anggaran Belanja Sektor Kesehatan terhadap Total Anggaran Belanja

No	Kategori Belanja untuk Sektor Kesehatan	2007	2008	2009	2010	2011
1	belanja sektor kesehatan sama dengan/lebih dari 20% dari anggaran belanja	76	1	143	4	4
2	belanja sektor kesehatan kurang dari 20% dari anggaran belanja	219	449	334	481	487
	Tidak ada data belanja sektor kesehatan	139	1		6	
	Jumlah	434	451	477	491	491

Sumber : Kementerian Keuangan, 2012, diolah.



Tabel IV.27. Total Dana Belanja sektor kesehatan Provinsi/ Kabupaten/Kota (dalam jutaan rupiah)

No	Total Belanja Sektor Kesehatan	Tahun				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Belanja Sektor Kesehatan Pemerintah Provinsi	1.559.584,67	6.644.540	8.099.139	9.945.360,03	11.886.141,76
2	Belanja Sektor Kesehatan Pemerintah Kabupaten/ Kota	13.857.816,32	26.061.780	29.697.565	30.536.107,44	36.393.365,56

Sumber : Kementerian Keuangan, 2012, diolah.

Tabel IV.28. Jumlah Pemda Propinsi berdasarkan persentase Anggaran Belanja Sektor Infrastruktur terhadap Total Anggaran Belanja

No	Kategori Belanja untuk Sektor Infrastruktur	2007	2008	2009	2010	2011
1	belanja sektor infrastruktur sama dengan/ lebih dari 20% dari anggaran belanja	17	11	33	11	9
2	belanja sektor infrastruktur kurang dari 20% dari anggaran belanja	2	22	0	22	24
	Tidak ada data belanja sektor infrastruktur	14				
	Jumlah	33	33	33	33	33

Sumber : Kementerian Keuangan, 2012, diolah.

Tabel IV.29. Jumlah Pemda Kab/Kota berdasarkan persentase Anggaran Belanja Sektor Infrastruktur terhadap Total Anggaran Belanja

No	Kategori Belanja untuk Sektor Infrastruktur	2007	2008	2009	2010	2011
1	belanja sektor infrastruktur sama dengan/ lebih dari 20% dari anggaran belanja	226	152	333	88	78
2	belanja sektor infrastruktur kurang dari 20% dari anggaran belanja	71	299	144	394	413
	Tidak ada data belanja sektor infrastruktur	137			9	
	Jumlah	434	451	477	491	491

Sumber : Kementerian Keuangan, 2012, diolah.

Tabel IV.30. Total Dana Belanja sektor infrastruktur Provinsi/ Kabupaten/Kota (dalam jutaan rupiah)

N o	Total Belanja Sektor Infrastruktur	Tahun				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Belanja Sektor Infrastruktur Pemerintah Provinsi	4.483.074,36	16.721.282	18.975.161	19.232.914,58	18.361.047,82
2	Belanja Sektor Infrastruktur Pemerintah Kabupaten/ Kota	27.143.536,26	54.097.344	54.339.027	44.785.330,99	50.210.361,14

Sumber : Kementerian Keuangan, 2012, diolah.

BAGIAN V

KINERJA APARATUR / REFORMASI BIROKRASI

Bagian ini menyajikan data mengenai kinerja aparatur/ reformasi birokrasi yang dilihat dari beberapa indikator, baik indikator nasional maupun indikator internasional. Untuk indikator kinerja aparatur / reformasi birokrasi dalam skala nasional adalah opini BPK terhadap Laporan Keuangan Instansi baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah; Hasil Penilaian LAKIP oleh Kemenpan; Integritas Sektor Publik; dan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk indikator kinerja aparatur / reformasi birokrasi dalam skala internasional adalah Peringkat *Doing Business*; Indeks Persepsi Korupsi; *Government Effectiveness Index*; *Rule Of Law Index*; *Regulatory Quality Index*; dan Peringkat dan Nilai *Human Development Index*.

A. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Instansi

Tabel V.1, tabel V.2 dan tabel V.3 menyajikan data kualifikasi hasil penilaian BPK terhadap laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dari tahun 2006 – 2010. Opini tertinggi BPK yakni opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), kemudian Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Dari tahun 2006 – 2010, terjadi peningkatan jumlah K/L yang mendapatkan opini WTP dari BPK dan semakin menurunnya jumlah K/L yang mendapatkan opini WDP bahkan TMP. Hal ini menunjukkan semakin baiknya hasil laporan keuangan pemerintah pusat.

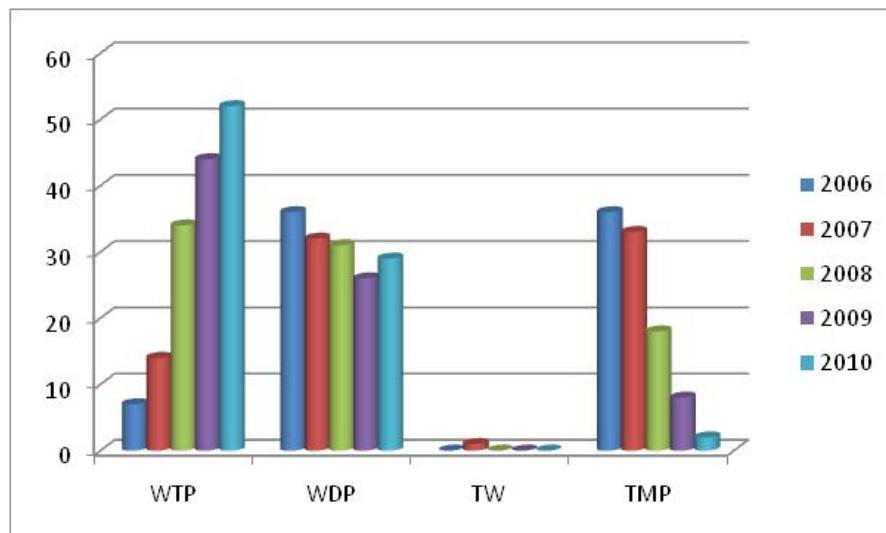
Peningkatan jumlah lembaga pemerintah yang memperoleh opini WTP bukan saja terjadi pada lembaga pusat, tetapi juga pada pemerintah daerah. Jika pada tahun 2006 hanya terdapat 3 pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP, pada tahun 2010 terdapat 34 (7%) pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP. Opini WTP merupakan prestasi tertinggi dalam penilaian kualitas laporan keuangan instansi, walaupun bukan berarti lembaga atau pemerintah daerah yang sudah memperoleh opini yang baik bebas dari penyimpangan.

Jika melihat data pada tabel V.1 tabel V.2 dan tabel V.3, tentu merupakan hal yang menggembirakan. Akan tetapi, perlu pula dicermati persentase untuk instansi, baik Pusat maupun Daerah, yang mendapatkan kategori WDP. Pada tahun 2012, terdapat peningkatan persentase WDP sebesar 1%. Sekalipun hanya 1%, hal ini harus



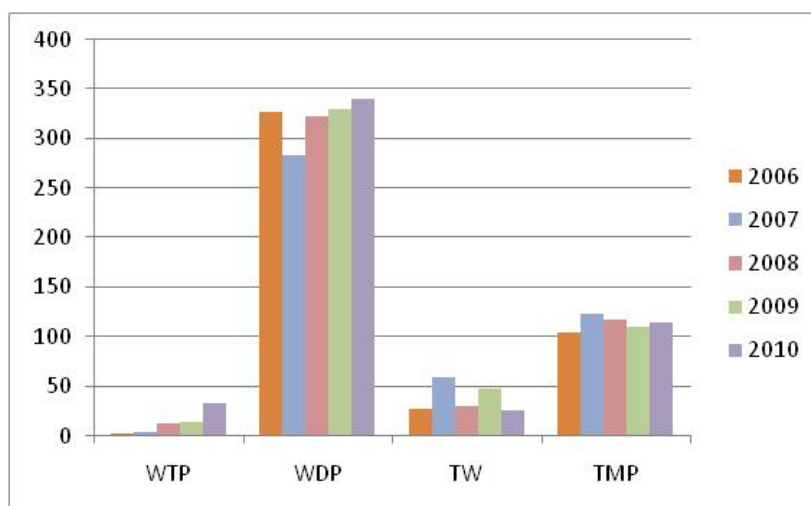
menjadi perhatian serius karena, untuk kategori selain WTP, harus menunjukkan kecenderungan penurunan dari tahun ke tahun.

Gambar V.1. Kualifikasi Hasil Penilaian BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat



Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), 2012

Gambar V.2. Kualifikasi Hasil Penilaian BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah



Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), 2012

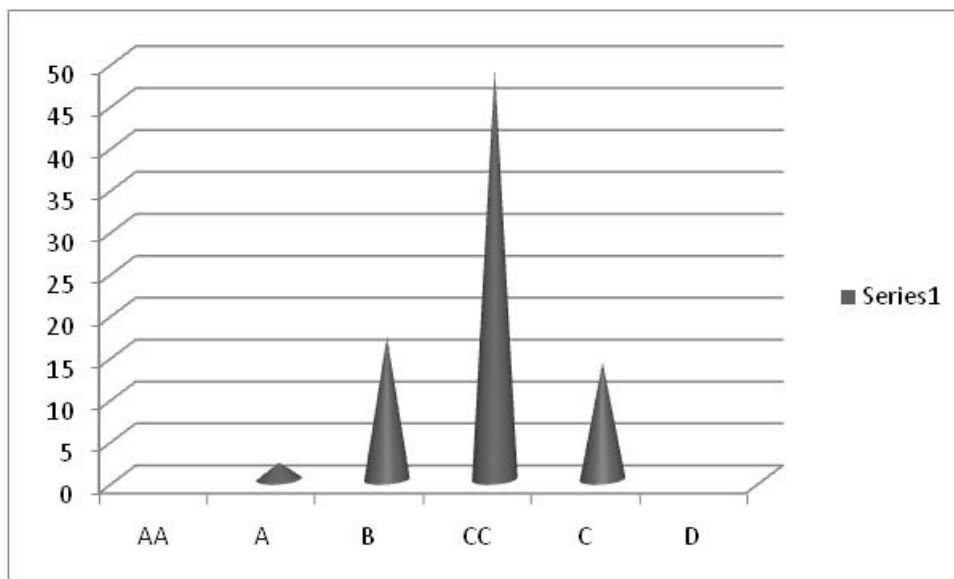


B. Kualifikasi Penilaian LAKIP oleh Kemenpan

Penilaian LAKIP oleh Kemenpan merupakan salah satu indikator kinerja aparatur. Bagian ini akan menampilkan data Penilaian LAKIP lembaga pemerintah pusat dan daerah pada tahun 2011. Untuk kualifikasi hasil penilaian Kemenpan terhadap LAKIP pemerintah pusat tahun 2011 dapat dilihat dari tabel V.4 dan untuk kualifikasi hasil penilaian Kemenpan terhadap LAKIP pemerintah daerah tahun 2011 dapat dilihat dari tabel V.5., tabel V.6 dan tabel V.7 Pada tahun 2011, Kemenpan memberikan nilai A untuk 2 K/L, nilai B untuk 17 K/L, nilai CC untuk 49 K/L, dan nilai C untuk 14 k/L. Sementara itu, untuk LAKIP pemerintah daerah, Kemenpan memberikan nilai dari B untuk 2 Provinsi dan 1 kota; nilai CC untuk 17 Provinsi, 14 kabupaten dan 7 kota; nilai C untuk 11 Provinsi 73 kabupaten dan 20 kota; dan nilai D untuk 53 kabupaten dan 12 kota.

Dari data yang ada, tidak satupun institusi pemerintah, baik di Pusat maupun di Daerah yang mendapatkan nilai AA. Bahkan di Daerah, tidak satupun institusi pemerintah yang mendapatkan nilai A. hal ini tentu harus menjadi kajian serius mengingat LAKIP merupakan pertanggungjawaban instansi pemerintah terhadap apa yang telah dilakukannya.

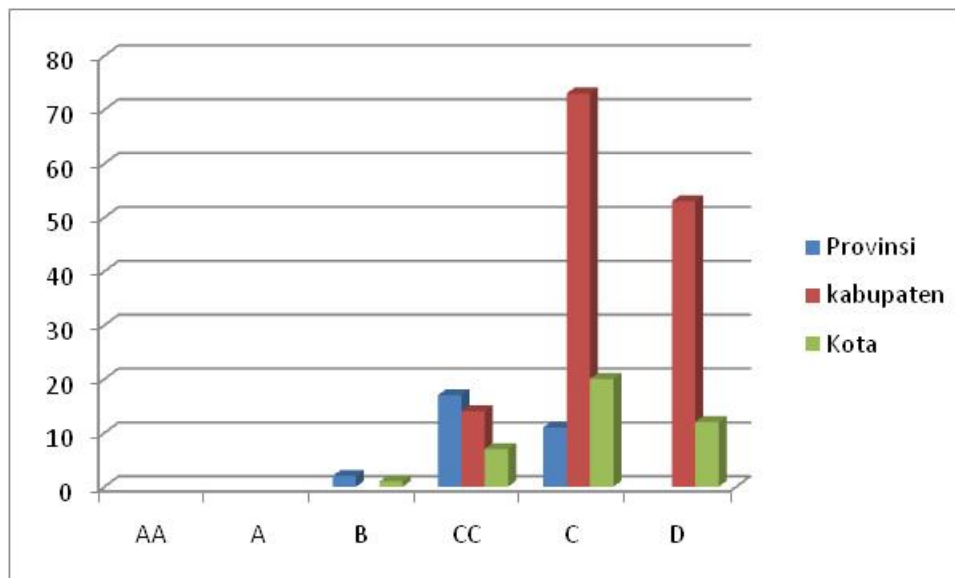
Gambar V.3. Kualifikasi Hasil Penilaian Kemenpan terhadap LAKIP Pemerintah Pusat Tahun 2011



Sumber : Kemenpan RB, 2012



Gambar V.4. Kualifikasi Hasil Penilaian Kemenpan terhadap LAKIP Pemerintah Daerah tahun 2011

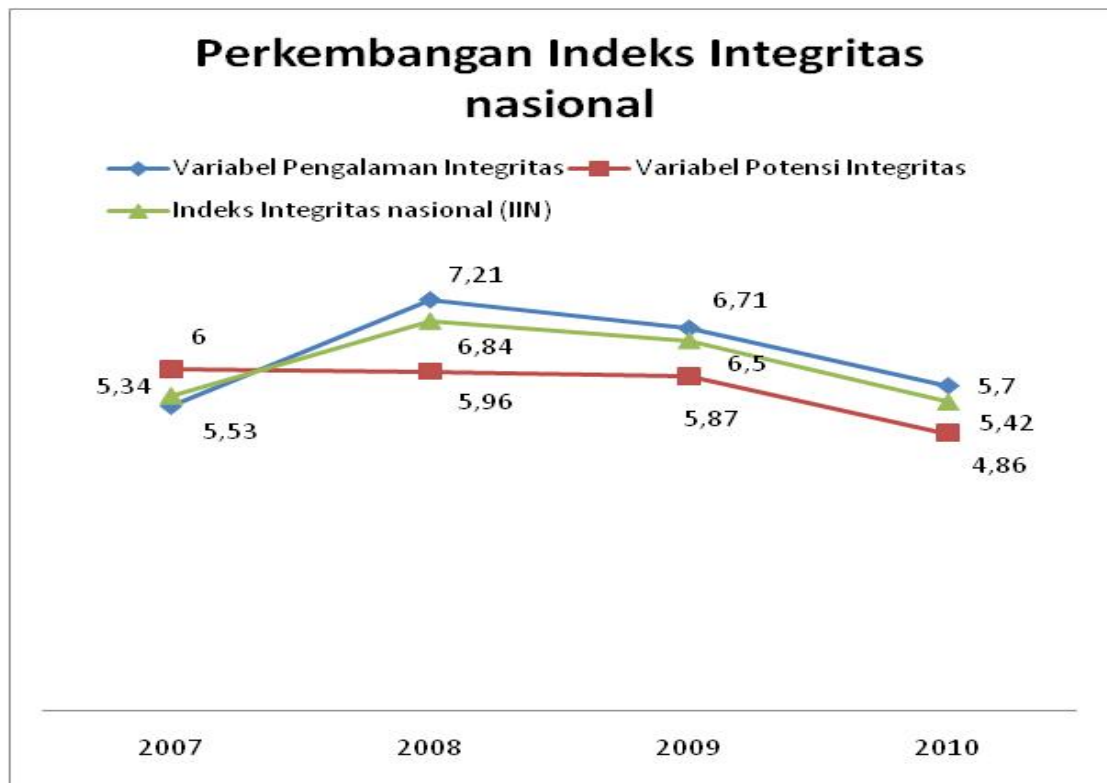


Sumber : Kemenpan RB, 2012

C. Integritas Sektor Publik

Integritas sektor publik merupakan survey yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengukur persepsi masyarakat tentang pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Adapun responden dalam survey ini adalah para pengguna layanan langsung dari layanan yang disediakan oleh instansi tersebut. Skala penilaian dimulai dari 1 sampai dengan 10, dimana semakin mendekati 10, maka semakin baik integritas sector publik. Intergritas Sektor Publik Tingkat nasional pada Tahun 2007 – 2010 dapat dilihat dari 3 kategori yaitu variable pengalaman integritas, variable potensi integritas dan indeks integritas nasional (IIN). Data mengenai kategori tersebut dapat dilihat pada tabel V.8. Dari data tersebut terlihat bahwa indeks integritas nasional (IIN) dari tahun 2007 sampai 2008 nilainya fluktuatif berkisar antara nilai 5-6. Hal ini menunjukkan bahwa menurut responden pengguna layanan, integritas sektor publik nasional Indonesia masih kurang baik dan perlu untuk ditingkatkan.

Gambar. V.5. Perkembangan Integritas Sektor Publik Tingkat Nasional



Sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 2012

D. Peringkat Dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja sesuai dengan amanah dari PP Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. EKPPD meliputi pengukuran dan pemeringkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kabupaten /kota dalam wilayah provinsi dan juga pemerintahan propinsi. Sumber informasi utama yang digunakan untuk melakukan EKPPD adalah LPPD. EKPPD meliputi pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan, penentuan peringkat, dan penentuan status kinerja. Evaluasi ini dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk melihat kinerja aparatur, terutama aparatur pemerintah daerah.

Aspek penilaian EKPPD meliputi tataran pengambil kebijakan dan tataran pelaksanaan kebijaksanaan daerah. Pada tataran pengambil kebijakan, aspek penilaiannya adalah : ketentraman dan ketertiban umum daerah; keselarasan dan efektivitas hubungan antara pemerintahan daerah dan Pemerintah serta antarpemerintahan daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah; keselarasan antara kebijakan pemerintahan daerah dengan kebijakan Pemerintah; efektivitas hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD; efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan;



Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh kepala daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan; ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan; intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara pemerintah daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk daerah; transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK, dan Bagi Hasil; intensitas, efektivitas dan transparansi pemungutan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan pinjaman/obligasi daerah; efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggungjawaban, dan pengawasan APBD; Pengelolaan potensi daerah; terobosan/inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sementara tataran pengambil kebijakan, aspek penilaiannya adalah : kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan; ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan; tingkat capaian SPM; penataan kelembagaan daerah; pengelolaan kepegawaian daerah; Perencanaan pembangunan daerah; pengelolaan keuangan daerah; pengelolaan barang milik daerah; dan Pemberian fasilitas terhadap partisipasi masyarakat. Pada tabel V.9, tabel V.10 dan tabel V.11 ditampilkan data mengenai Peringkat Dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, baik pemerintah provinsi, kabupaten dan pemerintah kota.

E. Peringkat *Doing Business* Indonesia dan Negara ASEAN

Doing Business report merupakan laporan yang menyediakan penilaian objektif mengenai regulasi berusaha yang berdampak pada kemudahan berusaha di negara-negara yang disurveinya. Selain itu, laporan ini dapat menjadi pedoman untuk mengevaluasi regulasi-regulasi yang secara langsung berdampak pada pertumbuhan ekonomi, membuat perbandingan antar negara dan mengidentifikasi reformasi yang telah dilakukan. Pada tabel V.12. disajikan peringkat *Doing Business* di Indonesia dan negara ASEAN lain sebagai perbandingan. Pada tahun 2011, Indonesia menduduki peringkat 126, sementara pada tahun 2012, peringkat *Doing Business* Indonesia turun menjadi 129. Penurunan peringkat ini perlu memperoleh perhatian serius bagi pemerintah. Selain peringkat *Doing Business* Indonesia yang menurun dari tahun 2011, dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN seperti Singapura, Thailand dan Malaysia, peringkat *Doing Business* Indonesia cukup rendah.

F. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dan Negara ASEAN

Indeks persepsi korupsi merupakan pengukuran terhadap tingkat korupsi di suatu negara yang dilakukan secara berkala oleh lembaga Transparency International. Indeks ini merupakan indeks gabungan, sebuah hasil polling dari berbagai polling, kumpulan pendapat ahli terkait dengan korupsi dan survei bisnis yang dilakukan oleh sejumlah lembaga independen dan terkemuka. Indeks ini mencerminkan pendapat seluruh dunia, termasuk pendapat pakar yang bertempat tinggal di negara-negara yang dievaluasi.

Pada tabel V.13 ditampilkan skor Indeks persepsi korupsi Indonesia dan negara ASEAN, sementara pada tabel V.14. ditampilkan data mengenai peringkat



Indeks persepsi korupsi Indonesia dan Negara ASEAN sebagai perbandingan. Dari tabel tersebut terlihat bahwa skor dan peringkat Indeks persepsi korupsi Indonesia meningkat. Pada tahun 2010, Indonesia memperoleh skor 2,8 dengan peringkat 110. Sementara pada tahun 2011, Indonesia memperoleh skor 3,0 dengan peringkat 100. Peningkatan ini dikarenakan berbagai upaya telah dilakukan pemerintah baik untuk mencegah terjadinya korupsi maupun untuk mengungkap berbagai kasus korupsi yang terjadi di berbagai tingkatan pemerintahan. Namun upaya ini perlu terus ditingkatkan karena bila dibandingkan skor dan peringkat Indeks persepsi korupsi beberapa negara di ASEAN, seperti Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia dan Thailand, Indonesia masih jauh tertinggal.

G. Skor *Government Effectiveness Index* Indonesia dan Negara ASEAN

Government Effectiveness Index (Indeks Efektivitas pemerintahan) merupakan pengukuran yang dilakukan oleh World Bank untuk mengetahui efektivitas berjalannya pemerintahan di berbagai negara. Pada tabel V.15. disajikan data mengenai skor Indeks Efektivitas pemerintahan Indonesia dan negara ASEAN dari tahun 2005 sampai tahun 2009. Dari tabel tersebut terlihat bahwa skor Indeks Efektivitas pemerintahan Indonesia semakin meningkat dari tahun-ke tahun, walaupun dengan peningkatan yang tidak signifikan. Data ini menunjukkan pemerintah masih harus bekerja keras untuk memperbaiki kondisi birokrasi agar dapat menciptakan pemerintahan yang efektif.

H. Skor *Rule Of Law Index* Indonesia dan Negara ASEAN

Rule Of Law Index juga merupakan pengukuran yang dilakukan oleh World Bank secara teratur untuk melihat tingkat kepercayaan dan harapan terhadap tegaknya berbagai aturan hukum di masyarakat. Indeks ini terdiri dari berbagai indikator yang mengukur persepsi mengenai tindakan kriminal, kualitas peradilan, dan penegakan kontrak atau perjanjian. Tegaknya berbagai aturan akan menciptakan situasi yang kondusif bagi keberlangsungan aktivitas sosial dan ekonomi yang pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas pemerintahan.

Pada tabel V.16. ditampilkan skor *Rule Of Law Index* Indonesia dan negara ASEAN. Dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN, skor *Rule Of Law Index* Indonesia masih cukup rendah. Hal ini tentunya perlu memperoleh perhatian dan upaya keras dari pemerintah untuk memperbaikinya.

I. Skor *Regulatory Quality Index* Indonesia dan Negara ASEAN

Sama seperti *Government Effectiveness Index* dan *Regulatory Quality Index*, *Regulatory Quality Index* juga merupakan pengukuran yang dilakukan oleh World Bank. Indeks ini mengukur akibat yang ditimbulkan dari kebijakan yang tidak pro



pasar, seperti kebijakan kontrol harga, rendahnya pengawasan terhadap bank, serta persepsi mengenai hambatan yang disebabkan bertumpuknya regulasi atau peraturan di bidang perdagangan internasional. Indeks ini terdiri dari variabel-variabel yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah di bidang perdagangan, investasi luar negeri dan nilai tukar.

Tabel V.17. menampilkan data mengenai skor *Regulatory Quality Index* Indonesia dan negara ASEAN. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa skor *Regulatory Quality Index* Indonesia masih tertinggal bila dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN. Hal ini dapat menyebabkan daya saing perdagangan Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN seperti Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand. Selain itu terlihat pula skor *Regulatory Quality Index* Indonesia tidak mengalami peningkatan yang signifikan selama empat tahun terakhir, yang berkisar antara -0,28 sampai dengan -0,23.

J. Peringkat dan Nilai *Human Development Index* Indonesia dan Negara ASEAN

Human Development Index atau indeks pembangunan manusia merupakan pengukuran yang dilakukan oleh UNDP secara berkala untuk melihat perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara di seluruh dunia. IPM ini digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Indeks ini lebih fokus pada hal-hal yang lebih khusus dan berguna daripada hanya sekedar pendapatan perkapita yang selama ini digunakan. Indeks ini dapat digunakan untuk melihat sejauh mana kinerja pemerintah dan aparatur dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Tabel V.18. menampilkan data mengenai Rangking (*Rank*) dan Nilai (*Value*) *Human Development Index* (HDI) Negara ASEAN 2010-2011. Sementara itu, tabel V.19. Nilai Komponen (*components*) *Human Development Index* (HDI) Negara ASEAN 2010-2011, dari tabel tersebut terlihat bahwa rangking indeks pembangunan manusia Indonesia menurun, tahun 2010 Indonesia menempati peringkat 108, tetapi pada tahun 2011, Indonesia menempati peringkat 124. Penurunan ini perlu diperhatikan oleh pemerintah dan dicari solusi untuk meningkatkan kembali indeks pembangunan manusia Indonesia, yang berarti juga akan meningkatkan kondisi kesejahteraan masyarakat Indonesia secara real.

Tabel V.1. Kualifikasi Hasil Penilaian BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2004-2010

No.	LKPP	Opini
1.	Tahun 2004	Disclaimer/Tidak menyatakan pendapat (TMP)
2.	Tahun 2005	Disclaimer/Tidak menyatakan pendapat (TMP)
3.	Tahun 2006	Disclaimer/Tidak menyatakan pendapat (TMP)
4.	Tahun 2007	Disclaimer/Tidak menyatakan pendapat (TMP)
5.	Tahun 2008	Disclaimer/Tidak menyatakan pendapat (TMP)
6.	Tahun 2009	Qualified Opinion/ Wajar dengan Pengecualian (WDP)
7.	Tahun 2010	Qualified Opinion/ Wajar dengan Pengecualian (WDP)

Sumber : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2011, BPK.

Tabel V.2. Kualifikasi Hasil Penilaian BPK terhadap Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat

Opini	Tahun				
	2006	2007	2008	2009	2010
WTP	7	14	34	44	52
%	9%	18%	41%	56%	63%
WDP	36	32	31	26	29
%	46%	40%	37%	33%	35%
TW	0	1	0	0	0
%	0%	1%	0%	0%	0%
TMP	36	33	18	8	2
%	46%	41%	22%	10%	2%
JUMLAH	79	80	83	78	83

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), 2012

Tabel V.3. Kualifikasi Hasil Penilaian BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Opini	Tahun				
	2006	2007	2008	2009	2010
WTP	3	4	13	15	34
%	1%	1%	3%	3%	7%
WDP	327	283	323	330	341
%	70%	60%	67%	65%	66%
TW	28	59	31	48	26
%	6%	13%	6%	10%	5%
TMP	105	123	118	111	115
%	23%	26%	24%	22%	22%
JUMLAH	463	469	485	504	516

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), 2012



Tabel V.4. Kualifikasi Hasil Penilaian Kemenpan terhadap LAKIP Pemerintah Pusat Tahun 2011

No.	Kementerian/lembaga
NILAI A	
1.	Komisi Pemberantasan Korupsi
2.	Badan Pemeriksa Keuangan
Total = 2 Lembaga	
NILAI B	
1.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
2.	Sekretariat Negara
3.	Kementerian Dalam Negeri
4.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5.	Kementerian Kelautan dan Perikanan
6.	Kementerian Keuangan
7.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
8.	Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/BAPPENAS
9.	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
10.	Kementerian Hukum dan HAM
11.	Kementerian Pekerjaan Umum
12.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
13.	Kementerian Perdagangan
14.	Kementerian Pertanian
15.	Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
16.	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
17.	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
Total = 17 Lembaga	
NILAI CC	
1.	Kementeriaan Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
2.	Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
3.	Sekretariat kabinet
4.	Kementerian Agama
5.	Kementerian Badan Usaha Milik Negara
6.	Kementerian Kehutanan
7.	Kementerian Kesehatan
8.	Kementerian Komunikasi dan Informatika
9.	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
10.	Kementerian Lingkungan Hidup
11.	Kementerian Luar Negeri
12.	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
13.	Kementerian Pembangunan Daerah tertinggal
14.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
15.	Kementerian Pemuda dan Olahraga
16.	Kementerian Perhubungan
17.	Kementerian Perindustrian
18.	Kementerian Pertahanan
19.	Kementerian Perumahan Rakyat
20.	Kementerian Riset dan Teknologi
21.	Kementerian Sosial
22.	Markas Besar TNI
23.	Kepolisian Negara Republik Indonesia
24.	Mahkamah Agung
25.	Sekretariat Jenderal MPR

Lanjutan Tabel V.4.

No.	Kementerian/lembaga
26.	Kementerian Perindustrian
27.	Kementerian Pertahanan
28.	Kementerian Perumahan Rakyat
29.	Kementerian Riset dan Teknologi
30.	Kementerian Sosial
31.	Markas Besar TNI
32.	Kepolisian Negara Republik Indonesia
33.	Mahkamah Agung
34.	Sekretariat Jenderal MPR
35.	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
36.	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah
37.	Arsip Nasional Republik Indonesia
38.	Badan Kepegawaian Negara
39.	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
40.	Badan Koordinasi Penanaman Modal
41.	Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional
42.	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
43.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
44.	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI
45.	Badan Narkotika Nasional
46.	Badan Pengawas Obat dan Makanan
47.	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
48.	Badan Pegusahaan BATAM
49.	Badan Pusat Statistik
50.	Badan Standarisasi Nasional
51.	Badan Tenaga Nuklir Nasional
52.	Lembaga Administrasi Negara
53.	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
54.	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
55.	Lembaga Ketahanan Nasional
56.	Lembaga Sandi Negara
57.	Perpustakaan Nasional RI
58.	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Total = 49 Lembaga	
NILAI C	
1.	Kejaksaan Agung
2.	Badan Intelijen Negara
3.	Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
4.	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
5.	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
6.	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
7.	Badan Pertanahan Nasional
8.	Badan SAR Nasional
9.	Dewan Ketahanan Nasional
10.	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
11.	Komisi Pengawas Persaingan Usaha
12.	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
13.	Sekretariat Jenderal Dewan Jaminan Sosial Nasional



Lanjutan Tabel V.4.

No.	Kementerian/lembaga
14.	Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Total = 14 Lembaga	

Sumber : Kemenpan RB, 2012

Tabel V.5. Kualifikasi Hasil Penilaian Kemenpan terhadap LAKIP Pemerintah Daerah Tahun 2011

Daerah	Hasil Penilaian LAKIP 2011						Total
	AA	A	B	CC	C	D	
Provinsi			2	17	11		30
kabupaten				14	73	53	140
Kota			1	7	20	12	40

Sumber : Kemenpan RB, 2012

Tabel V.6. Nomenklatur Pemerintah Daerah Propinsi dengan Kualifikasi Hasil Penilaian Kemenpan terhadap LAKIP Pemerintah Daerah Tahun 2011

No	Provinsi	Kriteria
1.	Jawa Tengah	B
2.	Kalimantan Timur	B
	JUMLAH	2
1.	Bali	CC
2.	DI. Yogyakarta	CC
3.	DKI Jakarta	CC
4.	Jawa barat	CC
5.	Jawa timur	CC
6.	Kalimantan barat	CC
7.	Kalimantan selatan	CC
8.	Kepulauan riau	CC
9.	Maluku	CC
10.	Nusa tenggara barat	CC
11.	Nusa tenggara timur	CC
12.	Riau	CC
13.	Sulawesi tengah	CC
14.	Sulawesi utara	CC
15.	Sumatera barat	CC
16.	Sumatera selatan	CC
17.	Sumatera utara	CC
	JUMLAH	17

Lanjutan Tabel V.6.

No	Provinsi	Kriteria
1.	Aceh	C
2.	Banten	C
3.	Bengkulu	C
4.	Gorontalo	C
5.	Jambi	C
6.	Kalimantan tengah	C
7.	Kepulauan bangka belitung	C
8.	Lampung	C
9.	Papua	C
10.	Sulawesi barat	C
11.	Sulawesi selatan	C
	JUMLAH	11
	RATA RATA	CC

Sumber : Kemenpan RB, 2012

Tabel V.7. Nomenklatur Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Kualifikasi Hasil Penilaian Kemenpan terhadap LAKIP Pemerintah Daerah Tahun 2011

NO	KABUPATEN/KOTA	KRITERIA
1.	Kota Sukabumi	B
	Jumlah	1
1.	Kab Batang Hari	CC
2.	Kab bengkayang	CC
3.	Kab bima	CC
4.	Kab bogor	CC
5.	Kab boyolali	CC
6.	Kab garut	CC
7.	Kab gunung kidul	CC
8.	Kab karimun	CC
9.	Kab kerinci	CC
10.	Kab musi banyuasin	CC
11.	Kab pacitan	CC
12.	Kab pandeglang	CC
13.	Kab pangkajene kepulauan	CC
14.	Kab sleman	CC
15.	Kota banjar baru	CC
16.	Kota bekasi	CC
17.	Kota bitung	CC
18.	Kota blitar	CC
19.	Kota cilegon	CC
20.	Kota malang	CC
21.	Kota tegal	CC
	Jumlah	21



Lanjutan Tabel V.7.

NO	KABUPATEN/KOTA	KRITERIA
1.	Kab aceh tengah	C
2.	Kab bandung	C
3.	Kab balangan	C
4.	Kab bangka	C
5.	Kab banjar	C
6.	Kab bengkulu selatan	C
7.	Kab bintang	C
8.	Kab bone bolango	C
9.	Kab buru	C
10.	Kab dairi	C
11.	Kab donggala	C
12.	Kab ende	C
13.	Kab enrekang	C
14.	Kab kampar	C
15.	Kab kapuas	C
16.	Kab karang anyar	C
17.	Kab karawang	C
18.	Kab katingan	C
19.	Kab kaur	C
20.	Kab kediri	C
21.	Kab ketapang	C
22.	Kab klaten	C
23.	Kab kota waringin timur	C
24.	Kab kudus	C
25.	Kab kulon progo	C
26.	Kab kutai barat	C
27.	Kab lahat	C
28.	Kab lampung selatan	C
29.	Kab lampung utara	C
30.	Kab landak	C
31.	Kab langkat	C
32.	Kab lombok timur	C
33.	Kab madiun	C
34.	Kab magelang	C
35.	Kab malinau	C
36.	Kab maluku tengah	C
37.	Kab maluku tenggara	C
38.	Kab manggarai	C
39.	Kab manggarai timur	C
40.	Kab merauke	C
41.	Kab minahasa utara	C
42.	Kab muna	C
43.	Kab musir rawas	C
44.	Kab ogan komering ilir	C
45.	Kab ogan komering ulu	C
46.	Kab ogan komering ulu timur	C
47.	Kab padang pariaman	C
48.	Kab parigi moutong	C
49.	Kab pasaman	C



Lanjutan Tabel V.7.

NO	KABUPATEN/KOTA	KRITERIA
50.	Kab pasaman barat	C
51.	Kab pati	C
52.	Kab pesisir selatan	C
53.	Kab pidie jaya	C
54.	Kab polewali mandar	C
55.	Kab purbalingga	C
56.	Kab rokan hulu	C
57.	Kab samosir	C
58.	Kab sanggau	C
59.	Kab selayar	C
60.	Kab sinjai	C
61.	Kab situbondo	C
62.	Kab sragen	C
63.	Kab sumenap	C
64.	Kab tabanan	C
65.	Kab tanah datar	C
66.	Kab tanah laut	C
67.	Kab tanggerang	C
68.	Kab tanjung jabung timur	C
69.	Kab tebo	C
70.	Kab temanggung	C
71.	Kab timor tengah selatan	C
72.	Kab toujo una-una	C
73.	Kab trenggalek	C
74.	Kota banda aceh	C
75.	Kota banjar masin	C
76.	Kota batam	C
77.	Kota bogor	C
78.	Kota bukit tinggi	C
79.	Kota cimahi	C
80.	Kota denpasar	C
81.	Kota dumai	C
82.	Kota madiun	C
83.	Kota makassar	C
84.	Kota medan	C
85.	Kota metro	C
86.	Kota pariaman	C
87.	Kota probolinggo	C
88.	Kota singkawang	C
89.	Kota tanah bumbu	C
90.	Kota tanjung pinang	C
91.	Kota tarakan	C
92.	Kota ternate	C
93.	Kota yogyakarta	C
	Jumlah	93
		D
1.	Kab aceh barat	D
2.	Kabaceh barat daya	D
3.	Kab aceh jaya	D





Lanjutan Tabel V.7.

NO	KABUPATEN/KOTA	KRITERIA
4.	Kab aceh selatan	D
5.	Kab asahan	D
6.	Kab banggai	D
7.	Kab bangka tengah	D
8.	Kab barito selatan	D
9.	Kab batang	D
10.	Kab bau-bau	D
11.	Kab bekasi	D
12.	Kab belitung	D
13.	Kab belitung timur	D
14.	Kab belu	D
15.	Kab berau	D
16.	Kab bireuen	D
17.	Kab bojonegoro	D
18.	Kab boolangmongondow	D
19.	Kab bulukumba	D
20.	Kab cianjur	D
21.	Kab jayapura	D
22.	Kab karo	D
23.	Kab kepahiang	D
24.	Kab kepulauan aru	D
25.	Kab kota waringin barat	D
26.	Kab kuantan singingi	D
27.	Kab kuningan	D
28.	Kab kupang	D
29.	Kab kutai kartanegara	D
30.	Kab lingga	D
31.	Kab lombok tengah	D
32.	Kab luwu timur	D
33.	Kab wanokwari	D
34.	Kab melawi	D
35.	Kab muara enim	D
36.	Kab ogan komering ulu selatan	D
37.	Kab pidie	D
38.	Kab pringsewu	D
39.	Kab sangihe	D
40.	Kab seluma	D
41.	Kab seram bagian timur	D
42.	Kab siak	D
43.	Kab sidengreng rapang	D
44.	Kab sigi	D
45.	Kab sorong	D
46.	Kab sumba tengah	D
47.	Kab sumbawa	D
48.	Kab sumedang	D
49.	Kab tanah toraja	D
50.	Kab timor tengah utara	D
51.	Kab toli toli	D
52.	Kab tulang bawang	D

Lanjutan Tabel V.7.

No	Kabupaten/kota	Kriteria
53.	Kab tulang bawang barat	D
54.	Kota ambon	D
55.	Kota mataram	D
56.	Kota pagar alam	D
57.	Kota pakpak barat	D
58.	Kota palu	D
59.	Kota payakumbuh	D
60.	Kota prabumulih	D
61.	Kota salatiga	D
62.	Kota sibolga	D
63.	Kota sorong	D
64.	Kota sungai penuh	D
65.	Kota tual	D
	Jumlah	65

Sumber : Kemenpan RB, 2012

Tabel V.8. Perkembangan Integritas Sektor Publik Tingkat Nasional

No.	Kategori	2007	2008	2009	2010
1.	Variabel Pengalaman Integritas	5,34	7,21	6,71	5,70
2.	Variabel Potensi Integritas	6,00	5,96	5,87	4,86
3.	Indeks Integritas nasional (IIN)	5,53	6,84	6,50	5,42

Sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 2012

Tabel V.9. Peringkat Dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Secara Nasional Tahun 2012

No.	Nama pemerintah daerah	Peringkat		Status
		Nomor	Skor	
1.	Provinsi jawa timur	1	2,7696	Tinggi
2.	Provinsi jawa tengah	2	2.7570	Tinggi
3.	Provinsi sulawesi selatan	3	2.6403	Tinggi
4.	Provinsi sulawesi utara	4	2.4973	Tinggi
5.	Provinsi sumatera utara	5	2.4131	Tinggi
6.	Provinsi nusa tenggara barat	6	2.4100	Tinggi
7.	Provinsi kalimantan barat	7	2.3931	Tinggi



Lanjutan Tabel V.9.

No.	Nama pemerintah daerah	Peringkat		Status
		Nomor	Skor	
8.	Provinsi jawa barat	8	2.3489	Tinggi
9.	Provinsi sumatera barat	9	2.3447	Tinggi
10.	Provinsi d.i yogyakarta	10	2.3356	Tinggi
11.	Provinsi kalimantan timur	11	2.3294	Tinggi
12.	Provinsi riau	12	2.2821	Tinggi
13.	Provinsi aceh	13	2.2657	Tinggi
14.	Provinsi kalimantan selatan	14	2.2650	Tinggi
15.	Provinsi dki jakarta	15	2.2454	Tinggi
16.	Provinsi sumatera utara	16	2.2143	Tinggi
17.	Provinsi lampung	17	2.1884	Tinggi
18.	Provinsi sulawesi barat	18	2.1761	Tinggi
19.	Provinsi banten	19	2.1687	Tinggi
20.	Provinsi kalimantan tengah	20	2.1203	Tinggi
21.	Provinsi bali	21	2.0951	Tinggi
22.	Provinsi kepulauan bangka belitung	22	2.0939	Tinggi
23.	Provinsi gorontalo	23	2.0812	Tinggi
24.	Provinsi maluku	24	1.9901	Sedang
25.	Provinsi maluku utara	25	1.9731	Sedang
26.	Provinsi Bengkulu	26	1.8237	Sedang
27.	Provinsi nusa tenggara timur	27	1.7052	Sedang
28.	Provinsi kepulauan riau	28	1.5576	Sedang
29.	Provinsi sulawesi tenggara	29	1.5000	Sedang
30.	Provinsi sulawesi tengah	30	1.4939	Sedang
31.	Provinsi papua barat	31	1.4392	Sedang
32.	Provinsi papua	32	1.4230	Sedang
33.	Provinsi jambi	33	1.3106	Sedang

Sumber : Kementerian Dalam Negeri, 2012

Tabel V.10. Peringkat Dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Secara Nasional Tahun 2012

No.	Nama pemerintah daerah	Peringkat		Status
		Nomor	Skor	
1.	Kabupaten sleman	1	3.1969	Sangat tinggi
2.	Kabupaten wonosobo	2	3.1578	Sangat tinggi
3.	Kabupaten boyolali	3	3.1252	Sangat tinggi
4.	Kabupaten karanganyar	4	3.0968	Sangat tinggi
5.	Kabupaten jombang	5	3.0872	Sangat tinggi
6.	Kabupaten luwu utara	6	3.0717	Sangat tinggi
7.	Kabupaten kulon rugo	7	3.0707	Sangat tinggi
8.	Kabupaten pacitan	8	3.0631	Sangat tinggi
9.	Kabupaten sukoharjo	9	3.0587	Sangat tinggi



Lanjutan Tabel V.10.

No.	Nama pemerintah daerah	Peringkat		Status
		Nomor	Skor	
10.	Kabupaten bogor	10	3.0514	Sangat tinggi
11.	Kabupaten malinau	11	3.0410	Sangat tinggi
12.	Kabupaten wajo	12	3.0408	Sangat tinggi
13.	Kabupaten sukabumi	13	3.0401	Sangat tinggi
14.	Kabupaten bojonegoro	14	3.0395	Sangat tinggi
15.	Kabupaten lumajang	15	3.0321	Sangat tinggi
16.	Kabupaten ponogoro	16	3.0314	Sangat tinggi
17.	Kabupaten bantul	17	3.0287	Sangat tinggi
18.	Kabupaten purworejo	18	3.0219	Sangat tinggi
19.	Kabupaten malang	19	3.0004	Sangat tinggi
20.	Kabupaten barito kuala	20	3.0002	Sangat tinggi
21.	Kabupaten bandung	21	2.9921	Tinggi
22.	Kabupaten wonogiri	22	2.9863	Tinggi
23.	Kabupaten kebumen	23	2.9851	Tinggi
24.	Kabupaten pasuruan	24	2.9814	Tinggi
25.	Kabupaten bondowoso	25	2.9805	Tinggi
26.	Kabupaten jepara	26	2.9728	Tinggi
27.	Kabupaten subang	27	2.9694	Tinggi
28.	Kabupaten sidoarjo	28	2.9541	Tinggi
29.	Kabupaten garut	29	2.9515	Tinggi
30.	Kabupaten luwu timur	30	2.9421	Tinggi
31.	Kabupaten berau	31	2.9314	Tinggi
32.	Kabupaten pekalongan	32	2.9288	Tinggi
33.	Kabupaten banyumas	33	2.9200	Tinggi
34.	Kabupaten bangkalan	34	2.9195	Tinggi
35.	Kabupaten tulungagung	35	2.9165	Tinggi
36.	Kabupaten enrekang	36	2.9106	Tinggi
37.	Kabupaten magelang	37	2.9099	Tinggi
38.	Kabupaten purwakarta	38	2.9080	Tinggi
39.	Kabupaten ciamis	39	2.9074	Tinggi
40.	Kabupaten jembrana	40	2.9006	Tinggi
41.	Kabupaten gunung kidul	41	2.8967	Tinggi
42.	Kabupaten ngawi	42	2.8906	Tinggi
43.	Kabupaten halmahera barat	43	2.8906	Tinggi
44.	Kabupaten kediri	44	2.8904	Tinggi
45.	Kabupaten semarang	45	2.8876	Tinggi
46.	Kabupaten sidrap	46	2.8863	Tinggi
47.	Kabupaten indramayu	47	2.8656	Tinggi
48.	Kabupaten purwakarta	48	2.8644	Tinggi
49.	Kabupaten cianjur	49	2.8605	Tinggi
50.	Kabupaten purbalingga	50	2.8550	Tinggi
51.	Kabupaten cilacap	51	2.8513	Tinggi
52.	Kabupaten sragen	52	2.8487	Tinggi
53.	Kabupaten majalengka	53	2.8483	Tinggi
54.	Kabupaten bone	54	2.8467	Tinggi
55.	Kabupaten sumedang	55	2.8466	Tinggi
56.	Kabupaten gresik	56	2.8456	Tinggi
57.	Kabupaten klungkung	57	2.8410	Tinggi

Lanjutan Tabel V.10.

No.	Nama pemerintah daerah	Peringkat		Status
		Nomor	Skor	
58.	Kabupaten gowa	58	2.8395	Tinggi
59.	Kabupaten barjarnegara	59	2.8359	Tinggi
60.	Kabupaten tabanan	60	2.8317	Tinggi
61.	Kabupaten sumbawa	61	2.8269	Tinggi
62.	Kabupaten lamongan	62	2.8204	Tinggi
63.	Kabupaten karawang	63	2.8178	Tinggi
64.	Kabupaten kudus	64	2.8168	Tinggi
65.	Kabupaten rembang	65	2.8165	Tinggi
66.	Kabupaten polewati mandar	66	2.8121	Tinggi
67.	Kabupaten kendal	67	2.8113	Tinggi
68.	Kabupaten gorontalo	68	2.8101	Tinggi
69.	Kabupaten serdang bedagai	69	2.8059	Tinggi
70.	Kabupaten sampang	70	2.8057	Tinggi
71.	Kabupaten kapuas	71	2.7941	Tinggi
72.	Kabupaten sumbawa barat	72	2.7922	Tinggi
73.	Kabupaten pinrang	73	2.7901	Tinggi
74.	Kabupaten ogan komering ilir	74	2.7899	Tinggi
75.	Kabupaten hulu sungai tengah	75	2.7858	Tinggi
76.	Kabupaten trenggalek	76	2.7844	Tinggi
77.	Kabupaten pemalang	77	2.7839	Tinggi
78.	Kabupaten klaten	78	2.7812	Tinggi
79.	Kabupaten demak	79	2.7778	Tinggi
80.	Kabupaten ogan komering ulu	80	2.7770	Tinggi
81.	Kabupaten boalemo	81	2.7747	Tinggi
82.	Kabupaten gianyar	82	2.7743	Tinggi
83.	Kabupaten bangka	83	2.7701	Tinggi
84.	Kabupaten bangkai	84	2.7686	Tinggi
85.	Kabupaten tanah datar	85	2.7683	Tinggi
86.	Kabupaten sumenep	86	2.7601	Tinggi
87.	Kabupaten minahasa	87	2.7560	Tinggi
88.	Kabupaten blora	88	2.7531	Tinggi
89.	Kabupaten kotawaringin barat	89	2.7495	Tinggi
90.	Kabupaten humbang hasundutan	90	2.7458	Tinggi
91.	Kabupaten kuningan	91	2.7443	Tinggi
92.	Kabupaten cirebon	92	2.7440	Tinggi
93.	Kabupaten	93	2.7421	Tinggi
94.	Kabupaten tanahumbu	94	2.7384	Tinggi
95.	Kabupaten solok	95	2.7292	Tinggi
96.	Kabupaten lombok timur	96	2.7272	Tinggi
97.	Kabupaten grobogan	97	2.7271	Tinggi
98.	Kabupaten pandeglan	98	2.7268	Tinggi
99.	Kabupaten tangerang	99	2.7258	Tinggi
100.	Kabupaten kampar	100	2.7165	Tinggi
101.	Kabupaten mamasa	101	2.7164	Tinggi
102.	Kabupaten buleleng	102	2.7139	Tinggi
103.	Kabupaten sijunjung	103	2.7122	Tinggi
104.	Kabupaten bantaeng	104	2.7112	Tinggi
105.	Kabupaten sinjai	105	2.7095	Tinggi



Lanjutan Tabel V.10.

No.	Nama pemerintah daerah	Peringkat		Status
		Nomor	Skor	
106.	Kabupaten musi banyuasin	106	2.7092	Tinggi
107.	Kabupaten hulu sungai utara	107	2.7067	Tinggi
108.	Kabupaten tuban	108	2.7011	Tinggi
109.	Kabupaten pamekasan	109	2.6996	Tinggi
110.	Kabupaten tapanuli utara	110	2.6977	Tinggi
111.	Kabupaten soppeng	111	2.6933	Tinggi
112.	Kabupaten muara enim	112	2.6971	Tinggi
113.	Kabupaten nganjuk	113	2.6828	Tinggi
114.	Kabupaten selayar	114	2.6822	Tinggi
115.	Kabupaten balangan	115	2.6815	Tinggi
116.	Kabupaten mamuju	116	2.6790	Tinggi
117.	Kabupaten lombok tengah	117	2.6779	Tinggi
118.	Kabupaten kupang	118	2.6747	Tinggi
119.	Kabupaten tana toraja	119	2.6698	Tinggi
120.	Kabupaten ogan ilir	120	2.6690	Tinggi
121.	Kabupaten lampung barat	121	2.6684	Tinggi
122.	Kabupaten bangka barat	122	2.6637	Tinggi
123.	Kabupaten nganjuk	123	2.6633	Tinggi
124.	Kabupaten lampung selatan	124	2.6574	Tinggi
125.	Kabupaten kutai barat	125	2.6442	Tinggi
126.	Kabupaten lombok barat	126	2.6343	Tinggi
127.	Kabupaten lamandau	127	2.6386	Tinggi
128.	Kabupaten batang	128	2.6275	Tinggi
129.	Kabupaten magetan	129	2.6259	Tinggi
130.	Kabupatenprobolinggo	130	2.6171	Tinggi
131.	Kabupaten bulungan	131	2.6087	Tinggi
132.	Kabupaten pesisir selatan	132	2.6058	Tinggi
133.	Kabupaten takalar	133	2.5984	Tinggi
134.	Kabupaten tebo	134	2.5975	Tinggi
135.	Kabupaten barito utara	135	2.5929	Tinggi
136.	Kabupaten bengkalis	136	2.5903	Tinggi
137.	Kabupaten landak	137	2.5885	Tinggi
138.	Kabupaten samosir	138	2.5876	Tinggi
139.	Kabupaten bulukumba	139	2.5872	Tinggi
140.	Kabupaten kutai kartanegara	140	2.5871	Tinggi
141.	Kabupaten barru	141	2.5840	Tinggi
142.	Kabupaten murung raya	142	2.5822	Tinggi
143.	Kabupaten situ bondo	143	2.5803	Tinggi
144.	Kabupaten badung	144	2.5769	Tinggi
145.	Kabupaten tabalong	145	2.5675	Tinggi
146.	Kabupaten aceh barat	146	2.5639	Tinggi
147.	Kabupaten nunukan	147	2.5587	Tinggi
148.	Kabupaten sambas	148	2.5579	Tinggi
149.	Kabupaten tegal	149	2.5562	Tinggi
150.	Kabupaten siak	150	2.5559	Tinggi
151.	Kabupaten aceh timur	151	2.5535	Tinggi
152.	Kabupaten hulu sungai selatan	152	2.5537	Tinggi
153.	Kabupaten blitar	153	2.5518	Tinggi



Lanjutan Tabel V.10.

No.	Nama pemerintah daerah	Peringkat		Status
		Nomor	Skor	
154.	Kabupaten rokan hulu	154	2.5497	Tinggi
155.	Kabupaten tapin	155	2.5497	Tinggi
156.	Kabupaten pontianak	156	2.5475	Tinggi
157.	Kabupaten kotawaringin timur	157	2.5436	Tinggi
158.	Kabupaten halmahera selatan	158	2.5389	Tinggi
159.	Kabupaten sintang	159	2.5318	Tinggi
160.	Kabupaten minahasa utara	160	2.5278	Tinggi
161.	Kabupaten banyuwangi	161	2.5271	Tinggi
162.	Kabupaten maros	162	2.5212	Tinggi
163.	Kabupaten bengkulu utara	163	2.5204	Tinggi
164.	Kabupaten kapuas hulu	164	2.5177	Tinggi
165.	Kabupaten belitung	165	2.5140	Tinggi
166.	Kabupaten katingan	166	2.5137	Tinggi
167.	Kabupaten lima puluh kota	167	2.5092	Tinggi
168.	Kabupaten alor	168	2.5077	Tinggi
169.	Kabupaten kaur	169	2.5058	Tinggi
170.	Kabupaten pangkejene dan kepulauan	170	2.5042	Tinggi
171.	Kabupaten belu	171	2.5034	Tinggi
172.	Kabupaten kolaka utara	172	2.5033	Tinggi
173.	Kabupaten kotabaru	173	2.5024	Tinggi
174.	Kabupaten melawi	174	2.5022	Tinggi
175.	Kabupaten tanah laut	175	2.5006	Tinggi
176.	Kabupaten bekasi	176	2.5005	Tinggi
177.	Kabupaten bima	177	2.4986	Tinggi
178.	Kabupaten wakatobi	178	2.4077	Tinggi
179.	Kabupaten ogan komering ulu timur	179	2.4960	Tinggi
180.	Kabupaten morowali	180	2.4960	Tinggi
181.	Kabupaten lampung utara	181	2.4944	Tinggi
182.	Kabupaten bengkulu selatan	182	2.4932	Tinggi
183.	Kabupaten kepahiang	183	2.4889	Tinggi
184.	Kabupaten serang	184	2.4889	Tinggi
185.	Kabupaten donggala	185	2.4865	Tinggi
186.	Kabupaten musu rawas	186	2.4834	Tinggi
187.	Kabupaten gayo lues	187	2.4799	Tinggi
188.	Kabupaten gunung mas	188	2.4776	Tinggi
189.	Kabupaten jeneponto	189	2.4733	Tinggi
190.	Kabupaten mojokerto	190	2.4693	Tinggi
191.	Kabupaten mandailing natal	191	2.4663	Tinggi
192.	Kabupaten maluku tenggara barat	192	2.4657	Tinggi
193.	Kabupaten karang asem	193	2.5652	Tinggi
194.	Kabupaten labuhan batu	194	2.4601	Tinggi
195.	Kabupaten aceh tamiang	195	2.4580	Tinggi
196.	Kabupaten sukamara	196	2.4558	Tinggi
197.	Kabupaten minahasa selatan	197	2.4549	Tinggi
198.	Kabupaten agam	198	2.4464	Tinggi
199.	Kabupaten mimika	199	2.4430	Tinggi
200.	Kabupaten pohuwato	200	2.4376	Tinggi

Lanjutan Tabel V.10.

No.	Nama pemerintah daerah	Peringkat		Status
		Nomor	Skor	
201.	Kabupaten bintang	201	2.4285	Tinggi
202.	Kabupaten pulang pisau	202	2.4250	Tinggi
203.	Kabupaten luwu	203	2.4229	Tinggi
204.	Kabupaten barito selatan	204	2.4217	Tinggi
205.	Kabupaten sanggau	205	2.4194	Tinggi
206.	Kabupaten pakpak bharat	206	2.4187	Tinggi
207.	Kabupaten muko muko	207	2.4167	Tinggi
208.	Kabupaten pasaman barat	208	2.4162	Tinggi
209.	Kabupaten toba samosir	209	2.4116	Tinggi
210.	Kabupaten batang hari	210	2.4074	Tinggi
211.	Kabupaten belitung timur	211	2.4057	Tinggi
212.	Kabupaten bengkayang	212	2.4050	Tinggi
213.	Kabupaten bener meriah	213	2.4024	Tinggi
214.	Kabupaten indragiri hilir	214	2.4020	Tinggi
215.	Kabupaten kutai timur	215	2.3930	Tinggi
216.	Kabupaten seruyan	216	2.3862	Tinggi
217.	Kabupaten maluku tengah	217	2.3821	Tinggi
218.	Kabupaten poso	218	2.3774	Tinggi
219.	Kabupaten deli serdang	219	2.3753	Tinggi
220.	Kabupaten asahan	220	2.3655	Tinggi
221.	Kabupaten merauke	221	2.3649	Tinggi
222.	Kabupaten buton	222	2.3631	Tinggi
223.	Kabupaten aceh selatan	223	2.3627	Tinggi
224.	Kabupaten merangin	224	2.3621	Tinggi
225.	Kabupaten brebes	225	2.3479	Tinggi
226.	Kabupaten ngada	226	2.3469	Tinggi
227.	Kabupaten buru	227	2.3450	Tinggi
228.	Kabupaten ketapang	228	2.3217	Tinggi
229.	Kabupaten langkat	229	2.3208	Tinggi
230.	Kabupaten lampung timur	230	2.3154	Tinggi
231.	Kabupaten tasik malaya	231	2.3141	Tinggi
232.	Kabupaten nabire	232	2.3139	Tinggi
233.	Kabupaten majene	233	2.3047	Tinggi
234.	Kabupaten kerinci	234	2.3032	Tinggi
235.	Kabupaten tapanuli selatan	235	2.2889	Tinggi
236.	Kabupaten mamuju utara	236	2.2864	Tinggi
237.	Kabupaten tulang bawah	237	2.2833	Tinggi
238.	Kabupaten aceh singkil	238	2.2806	Tinggi
239.	Kabupaten sarmi	239	2.2787	Tinggi
240.	Kabupaten lingga	240	2.2767	Tinggi
241.	Kabupaten sorong	241	2.2767	Tinggi
242.	Kabupaten aceh tenggara	242	2.2708	Tinggi
243.	Kabupaten jayapura	243	2.2642	Tinggi
244.	Kabupaten timor tengah utara	244	2.2610	Tinggi
245.	Kabupaten pasaman	245	2.2583	Tinggi
246.	Kabupaten manggarai	246	2.2580	Tinggi
247.	Kabupaten way kanan	247	2.2568	Tinggi
248.	Kabupaten rokan hilir	248	2.2555	Tinggi

Lanjutan Tabel V.10.

No.	Nama pemerintah daerah	Peringkat		Status
		Nomor	Skor	
249.	Kabupaten kepulauan sangihe	249	2.2551	Tinggi
250.	Kabupaten asmat	250	2.2519	Tinggi
251.	Kabupaten bolaang mongondow	251	2.2518	Tinggi
252.	Kabupaten aceh barat daya	252	2.2431	Tinggi
253.	Kabupaten sekadau	253	2.2393	Tinggi
254.	Kabupaten bireuen	254	2.2363	Tinggi
255.	Kabupaten parigi moutong	255	2.2184	Tinggi
256.	Kabupaten aceh besar	256	2.2168	Tinggi
257.	Kabupaten rejang lebong	257	2.2156	Tinggi
258.	Kabupaten sumba barat	258	2.2066	Tinggi
259.	Kabupaten barito timur	259	2.1879	Tinggi
260.	Kabupaten ogan komering ulu selatan	260	2.1812	Tinggi
261.	Kabupaten padang pariaman	261	2.1682	Tinggi
262.	Kabupaten natuna	262	2.1508	Tinggi
263.	Kabupaten aceh jaya	263	2.1507	Tinggi
264.	Kabupaten tapanuli tengah	264	2.1491	Tinggi
265.	Kabupaten sikka	265	2.1461	Tinggi
266.	Kabupaten lembata	266	2.1362	Tinggi
267.	Kabupaten passer	267	2.1256	Tinggi
268.	Kabupaten bangli	268	2.1224	Tinggi
269.	Kabupaten pengunungan bintang	269	2.1220	Tinggi
270.	Kabupaten aceh utara	270	2.1220	Tinggi
271.	Kabupaten nias	271	2.1199	Tinggi
272.	Kabupaten solok selatan	272	2.1035	Tinggi
273.	Kabupaten paniai	273	2.0973	Tinggi
274.	Kabupaten kepulauan talaud	274	2.0890	Tinggi
275.	Kabupaten pati	275	2.0789	Tinggi
276.	Kabupaten madiun	276	2.0768	Tinggi
277.	Kabupaten raja ampat	277	2.0742	Tinggi
278.	Kabupaten karimun	278	2.0694	Tinggi
279.	Kabupaten bangka selatan	279	2.0606	Tinggi
280.	Kabupaten dharmasraya	280	2.0551	Tinggi
281.	Kabupaten banjar	281	2.0520	Tinggi
282.	Kabupaten timor tengah selatan	282	2.0450	Tinggi
283.	Kabupaten dompu	283	2.0304	Tinggi
284.	Kabupaten bangkai kepulauan	284	2.0277	Tinggi
285.	Kabupaten rote ndau	285	2.0238	Tinggi
286.	Kabupaten keerom	286	2.0101	Tinggi
287.	Kabupaten sarolangun	287	2.0082	Tinggi
288.	Kabupaten kaimana	288	2.0080	Tinggi
289.	Kabupaten jember	289	2.0022	Tinggi
290.	Kabupaten bone bolango	290	1.9938	Sedang
291.	Kabupaten teluk wondama	291	1.9869	Sedang
292.	Kabupaten sumba timur	292	1.9814	Sedang
293.	Kabupaten kepulauan sura	293	1.9799	Sedang
294.	Kabupaten halmahera utara	294	1.9761	Sedang
295.	Kabupaten halmahera tengah	295	1.9736	Sedang



Lanjutan Tabel V.10.

No.	Nama pemerintah daerah	Peringkat		Status
		Nomor	Skor	
296.	Kabupaten karo	296	1.9706	Sedang
297.	Kabupaten tojo unauna	297	1.9683	Sedang
298.	Kabupaten pidie	298	1.9644	Sedang
299.	Kabupaten supiori	299	1.9515	Sedang
300.	Kabupaten lampung tengah	300	1.9492	Sedang
301.	Kabupaten jayawijaya	301	1.8469	Sedang
302.	Kabupaten yapen waropen	302	1.9352	Sedang
303.	Kabupaten seram bagian barat	303	1.9288	Sedang
304.	Kabupaten bangka tengah	304	1.9129	Sedang
305.	Kabupaten simeulue	305	1.9129	Sedang
306.	Kabupaten seluma	306	1.9115	Sedang
307.	Kabupaten tolikara	307	1.8988	Sedang
308.	Kabupaten lebong	308	1.8951	Sedang
309.	Kabupaten kolaka	309	1.8687	Sedang
310.	Kabupaten seram bagian timur	310	1.8597	Sedang
311.	Kabupaten biak numfor	311	1.8517	Sedang
312.	Kabupaten lahat	312	1.8508	Sedang
313.	Kabupaten ende	313	1.8384	Sedang
314.	Kabupaten halmahera timur	314	1.8192	Sedang
315.	Kabupaten flores timur	315	1.8124	Sedang
316.	Kabupaten boven digoel	316	1.8029	Sedang
317.	Kabupaten puncak jaya	317	1.7786	Sedang
318.	Kabupaten muaro jambi	318	1.7772	Sedang
319.	Kabupaten yahukimo	319	1.7734	Sedang
320.	Kabupaten nagan raya	320	1.7689	Sedang
321.	Kabupaten sorong selatan	321	1.7254	Sedang
322.	Kabupaten lebak	322	1.7196	Sedang
323.	Kabupaten simalungun	323	1.7162	Sedang
324.	Kabupaten kuantan singingi	324	1.7112	Sedang
325.	Kabupaten nias selatan	325	1.7062	Sedang
326.	Kabupaten bungo	326	1.7035	Sedang
327.	Kabupaten tangjung jabung timur	327	1.6861	Sedang
328.	Kabupaten buol	328	1.6594	Sedang
329.	Kabupaten pelalawan	329	1.6373	Sedang
330.	Kabupaten fakfak	330	1.6335	Sedang
331.	Kabupaten maluku tenggara	331	1.5920	Sedang
332.	Kabupaten mappi	332	1.5100	Sedang
333.	Kabupaten waropen	333	1.4721	Sedang
334.	Kabupaten tolitoli	334	1.4521	Sedang
335.	Kabupaten tangjung jabung barat	335	1.4494	Sedang
336.	Kabupaten muna	336	1.4194	Sedang
337.	Kabupaten tanggamus	337	1.4070	Sedang
338.	Kabupaten banyuasin	338	1.3259	Sedang
339.	Kabupaten konawe	339	1.1995	Sedang
340.	Kabupaten kepulauan aru	340	1.1383	Sedang
341.	Kabupaten indra giri hulu	341	0.9555	Rendah
342.	Kabupaten manggarai barat	342	0.7810	Rendah
343.	Kabupaten kepulauan mantili	343	0.6972	Rendah



Lanjutan Tabel V.10.

No.	Nama pemerintah daerah	Peringkat		Status
		Nomor	Skor	
344.	Kabupaten penajam pares utara	344	0.6856	Rendah
345.	Kabupaten bombana	345	0.2811	Rendah
346.	Kabupaten konawen selatan	346	0.2811	Rendah

Sumber : Kementerian Dalam Negeri, 2012

Tabel V.11. Peringkat Dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Secara Nasional Tahun 2012

No.	Nama Pemerintah Daerah	Peringkat		Status
		Nomor	Skor	
1.	Kota yogyakarta	1	3.2397	Sangat tinggi
2.	Kota magelang	2	3.2293	Sangat tinggi
3.	Kota tangerang	3	3.1747	Sangat tinggi
4.	Kota semarang	4	3.1289	Sangat tinggi
5.	Kota samarinda	5	2.9815	Tinggi
6.	Kota bogor	6	2.9672	Tinggi
7.	Kota sukabumi	7	2.9330	Tinggi
8.	Kota depok	8	2.9277	Tinggi
9.	Kota makasar	9	2.9256	Tinggi
10.	Kota cimahi	10	2.9238	Tinggi
11.	Kota surakarta	11	2.9232	Tinggi
12.	Kota salatiga	12	2.9197	Tinggi
13.	Kota balikpapan	13	2.8992	Tinggi
14.	Kota madiun	14	2.8974	Tinggi
15.	Kota palapo	15	2.8863	Tinggi
16.	Kota pekalongan	16	2.8626	Tinggi
17.	Kota parepare	17	2.8497	Tinggi
18.	Kota malang	18	2.8485	Tinggi
19.	Kota cirebon	19	2.8450	Tinggi
20.	Kota bontang	20	2.8369	Tinggi
21.	Kota banjar	21	2.8183	Tinggi
22.	Kota tegal	22	2.8158	Tinggi
23.	Kota manado	23	2.7890	Tinggi
24.	Kota kediri	24	2.7909	Tinggi
25.	Kota padang panjang	25	2.7689	Tinggi
26.	Kota bitung	26	2.7571	Tinggi
27.	Kota lubuklinggau	27	2.7534	Tinggi
28.	Kota mojo kerto	28	2.7467	Tinggi
29.	Kota mataram	29	2.7447	Tinggi
30.	Kota surabaya	30	2.7346	Tinggi
31.	Kota solok	31	2.7345	Tinggi
32.	Kota palangkaraya	32	2.7100	Tinggi
33.	Kota banda aceh	33	2.6887	Tinggi
34.	Kota probolinggo	34	2.6838	Tinggi
35.	Kota medan	35	2.6831	Tinggi
36.	Kota payakumbuh	36	2.6763	Tinggi
37.	Kota bengkulu	37	2.6715	Tinggi

Lanjutan Tabel V.11.

No.	Nama pemerintah daerah	Peringkat		Status
		Nomor	Skor	
38.	Kota tasikmalaya	38	2.6670	Tinggi
39.	Kota metro	39	2.6530	Tinggi
40.	Kota banjar baru	40	2.6475	Tinggi
41.	Kota banjarmasin	41	2.6475	Tinggi
42.	Kota cilegon	42	2.6464	Tinggi
43.	Kota bandung	43	2.6318	Tinggi
44.	Kota palu	44	2.6264	Tinggi
45.	Kota tarakan	45	2.5889	Tinggi
46.	Kota bekasi	46	2.5860	Tinggi
47.	Kota blitar	47	2.5791	Tinggi
48.	Kota bandar lampung	48	2.5705	Tinggi
49.	Kota batu	49	2.5620	Tinggi
50.	Kota gorontalo	50	2.5498	Tinggi
51.	Kota bukitinggi	51	2.5479	Tinggi
52.	Kota bima	52	2.5392	Tinggi
53.	Kota tanjung balai	53	2.5238	Tinggi
54.	Kota pasuruan	54	2.5157	Tinggi
55.	Kota batam	55	2.5115	Tinggi
56.	Kota langsa	56	2.5086	Tinggi
57.	Kota tanjung pinang	57	2.5080	Tinggi
58.	Kota pagaralam	58	2.4918	Tinggi
59.	Kota jayapura	59	2.4886	Tinggi
60.	Kota pariaman	60	2.4882	Tinggi
61.	Kota lhpksaumawe	61	2.4796	Tinggi
62.	Kota dumai	62	2.4743	Tinggi
63.	Kota pangkalpinang	63	2.4226	Tinggi
64.	Kota ternate	64	2.4124	Tinggi
65.	Kota singkawang	65	2.3749	Tinggi
66.	Kota sibolga	66	2.3683	Tinggi
67.	Kota prabumulih	67	2.3656	Tinggi
68.	Kota baubau	68	2.3648	Tinggi
69.	Kota binjai	69	2.3469	Tinggi
70.	Kota sawahlunto	70	2.3467	Tinggi
71.	Kota sorong	71	2.3027	Tinggi
72.	Kota pontianak	72	2.2989	Tinggi
73.	Kota padangsidempuan	73	2.2572	Tinggi
74.	Kota sabang	74	2.2481	Tinggi
75.	Kota Palembang	75	2.7924	Tinggi
76.	Kota pekanbaru	76	2.1901	Tinggi
77.	Kota tidore kepulauan	77	2.1767	Tinggi
78.	Kota kupang	78	2.1485	Tinggi
79.	Kota tomohon	79	2.1455	Tinggi
80.	Kota ambon	80	2.1364	Tinggi
81.	Kota pematangsiantar	81	2.0519	Tinggi
82.	Kota Denpasar	82	1.9463	Sedang
83.	Kota tebing tinggi	83	1.9463	Sedang
84.	Kota Jambi	84	1.8142	Sedang
85.	Kota Padang	85	1.3585	Sedang
86.	Kota Kendari	86	1.0537	Sedang

Sumber : Kementerian Dalam Negeri, 2012



Tabel V.12. Peringkat Doing Business Negara ASEAN 2011 – 2012

No.	Negara	2011	2012
1.	Singapura	1	1
2.	Thailand	16	17
3.	Malaysia	23	18
4.	Brunei	86	83
5.	Vietnam	90	98
6.	Indonesia	126	129
7.	Philipina	134	136
8.	Kamboja	138	138

Sumber : Doing Business in a more transparent world, 2012.

<http://www.doingbusiness.org/~media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB12-FullReport.pdf>

Tabel V.13 Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Negara ASEAN Tahun 2007-2011

No.	Negara	Skor IPK Negara ASEAN				
		2007	2008	2009	2010	2011
1.	Singapura	9,3	9,2	9,2	9,3	9,2
2.	Brunei Darussalam	0	0	5,5	5,5	5,2
3.	Malaysia	5,1	5,1	4,5	4,4	4,3
4.	Thailand	3,3	3,5	3,4	3,5	3,4
5.	Indonesia	2,3	2,6	2,8	2,8	3,0
6.	Vietnam	2,6	2,7	2,7	2,7	2,9
7.	Philipina	2,5	2,3	2,4	2,4	2,6
8.	Kamboja	2	1,8	2	2,1	2,1
9.	Laos	1,9	2	2	2,1	2,2
10.	Myanmar	1,4	1,3	1,4	1,4	1,5

Sumber : Pengembangan Database Pembangunan Aparatur Negara, 2010, Bappenas; Corruption

Perception Index 2011, http://www.transparency.org/whatwedo/pub/corruption_perceptions_index_2011

Tabel V.14. Peringkat Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Negara ASEAN Tahun 2007-2011

No.	Negara	Peringkat IPK Negara ASEAN				
		2007	2008	2009	2010	2011
1.	Singapura	4	4	3	1	5
2.	Malaysia	43	47	56	56	60
3.	Philipina	131	141	139	134	129
4.	Thailand	84	80	84	78	80
5.	Vietnam	123	121	120	116	112
6.	Indonesia	143	126	111	110	100
7.	Brunei Darussalam	-	-	39	38	44
8.	Laos					154
9.	Myanmar					180
10.	Kamboja					164

Sumber : Pengembangan Database Pembangunan Aparatur Negara 2010, Bappenas; Corruption

Perception Index 2011, http://www.transparency.org/whatwedo/pub/corruption_perceptions_index_2011



Tabel V.15. Perbandingan Skor Government Effectiveness Index Negara ASEAN 2005-2009

No.	Negara	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009
1.	Singapura	1,88	2,04	2,26	2,26	2,19
2.	Malaysia	1,05	1,11	1,2	1,13	0,98
3.	Brunei Darussalam	0,53	0,79	0,85	0,80	0,87
4.	Thailand	0,45	0,35	0,34	0,18	0,15
5.	Philipina	-0,07	-0,02	0,11	0,08	0,14
6.	Indonesia	-0,45	-0,30	-0,26	-0,21	-0,21
7.	Vietnam	-0,22	-0,17	-0,17	-0,16	-0,26
8.	Kamboja	-0,98	-1	-0,91	-0,90	-0,74
9.	Laos	-1,17	-0,98	-0,89	-0,92	-1,03

Sumber : Pengembangan Database Pembangunan Aparatur Negara 2010, Bappenas.

Tabel V.16. Perbandingan Skor Rule of Law Index Negara ASEAN 2005-2009

No.	Negara	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009
1.	Singapura	1,70	1,64	1,65	1,65	1,61
2.	Brunei Darussalam	0,31	0,26	0,45	0,51	0,79
3.	Malaysia	0,59	0,56	0,56	0,49	0,54
4.	Thailand	0,14	0,03	0,01	-0,06	-0,13
5.	Vietnam	-0,22	-0,40	-0,40	-0,37	-0,42
6.	Philipina	-0,33	-0,37	-0,46	-0,52	-0,53
7.	Indonesia	-0,81	-0,70	-0,63	-0,62	-0,55
8.	Laos	-1,01	-0,89	-0,87	-0,79	-0,93
9.	Kamboja	-1,14	-1,15	-1,05	-1,05	-1,04

Sumber : Pengembangan Database Pembangunan Aparatur Negara 2010, Bappenas.

Tabel V.17. Perbandingan Skor Regulatory Quality Index Negara ASEAN 2005-2009

No.	Negara	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009
1.	Singapura	1,78	1,74	1,85	1,96	1,83
2.	Brunei Darussalam	0,95	0,96	1,00	0,82	1,11
3.	Malaysia	0,54	0,53	0,56	0,41	0,33
4.	Thailand	0,45	0,28	0,16	0,28	0,36
5.	Philipina	-0,01	-0,08	-0,06	-0,02	-0,01
6.	Indonesia	-0,45	-0,28	-0,25	-0,23	-0,28
7.	Kamboja	-0,47	-0,60	-0,47	-0,40	-0,37
8.	Vietnam	-0,56	-0,57	-0,43	-0,52	-0,56
9.	Laos	-1,25	-1,22	-1,14	-1,13	-1,05

Sumber : Pengembangan Database Pembangunan Aparatur Negara 2010, Bappenas.



Tabel V.18. Rangking (Rank) dan Nilai (Value) Human Development Index (HDI) Negara ASEAN 2010-2011

No.	Negara	HDI Rank		HDI Values	
		2010	2011	2010	2011
1.	Singapura	27	26	0,846	0,866
2.	Brunei Darussalam	37	33	0,805	0,838
3.	Malaysia	57	61	0,744	0,761
4.	Thailand	92	103	0,654	0,682
5.	Philipina	97	112	0,638	0,644
6.	Indonesia	108	124	0,600	0,617
7.	Kamboja	124	139	0,494	0,523
8.	Myanmar	132	149	0,451	0,483
9.	Laos	122	138	0,497	0,524
10.	Vietnam	113	128	0,572	0,593

Sumber : Human Development Report UNDP, 2010-2011

Tabel V.19. Nilai Komponen (components) Human Development Index (HDI) Negara ASEAN 2010-2011

No	Negara	Health		Education				Living Standard	
		Life Expectancy at birth		Mean Years of schooling		Expected Years of schooling		Gross National Income (GNI) per capita	
		2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
1.	Singapura	80,7	81,1	8,8	8,8	14,4	14,4	48.893	52.569
2.	Brunei Darussalam	77,4	78,0	7,5	8,6	14,0	14,1	49.915	45.753
3.	Malaysia	74,7	74,2	9,5	9,5	12,5	12,6	13.927	13685
4.	Thailand	69,3	74,1	6,6	6,6	13,5	12,3	8.001	7.694
5.	Philipina	72,3	68,7	8,7	8,9	11,5	11,9	4.002	3.478
6.	Indonesia	71,5	69,4	5,7	5,8	12,7	13,2	3.957	3.716
7.	Kamboja	62,2	63,1	5,8	5,8	9,8	9,8	1.868	1.848
8.	Myanmar	62,7	65,2	4,0	4,0	9,2	9,2	1.596	1.535
9.	Laos	65,9	67,5	4,6	4,6	9,2	9,2	2321	2.242
10.	Vietnam	74,9	75,2	5,5	5,5	10,4	10,4	2.995	2.805

Sumber : Human Development Report UNDP, 2010-2011